



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 126 TAHUN 2020
TENTANG
MASTER FILE STANDAR DATA STATISTIK TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : bahwa untuk melengkapi petunjuk teknis tentang standar data statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG MASTER FILE STANDAR DATA STATISTIK TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Data statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
3. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
4. Standar Data Statistik adalah Standar Data yang mendasari Data Statistik.
5. Master File Standar Data Statistik adalah basis Data yang berisi kumpulan Standar Data Statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
6. Kode Standar Data Statistik adalah kode identitas Standar Data Statistik yang bersifat unik yang memiliki arti.
7. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
8. Konsep adalah ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
9. Definisi adalah penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

10. Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
11. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
12. Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
13. Indikator adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan.
14. Variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan Data pada kegiatan statistik.

Pasal 2

- (1) Master File Standar Data Statistik menjadi dasar rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dalam tatanan Satu Data Indonesia.
- (2) Master File Standar Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirujuk oleh produsen Data dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan berlaku lintas instansi.

Pasal 3

Master File Standar Data Statistik Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PUSAT STATISTIK,

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum



Endang Retno Sri Subiyandani

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 126 TAHUN 2020
TENTANG
MASTER FILE STANDAR DATA STATISTIK
TAHUN 2020

MASTER FILE STANDAR DATA STATISTIK TAHUN 2020

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	SD00001.00.01	Indikator SDGs	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	<i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	Klasifikasi Stadium klinis Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)/HIV menurut WHO	1. Infeksi Primer HIV 2. Stadium I 3. Stadium II 4. Stadium III 5. Stadium IV	Jumlah	Orang
2	SD00001.00.01	Indikator SDGs	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	Klasifikasi Stadium klinis Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)/HIV menurut WHO	1. Infeksi Primer HIV 2. Stadium I 3. Stadium II 4. Stadium III 5. Stadium IV	Jumlah	Orang
3	SD00001.00.02	Indikator SDGs	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	<i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	Klasifikasi Stadium klinis Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)/HIV menurut CDC	1. Kategori A 2. Kategori B 3. Kategori C	Jumlah	Orang
4	SD00001.00.02	Indikator SDGs	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.	Klasifikasi Stadium klinis Acquired Immuno Deficiency Syndrome	1. Kategori A 2. Kategori B 3. Kategori C	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
							(AIDS)/HIV menurut CDC			
5	SD00002.00.00	Indikator SDGs	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	Adaptasi	Suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya	Klasifikasi Adaptasi	1. Adaptasi bentuk tubuh (morfologi) 2. Adaptasi proses metabolisme tubuh (fisiologi) 3. Adaptasi perilaku	Persentase	Persen
6	SD00003.00.00	Indikator SDGs	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Adil	Memperlakukan seseorang dengan cara yang benar atau masuk akal, atau memperlakukan sekelompok orang secara setara dan tidak membiarkan pendapat pribadi memengaruhi penilaian Anda.	Klasifikasi Adil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Skala	Satuan Skala
7	SD00004.00.00	Indikator SDGs	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Administrasi Pemerintahan	Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.	Klasifikasi Administrasi Pemerintahan	1. Administrasi Perekonomian Negara 2. Administrasi peradilan. 3. Administrasi kepegawaian Negara 4. Administrasi hubungan luar	Jumlah	Dokumen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								negeri 5. Administrasi Pembangunan		
8	SD00005.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Advis Hukum	Memberikan saran atau menyiapkan dokumen untuk pihak lain, yang memengaruhi hak atau kewajiban hukum.	Klasifikasi Perolehan Adv Hukum	1. Memperoleh advis hukum 2. Tidak memperoleh advis hukum 3. Tidak mengetahui advis hukum	Persentase	Persen
9	SP00001.00.00	Indikator SP2020			Agama	Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia.	Klasifikasi Agama	1. Islam 2. Kristen 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha 6. Khong Hu Chu 7. Agama Lainnya	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
10	SD00006.00.00	Indikator SDGs	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Agresi Psikologis	Meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak.	Klasifikasi Frekuensi Melakukan Agresi Psikologis	1. Ya, pernah 2. Tidak pernah	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
11	SD00006.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Agresi Psikologis	Meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak.	Klasifikasi Frekuensi Melakukan Agresi Psikologis	1. Ya, pernah 2. Tidak pernah	Persentase	Persen
12	SD00007.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Air	semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.	Klasifikasi Air berdasarkan mutu air	1. Kelas satu (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut) 2. Kelas dua (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar,	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								<p>peternakan ,air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut)</p> <p>3. Kelas tiga (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut)</p> <p>4. Kelas empat (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi,pertana</p>		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								man dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut)		
13	SD00008.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Air Baku	Air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.	Klasifikasi berdasarkan sumber Air Baku	1. Sumber air permukaan 2. Cekungan air tanah 3. Air hujan	Volume	Liter
14	SD00008.00.00	Indikator SDGs	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Air Baku	Air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.	Klasifikasi berdasarkan sumber Air Baku	1. Sumber air permukaan 2. Cekungan air tanah 3. Air hujan	Volume	Liter
15	SP00002.00.00	Indikator SP2020			Air Isi Ulang	Air yang diproduksi melalui proses penjernihan.	Klasifikasi Air Isi Ulang	1. Air isi ulang air mineral 2. Air isi ulang reverse osmosis	Volume	Liter
16	SP00003.00.00	Indikator SP2020			Air Kemasan	Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter) atau kemasan gelas.	Klasifikasi Air Kemasan	1. Sekali Pakai 2. Isi Ulang	Volume	Liter
17	SP00071.00.00	Indikator SP2020			Air Leding	Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum	Klasifikasi Air Leding	1. Leding meteran 2. Leding eceran	Volume	m ³

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dialirkan kepada konsumen, termasuk leding meteran dan leding eceran.				
18	SD00009.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Air Minum	Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.	Klasifikasi Air Minum	1. Air minum yang layak 2. Air minum tak layak	Jumlah; persentase	Liter; Kubik; Rumah tangga; persen
19	SD00009.00.00	Indikator SDGs	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Air Minum	Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.	Klasifikasi Air Minum	1. Air minum yang layak 2. Air minum tak layak	Jumlah; Volume; persentase	Liter; Kubik; Rumah tangga; persen
20	SD00009.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Air Minum	Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.	Klasifikasi Air Minum	1. Air minum yang layak 2. Air minum tak layak	Jumlah; Volume; persentase	Liter; Kubik; Rumah tangga; persen
21	SD00009.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Air Minum	Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.	Klasifikasi Air Minum	1. Air minum yang layak 2. Air minum tak layak	Jumlah; Volume; persentase	Liter; Kubik; Rumah tangga; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
22	SD00010.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Air minum (termasuk air untuk memasak, mandi, cuci, dll) yang berasal dari sumber air minum layak (sesuai definisi diatas) yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan), yaitu (i) lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; (ii) jarak ke sumber air minum kurang dari 1 km atau memerlukan waktu kurang dari 30 menit (pulang pergi termasuk antri) untuk mendapatkan air; (iii) memenuhi kondisi fisik air minum (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, dan tidak berbau); dan (iv) memenuhi kondisi biologi dan kimiawi air minum	Klasifikasi Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume	Liter
23	SD00011.00.00	Indikator SDGs	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)	Air Minum Layak	Air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	Klasifikasi Air Minum Layak berdasarkan sumber air	1. Air ledeng (keran) 2. Air keran umum 3. Air hydrant umum 4. Terminal air 5. Penampungan air hujan (PAH) 6. Mata air 7. Sumur terlindung (sumur bor atau sumur pompa)	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).						
24	SD00012.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Air Minum yang Layak	Air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.	Klasifikasi Air Minum Layak berdasarkan sumber air	1. Air ledeng (keran) 2. Air keran umum 3. Air hydrant umum 4. Terminal air 5. Penampungan air hujan (PAH) 6. Mata air 7. Sumur terlindung (sumur bor atau sumur pompa)	Jumlah; persentase	Liter; Kubik; Rumah tangga; persen
25	SD00012.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Air Minum yang Layak	Air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan	Klasifikasi Air Minum Layak berdasarkan sumber air	1. Air ledeng (keran) 2. Air keran umum 3. Air hydrant umum 4. Terminal air	Jumlah; persentase	Liter; Kubik; Rumah tangga; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.		5. Penampungan air hujan (PAH) 6. Mata air 7. Sumur terlindung (sumur bor atau sumur pompa)		
26	SP00072.00.00	Indikator SP2020			Air Pompa/Sumur Bor	Air tanah yang cara pengambilannya menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur bor).	Klasifikasi Air Pompa/Sumur Bor	1. Pompa tangan 2. Pompa listrik 3. Kincir angin 4. Sumur artesis	Persentase	Persen
27	SP00073.00.00	Indikator SP2020			Air Sumur	Air tanah yang cara pengambilannya melalui lubang tanah atau sumur, termasuk sumur terlindung dan tidak terlindung.	Klasifikasi Air Sumur	1. Sumur terlindung 2. Sumur tidak terlindung	Persentase	Persen
28	SP00076.00.00	Indikator SP2020			Air Sungai/Danau	Sumber air permukaan tanah berupa sungai atau danau, termasuk yang disalurkan melalui pipa paralon atau diambil langsung.	Klasifikasi Air Sungai/Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
29	SD00013.00.00	Indikator SDGs	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Air Tanah	Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi Air Tanah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
30	SD00014.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Ajudikasi Non Litigasi	Proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.	Klasifikasi Ajudikasi Non Litigasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
31	SD00015.00.00	Indikator SDGs	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Akreditasi	Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.	Klasifikasi Akreditasi	1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak Terakreditasi	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
32	SD00015.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Akreditasi	Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.	Klasifikasi Akreditasi	1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak Terakreditasi	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
33	SD00015.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Akreditasi	Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.	Klasifikasi Akreditasi	1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak Terakreditasi	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
34	SD00015.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Akreditasi	Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.	Klasifikasi Akreditasi	1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak Terakreditasi	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
35	SD00016.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang	Akses	Hak atau kesempatan untuk menggunakan atau melihat sesuatu.	Klasifikasi Akses	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.						
36	SD00017.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Akses Air Minum Layak	Rumah tangga yang menggunakan air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung	Klasifikasi Akses Air Minum Layak berdasarkan tingkat kesulitan	1. Mudah diperoleh 2. Cukup sulit diperoleh 3. Sangat sulit diperoleh	Persentase	Persen
37	SD00018.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Akses Bergerak Pitalebar (<i>Mobile Broadband</i>)	Akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan Gbps.	Klasifikasi Akses Bergerak Pitalebar (Mobile Broadband) berdasarkan alat yang digunakan	1. Modem portabel 2. Modem nirkabel USB 3. Tablet / smartphone 4. Perangkat seluler lainnya	Kecepatan	Mbps
38	SD00018.00.00	Indikator SDGs	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Akses Bergerak Pitalebar (<i>Mobile Broadband</i>)	Akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan Gbps.	Klasifikasi Akses Bergerak Pitalebar (Mobile Broadband) berdasarkan alat yang digunakan	1. Modem portabel 2. Modem nirkabel USB 3. Tablet / smartphone 4. Perangkat seluler lainnya	Kecepatan	Mbps

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
39	SD00019.00.00	Indikator SDGs	17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband)	Akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan Gbps. Akses tetap pita lebar perkotaan sebesar 20 Mbps an di pedesaan sebesar 10 Mbps.	Klasifikasi Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband)	1. 256 kbit/s hingga kurang dari 2 Mbit/s 2. 2 Mbit/s hingga kurang dari 10 Mbit/s 3. Sama dengan atau lebih dari 10 Mbit/s	Kecepatan	Mbps
40	SD00019.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan.	Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband)	Akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan Gbps. Akses tetap pita lebar perkotaan sebesar 20 Mbps an di pedesaan sebesar 10 Mbps.	Klasifikasi Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband)	1. 256 kbit/s hingga kurang dari 2 Mbit/s 2. 2 Mbit/s hingga kurang dari 10 Mbit/s 3. Sama dengan atau lebih dari 10 Mbit/s	Kecepatan	Mbps
41	SD00020.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Aksesibilitas	Terdiri dari indikator: - Rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi; - Persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan \geq 5 km; dan - Rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar	Klasifikasi Aksesibilitas berdasarkan tingkat kesulitan	1. Sangat mudah dijangkau 2. Cukup mudah dijangkau 3. Sulit dijangkau 4. Sangat sulit dijangkau	Jarak; jumlah	Km; persentase
42	SD00887.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Aksesibilitas Daerah Tertinggal	Terdiri dari indikator: - Rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi - Persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan \geq 5 km - Rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar.	Klasifikasi Aksesibilitas Daerah Tertinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
43	SD00021.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.	Klasifikasi Akta kelahiran	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
44	SD00021.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.	Klasifikasi Akta kelahiran	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
45	SD00021.00.00	Indikator SDGs	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.	Klasifikasi Akta kelahiran	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
46	SD00021.00.00	Indikator SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.	Klasifikasi Akta kelahiran	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
47	SD00021.00.00	Indikator SDGs	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari	Klasifikasi Akta kelahiran	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.				
48	SD00021.00.00	Indikator SP2020			Akta kelahiran	Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.	Klasifikasi Akta kelahiran	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
49	SP00004.00.00	Indikator SP2020			Akta kematian	Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik perihal peristiwa kematian seseorang	Klasifikasi Akta kematian	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Jumlah; Persentase	Orang; persen
50	SD00022.00.00	Indikator SDGs	7.a.1	Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar.	Akuntabel	Dapat dipertanggungjawabkan	Klasifikasi Akuntabel	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
51	SP00005.00.00	Indikator SP2020			Alamat Tempat Tinggal	Alamat lengkap tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, lingkungan, dan keterangan lainnya seperti kode pos.	Klasifikasi Alamat Tempat Tinggal	1. Alamat Sesuai KTP 2. Alamat Domisili	Wilayah	Satuan Lingkungan Setempat (SLS)/RT /RW

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
52	SD00023.00.00	Indikator SDGs	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Alat kontrasepsi metode modern	Terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil, spiral/IUD, suntik KB, susuk KB, kondom, metode amenore laktasi (MAL).	Klasifikasi Alat kontrasepsi metode modern	1. sterilisasi perempuan; 2. sterilisasi pria 4. pil 5. spiral/IUD 6. suntik KB 7. susuk KB 8. kondom 9. metode amenore laktasi (MAL)	Jumlah	Alat
53	SD00441.00.00	Indikator SDGs	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	Aliran Dana Gelap/Illegal	Penilaian terhadap aliran dana gelap/illegal dinilai dari dua sumbernya yaitu: 1) Perdagangan dengan nilai faktur yang tidak benar secara sengaja 2) Kebocoran dalam neraca pembayaran. Perdagangan dengan nilai faktur yang tidak benar, merupakan penyebab utama dari aliran dana gelap/illegal dari negara-negara berkembang.	Klasifikasi Aliran Dana Gelap/Illegal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
54	SD00024.00.00	Indikator SDGs	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Alkohol	Seseorang dikatakan pernah meminum minuman beralkohol apabila telah meminumnya meskipun hanya satu atau dua teguk. Jika hanya sekedar menegap beberapa tetes, belumlah dikatakan meminum. Minuman beralkohol yang banyak beredar di pasaran yaitu bir, tuak, arak, angciu,ciu, brem (sari ketan/tebu), anggur beras, minuman putau, mansion house, wine, whisky, vodka, bandy, malaga, vigour, kamput (kambing putih), cap tikus	Klasifikasi Minuman Mengandung Etil Alkohol	1. Golongan A (kurang dari 5%) 2. Golongan B (5% s.d. 20%) 3. Golongan C (lebih dari 20%)	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dan sebagainya yang beralkohol atau yang disebut minuman keras.				
55	SD01037.00.00	Indikator SDGs	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Jumlah alokasi penyiapan KPBU ditambah dengan jumlah alokasi untuk transaksi KPBU ditambah dengan jumlah alokasi dukungan pemerintah untuk proyek KPBU.	Klasifikasi Alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
56	SD00025.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Aman/ tidak berisiko	Menurut Keputusan Mentan RI No.117/Permentan SR.120/10/2014 status aman atau tidak berisiko jika jantan dan betina produktif 20:40 (sapi dan kerbau), 20:50 (kambing, domba dan babi), 20:200 (ayam, itik, angsa).	Klasifikasi Aman/ tidak berisiko	1. Jantan 2. Betina	Jumlah	Ekor
57	SD00025.00.01	Indikator SDGs	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Klasifikasi Anak	1. Anak kandung 2. Anak tiri/adopsi	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
58	SD00025.01.01	Indikator SDGs	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Klasifikasi Anak	1. Anak kandung 2. Anak tiri/adopsi	Jumlah; persentase	Orang; persen
59	SD00025.01.02	Indikator SDGs	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Klasifikasi Anak	1. Anak Kandung; 2. Anak Tiri; 3. Anak Angkat	Jumlah; persentase	Orang; persen
60	SD00025.01.02	Indikator SDGs	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Klasifikasi Anak	1. Anak Kandung; 2. Anak Tiri; 3. Anak Angkat	Jumlah; persentase	Orang; persen
61	SD00025.01.02	Indikator SDGs	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Klasifikasi Anak	1. Anak Kandung; 2. Anak Tiri; 3. Anak Angkat	Jumlah; persentase	Orang; persen
62	SD00025.02.01	Indikator SDGs	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih	Klasifikasi Anak	1. Anak Kandung 2. Anak Asuh	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir		dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.		3. Anak Angkat 4. Anak Terlantar		
63	SD00025.02.02	Indikator SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.	Klasifikasi Anak	1. Anak kandung 2. Anak tiri 3. Anak angkat/anak adopsi	Jumlah; persentase	ruta; persen
64	SD00036.00.00	Indikator SDGs	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Anak yang berkonflik dengan hukum	anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).	Klasifikasi Anak yang berkonflik dengan hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
65	SD00026.01.00	Indikator SDGs	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Anemia	Keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal, yang berbeda untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yaitu untuk Ibu hamil <11 gram / dl	Klasifikasi Anemia	1. Anemia Ringan 2. Anemia Akut 3. Anemia Kronis	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
66	SD00026.02.00	Indikator SDGs	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Anemia	Suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis.	Klasifikasi Anemia	1. Anemia Ringan 2. Anemia Akut 3. Anemia Kronis	Persentase	Persen
67	SD00027.00.00	Indikator SDGs	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Anggaran	Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan.	Klasifikasi Anggaran	1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Jumlah	Rupiah
68	SD00027.00.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Anggaran	Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan.	Klasifikasi Anggaran	1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Jumlah	Rupiah
69	SD00028.00.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Klasifikasi anggaran meliputi: 1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Persentase; Jumlah	Persen; Rupiah
70	SD00028.00.00	Indikator SDGs	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Persentase; Jumlah	Persen; Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
71	SD00028.00.00	Indikator SDGs	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat	Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Klasifikasi anggaran meliputi: 1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Persentase; Jumlah	Persen; Rupiah
72	SD00028.00.00	Indikator SDGs	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat	Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Klasifikasi anggaran meliputi: 1. Klasifikasi Organisasi 2. Klasifikasi Fungsi 3. Klasifikasi Jenis Belanja	Persentase; Jumlah	Persen; Rupiah
73	SP00006.00.00	Indikator SP2020			Anggota Keluarga	Orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga.	Klasifikasi Anggota Keluarga	1. Kepala Keluarga 2. Suami/Istri 3. Anak Kandung 4. Anak Adopsi/Tiri 5. Menantu 6. Cucu 7. Orang Tua/Mertua 8. Famili Lain 9. Pembantu/Sopir/ Tukang Kebun 0. Lainnya	Jumlah; Rata-rata	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
74	SD00029.00.00	Indikator SDGs	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 orang di antara populasi yang tidak terinfeksi	Klasifikasi Angka Infeksi Baru HIV	1. HIV-1 (HIV Tipe 1) 2. HIV-2 (HIV Tipe 2)	Proporsi	Proporsi permil (1000)
75	SD00030.00.00	Indikator SDGs	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Banyaknya kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun pada periode tertentu, dibagi jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1000 perempuan 15-19 tahun.	Klasifikasi Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi permil (1000)
76	SD00030.00.00	Indikator SDGs	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Banyaknya kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu diantara jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1000 perempuan umur 15-19 tahun.	Klasifikasi Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi permil (1000)
77	SD00031.00.00	Indikator SDGs	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran remaja (usia 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1,000	Banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.	Klasifikasi Angka kelahiran remaja (usia 10-14 tahun, umur 15-19 tahun) per 1,000 perempuan di	Klasifikasi wilayah	Ratio	Angka

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					perempuan di kelompok umur yang sama		kelompok umur yang sama			
78	SD01038.00.00	Indikator SDGs	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Jumlah kematian akibat bunuh diri (data dari kepolisian maupun dari pelayanan kesehatan) dibagi jumlah seluruh kematian dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
79	SD01039.00.00	Indikator SDGs	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jiwa; Persen
80	SD01040.00.00	Indikator SDGs	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jiwa; Persen
81	SD01041.00.00	Indikator SDGs	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Angka kematian akibat keracunan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Angka kematian akibat keracunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jiwa; Persen
82	SD01042.00.00	Indikator SDGs	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Angka kematian akibat rumah tangga dan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Angka kematian akibat rumah tangga dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jiwa; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					polusi udara ambien		polusi udara ambien			
83	SD00031.01.00	Indikator SDGs	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa)	Jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.	Klasifikasi Angka Kematian Balita (AKBa)	Nilai normatif AKBa adalah ; 1. ≥ 140 = sangat tinggi 2. $71 < \text{AKBa} < 140$ = tinggi, 3. $20 < \text{AKBa} < 70$ = sedang, 4. ≤ 20 = rendah.	Jumlah	Orang
84	SD00031.02.00	Indikator SDGs	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa)	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).	Klasifikasi Angka Kematian Balita (AKBa)	Nilai normatif AKBa adalah ; 1. ≥ 140 = sangat tinggi 2. $71 < \text{AKBa} < 140$ = tinggi, 3. $20 < \text{AKBa} < 70$ = sedang, 4. ≤ 20 = rendah.	Jumlah	Orang
85	SD01043.00.00	Indikator SDGs	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <5 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.	Klasifikasi Angka Kematian Balita (AKBa)	Nilai normatif AKBa adalah ; 1. ≥ 140 = sangat tinggi 2. $71 < \text{AKBa} < 140$ = tinggi, 3. $20 < \text{AKBa} < 70$ = sedang, 4. ≤ 20 = rendah.	Jumlah	Orang
86	SD00032.01.00	Indikator SDGs	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per	Angka Kematian Bayi	Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu	Klasifikasi Angka Kematian Bayi	Nilai normatif AKB adalah: 1. 70 sangat	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				1000 kelahiran hidup.		atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).		tinggi, 2. 40 – 70 tinggi, 3. 20-39 sedang, 4. <20 rendah.		
87	SD00032.02.00	Indikator SDGs	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi	Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.	Klasifikasi Angka Kematian Bayi	Nilai normatif AKB adalah: 1. 70 sangat tinggi, 2. 40 – 70 tinggi, 3. 20-39 sedang, 4. <20 rendah.	Proporsi	Per 1000 kelahiran
88	SD01044.00.00	Indikator SDGs	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.	Klasifikasi Angka Kematian Bayi	Nilai normatif AKB adalah: 1. 70 sangat tinggi, 2. 40 – 70 tinggi, 3. 20-39 sedang, 4. <20 rendah.	Proporsi	Per 1000 kelahiran
89	SD00033.01.00	Indikator SDGs	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI)	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.	Klasifikasi Angka Kematian Ibu (AKI)	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Proporsi	Per 100.000 kelahiran hidup
90	SD00033.02.00	Indikator SDGs	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI)	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa	Klasifikasi Angka Kematian Ibu (AKI)	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Proporsi	Per 100.000 kelahiran hidup

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.				
91	SD00034.00.00	Indikator SDGs	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.	Klasifikasi Angka Kematian Neonatal (AKN)	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Proporsi	Per 1000 kelahiran hidup
92	SD01045.00.00	Indikator SDGs	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah anak yang meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan pada waktu tertentu dibagi jumlah seluruh kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 1.000.	Klasifikasi Angka Kematian Neonatal (AKN)	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Proporsi	Per 1000 kelahiran hidup
93	SD01046.00.00	Indikator SDGs	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
94	SD00035.00.00	Indikator SDGs	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Termasuk dapat membaca dan menulis: 1. Penyandang disabilitas penglihatan yang dapat membaca dan menulis huruf braille. 2. Dapat membaca dan menulis huruf braille Arab/Hijaiyah. 3. Orang difabel/cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena disabilitasnya/kecacatannya tidak dapat membaca dan menulis. 4. Orang yang tidak dapat membaca dan menulis karena katarak, lumpuh atau struk, padahal sebelumnya dapat membaca dan menulis.	Klasifikasi Angka Melek Huruf	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
95	SD00035.00.00	Indikator SDGs	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Termasuk dapat membaca dan menulis: 1. Penyandang disabilitas penglihatan yang dapat membaca dan menulis huruf braille. 2. Dapat membaca dan menulis huruf braille Arab/Hijaiyah. 3. Orang difabel/cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian	Klasifikasi Angka Melek Huruf	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						karena disabilitasnya/kecacatannya tidak dapat membaca dan menulis. 4. Orang yang tidak dapat membaca dan menulis karena katarak, lumpuh atau struk, padahal sebelumnya dapat membaca dan menulis.				
96	SD00037.00.00	Indikator SDGs	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Angka Melek Huruf penduduk umur 15-24 tahun	Perbandingan jumlah penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15-24 tahun.	Klasifikasi Angka Melek Huruf penduduk umur 15-24 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
97	SD00038.00.00	Indikator SDGs	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Angka Melek Huruf penduduk umur 15-59 tahun	Perbandingan jumlah penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, dengan jumlah penduduk umur 15-59 tahun.	Klasifikasi Angka Melek Huruf penduduk umur 15-59 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
98	SD00039.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/ sederajat 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat	Persentase	Persen
99	SD00039.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Usia sekolah SD/Mi/Sederajat adalah 7-12 tahun		SMP/MTs/ sederajat 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat		
100	SD00039.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/ sederajat 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat	Persentase	Persen
101	SD00039.00.00	Indikator SDGs	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/ sederajat 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat	Persentase	Persen
102	SD00039.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/ sederajat	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.		at 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat		
103	SD00039.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/sederajat at 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat	Persentase	Persen
104	SD00039.00.00	Indikator SDGs	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/sederajat at 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat	Persentase	Persen
105	SD00040.00.00	Indikator SDGs	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dini (PAUD) (umur 3-6 tahun). Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, PAUD Inklusi, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak (Day Care).				
106	SD00044.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19-23 tahun).	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
107	SD00041.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat (7-12 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A) turut diperhitungkan.	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
108	SD00043.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (umur 16-18	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(MA)/Sederajat	tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.				
109	SD00043.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (umur 16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
110	SD00043.00.00	Indikator SDGs	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (umur 16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
111	SD00042.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di	Klasifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat	jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat (13-15 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket B) turut diperhitungkan.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat			
112	SD00045.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM)	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan	Klasifikasi Angka Partisipasi Murni (APM)	1. APM SD/MI 2. APM SMP/MTs/ sederajat 3. APM SMA/ MA/ sederajat	Persentase	Persen
113	SD00045.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Angka Partisipasi Murni (APM)	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian	Klasifikasi Angka Partisipasi Murni (APM)	1. APM SD/MI 2. APM SMP/MTs/ sederajat 3. APM SMA/ MA/ sederajat	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
114	SD00046.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederaj at; (3)SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki- laki di (4) Perguruan Tinggi.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Proporsi penduduk pada kelompok umur 7- 12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
115	SD00046.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/Madras ah Ibtidaiyah (MI)/Sederaj at	Perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
116	SD00047.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sederajat	Perbandingan antara murid SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Paket C setara SMA, usia 16-18 tahun, dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase Proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%). Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
117	SD00047.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sederajat	Perbandingan antara murid SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Paket C setara SMA, usia 16-18 tahun, dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase Proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%). Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sederajat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				laki di (4) Perguruan Tinggi.						
118	SD00048.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederaj at; (3)SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki- laki di (4) Perguruan Tinggi.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase. Proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
119	SD00048.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederaj at.	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah	Perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase. Proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat	Klasifikasi Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Tsanawiyah (MTs)/Sederajat	terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Tsanawiyah (MTs)/Sederajat			
120	SD00049.00.00	Indikator SDGs	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis	Jumlah orang di kabupaten/kota endemis yang telah melaksanakan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut dengan cakupan POPM Filariasis minimal 85% dari jumlah penduduk di kabupaten/kota atau 65% dari jumlah sasaran POPM kabupaten/kota, kemudian dilakukan survei darah jari dan hasilnya angka mikrofilariannya < 1%.	Klasifikasi Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
121	SD00050.00.00	Indikator SDGs	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam persentase	Klasifikasi Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	1. Sterilisasi Perempuan 2. Sterilisasi Pria 3. Spiral/IUD 4. Susuk KB	Jumlah	Orang
122	SD00051.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan.	Klasifikasi Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				15-49 tahun yang berstatus kawin.						
123	SD00052.00.00	Indikator SDGs	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
124	SD00053.00.00	Indikator SDGs	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Angka-angka per kapita	Ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.	Klasifikasi Angka-angka per kapita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
125	SD00054.00.00	Indikator SDGs	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Klasifikasi Angkatan Kerja	Menurut lokasi: 1. Perkotaan 2. Perdesaan Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan: 1. Tidak Pernah Sekolah 2. Tidak tamat SD sederajat	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								3. SD/MI 4. SMP/MTs 5. SMA/MA 6. SMK 7. Diploma (DI/DII/DIII) 8. S1/S2/S3		
126	SD00055.00.00	Indikator SDGs	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya.	Klasifikasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	1. ATM Tarik Tunai 2. ATM Setor/Tarik Tunai	Jumlah	ATM
127	SD00056.00.00	Indikator SDGs	2.c.1	Indikator anomali harga pangan.	Anomali Harga	Catatan dari tingkat pertumbuhan majemuk yang lebih tinggi dari rata-ratanya pada bulan tertentu oleh satu standar deviasi atau lebih.	Klasifikasi Anomali Harga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
128	SP00007.00.00	Indikator SP2020			Aplikasi Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI)	Aplikasi wawancara responden yang dipasang pada perangkat pintar (tablet/smartphone) berbasis android.	Klasifikasi Aplikasi Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI)	1. CAPI Online 2. CAPI Offline	Jumlah	Aplikasi
129	SD00057.00.00	Indikator SDGs	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi	Arus Resmi Lainnya (Tidak Termasuk Kredit Ekspor yang Didukung	Transaksi oleh sektor resmi yang tidak memenuhi persyaratan untuk kelayakan sebagai ODA, baik karena mereka tidak terutama ditujukan untuk pembangunan, atau karena mereka tidak cukup lunak	Klasifikasi Arus Resmi Lainnya (Tidak Termasuk Kredit Ekspor yang Didukung Secara Resmi)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				biaya) untuk infrastruktur.	Secara Resmi)					
130	SD00058.00.00	Indikator SDGs	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	ASI (Air Susu Ibu)	Makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain mengandung zat kekebalan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit, ASI juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Memberikan ASI atau menyusui dengan rasa kasih sayang juga dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.	Klasifikasi ASI (Air Susu Ibu)	1. Ya 2. Tidak	Persentase	Persen
131	SD00059.00.00	Indikator SDGs	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif	ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin, dan mineral	Klasifikasi ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif	1. Ya 2. Tidak	Persentase	Persen
132	SD00060.00.00	Indikator SDGs	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Asuransi Kesehatan	Sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan.	Klasifikasi Asuransi Kesehatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
133	SP00008.00.00	Indikator SP2020			Awak Kapal	Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji atau buku daftar awak kapal.	Klasifikasi Awak Kapal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Orang; Persen
134	SD00061.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Badan Akreditasi Nasional	Badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan	Klasifikasi Badan Akreditasi	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)	menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan	Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)	analisis atau sesuai kebutuhan		
135	SD00061.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)	Badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan	Klasifikasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
136	SD00061.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)	Badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan	Klasifikasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
137	SD00062.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Badan Publik	Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.	Klasifikasi Badan Publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
138	SD00063.00.00	Indikator SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Badan Usaha	Perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan Usaha terdiri atas Badan Usaha	Klasifikasi Badan Usaha	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hokum asing, atau koperasi.		Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas 4. Badan hokum asing, atau koperasi		
139	SD00063.00.00	Indikator SDGs	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Badan Usaha	Perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan Usaha terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hokum asing, atau koperasi.	Klasifikasi Badan Usaha	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas 4. Badan hokum asing, atau koperasi	Jumlah; persentase	Orang; persen
140	SD00063.00.00	Indikator SDGs	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan	Badan Usaha	Perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan Usaha terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hokum asing, atau koperasi.	Klasifikasi Badan Usaha	1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Badan usaha swasta yang	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Badan Usaha (KPBU).				berbentuk Perseroan Terbatas 4. Badan hukum asing, atau koperasi		
141	SD01047.00.00	Indikator SDGs	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
142	SD00064.00.00	Indikator SDGs	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Bahan Bakar	Bahan atau barang yang dipakai untuk menimbulkan api (panas), seperti minyak, batu bara	Klasifikasi Bahan Bakar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
143	SD00065.00.00	Indikator SDGs	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Bahan Bakar Gas	bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.	Klasifikasi Bahan Bakar Gas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
144	SD00066.00.00	Indikator SDGs	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan	Bahan Bakar yang Bersih	Target tingkat emisi dan rekomendasi bahan bakar spesifik (contohnya batubara dan minyak tanah yang belum diolah) yang tercakup dalam pedoman normatif pedoman WHO untuk kualitas udara dalam	Klasifikasi Bahan Bakar yang Bersih	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				bahan bakar yang bersih.		ruangan: pembakaran bahan bakar rumah tangga.				
145	SD00067.00.00	Indikator SDGs	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain	Klasifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Ton; Persen
146	SD00068.00.00	Indikator SDGs	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Bandara (Bandar Udara)	Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.	Klasifikasi Bandara (Bandar Udara)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
147	SP00009.00.00	Indikator SP2020			Bangunan	Tempat berlindung tetap maupun sementara, yang mempunyai dinding, lantai dan atap	Klasifikasi Bangunan	1. Bangunan Tempat Tinggal (BTT) 2. Bangunan Bukan Tempat Tinggal (BBTT)	Jumlah	Bangunan
148	SP00010.00.00	Indikator SP2020			Bangunan Bukan Tempat Tinggal (BBTT)	Bangunan yang tidak berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk, seperti toko, restoran/rumah makan, tempat ibadah, bengkel, salon dan lain-lain.	Klasifikasi Bangunan Bukan Tempat Tinggal (BBTT)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bangunan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
149	SD00069.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Bangunan Embung Air	Bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.	Klasifikasi Bangunan Embung Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
150	SD00070.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Bangunan konservasi tanah dan air antara lain	Sumur resapan yang merupakan salah satu rekayasa teknik konservasi tanah dan air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.	Klasifikasi Bangunan konservasi tanah dan air antara lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
151	SD00071.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Bangunan pengendali jurang (gully plug)	Bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada paritparit, melintang alur parit dengan konstruksi batu, kayu atau bambu yang berfungsi untuk mengendalikan/ mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (run-off).	Klasifikasi Bangunan pengendali jurang (gully plug)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
152	SP00011.00.00	Indikator SP2020			Bangunan Tempat Tinggal (BTT)	Bangunan yang memiliki pintu keluar masuk sendiri dan berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk	Klasifikasi Bangunan Tempat Tinggal (BTT)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bangunan
153	SD00072.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Bantuan Hukum	Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.	Klasifikasi Bantuan Hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Jasa
154	SD00073.00.00	Indikator SDGs	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	Bantuan Pembangunan (Official Development Assistance)	Bantuan pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang (government aid designed to promote the economic development and welfare of developing countries).	Klasifikasi Bantuan Pembangunan (Official Development Assistance)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
155	SD01048.00.00	Indikator SDGs	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.		kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan			
156	SD01049.00.00	Indikator SDGs	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	***Indikator global yang akan dikembangkan.**	Klasifikasi Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
157	SD01049.00.00	Indikator SDGs	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
158	SD00293.00.00	Indikator SDGs	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang	Mahasiswa asing yang menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Indonesia (Pemri) dan dinyatakan dalam orang. Beasiswa Unggulan ditujukan untuk mahasiswa jenjang pendidikan master (S2) dan doctoral (S3) di Indonesia dan bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia pada bidang pendidikan Bahasa Indonesia, Seni dan Budaya	Klasifikasi Bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; rata-rata; persentase	Orang; persen
159	SD00074.00.00	Indikator SDGs	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan	Bantuan Untuk Komitmen dan	Total pengeluaran dan komitmen total Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dari semua donor untuk bantuan perdagangan.	Klasifikasi Bantuan Untuk Komitmen dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pencairan pendanaan.	Pencairan Perdagangan		Pencairan Perdagangan			
160	SD01050.00.00	Indikator SDGs	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bantuan /Rupiah
161	SD00075.00.00	Indikator SDGs	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Batasan Biologis Aman	Proporsi tangkapan ikan < 100%.	Klasifikasi Batasan Biologis Aman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
162	SD00076.00.00	Indikator SDGs	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran Energi Terbarukan	Persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final	Klasifikasi Bauran Energi Terbarukan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
163	SD00077.00.00	Indikator SDGs	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Bayi	Anak berusia/berumur kurang dari 1 (satu) tahun.	Klasifikasi Bayi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
164	SD00078.00.00	Indikator SDGs	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Beasiswa	Bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Beasiswa yang ada di perguruan tinggi diantaranya Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler (PPE), Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM).	Klasifikasi Beasiswa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
165	SD00079.00.00	Indikator SDGs	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Bantuan keuangan yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada siswa internasional dari negara-negara berkembang untuk mengejar gelar master mereka di Universitas Indonesia (a financial assistance offered by the Indonesian Government to International students coming from developing countries to pursue their master degree in Indonesian Universities)	Klasifikasi Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
166	SD00080.00.00	Indikator SDGs	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Beasiswa Unggulan	Pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia atau pihak lain kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih.	Klasifikasi Beasiswa Unggulan	1. Program Sarjana (S1) 2. Program Magister (S2) 3. Program Doktor (S3)	Persentase	Persen
167	SD00081.01.00	Indikator SDGs	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir	Klasifikasi Bekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
168	SD00081.01.00	Indikator SDGs	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir	Klasifikasi Bekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
169	SD00081.02.00	Indikator SDGs	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Bekerja	Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.	Klasifikasi Bekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
170	SP00012.00.00	Indikator SP2020			Bekerja	Melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa, penghasilan atau keuntungan, upah atau gaji, hasil usaha sewa, bunga, dan lain-lain.	Klasifikasi Bekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
171	SD00082.01.00	Indikator SDGs	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Belanja Negara	Semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah.	Klasifikasi Belanja Negara	1. Belanja Langsung 2. Belanja Tak Langsung	Nilai	Rupiah
172	SD00082.02.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap	Belanja Negara	Kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Belanja pemerintah pusat terdiri dari	Klasifikasi Belanja Negara	1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi 2. Belanja	Jumlah	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				anggaran yang disetujui.		belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.		pemerintah pusat menurut fungsi 3. Belanja pemerintah pusat menurut program.		
173	SD00082.02.00	Indikator SDGs	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Belanja Negara	Kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.	Klasifikasi Belanja Negara	1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi 2. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi 3. Belanja pemerintah pusat menurut program.	Jumlah	Rupiah
174	SD00082.02.00	Indikator SDGs	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Belanja Negara	Kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.	Klasifikasi Belanja Negara	1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi 2. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi 3. Belanja pemerintah pusat menurut program.	Jumlah	Rupiah
175	SD00083.00.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belanja pemerintah pusat menurut fungsi	Belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama,	Klasifikasi Belanja pemerintah pusat menurut fungsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.				
176	SD00084.00.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belanja pemerintah pusat menurut organisasi	Belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.	Klasifikasi Belanja pemerintah pusat menurut organisasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
177	SD00085.00.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belanja pemerintah pusat menurut program	Belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.	Klasifikasi Belanja pemerintah pusat menurut program	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
178	SP00066.00.00	Indikator SP2020			Belum Kawin	Status dari seseorang yang belum atau tidak terikat dalam perkawinan.	Klasifikasi Belum Kawin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
179	SD00086.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis	Klasifikasi Bencana	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian
180	SD00086.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam	Klasifikasi Bencana	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				per 100.000 orang.		dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis				
181	SD00086.00.00	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis	Klasifikasi Bencana	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian
182	SD00086.00.00	Indikator SDGs	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis	Klasifikasi Bencana	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian
183	SD00086.00.00	Indikator SDGs	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan	Klasifikasi Bencana	1. Bencana Alam 2. Bencana Non Alam 3. Bencana Sosial	Jumlah	Kejadian

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis				
184	SD00087.00.00	Indikator SDGs	11.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Bencana alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	Klasifikasi Bencana alam	1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Gunung Meletus 4. Banjir 5. kekeringan 6. Angin Topan 7. Tanah Longsor	Jumlah	Kejadian
185	SD00087.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana Alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	Klasifikasi Bencana Alam	1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Gunung Meletus 4. Banjir 5. kekeringan 6. Angin Topan 7. Tanah Longsor	Jumlah	Kejadian
186	SD00087.00.00	Indikator SDGs	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Bencana Alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	Klasifikasi Bencana Alam	1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Gunung Meletus 4. Banjir 5. kekeringan 6. Angin Topan 7. Tanah Longsor	Jumlah	Kejadian
187	SD00088.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana Nonalam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.	Klasifikasi Bencana Nonalam	1. gagal teknologi 2. gagal Modernisasi 3. Epidemi 4. Wabah penyakit	Jumlah	Kejadian

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
188	SD00088.00.00	Indikator SDGs	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Bencana Nonalam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.	Klasifikasi Bencana Nonalam	1. gagal teknologi 2. gagal Modernisasi 3. Epidemi 4. Wabah penyakit	Jumlah	Kejadian
189	SD00089.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Bencana Sosial	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.	Klasifikasi Bencana Sosial	1. Kerusuhan Sosial/Huru hara 2. Aksi Teror 3. Sabotase	Jumlah	Kejadian
190	SD00089.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bencana Sosial	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.	Klasifikasi Bencana Sosial	1. Kerusuhan Sosial/Huru hara 2. Aksi Teror 3. Sabotase	Jumlah	Kejadian
191	SD00089.00.00	Indikator SDGs	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Bencana Sosial	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.	Klasifikasi Bencana Sosial	1. Kerusuhan Sosial/Huru hara 2. Aksi Teror 3. Sabotase	Jumlah	Kejadian
192	SD00090.00.00	Indikator SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Bentuk Badan Hukum	Suatu status badan hukum yang telah dimiliki oleh suatu kegiatan ekonomi/usaha berdasarkan akte pendiriannya yang dikeluarkan oleh akte notaris, berupa akte notaris, atau berdasarkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang.	Klasifikasi Bentuk Badan Hukum	1. PT (persero) 2. PT 3. Koperasi 4. CV 5. Firma 6. Yayasan Izin khusus dari instansi terkait 7. Perorangan	Persentase	Persen
193	SD00091.00.00	Indikator SDGs	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia	Bentuk-Bentuk	Semua bentuk perbudakan atau praktik serupa seperti perdagangan dan perekrutan	Klasifikasi Bentuk-Bentuk	1. Tentara Anak 2. Pelacuran Anak	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	dan penggunaan anak sebagai tentara, perdagangan anak untuk pelacuran atau kegiatan terlarang lainnya, dan pekerjaan lain yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan anak-anak.	Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	3. Eksploitasi Anak Lainnya		
194	SD00092.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Berisiko	Jika populasi suatu rumpun dengan jumlah betina produktif (breeding females) ≤ 100 ekor dan jantan produktif (breeding males) ≤ 5 ekor, atau jumlah total populasi ≤ 120 ekor. Jika diluar itu maka dikatakan tidak berisiko. Yang tidak/sulit diketahui: data jantan produktif (breeding males) dan betina produktif (breeding females) dari suatu rumpun ternak.	Klasifikasi Berisiko	Klasifikasi berdasarkan jenis varietas	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
195	SD00294.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Berkas yang ditangani hingga sampai kepada berkas B1	Klasifikasi Berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
196	SD00093.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak	Berkas Penanganan Pengaduan	Seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai kepada berkas B1	Klasifikasi Berkas Penanganan Pengaduan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Berkas; Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Asasi Manusia (HAM).	Pelanggaran HAM		Pelanggaran HAM			
197	SD00094.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Berkas Pengaduan	Kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai Pengaduan dari masyarakat.	Klasifikasi Berkas Pengaduan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Berkas; Kasus
198	SD00386.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Berkumpul	Aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang.	Klasifikasi Berkumpul	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Aktivitas
199	SD00095.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Berkumpul	Aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang, antara lain rapat, rapat umum, mogok, konser musik, rapat akbar (di lapangan), dan kegiatan peribadatan.	Klasifikasi Berkumpul	1. Rapat 2. Rapat Umum 3. Mogok 4. Konser Musik 5. Rapat Akbar (di lapangan) 6. Kegiatan Peribadatan	Jumlah	Kegiatan
200	SD00096.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Berserikat	Mendirikan atau membentuk organisasi baik secara legal terdaftar (dibuktikan dengan akta notaris dan terdaftar di Depdagri) maupun tidak.	Klasifikasi Berserikat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
201	SD00389.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Berserikat	Mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah.	Klasifikasi Berserikat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
202	SD00097.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Berusaha Dibantu Buruh	KRT/ART berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.	Klasifikasi Berusaha Dibantu Buruh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Tetap/Buruh Dibayar		Tetap/Buruh Dibayar			
203	SD00098.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga	Kepala ruta/anggota ruta bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap atau pekerja keluarga	Klasifikasi Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
204	SP00013.00.00	Indikator SP2020			Berusaha dibantu pekerja dibayar	Bekerja atau berusaha yang menggunakan paling sedikit satu orang pekerja dibayar dengan menanggung risiko sendiri secara ekonomis	Klasifikasi Berusaha dibantu pekerja dibayar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
205	SP00014.00.00	Indikator SP2020			Berusaha dibantu pekerja tidak dibayar	Bekerja atau berusaha yang menggunakan pekerja tak dibayar dengan menanggung risiko sendiri secara ekonomis	Klasifikasi Berusaha dibantu pekerja tidak dibayar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
206	SD00099.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Berusaha Sendiri	Kepala Rumah Tangga (KRT)/Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yang ditandaidengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar.	Klasifikasi Berusaha Sendiri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
207	SP00015.00.00	Indikator SP2020			Berusaha sendiri	Bekerja atau berusaha tanpa dibantu pekerja dengan menanggung risiko sendiri secara ekonomis, seperti sopir lepas, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, agen koran, tukang ojek, pedagang, dan lain-lain	Klasifikasi Berusaha sendiri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
208	SD01051.00.00	Indikator SDGs	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD/kg
209	SD00100.00.00	Indikator SDGs	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Biaya Rekrutment	Biaya rekrutmen mengacu pada biaya yang terjadi dalam proses rekrutmen agar pekerja mendapatkan pekerjaan atau penempatan, terlepas dari cara, waktu atau lokasi. Ini sama dengan jumlah yang harus dibayar pekerja migran dan / atau keluarga mereka untuk menemukan, memenuhi syarat untuk, dan mendapatkan tawaran kerja nyata dari majikan asing dan untuk mencapai tempat pekerjaan untuk pekerjaan pertama di luar negeri.	Klasifikasi Biaya Rekrutment	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
210	SD00101.00.00	Indikator SDGs	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Bibit unggul	Bibit unggul ternak yang mempunyai keunggulan dalam kriteria bobot, kecepatan dalam hal berkembang biak yang diperoleh melalui pemuliaan ataupun pemurnian galur	Klasifikasi Bibit unggul	Klasifikasi berdasarkan jenis varietas unggul	Jumlah	Varietas
211	SD00102.00.00	Indikator SDGs	13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	Biennial Update Report (BUR)	Dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan	Klasifikasi Biennial Update Report (BUR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya.				
212	SP00016.00.00	Indikator SP2020			Bisa Berbahasa Indonesia	Apabila responden mengerti apa yang diucapkan orang (didengar oleh responden) dan dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia.	Klasifikasi Bisa Berbahasa Indonesia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
213	SD00103.00.00	Indikator SDGs	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Bunuh Diri	Tindakan merusak diri sendiri dengan menggunakan alat, cara tertentu atau zat (obat atau racun) yang mengakibatkan kematian.	Klasifikasi Bunuh Diri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
214	SD00104.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Buruh/Karyawan/Pegawai	Kepala Rumah Tangga (KRT)/Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.	Klasifikasi Buruh/Karyawan/Pegawai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
215	SD00104.00.00	Indikator SDGs	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Buruh/Karyawan/Pegawai	Kepala Rumah Tangga (KRT)/Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.	Klasifikasi Buruh/Karyawan/Pegawai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
216	SP00017.00.00	Indikator SP2020			Buruh/Karyawan/Pegawai/Pekerja dibayar	Penduduk yang bekerja kepada orang lain atau instansi/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.	Klasifikasi Buruh/Karyawan/Pegawai/Pekerja dibayar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
217	SD00105.00.00	Indikator SDGs	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan	Cakupan Intervensi Pengobatan	Jumlah orang yang menerima pengobatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah	Klasifikasi Cakupan Intervensi	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Bagi Gangguan Penyalahgunaan Zat	total orang dengan gangguan penggunaan narkoba pada tahun yang sama.	Pengobatan Bagi Gangguan Penyalahgunaan Zat	analisis atau sesuai kebutuhan		
218	SD00106.00.00	Indikator SDGs	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Perbandingan banyaknya penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan dengan jumlah seluruh penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
219	SD00107.00.00	Indikator SDGs	3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial	Cakupan rata-rata layanan esensial yang mencakup kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular dan kapasitas layanan dan akses, di antara populasi umum dan yang paling tidak beruntung	Klasifikasi Cakupan Layanan Kesehatan Esensial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rerata; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				penduduk kurang beruntung).						
220	SD01052.00.00	Indikator SDGs	3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular,	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				penduduk kurang beruntung).	penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)		akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)			
221	SP00018.00.00	Indikator SP2020			Cakupan wilayah	Wilayah geografis Indonesia atau teritorial Indonesia.	Klasifikasi Cakupan wilayah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Wilayah
222	SD00108.00.00	Indikator SDGs	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Cekungan Lintas Batas	Cekungan perairan lintas batas, yaitu, dari setiap permukaan air (terutama sungai, danau) atau air tanah yang menandai, melintasi atau terletak pada batas-batas antara dua negara atau lebih. Untuk keperluan perhitungan indikator ini, untuk perairan permukaan, cekungan adalah luas daerah tangkapan air; untuk air tanah, daerah yang dipertimbangkan adalah luasnya akuifer	Klasifikasi Cekungan Lintas Batas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	km ²
223	SP00067.00.00	Indikator SP2020			Cerai Hidup	Berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi, termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum atau wanita	Klasifikasi Cerai Hidup	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						yang mengaku belum pernah kawin tetapi telah melahirkan anak.				
224	SP00068.00.00	Indikator SP2020			Cerai Mati	Seseorang yang ditinggal meninggal oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.	Klasifikasi Cerai Mati	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
225	SD00109.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Cuci tangan pakai sabun	Perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.	Klasifikasi Cuci tangan pakai sabun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
226	SP00019.00.00	Indikator SP2020			Cucu	Anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.	Klasifikasi Cucu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
227	SD00110.00.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Daerah 3T	Daerah yang termasuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Perbatasan).	Klasifikasi Daerah 3T	1. Tertinggal 2. Terdepan 3. Terluar (Perbatasan)	Jumlah; persentase	Daerah; Persen
228	SD00110.00.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Daerah 3T	Daerah yang termasuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Perbatasan).	Klasifikasi Daerah 3T	1. Tertinggal 2. Terdepan 3. Terluar (Perbatasan)	Jumlah; persentase	Daerah; Persen
229	SD00111.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Klasifikasi berdasarkan	Panjang; Luas	Km; Km2

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).		menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.		analisis atau sesuai kebutuhan		
230	SD00111.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Luas	Km; Km2
231	SD00111.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Luas	Km; Km2
232	SD00111.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Luas	Km; Km2

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.		air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.				
233	SD00111.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Luas	Km; Km2
234	SD00111.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Luas	Km; Km2
235	SD00112.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan	Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Negara	Suatu wilayah DAS yang secara geografis melintasi batas antarnegara.	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Negara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Luas	Km; Km2

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.						
236	SD00295.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus yaitu mencakup daerah yang memiliki program pendidikan layanan khusus bencana berupa pendidikan pengurangan risiko bencana dalam bentuk Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), Tanggap Darurat Bidang Pendidikan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bidang Pendidikan pasca Bencana.	Klasifikasi Daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Daerah
237	SD00113.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Daerah kumuh	Daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.	Klasifikasi Daerah kumuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Daerah/ Kawasan
238	SD00113.00.00	Indikator SDGs	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Daerah kumuh	Daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.	Klasifikasi Daerah kumuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Daerah/ Kawasan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
239	SD00114.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Daerah Pabean	Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanaan.	Klasifikasi Daerah Pabean	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
240	SD00115.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Daerah Perdesaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi Daerah Perdesaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
241	SD00116.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi Daerah Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
242	SD00116.00.00	Indikator SDGs	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi Daerah Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
243	SD00116.00.00	Indikator SDGs	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi Daerah Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
244	SD00116.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi Daerah Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
245	SD00116.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi Daerah Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
246	SD00116.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota,	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana	Klasifikasi Daerah Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kawasan dan komunal.		pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.				
247	SD00116.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Daerah Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	Klasifikasi Daerah Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
248	SD00117.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Daerah Tangkapan Air Danau	Luasan lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air.	Klasifikasi Daerah Tangkapan Air Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Km2; Persen
249	SD00118.00.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Daerah Terbelakang/ Terpencil	Daerah di mana akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar. Daerah tersebut tidak tersedia dan atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan,	Klasifikasi Daerah Terbelakang/ Terpencil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						fasilitas listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih. Pada daerah itu juga harga-harga tinggi dan sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.				
250	SD00118.00.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Daerah Terbelakang/ Terpencil	Daerah di mana akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar. Daerah tersebut tidak tersedia dan atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih. Pada daerah itu juga harga-harga tinggi dan sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.	Klasifikasi Daerah Terbelakang/ Terpencil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
251	SD00119.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Daerah Tertinggal	Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : (i) Perekonomian masyarakat; (ii) Sumberdaya manusia; (iii) Sarana dan Prasarana; (iv) Kemampuan keuangan	Klasifikasi Daerah Tertinggal	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						daerah; (v) Aksesibilitas; (vi) Karakteristik daerah.				
252	SD00119.00.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Daerah Tertinggal	Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : (i) Perekonomian masyarakat; (ii) Sumberdaya manusia; (iii) Sarana dan Prasarana; (iv) Kemampuan keuangan daerah; (v) Aksesibilitas; (vi) Karakteristik daerah.	Klasifikasi Daerah Tertinggal	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
253	SD00119.00.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Daerah Tertinggal	Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : (i) Perekonomian masyarakat; (ii) Sumberdaya manusia; (iii) Sarana dan Prasarana; (iv) Kemampuan keuangan daerah; (v) Aksesibilitas; (vi) Karakteristik daerah.	Klasifikasi Daerah Tertinggal	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
254	SD00120.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Sarana dan prasarana 4. Kemampuan keuangan daerah	Klasifikasi Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Jumlah; persentase	Daerah; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. Aksesibilitas 6. Karakteristik daerah				
255	SD00120.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Sarana dan prasarana 4. Kemampuan keuangan daerah 5. Aksesibilitas 6. Karakteristik daerah	Klasifikasi Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Jumlah; persentase	Daerah; persen
256	SD00121.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Daerah Tertinggal yang Terentaskan	Daerah atau kabupaten yang sudah meningkat statusnya dari daerah atau kabupaten tertinggal	Klasifikasi Daerah Tertinggal yang Terentaskan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
257	SD00122.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Daerah yang Mengalami Bencana Alam atau Bencana Sosial	Daerah terkena musibah bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan: a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik; b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.	Klasifikasi Daerah yang Mengalami Bencana Alam atau Bencana Sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
258	SD00123.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dam Penahan	Bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau pasangan batu spesi yang dibuat pada alur sungai / jurang dengan tinggi maksimal 4 meter yang berfungsi untuk mengendalikan/mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (run-off).	Klasifikasi Dam Penahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dam; Persen
259	SD00124.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dam Pengendali	Bendungan kecil semi permanen yang dapat menampung air dengan konstruksi urugan tanah homogen, bronjong kawat atau lapisan kedap air dari beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi tanah, sedimentasi dan aliran permukaan yang dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi bendungan maksimal 8 (delapan) meter.	Klasifikasi Dam Pengendali	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dam; Persen
260	SD00125.00.00	Indikator SDGs	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dampak Obesitas	Meningkatnya probabilitas terkena penyakit diabetes, jantung, stroke, kanker, osteoarthritis, gangguan pernapasan, depresi maupun kematian mendadak (Obstructive Sleeping Apneu).	Klasifikasi Dampak Obesitas	Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin penderita: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Persentase	Persen
261	SD00126.00.00	Indikator SDGs	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Dana Desa	Dana yang berasal dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,	Klasifikasi Dana Desa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.				
262	SD00127.01.00	Indikator SDGs	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Danau	Cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
263	SD00127.01.00	Indikator SDGs	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Danau	Cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
264	SD00127.01.00	Indikator SDGs	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Danau	Cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
265	SD00127.01.00	Indikator SDGs	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Danau	Cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
266	SD00127.02.00	Indikator SDGs	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Danau	Sebuah cekungan yang terbentuk secara alami yang terisi oleh air dari beberapa sumber seperti curahan hujan, sungai, dan air tanah.	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
267	SD00127.02.00	Indikator SDGs	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan	Danau	Sebuah cekungan yang terbentuk secara alami yang terisi oleh air dari beberapa sumber seperti curahan hujan, sungai, dan air tanah.	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				daerah tangkapan sungai dan danau.						
268	SD00127.02.00	Indikator SDGs	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Danau	Sebuah cekungan yang terbentuk secara alami yang terisi oleh air dari beberapa sumber seperti curahan hujan, sungai, dan air tanah.	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
269	SD00127.02.00	Indikator SDGs	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Danau	Sebuah cekungan yang terbentuk secara alami yang terisi oleh air dari beberapa sumber seperti curahan hujan, sungai, dan air tanah.	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
270	SD00127.03.00	Indikator SDGs	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Danau	Wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamnya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan, termasuk situ, embung dan wadah air sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaga, ranu).	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
271	SD00127.03.00	Indikator SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Danau	Wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamnya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan, termasuk situ, embung dan wadah air sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaga, ranu).	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
272	SD00127.04.00	Indikator SDGs	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Danau	Wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal.	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2
273	SD00127.04.00	Indikator SDGs	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Danau	Wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ	Klasifikasi Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; luas	Danau; Km2

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal.		analisis atau sesuai kebutuhan		
274	SD00128.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Danau Prioritas	Danau yang memiliki kondisi ekosistem yang semakin beragam akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan pada daerah tangkapan air (DTA) hingga perairan danauannya.	Klasifikasi Danau Prioritas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Danau; Km ²
275	SD00296.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Banyaknya danau yang meningkat kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas yaitu Danau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Tondano, Limboto, Poso, Tempe, Matano, Mahakam, Sentarum, Sentasi, Batur, Rawadanau, dan Rawapening.	Klasifikasi Danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Indeks	Danau; Persentase
276	SD00297.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Danau yang menurun tingkat erosinya	Danau yang mengalami penurunan proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis.	Klasifikasi Danau yang menurun tingkat erosinya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
277	SD00298.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Banyaknya danau yang mengalami pendangkalan kurang dari 1% akibat sedimentasi.	Klasifikasi Danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
278	SD00129.00.00	Indikator SDGs	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Daratan	Permukaan bumi yang tidak tertutup air.	Klasifikasi Daratan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
279	SD00129.00.00	Indikator SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Daratan	Permukaan bumi yang tidak tertutup air.	Klasifikasi Daratan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
280	SD00130.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	DAS prioritas	DAS prioritas Indonesia terdiri atas 15 DAS yaitu Citarum, Ciliwung, Serayu, Solo, Brantas dan 10 DAS prioritas lainnya.	Klasifikasi DAS prioritas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	DAS
281	SD00299.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui penerapan teknologi konservasi tanah, dengan pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Klasifikasi DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
282	SD00300.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi tanah dan air di daerah hulu DAS	DAS yang diupayakan meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi tanah dan air serta pembangunan sumur resapan.	Klasifikasi DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi tanah dan air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					serta sumur resapan					
283	SD00301.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS.	DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan hutan serta peningkatan HHBK	DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan HTR, HKm, HD, HA dan HR serta peningkatan HHBK.	Klasifikasi DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan hutan serta peningkatan HHBK	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
284	SD00302.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	DAS yang meningkat jumlah mata airnya negara	DAS yang ditingkatkan kesehatannya melalui upaya peningkatan jumlah mata air dan pengelolaan terpadu.	Klasifikasi DAS yang meningkat jumlah mata airnya negara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
285	SD00131.00.00	Indikator SDGs	17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Dashboard Makroekonomi	Dashboard yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara historikal maupun real time. Dashboard makroekonomi berisikan namun tidak terbatas pada kriteria atau fungsi sebagai berikut: 1. Alert: Memonitor pergerakan beberapa indikator/variabel yang dianggap penting terhadap stabilitas ekonomi; 2. Global: Memvisualisasikan perbandingan indikator/variabel ekonomi dunia; 3. Forecast: Memproyeksi perkembangan ekonomi dengan berbagai indikator kunci dalam beberapa waktu ke depan; 4. Perkembangan Pasar: Menjelaskan pergerakan aktual harga beberapa komoditas domestik/lokal, komoditas dunia, indeks harga saham dan nilai tukar mata uang dunia terhadap USD.	Klasifikasi Dashboard Makroekonomi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks; Proporsi; Persentase	Indeks; Persen
286	SD00132.00.00	Indikator SDGs	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca.	Data Aktivitas (AD)	Besaran kuantitatif kegiatan manusia yang melepas emisi gas rumah kaca.	Klasifikasi Data Aktivitas (AD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
287	SD00133.00.00	Indikator SDGs	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Daur Ulang	Proses pengolahan sampah menghasilkan produk baru	Klasifikasi Daur Ulang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Ton; persen
288	SD00134.00.00	Indikator SDGs	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan	Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian	Klasifikasi Daya Air	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sumber daya air secara terpadu (0-100).		bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.		analisis atau sesuai kebutuhan		
289	SD00134.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.	Klasifikasi Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
290	SD00134.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.	Klasifikasi Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
291	SD00134.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.	Klasifikasi Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
292	SD00134.00.00	Indikator SDGs	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.	Klasifikasi Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
293	SD00134.00.00	Indikator SDGs	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem	Daya Air	Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian	Klasifikasi Daya Air	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dari waktu ke waktu.		bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.		analisis atau sesuai kebutuhan		
294	SD00135.00.00	Indikator SDGs	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Daya Rusak Air	Daya air yang merugikan kehidupan.	Klasifikasi Daya Rusak Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
295	SD00135.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Daya Rusak Air	Daya air yang merugikan kehidupan.	Klasifikasi Daya Rusak Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
296	SD00136.00.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Daya Saing Nasional	Daya saing suatu negara tergantung pada kapasitas industrinya untuk berinovasi dan meningkatkan. Perusahaan mendapatkan keuntungan melawan pesaing terbaik dunia karena tekanan dan tantangan. Mereka mendapat manfaat dari memiliki saingan domestik yang kuat, pemasok berbasis rumah yang agresif, dan menuntut pelanggan lokal.	Klasifikasi Daya Saing Nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
297	SD00137.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	<i>Debt Service Ratio (DSR)</i>	Rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri Pemerintah Pusat terhadap penerimaan transaksi berjalan.	Klasifikasi Debt Service Ratio (DSR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
298	SD00138.00.00	Indikator SDGs	15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Degradasi	Proses di mana keindahan atau kualitas sesuatu dihancurkan atau dimanjakan.	Klasifikasi Degradasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
299	SD00138.00.00	Indikator SDGs	15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Degradasi	Proses di mana keindahan atau kualitas sesuatu dihancurkan atau dimanjakan.	Klasifikasi Degradasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
300	SD00139.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Degradasi Hutan	Perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan sehingga kemampuan lahan hutan untuk memproduksi hasil hutan menjadi menurun.	Klasifikasi Degradasi Hutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
301	SD00140.00.00	Indikator SDGs	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan umum untuk kegiatan penyeberangan	Klasifikasi Dermaga Pelabuhan Penyeberangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dermaga
302	SD00141.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Klasifikasi Desa	1. Desa Adat 2. Desa Mandiri 3. Desa Berkembang 4. Desa Tertinggal	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
303	SD00141.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati	Klasifikasi Desa	1. Desa Adat 2. Desa Mandiri 3. Desa Berkembang 4. Desa Tertinggal	Jumlah; Persentase	Desa; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.				
304	SD00141.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Klasifikasi Desa	1. Desa Adat 2. Desa Mandiri Berkembang 3. Desa Tertinggal	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
305	SD00141.00.00	Indikator SDGs	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Klasifikasi Desa	1. Desa Adat 2. Desa Mandiri Berkembang 3. Desa Tertinggal	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
306	SD00141.00.00	Indikator SP2020			Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Klasifikasi Desa	1. Desa Adat 2. Desa Mandiri Berkembang 3. Desa Tertinggal	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
307	SD00142.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa Mandiri	Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai,	Klasifikasi Desa Mandiri	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75		analisis atau sesuai kebutuhan		
308	SD00143.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa Tertinggal	Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50	Klasifikasi Desa Tertinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
309	SD00303.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.	Klasifikasi Desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Desa/Kelurahan
310	SD00304.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai desa/kelurahan ODF /SBS.	Klasifikasi Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa/kelurahan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
311	SD00144.00.00	Indikator SDGs	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Deteksi Dini Infeksi Hepatitis B	Dilakukan oleh tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan darah pada ibu hamil paling sedikit 1 (satu) kali pada masa kehamilan	Klasifikasi Deteksi Dini Infeksi Hepatitis B	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
312	SD00145.00.00	Indikator SDGs	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.	Klasifikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
313	SD00145.00.00	Indikator SDGs	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.	Klasifikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
314	SD00146.00.00	Indikator SDGs	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.	Klasifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
315	SD00147.00.00	Indikator SDGs	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dewasa	Orang yang berusia lebih dari 19 tahun kecuali jika hukum nasional menetapkan seseorang sebagai orang dewasa pada usia lebih dini.	Klasifikasi Dewasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; proporsi	Orang; Persen
316	SD00148.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Diploma	Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.	Klasifikasi Diploma	1. Diploma satu (D1) 2. Diploma dua (D2) 3. Diploma tiga (D3) 4. Diploma empat (D4)	Jumlah	Orang
317	SD00149.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Diploma dua (D2)	Program diploma dengan masa studi 2 tahun dan lulusannya bergelar Ahli Muda (A.Ma).	Klasifikasi Diploma dua (D2)	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Perguruan Tinggi (PT).				analisis atau sesuai kebutuhan		
318	SD00150.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Diploma empat (D4)	Program diploma dengan masa studi 4 tahun dan lulusannya bergelar Sarjana Sains Terapan (S.S.T.).	Klasifikasi Diploma empat (D4)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
319	SD00150.00.00	Indikator SDGs	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Diploma empat (D4)	Program diploma dengan masa studi 4 tahun dan lulusannya bergelar Sarjana Sains Terapan (S.S.T.).	Klasifikasi Diploma empat (D4)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
320	SD00151.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Diploma satu (D1)	Program diploma dengan masa studi 1 tahun dan lulusannya bergelar Ahli Pratama (A.P.).	Klasifikasi Diploma satu (D1)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
321	SD00152.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Diploma tiga (D3)	Program diploma dengan masa studi 3 tahun dan lulusannya bergelar Ahli Madya (A.Md).	Klasifikasi Diploma tiga (D3)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
322	SD00153.01.00	Indikator SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Disabilitas	Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Gangguan fungsi atau keterbatasan antara lain kesulitan membaca (<i>reading difficulty</i>), kesulitan mendengar (<i>hearing difficulty</i>), berbicara tidak lancar (<i>cannot speak fluently</i>), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (<i>difficult understand</i>), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (<i>slow learning</i>), keterbatasan berjalan (<i>walking limitations</i>), keterbatasan bergerak (<i>limited movements</i>), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (<i>difficulty in picking up small objects</i>).	Klasifikasi Disabilitas	1. Kesulitan Membaca 2. Kesulitan Mendengar 3. Berbicara Tidak Lancar 4. Kesulitan Memahami/Hilang Ingatan/Gangguan Jiwa 5. Lambat Dalam Belajar/Memahami Pelajaran 6. Keterbatasan Berjalan 7. Keterbatasan Bergerak 8. Kesulitan Mengambil Barang Kecil Menggunakan Jari	Jumlah	Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
323	SD00153.01.00	Indikator SDGs	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Disabilitas	Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Gangguan fungsi atau keterbatasan antara lain kesulitan membaca (<i>reading difficulty</i>), kesulitan mendengar (<i>hearing difficulty</i>), berbicara tidak lancar (<i>cannot speak fluently</i>), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (<i>difficult understand</i>), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (<i>slow learning</i>), keterbatasan berjalan (<i>walking limitations</i>), keterbatasan bergerak (<i>limited movements</i>), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (<i>difficulty in picking up small objects</i>).	Klasifikasi Disabilitas	1. Kesulitan Membaca 2. Kesulitan Mendengar 3. Berbicara Tidak Lancar 4. Kesulitan Memahami/Hilang Ingatan/Gangguan Jiwa 5. Lambat Dalam Belajar/Memahami Pelajaran 6. Keterbatasan Berjalan 7. Keterbatasan Bergerak 8. Kesulitan Mengambil Barang Kecil Menggunakan Jari	Jumlah; Proporsi	Orang; Persen
324	SD00153.02.00	Indikator SDGs	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan	Disabilitas	Seseorang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk bersekolah.	Klasifikasi Disabilitas	1. Kesulitan Membaca 2. Kesulitan Mendengar 3. Berbicara Tidak Lancar 4. Kesulitan Memahami/Hilang Ingatan/Gangguan Jiwa	Jumlah	Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).				5. Lambat Dalam Belajar/Memahami Pelajaran 6. Keterbatasan Berjalan 7. Keterbatasan Bergerak 8. Kesulitan Mengambil Barang Kecil Menggunakan Jari		
325	SD00154.00.00	Indikator SDGs	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	Diskriminasi	Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.	Klasifikasi Diskriminasi	1. Dasar agama 2. Suku 3. Ras 4. Etnik 5. Kelompok 6. Golongan 7. Status Sosial 8. Status Ekonomi 9. Jenis Kelamin 10. Bahasa 11. Keyakinan Politik	Jumlah	Kasus
326	SD00154.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi	Diskriminasi	Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,	Klasifikasi Diskriminasi	1. Dasar agama 2. Suku 3. Ras 4. Etnik 5. Kelompok 6. Golongan	Jumlah	Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menurut hukum HAM Internasional.		keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.		7. Status Sosial 8. Status Ekonomi 9. Jenis Kelamin 10. Bahasa 11. Keyakinan Politik		
327	SD00154.00.00	Indikator SDGs	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Diskriminasi	Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.	Klasifikasi Diskriminasi	1. Dasar agama 2. Suku 3. Ras 4. Etnik 5. Kelompok 6. Golongan 7. Status Sosial 8. Status Ekonomi 9. Jenis Kelamin 10. Bahasa 11. Keyakinan Politik	Jumlah	Kasus
328	SD00154.00.00	Indikator SDGs	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Diskriminasi	Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan	Klasifikasi Diskriminasi	1. Dasar agama 2. Suku 3. Ras 4. Etnik 5. Kelompok 6. Golongan 7. Status Sosial 8. Status Ekonomi 9. Jenis Kelamin 10. Bahasa	Jumlah	Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.		11. Keyakinan Politik		
329	SD01054.00.00	Indikator SDGs	13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat nasional.	Klasifikasi Biennial Update Report (BUR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
330	SD00155.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Dokumen Hukum	Dokumen tentang masalah hukum; sebuah dokumen yang disusun oleh seorang pengacara.	Klasifikasi Dokumen Hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
331	SD01055.00.00	Indikator SDGs	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK.	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK	Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen laporan penurunan emisi GRK untuk lima sektor prioritas saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi penurunan emisi GRK pada lima sektor prioritas tingkat nasional.	Klasifikasi Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
332	SD00156.00.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen rencana pemanfaatan	dokumen rencana aksi terkait pemanfaatan keanekaragaman ekosistem, jenis dan genetika untuk mendukung pertumbuhan	Klasifikasi Dokumen rencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					keanekaragaman hayati	ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.	pemanfaatan kehati			
333	SD00157.00.00	Indikator SDGs	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
334	SD00157.00.00	Indikator SDGs	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Daerah	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Dokumen; Persen
335	SD00157.00.00	Indikator SDGs	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Klasifikasi berdasarkan jenis dokumen (jika ada)	Jumlah	Dokumen
336	SD00157.00.00	Indikator SDGs	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat	Klasifikasi Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Dokumen; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					nasional dan daerah	dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	nasional dan daerah			
337	SD00157.00.00	Indikator SDGs	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.	Klasifikasi Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Klasifikasi berdasarkan jenis dokumen (jika ada)	Jumlah	Dokumen
338	SD00158.00.00	Indikator SDGs	11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Dukungan Finansial	Dukungan mengenai (urusan) keuangan.	Klasifikasi Dukungan Finansial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
339	SD00159.00.00	Indikator SDGs	2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.	Dukungan Kebijakan Kepada Produsen	Kebijakan transfer kepada produsen pertanian yang diukurkan pada petani dan menyatakan kontribusi pendapatan bersih petani	Klasifikasi Dukungan Kebijakan Kepada Produsen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
340	SD00160.00.00	Indikator SDGs	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dukungan Pemerintah	Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.	Klasifikasi Dukungan Pemerintah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
341	SP00020.00.00	Indikator SP2020			Dusun	Bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan.	Klasifikasi Dusun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dusun
342	SD00161.00.00	Indikator SDGs	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Efisiensi Penggunaan Air	Nilai tambah dari sektor utama tertentu (pertanian, pertambangan, listrik, gas, uap, dan jasa) dibagi dengan volume air yang digunakan.	Klasifikasi Efisiensi Penggunaan Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
343	SD00162.00.00	Indikator SDGs	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.	Ekosistem	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.	Klasifikasi Ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen
344	SD00162.00.00	Indikator SDGs	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat	Ekosistem	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.	Klasifikasi Ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.						
345	SD00162.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Ekosistem	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.	Klasifikasi Ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen
346	SD00162.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Ekosistem	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.	Klasifikasi Ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen
347	SD00162.00.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Ekosistem	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.	Klasifikasi Ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen
348	SD00162.00.00	Indikator SDGs	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Ekosistem	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.	Klasifikasi Ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
349	SD00162.00.00	Indikator SDGs	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Ekosistem	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.	Klasifikasi Ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen
350	SD00162.00.00	Indikator SDGs	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Ekosistem	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.	Klasifikasi Ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekosistem; Persen
351	SD00163.01.00	Indikator SDGs	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Ekspor	Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.	Klasifikasi Ekspor	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US\$
352	SD00163.01.00	Indikator SDGs	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor	Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.	Klasifikasi Ekspor	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US\$
353	SD00163.01.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Ekspor	Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.	Klasifikasi Ekspor	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US\$

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
354	SD00163.02.00	Indikator SDGs	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Ekspor	Seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.	Klasifikasi Ekspor	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US\$
355	SD00163.02.00	Indikator SDGs	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor	Seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.	Klasifikasi Ekspor	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US\$
356	SD00163.02.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Ekspor	Seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.	Klasifikasi Ekspor	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US\$
357	SD00164.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Ekspor Barang dan Jasa	Pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli.	Klasifikasi Ekspor Barang dan Jasa	1. Migas 2. Non migas	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US\$
358	SD00165.00.00	Indikator SDGs	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor Non Migas	Agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas.	Klasifikasi Ekspor Non Migas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; US\$

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
359	SD00166.00.00	Indikator SDGs	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Eliminasi	Upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.	Klasifikasi Eliminasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
360	SD00167.00.00	Indikator SDGs	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Eliminasi Filariasis	Tercapainya keadaan dimana penularan filariasis sedemikian rendahnya sehingga penyakit ini tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.	Klasifikasi Eliminasi Filariasis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
361	SD00168.01.00	Indikator SDGs	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Eliminasi Kusta	Eliminasi kusta berarti angka prevalensi <1/ 10.000 penduduk.	Klasifikasi Eliminasi Kusta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
362	SD00168.02.00	Indikator SDGs	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Eliminasi Kusta	Kondisi penurunan penderita terdaftar pada suatu wilayah.	Klasifikasi Eliminasi Kusta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
363	SD00169.00.00	Indikator SDGs	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Eliminasi Malaria	Suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali	Klasifikasi Eliminasi Malaria	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Daerah; persen
364	SD00170.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan	Embung	Bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim	Klasifikasi Embung	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.		hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.		analisis atau sesuai kebutuhan		
365	SD00171.00.00	Indikator SDGs	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca.	Emisi Gas Rumah Kaca	Lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.	Klasifikasi Emisi Gas Rumah Kaca	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
366	SD00171.00.00	Indikator SDGs	9.4.1*	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Emisi Gas Rumah Kaca	Lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.	Klasifikasi Emisi Gas Rumah Kaca	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
367	SD00172.00.00	Indikator SDGs	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Energi	Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika	Klasifikasi Energi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
368	SD00173.00.00	Indikator SDGs	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Energi Final	Energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir.	Klasifikasi Energi Final	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
369	SD00174.00.00	Indikator SDGs	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Energi Primer	Energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut.	Klasifikasi Energi Primer	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional)		analisis atau sesuai kebutuhan		
370	SD00175.00.00	Indikator SDGs	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Energi Terbarukan	Energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.	Klasifikasi Energi Terbarukan	1. Energi matahari/solar 2. Tenaga air 3. Tenaga angin 4. Energi Biogas 5. Energi Panas bumi 6. Energi gelombang air laut 7. Energi sampah 8. Energi Biomassa	Persentase	Persen
371	SD00176.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Erosi	Proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis berupa air, salju, dan angin.	Klasifikasi Erosi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
372	SD00177.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah; persentase	Orang; persen
373	SD00178.00.00	Indikator SDGs	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca.	Faktor Emisi	Faktor yang menunjukkan intensitas emisi per unit aktivitas yang bergantung kepada berbagai parameter terkait proses kimia yang terjadi	Klasifikasi Faktor Emisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
374	SP00021.00.00	Indikator SP2020			Famili lain	Mereka yang ada hubungan famili dengan kepala keluarga atau dengan suami/istri	Klasifikasi Famili lain	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kepala keluarga, misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek, atau nenek.		analisis atau sesuai kebutuhan		
375	SD00179.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Fasilitas Kesehatan	Tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin (Poindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Obat Desa (POD), Pos UKK, Balai Pengobatan, Praktik Pengobatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dukun Bersalin, Praktik Dokter, Klinik/Praktik Dokter Bersama, Praktik Bidan, Bidan di Desa, Apotek, Petugas Lapangan KB, TKBK, Pos KB.	Klasifikasi Fasilitas Kesehatan	1. RS Pemerintah/RS Swasta/RSIA 2. Rumah Bersalin 3. Puskesmas 4. Pustu 5. Praktik nakes 6. Polindes/Poskesdes 7. Rumah 8. Lainnya	Jumlah; persentase; proporsi	Persen; unit
376	SD00179.00.00	Indikator SDGs	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Fasilitas Kesehatan	Tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin (Poindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Obat Desa (POD), Pos UKK, Balai Pengobatan, Praktik Pengobatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dukun Bersalin, Praktik Dokter, Klinik/Praktik Dokter Bersama, Praktik Bidan, Bidan di Desa, Apotek, Petugas Lapangan KB, TKBK, Pos KB.	Klasifikasi Fasilitas Kesehatan	1. RS Pemerintah/RS Swasta/RSIA 2. Rumah Bersalin 3. Puskesmas 4. Pustu 5. Praktik nakes 6. Polindes/Poskesdes 7. Rumah 8. Lainnya	Jumlah; persentase; proporsi	Persen; unit

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
377	SD00179.00.00	Indikator SDGs	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Fasilitas Kesehatan	Tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin (Poindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Obat Desa (POD), Pos UKK, Balai Pengobatan, Praktik Pengobatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dukun Bersalin, Praktik Dokter, Klinik/Praktik Dokter Bersama, Praktik Bidan, Bidan di Desa, Apotek, Petugas Lapangan KB, TKBK, Pos KB.	Klasifikasi Fasilitas Kesehatan	1. RS Pemerintah/RS Swasta/RSIA 2. Rumah Bersalin 3. Puskesmas 4. Pustu 5. Praktik nakes 6. Polindes/Poskesdes 7. Rumah 8. Lainnya	Jumlah; persentase; proporsi	Persen; unit
378	SD00180.00.00	Indikator SDGs	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Fasilitas layanan kesehatan	Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSUD atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.	Klasifikasi Fasilitas layanan kesehatan	1. Puskesmas 2. Klinik pratama 3. RSUD 4. RS khusus	Jumlah; persentase; proporsi	Persen; unit
379	SD00181.00.00	Indikator SDGs	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Fasilitas Publik	Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya	Klasifikasi Fasilitas Publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Fasilitas Publik; Persen
380	SD00306.00.00	Indikator SDGs	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan	Fasilitas Publik yang Menerapkan	Fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber	Klasifikasi Fasilitas Publik yang Menerapkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Fasilitas Publik; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Masyarakat (SPM) dan teregister.	SPM dan Teregister	daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah.	SPM dan Teregister			
381	SD00182.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Fasilitas Sanitasi Layak	Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.	Klasifikasi Fasilitas Sanitasi Layak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
382	SD00182.00.00	Indikator SDGs	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Fasilitas Sanitasi Layak	Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.	Klasifikasi Fasilitas Sanitasi Layak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
383	SD00182.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Fasilitas Sanitasi Layak	Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.	Klasifikasi Fasilitas Sanitasi Layak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
384	SP00022.00.00	Indikator SP2020			Fasilitas Tempat	Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh anggota keluarga.	Klasifikasi Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Buang Air Besar			analisis atau sesuai kebutuhan		
385	SD00183.00.00	Indikator SDGs	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)	Semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau total genitalia wanita eksternal, atau cedera lain pada organ genital wanita karena alasan non-medis (all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical reasons)	Klasifikasi Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)	1. Tipe 1 (Clitoridectomy) 2. Tipe 2 (Excision) 3. Tipe 3 (Infibulation) 4. Tipe 4 (all other harmful procedures to the female genitalia for non-medical purposes)	Persentase	Persen
386	SD00253.01.00	Indikator SDGs	10.5.1	Financial Soundness Indicator.	Financial Soundness Indicator (FSI)	Indikator kesehatan keuangan (FSI) memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan dan kesehatan lembaga keuangan suatu negara serta sektor perusahaan dan rumah tangga. FSI mendukung analisis stabilitas ekonomi dan keuangan.	Klasifikasi Financial Soundness Indicator (FSI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
387	SD00253.02.00	Indikator SDGs	10.5.1	Financial Soundness Indicator.	Financial Soundness Indicator (FSI)	Indikator terkini tingkat kesehatan sektor keuangan suatu negara yang disajikan secara komprehensif, sekaligus menggambarkan kondisi Perusahaan dan Rumah Tangga selaku counterpart-nya. Indikator FSI mencakup indikator utama yang menggambarkan tingkat kesehatan sektor perbankan, dan indikator pendukung yang menyajikan indikator kesehatan sektor perbankan lainnya serta	Klasifikasi Financial Soundness Indicator (FSI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						indikator lainnya yang berdampak terhadap kesehatan sektor keuangan.				
388	SD00185.00.00	Indikator SDGs	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Salah satu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota. Bisa dilakukan dengan Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota (FDPPKB) guna memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Klasifikasi Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Forum; Persen
389	SD00186.00.00	Indikator SDGs	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).	Free Trade Agreement	Perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas dimana perdagangan barang atau jasa diantara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tarif.	Klasifikasi Free Trade Agreement	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
390	SD00186.00.00	Indikator SDGs	17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).	Free Trade Agreement	Perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas dimana perdagangan barang atau jasa diantara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tarif.	Klasifikasi Free Trade Agreement	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
391	SD00187.00.00	Indikator SDGs	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Garis kemiskinan	Representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.	Klasifikasi Garis kemiskinan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
392	SD00188.00.00	Indikator SDGs	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK.	Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah	Klasifikasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
393	SD00188.00.00	Indikator SDGs	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah	Klasifikasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen
394	SD00188.00.00	Indikator SDGs	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor	Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah	Klasifikasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Persentase	m3; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				industri manufaktur.						
395	SD00189.00.00	Indikator SDGs	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Gender	Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.	Klasifikasi Gender	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
396	SD00189.00.00	Indikator SDGs	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Gender	Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.	Klasifikasi Gender	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
397	SD00189.00.00	Indikator SDGs	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk	Gender	Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki	Klasifikasi Gender	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.		dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.		analisis atau sesuai kebutuhan		
398	SD00189.00.00	Indikator SDGs	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Gizi Buruk	Keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada <- 3SD tabel baku WHO-NCHS. Gizi buruk ini meliputi marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.	Klasifikasi Gizi Buruk	1. Marasmus 2. Kwashiorkor 3. Marasmus-kwashiorkor	Persentase	Persen
399	SD00190.00.00	Indikator SDGs	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Green Waste	Upaya pengelolaan limbah/ sampah untuk menciptakan zero waste dengan menerapkan konsep 3R yaitu reduce (mengurangi sampah), reuse (memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang), recycle (mendaur ulang sampah)	Klasifikasi Green Waste	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kota
400	SD00191.00.00	Indikator SDGs	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Guru	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	Klasifikasi Guru	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
401	SD00192.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Hak Asasi Manusia	Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.	Klasifikasi Hak Asasi Manusia	1. Hak untuk Hidup 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 3. Hak Mengembangkan Diri 4. Hak Memperoleh Keadilan 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi 6. Hak atas Rasa Aman 7. Hak atas Kesejahteraan 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan 9. Hak Wanita 10. Hak Anak	Persentase	Persen
402	SD00192.00.00	Indikator SDGs	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan	Hak Asasi Manusia	Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia	Klasifikasi Hak Asasi Manusia	1. Hak untuk Hidup 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 3. Hak Mengembangkan Diri	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.				4. Hak Memperoleh Keadilan 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi 6. Hak atas Rasa Aman 7. Hak atas Kesejahteraan 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan 9. Hak Wanita 10. Hak Anak		
403	SD00192.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Hak Asasi Manusia (HAM)	Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia	Klasifikasi Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Hak untuk Hidup 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 3. Hak Mengembangkan Diri 4. Hak Memperoleh Keadilan 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi 6. Hak atas Rasa Aman 7. Hak atas Kesejahteraan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan 9. Hak Wanita 10. Hak Anak		
404	SD00193.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Hak Asasi Perempuan	Hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dan lain-lain, terutama berbasis gender.	Klasifikasi Hak Asasi Perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
405	SD00193.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan	Hak Asasi Perempuan	Hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dan lain-lain, terutama berbasis gender	Klasifikasi Hak Asasi Perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				terhadap perempuan.						
406	SD00194.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Hak dasar	Meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).	Klasifikasi Hak dasar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
407	SD00195.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Hak dipilih	Hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik.	Klasifikasi Hak dipilih	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
408	SD00196.00.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki haklahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Hak guna-bangunan	Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun	Klasifikasi Hak guna-bangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
409	SD00197.00.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang	Hak guna-usaha	Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan	Klasifikasi Hak guna-usaha	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				memiliki haklahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.						
410	SD00198.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Hak memilih	Hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik	Klasifikasi Hak memilih	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
411	SD00199.00.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki haklahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Hak milik	Hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.	Klasifikasi Hak milik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
412	SD00199.00.00	Indikator SDGs	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Hak milik	Hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.	Klasifikasi Hak milik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
413	SD00200.00.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki haklahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Hak pakai	Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini	Klasifikasi Hak pakai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
414	SD00201.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Hak Politik	Hak politik mencakup antara lain partisipasi responden dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu)/Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terakhir, adanya money politics saat pelaksanaan pemilu/pilpres/pemilukada, kepercayaan pada kinerja Presiden, DPR, Polisi, dan lembaga peradilan. Termasuk partisipasi responden pada partai politik.	Klasifikasi Hak Politik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
415	SD00202.00.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Hak-hak atas tanah	Memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.	Klasifikasi Hak-hak atas tanah	1. Hak Milik 2. Hak Guna-Usaha 3. Hak Guna-Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak Sewa 6. Hak Membuka Tanah 7. Hak Memungut-Hasil Hutan 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53	Persentase	Persen
416	SD00202.00.00	Indikator SDGs	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah	Hak-hak atas tanah	Memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan	Klasifikasi Hak-hak atas tanah	1. Hak Milik 2. Hak Guna-Usaha 3. Hak Guna-Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak Sewa 6. Hak Membuka	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dan/atau hak kontrol.		peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.		Tanah 7. Hak Memungut-Hasil Hutan 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53		
417	SD00203.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Hak-Hak Politik	Hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.	Klasifikasi Hak-Hak Politik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
418	SD00204.00.00	Indikator SDGs	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan	Semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan.	Klasifikasi Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
419	SD00205.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya,	Hampir Punah yang Dipelihara	Populasi terancam punah yang menjadi sasaran program konservasi aktif atau	Klasifikasi Hampir Punah yang Dipelihara	Klasifikasi berdasarkan jenis varietas	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	(Endangered Maintened)	populasi yang dikelola oleh perusahaan komersial atau lembaga penelitian.	(Endangered Maintened)			
420	SD00206.00.00	Indikator SDGs	15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Hasil buruan	Hasil yang diperoleh dari kegiatan berburu yang berwujud satwa buru baik hidup maupun mati atau bagian-bagiannya.	Klasifikasi Hasil buruan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
421	SD00206.00.00	Indikator SDGs	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Hasil buruan	Hasil yang diperoleh dari kegiatan berburu yang berwujud satwa buru baik hidup maupun mati atau bagian-bagiannya.	Klasifikasi Hasil buruan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
422	SD00207.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.	Klasifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
423	SD00208.00.00	Indikator SDGs	3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Hepatitis B	Penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B	Klasifikasi Hepatitis B	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
424	SD00208.00.00	Indikator SDGs	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan	Hepatitis B	Penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B	Klasifikasi Hepatitis B	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.				analisis atau sesuai kebutuhan		
425	SD00209.00.00	Indikator SDGs	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Hepatitis B dan C	Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis B dan C yang dapat menimbulkan peradangan hati akut atau menahun, dan dapat berlanjut menjadi sirosis atau kanker hati.	Klasifikasi Hepatitis B dan C	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
426	SD00210.00.00	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Hibah	Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.	Klasifikasi Hibah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
427	SD00211.00.00	Indikator SDGs	15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Hidupan Liar	Hewan dan tumbuhan yang tumbuh secara independen dari manusia, biasanya dalam kondisi alami.	Klasifikasi Hidupan Liar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
428	SD00211.00.00	Indikator SDGs	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Hidupan Liar	Hewan dan tumbuhan yang tumbuh secara independen dari manusia, biasanya dalam kondisi alami.	Klasifikasi Hidupan Liar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
429	SD00212.00.00	Indikator SDGs	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	<i>HIV (Human Immunodeficiency Virus)</i>	Virus yang menyebabkan <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	Klasifikasi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	1. HIV-1 (HIV Tipe 1) 2. HIV-2 (HIV Tipe 2)	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
430	SD00212.00.00	Indikator SDGs	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Virus yang menyebabkan <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	Klasifikasi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	1. HIV-1 (HIV Tipe 1) 2. HIV-2 (HIV Tipe 2)	Persentase	Persen
431	SD00213.00.00	Indikator SDGs	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Hukum	Sebuah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.	Klasifikasi Hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
432	SD00213.00.00	Indikator SDGs	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Hukum	Sebuah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.	Klasifikasi Hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
433	SD00214.00.00	Indikator SDGs	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum	Hukum HAM Internasional	Seperangkat aturan internasional yang memperkuat hak dan martabat semua manusia (wanita, pria dan anak-anak) tanpa diskriminasi.	Klasifikasi Hukum HAM Internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				HAM Internasional.						
434	SD00214.00.00	Indikator SDGs	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Hukum HAM Internasional	Seperangkat aturan internasional yang memperkuat hak dan martabat semua manusia (wanita, pria dan anak-anak) tanpa diskriminasi.	Klasifikasi Hukum HAM Internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
435	SD00215.00.00	Indikator SDGs	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Hukum Nasional Responsif Gender	Sistem atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan. Hukum nasional yang ditinjau meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KemenPPPA).	Klasifikasi Hukum Nasional Responsif Gender	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
436	SD00216.00.00	Indikator SDGs	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari	Hukuman fisik/ badan	Tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera. Hukuman fisik meliputi mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul,	Klasifikasi Hukuman fisik/ badan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pengasuh dalam sebulan terakhir		menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain.				
437	SD00216.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Hukuman fisik/ badan	Tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera. Hukuman fisik meliputi mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain.	Klasifikasi Hukuman fisik/ badan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
438	SD00217.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Hunian Terjangkau	Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%.	Klasifikasi Hunian Terjangkau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
439	SD00218.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta	Hutan Adat (HA)	Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Klasifikasi Hutan Adat (HA)	Klasifikasi berdasarkan	Luas	Km ²

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.				analisis atau sesuai kebutuhan		
440	SD00219.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Hutan Alam	Unit vegetasi berlapis-lapis yang umumnya didominasi oleh pohon (sebagian besar hijau atau semi-gugur), yang strata gabungannya memiliki tumpang tindih mahkota (yaitu penutup mahkota 75% atau lebih), dan di mana rumput di strata herba (jika ada) umumnya jarang.	Klasifikasi Hutan Alam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
441	SD00220.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Hutan Desa (HD)	Hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.	Klasifikasi Hutan Desa (HD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
442	SD00221.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.	Klasifikasi Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
443	SD00222.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai	Hutan Konservasi	Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.	Klasifikasi Hutan Konservasi	1. Kawasan suaka alam (KSA) 2. Kawasan pelestarian alam	Luas	Km ²

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				indeks METT minimal 70%.				(KPA) 3. Taman buru (TB)		
444	SD00223.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Hutan Produksi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.	Klasifikasi Hutan Produksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
445	SD00224.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Hutan Rakyat (HR)	Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.	Klasifikasi Hutan Rakyat (HR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
446	SD00225.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.	Klasifikasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
447	SD00226.00.00	Indikator SDGs	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Ibu hamil anemia	Ibu hamil dengan kadar Hb <11,0 g/dl yang diperiksa pada saat kunjungan pertama (K1).	Klasifikasi Ibu hamil anemia	1. Anemia Ringan 2. Anemia Akut 3. Anemia Kronis	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
448	SD00227.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang	Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK)	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.	Klasifikasi Ibukota Kabupaten/Kota (IKK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).						
449	SP00024.00.00	Indikator SP2020			Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Mengacu pada ijazah pendidikan formal tertinggi yang dimiliki penduduk.	Klasifikasi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	1. Tidak/Belum Tamat SD 2. Tamat SD/MI/Sederajat 3. Tamat SLTP/MTs/Sederajat 4. Tamat SLTA/MA/Sederajat 5. Tamat SM Kejuruan 6. Tamat Diploma I/II 7. Tamat Diploma III/Akademi 8. Tamat Diploma IV/S1 9. Tamat S2/S3	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
450	SD00228.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam pada Hutan	Ijin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas	Klasifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam pada	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas	Ijin; Km2

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Produksi (IUPHHK-RE)	liaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.	Hutan Produksi (IUPHHK-RE)			
451	SD00229.00.00	Indikator SDGs	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Ikan	Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	Klasifikasi Ikan	1. Ikan 2. Mollusca 3. Crustacea 4. Algae 5. Mamalia Air 6. Lainnya	Volume; Nilai	Kg; Rupiah
452	SD00229.00.00	Indikator SDGs	14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).	Ikan	Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	Klasifikasi Ikan	1. Ikan 2. Mollusca 3. Crustacea 4. Algae 5. Mamalia Air 6. Lainnya	Volume; Nilai	Kg; Rupiah
453	SD00229.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Ikan	Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	Klasifikasi Ikan	1. Ikan 2. Mollusca 3. Crustacea 4. Algae 5. Mamalia Air 6. Lainnya	Volume; Nilai	Kg; Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
454	SD00230.00.00	Indikator SDGs	14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).	Ilegal	Bertentangan dengan atau dilarang oleh hukum, terutama hukum pidana.	Klasifikasi Ilegal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
455	SD00231.01.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Impor	Kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.	Klasifikasi Impor	1. Migas 2. Non migas	Berat Bersih; Volume; Nilai	Ton; m3; Rupiah; USD
456	SD00231.02.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Impor	Pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri.	Klasifikasi Impor	1. Migas 2. Non migas	Berat Bersih; Volume; Nilai	Ton; m3; Rupiah; USD
457	SD00232.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Imunisasi	Suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, baik disuntik maupun diminum (diteteskan dalam mulut) agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu	Klasifikasi Imunisasi	1. Imunisasi Dasar 2. Imunisasi Lanjutan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						di dalam tubuh, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.				
458	SD00232.00.00	Indikator SDGs	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi	Suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, baik disuntik maupun diminum (diteteskan dalam mulut) agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.	Klasifikasi Imunisasi	1. Imunisasi Dasar 2. Imunisasi Lanjutan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
459	SD00232.00.00	Indikator SDGs	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Imunisasi	Suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, baik disuntik maupun diminum (diteteskan dalam mulut) agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.	Klasifikasi Imunisasi	1. Imunisasi Dasar 2. Imunisasi Lanjutan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
460	SD00233.00.00	Indikator SDGs	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai	Imunisasi Dasar	Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun.	Klasifikasi Imunisasi Dasar	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.				analisis atau sesuai kebutuhan		
461	SD00234.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Imunisasi Dasar Lengkap	Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun. Seorang anak telah menerima imunisasi lengkap apabila telah menerima: - 1 (satu) kali imunisasi BCG; - 3 (tiga) kali imunisasi DPT; - 3 (tiga) kali imunisasi HB; - 3 (tiga) kali imunisasi Polio; dan - 1 (satu) kali imunisasi Campak.	Klasifikasi Imunisasi Dasar Lengkap	1. Bacillus Calmette Guerin (BCG), 2. Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPTHB-Hib), 3. Hepatitis B pada bayi baru lahir, 4. Polio, dan 5. Campak	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
462	SD00234.00.00	Indikator SDGs	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi Dasar Lengkap	Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun. Seorang anak telah menerima imunisasi lengkap apabila telah menerima: - 1 (satu) kali imunisasi BCG; - 3 (tiga) kali imunisasi DPT; - 3 (tiga) kali imunisasi HB; - 3 (tiga) kali imunisasi Polio; dan - 1 (satu) kali imunisasi Campak.	Klasifikasi Imunisasi Dasar Lengkap	1. Bacillus Calmette Guerin (BCG), 2. Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPTHB-Hib), 3. Hepatitis B pada bayi baru lahir, 4. Polio, dan 5. Campak	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
463	SD00235.00.00	Indikator SDGs	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Imunisasi Khusus	Dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.	Klasifikasi Imunisasi Khusus	1. Rabies 2. Demam Kuning 3. Pneumonia 4. Meningitis	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
464	SD00236.00.00	Indikator SDGs	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Imunisasi Lanjutan	Ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi ini diberikan pada: a. anak usia bawah dua tahun (Baduta); b. anak usia sekolah dasar; dan c. wanita usia subur (WUS)	Klasifikasi Imunisasi Lanjutan	1. DPT 2. Hepatitis B 3. HiB 4. Campak/MR 5. DT 6. Td	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
465	SD00237.00.00	Indikator SDGs	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Imunisasi Tambahan	Jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.	Klasifikasi Imunisasi Tambahan	1. HPV 2. Influenza 3. PCV 4. Rotavirus 5. Varicela 6. Japanese Encephalitis 7. Dengue 8. Tifoid 9. Hepatitis A	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
466	SD00238.00.00	Indikator SDGs	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Imunisasi Wajib	Imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu	Klasifikasi Imunisasi Wajib	1. Imunisasi rutin 2. Imunisasi tambahan 3. Imunisasi khusus.	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen
467	SD00238.00.00	Indikator SDGs	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai	Imunisasi Wajib	Imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi	Klasifikasi Imunisasi Wajib	1. Imunisasi rutin 2. Imunisasi tambahan	Jumlah; persentase	Orang; Kali; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.		yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu		3. Imunisasi khusus.		
468	SD00239.00.00	Indikator SDGs	15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Indeks	Sistem angka yang digunakan untuk membandingkan nilai hal-hal yang berubah sesuai satu sama lain atau standar tetap.	Klasifikasi Indeks	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
469	SD00240.01.00	Indikator SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.	Klasifikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60-80) 3. Buruk (indeks < 60) (BRS IDI 2017)	Indeks	Indeks
470	SD00240.01.00	Indikator SDGs	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.	Klasifikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60-80) 3. Buruk (indeks < 60) (BRS IDI 2017)	Indeks	Indeks
471	SD00240.01.00	Indikator SDGs	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.	Klasifikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60-80) 3. Buruk (indeks < 60) (BRS IDI 2017)	Indeks	Indeks
472	SD00240.02.00	Indikator SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap	Klasifikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1. Baik (indeks > 80) 2. Sedang (indeks 60-80)	Indeks	Indeks

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.		3. Buruk (indeks < 60) (BRS IDI 2017)		
473	SD00241.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-Hak Politik	Indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengangkat hak politik sebagai indikator demokrasi politik yang cukup lengkap.	Klasifikasi Indeks Hak-Hak Politik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
474	SD00242.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi Indeks Kebebasan Sipil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
475	SD00242.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi Indeks Kebebasan Sipil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
476	SD00243.00.00	Indikator SDGs	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	Indeks Kehilangan	Ukuran totalitas kerugian yang terjadi dari waktu pencatatan produksi pertanian	Klasifikasi Indeks	Klasifikasi berdasarkan	Indeks	Indeks

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Makanan Global	hingga mencapai konsumen akhir sebagai makanan. Dihitung secara kuantitas, kemudian diubah menjadi pasokan energi makanan (dalam kkal) per kapita yang memungkinkan agregasi konsisten dan kemudian diindeks.	Kehilangan Makanan Global	analisis atau sesuai kebutuhan		
477	SD00244.00.00	Indikator SDGs	1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)	Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) mengukur kekurangan (deprivation) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. IKM merupakan perkalian antara proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan dan intensitas kemiskinan individu.	Klasifikasi Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
478	SD00245.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi	Indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen.	Klasifikasi Indeks Lembaga Demokrasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
479	SD00246.00.00	Indikator SDGs	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Indeks Massa Tubuh (IMT)	Alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan	Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT)	1. Kategori Kurus: -Kekurangan berat badan tingkat berat: < 17,0 -Kekurangan berat badan tingkat ringan: < 17,0 – 18,4 2. Kategori Normal: 18,5 – 25,0 3. Kategori Gemuk: -Kelebihan berat badan tingkat ringan: 25,1 – 27,0 -Kelebihan berat badan tingkat berat: > 27,0	Indeks	Indeks
480	SD00247.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup 5 dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa.	Klasifikasi Indeks Pembangunan Desa (IPD)	1. Indeks > 75 (Mandiri) 2. Indeks 50–75 (Berkembang) 3. Indeks < 50 (Tertinggal) (BRS IDI 2017)	Indeks	Indeks
481	SD00248.00.00	Indikator SDGs	2.a.1	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian.	Indeks Pengeluaran Pemerintah	Kontribusi pertanian dalam pengeluaran pemerintah dibagi dengan kontribusi pertanian terhadap PDB dengan pertanian	Klasifikasi Indeks Pengeluaran	1. Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian lebih	Jumlah	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					untuk Pertanian	merujuk kepada pertanian, kehutanan, dan perikanan.	Pemerintah untuk Pertanian	dari 1: negara memiliki orientasi tinggi terhadap sektor pertanian. 2. Indeks dengan nilai kurang dari 1: merefleksikan orientasi negara yang rendah terhadap sektor pertanian. 3. Indeks nilai sama dengan 1: kenetralan pemerintah terhadap sektor ini.		
482	SD00249.01.00	Indikator SDGs	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks komposit yang mengukur budaya zero tolerance masyarakat terhadap korupsi.	Klasifikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	1. 0 - 1,25 (Sangat permisif) 2. 1,26 - 2,5 (Permisif) 3. 2,51 - 3,75 (Anti korupsi) 4. 3,76 - 5 (Sangat anti korupsi)	Indeks	Indeks
483	SD00249.02.00	Indikator SDGs	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks yang mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuaapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK).	Klasifikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	1. 0 - 1,25 (Sangat permisif) 2. 1,26 - 2,5 (Permisif) 3. 2,51 - 3,75 (Anti korupsi)	Indeks	Indeks

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								4. 3,76 - 5 (Sangat anti korupsi)		
484	SD00250.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran dan Indikator : 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN - Indeks Perspektif Korupsi (IPK) = 5.0 - Opini BPK (WTP) : a) Pusat 100% b) Daerah 60% 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat - Integritas Pelayanan Publik a) Pusat 8,0 b) Daerah 8,0 - Peringkat Kemudahan Berusaha = 75 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi - Efektivitas Pemerintahan = 0,5 - Instansi Pemerintah Yang Akuntabel 80%	Klasifikasi Indeks Reformasi Birokrasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
485	SD00251.01.00	Indikator SDGs	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks yang menunjukkan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) tersebut.	Klasifikasi Indeks Risiko Bencana (IRB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
486	SD00251.02.00	Indikator SDGs	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian (indeks rawan bencana, BNPB, 2013). IRB terdiri	Klasifikasi Indeks Risiko Bencana (IRB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang berisiko tinggi.		dari 71 indikator yang dapat dilihat dari dokumen perangkat penilaian kapasitas daerah dari BNPB.				
487	SD00252.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Klasifikasi Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
488	SD01056.00.00	Indikator SDGs	15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Indeks tutupan hijau pegunungan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Indeks tutupan hijau pegunungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
489	SD01057.00.00	Indikator SDGs	2.c.1	Indikator anomali harga pangan.	Indikator anomali harga pangan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Indikator anomali harga pangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Indikator
490	SD00254.01.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Industri	Cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI)	Klasifikasi Industri	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
491	SD00254.01.00	Indikator SDGs	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkeb	Industri	Cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				unan dan industri.		ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI)				
492	SD00254.02.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Industri	Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri	Klasifikasi Industri	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
493	SD00254.02.00	Indikator SDGs	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Industri	Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
494	SD00255.00.00	Indikator SDGs	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Industri Kecil	Usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
495	SD00255.00.00	Indikator SDGs	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Industri Kecil	Usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
496	SD00251.01.00	Indikator SDGs	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Industri Manufaktur	Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya,	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).				
497	SD00251.01.00	Indikator SDGs	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Industri Manufaktur	Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
498	SD00251.01.00	Indikator SDGs	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Industri Manufaktur	Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
499	SD00251.02.00	Indikator SDGs	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Industri manufaktur	Transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
500	SD00251.02.00	Indikator SDGs	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Industri Manufaktur	Transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
501	SD00251.02.00	Indikator SDGs	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Industri Manufaktur	Transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
502	SD00252.00.00	Indikator SDGs	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Industri Pengolahan	Unit produksi yang menyangkut kegiatan ekonomi, produksi barang atau jasa, yang bertempat di suatu bangunan atau lokasi tertentu, keeping business records concerning struktur upah dan produksi, dan mempunyai satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atau menanggung resiko dari kegiatan tersebut.	KBLI	KBLI	Jumlah; Persen	Unit; Persentase
503	SD00253.01.00	Indikator SDGs	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Informasi	Hasil dari proses pengolahan data atau komunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui media komunikasi, seperti: TV, radio, surat kabar, dan lain-lain.	Klasifikasi Informasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi ; Persen
504	SD00253.01.00	Indikator SDGs	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang	Informasi	Hasil dari proses pengolahan data atau komunikasi antara satu orang dengan	Klasifikasi Informasi	Klasifikasi berdasarkan	Jenis; Persentase	Informasi ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		orang lain melalui media komunikasi, seperti: TV, radio, surat kabar, dan lain-lain.		analisis atau sesuai kebutuhan		
505	SD00253.01.00	Indikator SDGs	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Informasi	Hasil dari proses pengolahan data atau komunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui media komunikasi, seperti: TV, radio, surat kabar, dan lain-lain.	Klasifikasi Informasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi ; Persen
506	SD00253.02.00	Indikator SDGs	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.	Klasifikasi Informasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi ; Persen
507	SD00253.02.00	Indikator SDGs	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi	Klasifikasi Informasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.				
508	SD00253.02.00	Indikator SDGs	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.	Klasifikasi Informasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi ; Persen
509	SD00253.02.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.	Klasifikasi Informasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi ; Persen
510	SD00254.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	Klasifikasi Informasi publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
511	SD00254.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Informasi Publik	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	Klasifikasi Informasi Publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jenis; Persentase	Informasi ; Persen
512	SD00255.01.00	Indikator SDGs	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.	Klasifikasi Infrastruktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Infrastru ktur; Persen
513	SD00255.01.00	Indikator SDGs	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik	Klasifikasi Infrastruktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Infrastru ktur; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
514	SD00255.01.00	Indikator SDGs	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik	Klasifikasi Infrastruktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Infrastruktur; Persen
515	SD00255.01.00	Indikator SDGs	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik	Klasifikasi Infrastruktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Infrastruktur; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
516	SD00255.01.00	Indikator SDGs	7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik	Klasifikasi Infrastruktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Infrastruktur; Persen
517	SD00255.02.00	Indikator SDGs	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Infrastruktur	Prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.	Klasifikasi Infrastruktur	1. Infrastruktur transportasi 2. Infrastruktur jalan 3. Infrastruktur pengairan 4. Infrastruktur air minum 5. Infrastruktur air limbah 6. Infrastruktur telekomunikasi 7. Infrastruktur ketenagalistrikan 8. Infrastruktur minyak dan gas bumi 9. Infrastruktur	Jumlah; Persentase	Infrastruktur; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								lain yang tidak termasuk diatas		
518	SD00256.00.00	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Infrastruktur Kritis	Aset, sistem, maupun jaringan, berbentuk fisik maupun virtual yang sangat vital, dimana gangguan terhadapnya berpotensi mengancam keamanan, kestabilan perekonomian nasional, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau gabungan diantaranya.	Klasifikasi Infrastruktur Kritis	Sektor yang mengelola infrastruktur kritis seperti pertahanan keamanan, energi, transportasi, sistem keuangan, dan berbagai layanan publik lainnya.	Jumlah; Persentase	Infrastruktur; Persen
519	SD01058.00.00	Indikator SDGs	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Indikator insentif penghematan air telah tercapai melalui tersedianya regulasi di tingkat pusat atau daerah yang mengatur upaya penghematan air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.	Klasifikasi Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
520	SD00257.00.00	Indikator SDGs	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian	Upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).	Klasifikasi Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
521	SD01059.00.00	Indikator SDGs	3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 1000 penduduk
522	SD01060.00.00	Indikator SDGs	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode waktu yang sama kemudian dikali 100.000.	Klasifikasi Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
523	SD00258.00.00	Indikator SDGs	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Insidens Tuberkulosis (ITB)	Jumlah kasus TB baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk.	Klasifikasi Insidens Tuberkulosis (ITB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
524	SD00259.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan	Instalasi Pengelolaan	Instalasi pengelolaan lumpur tinja rumah tangga. Instalasi tempat mengolah lumpur	Klasifikasi Instalasi Pengelolaan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Lumpur Tinja (IPLT)	tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke lingkungan.	Lumpur Tinja (IPLT)	analisis atau sesuai kebutuhan		
525	SD00259.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Instalasi pengelolaan lumpur tinja rumah tangga. Instalasi tempat mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke lingkungan.	Klasifikasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
526	SD00260.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Instansi Daerah	Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.	Klasifikasi Instansi Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
527	SD00261.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	Instansi Pemerintah	Instansi pusat dan instansi daerah.	Klasifikasi Instansi Pemerintah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
528	SD00262.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Instansi Pusat	Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.	Klasifikasi Instansi Pusat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
529	SD00263.00.00	Indikator SDGs	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas	Keadaan tingkatan atau ukuran intensinya	Klasifikasi Intensitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
530	SD00264.00.00	Indikator SDGs	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas Energi Primer	Total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli	Klasifikasi Intensitas Energi Primer	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Setara Barel Minyak (SBM) per milliar rupiah
531	SD00265.01.00	Indikator SDGs	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Internet	Istilah umum yang dipakai untuk menunjuk Network komputer dan layanan servis atau sekitar 30 sampai 50 juta pemakai informasi termasuk e-mail, Gopher, FTP dan World Wide Web.	Klasifikasi Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
532	SD00265.02.00	Indikator SDGs	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Internet	Sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman world wide web (www), surat elektronik (email), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat game elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun selular.	Klasifikasi Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
533	SD00265.03.00	Indikator SDGs	17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	Internet	Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak diasumsikan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dan lainnya). Akses bisa melalui jaringan fixed maupun mobile.	Klasifikasi Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
534	SD00265.03.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Internet	Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak diasumsikan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dan	Klasifikasi Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						lainnya). Akses bisa melalui jaringan fixed maupun mobile.				
535	SD00265.03.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Internet	Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak diasumsikan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dan lainnya). Akses bisa melalui jaringan fixed maupun mobile.	Klasifikasi Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
536	SD00265.03.00	Indikator SDGs	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air,	Internet	Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak diasumsikan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dan lainnya). Akses bisa melalui jaringan fixed maupun mobile.	Klasifikasi Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).						
537	SD00265.04.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Internet	Sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global	Klasifikasi Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
538	SD00265.04.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Internet	Sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global	Klasifikasi Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
539	SD00266.01.00	Indikator SDGs	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Investasi	Menanamkan sejumlah uang atau membeli suatu aset dengan maksud memperoleh keuntungan.	Klasifikasi Investasi	1. Dalam Negeri 2.Luar Negeri 1. Langsung 2. Tidak Langsung	Nilai	Rupiah; USD

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
540	SD00266.03.00	Indikator Lainnya			Investasi	Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi Investasi	a. PMA b. PMDN	Nilai	Rupiah; USD
541	SD00266.02.00	Indikator Lainnya			Investasi	Biaya pembangunan fasilitas pemurnian dalam bentuk penawaran , kontrak dan estimasi biaya yang wajar meliputi : 1. Persiapan awal 2. Persiapan proyek 3. Pelaksanaan Proyek 4. Utilitas 5. Infrastruktur pendukung 6. Commisioning and start up	Klasifikasi Investasi	1. Rencana 2. Realisasi	Nilai	Rupiah; USD
542	SD00267.01.00	Indikator SDGs	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Investasi Asing Langsung	Investasi penduduk Indonesia pada suatu perusahaan di luar negeri, yang ditandai dengan kepemilikan modal saham (equity capital) minimal 10%.	Klasifikasi Investasi Asing Langsung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
543	SD00267.01.00	Indikator SDGs	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi	Investasi Asing Langsung	Investasi penduduk Indonesia pada suatu perusahaan di luar negeri, yang ditandai dengan kepemilikan modal saham (equity capital) minimal 10%.	Klasifikasi Investasi Asing Langsung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				investasi untuk negara-negara kurang berkembang.						
544	SD00267.02.00	Indikator SDGs	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Investasi Asing Langsung	Jika investor asing menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia.	Klasifikasi Investasi Asing Langsung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
545	SD00267.02.00	Indikator SDGs	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Investasi Asing Langsung	Jika investor asing menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia.	Klasifikasi Investasi Asing Langsung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
546	SD01061.00.00	Indikator SDGs	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI),	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) , bantuan pembangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	bantuan pembangun dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik		dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik			
547	SD00268.00.00	Indikator SDGs	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Investasi Dalam Negeri / Penanaman Investasi Dalam Negeri	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	Klasifikasi Investasi Dalam Negeri / Penanaman Investasi Dalam Negeri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
548	SD00269.00.00	Indikator SDGs	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Investasi Langsung	Menyajikan total aset dan total kewajiban, yang masing-masing dirinci menjadi modal saham (equity capital), laba ditanam kembali (reinvested earnings), dan modal lainnya (other capital).	Klasifikasi Investasi Langsung	Negara asal pemegang saham, Sektor ekonomi perusahaan investasi langsung, <i>Cross-tab</i> sektor ekonomi dan negara asal pemegang saham perusahaan investasi langsung	Jumlah	Rupiah; USD

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
549	SD00270.00.00	Indikator SDGs	7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Investasi Luar Negeri Langsung	Jika investor asing menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia	Klasifikasi Investasi Luar Negeri Langsung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
550	SD00271.00.00	Indikator SDGs	7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Investasi Luar Negeri/ Penanaman Modal Luar Negeri/ Penanam Modal Asing	Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi Investasi Luar Negeri/ Penanaman Modal Luar Negeri/ Penanam Modal Asing	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Penanaman Modal

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
551	SD00272.00.00	Indikator SDGs	7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Investasi/ Penanaman Modal	Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi Investasi/ Penanaman Modal	1. Penanaman modal dalam negeri 2. Penanaman modal luar negeri	Jumlah	Rupiah/ USD
552	SP00025.00.00	Indikator SP2020			Istri	Istri dari kepala keluarga.	Klasifikasi Istri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
553	SD00273.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Jabatan Fungsional Statistisi	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.	Klasifikasi Jabatan Fungsional Statistisi	1. Statistisi Terampil (Statistisi Pelaksana, Statistisi Pelaksanaan Lanjutan, Statistisi Penyelia) 2. Statistisi Ahli (Statistisi Pertama, Statistisi Muda, Statistisi Madya, Statistisi Utama)	Jumlah; presentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
554	SD00273.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lem baga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Jabatan Fungsional Statistisi	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.	Klasifikasi Jabatan Fungsional Statistisi	1. Statistisi Terampil (Statistisi Pelaksana, Statistisi Pelaksanaan Lanjutan, Statistisi Penyelia) 2. Statistisi Ahli (Statistisi Pertama, Statistisi Muda, Statistisi Madya, Statistisi Utama)	Jumlah; presentase	Orang; persen
555	SD00273.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lem baga.	Jabatan Fungsional Statistisi	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.	Klasifikasi Jabatan Fungsional Statistisi	1. Statistisi Terampil (Statistisi Pelaksana, Statistisi Pelaksanaan Lanjutan, Statistisi Penyelia) 2. Statistisi Ahli (Statistisi Pertama, Statistisi Muda, Statistisi Madya, Statistisi Utama)	Jumlah; presentase	Orang; persen
556	SD00274.00.00	Indikator SDGs	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Jabatan manager	Menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manajer Administrasi dan Komersial (kode 12);	Klasifikasi Jabatan manager	KBJI	Jumlah; presentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14).				
557	SD00275.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Jalan	Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	Klasifikasi Jalan	<p>Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:</p> <p>a. jalan nasional; b. jalan provinsi; c. jalan kabupaten; d. jalan kota; dan e. jalan desa.</p> <p>Jalan umum berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas :</p> <p>a. jalan bebas hambatan, b. jalan raya, c. jalan sedang, dan d. jalan kecil.</p>	Panjang; Persentase	Km; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
558	SD00276.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Jalan Nasional	Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional.	Klasifikasi Jalan Nasional	1. Jalan Arteri Primer 2. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi 3. Jalan tol 4. Jalan strategis nasional	Panjang; Persentase	Km; Persen
559	SD00278.00.00	Indikator SDGs	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jalan Rel	Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.	Klasifikasi Jalan Rel	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Persentase	Km; Persen
560	SD00277.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Jalan Tol	Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.	Klasifikasi Jalan Tol	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang; Persentase	Km; Persen
561	SD00279.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Jalur Kereta Api	Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.	Klasifikasi Jalur Kereta Api	1. Jalur Tunggal 2. Jalur Ganda	Panjang; Persentase	Km; Persen
562	SD00280.00.00	Indikator SDGs	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jalur Kereta Api	Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.	Klasifikasi Jalur Kereta Api	1. Jalur Tunggal 2. Jalur Ganda	Panjang; Persentase	Km; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
563	SD00281.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Jaminan Kesehatan	Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan meliputi JAMKESMAS/ JAMKESDA, Surat miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan BPJS kesehatan.	Klasifikasi Jaminan Kesehatan	1. JAMKESMAS/ JAMKESDA 2. Surat miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), 3. BPJS kesehatan	Jumlah; Persentase	Kegiatan /program; Persen
564	SD00281.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Jaminan Kesehatan	Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan meliputi JAMKESMAS/ JAMKESDA, Surat miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan BPJS kesehatan.	Klasifikasi Jaminan Kesehatan	1. JAMKESMAS/ JAMKESDA 2. Surat miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), 3. BPJS kesehatan	Jumlah; Persentase	Kegiatan /program; Persen
565	SD00282.00.00	Indikator SDGs	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap	Klasifikasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan /program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.				
566	SD00283.01.00	Indikator SDGs	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Sosial	Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.	Klasifikasi Jaminan Sosial	1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiun 5. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan /program; Persen
567	SD00283.02.00	Indikator SDGs	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Jaminan Sosial	Bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (<i>income support</i>) dan/atau penanggungian biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian. Jaminan sosial menggunakan prinsip asuransi sosial dengan kontribusi membayar premi.	Klasifikasi Jaminan Sosial	1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiun 5. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan /program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
568	SD00284.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.	Klasifikasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Jaminan Hari Tua 3. Jaminan Pensiun 4. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan /program; Persen
569	SD00284.00.00	Indikator SDGs	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,	Klasifikasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Jaminan Hari Tua 3. Jaminan Pensiun	Jumlah; Persentase	Kegiatan /program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.		4. Jaminan Kematian		
570	SD00284.00.00	Indikator SDGs	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor	Klasifikasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Jaminan Hari Tua 3. Jaminan Pensiun 4. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan /program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.				
571	SD00285.00.00	Indikator SDGs	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Jangkauan Penggunaan Kerangka Kerja	Indikator ini mengukur sejauh mana dan cara yang digunakan dalam kerangka kerja hasil-hasil yang dikembangkan oleh negara-negara berkembang, yang digunakan oleh mitra pembangunan terkait untuk merencanakan upaya kerjasama pembangunan dan menilai kinerjanya.	Klasifikasi Jangkauan Penggunaan Kerangka Kerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
572	SD01062.00.00	Indikator SDGs	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
573	SD00307.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk	Jaringan informasi terpadu yang dibentuk untuk menggabungkan informasi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, hingga kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.	Klasifikasi Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
574	SD00286.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Jaringan tulang punggung (<i>backbone</i>) telekomunikasi berbasis serat optik	Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya sehingga terbentuk konfigurasi ring.	Klasifikasi Jaringan tulang punggung (<i>backbone</i>) telekomunikasi berbasis serat optik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan; Persentase	Gbps (Gigabyte s per second); Persen
575	SD00287.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional	Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring.	Klasifikasi Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan; Persentase	Gbps (Gigabyte s per second); Persen
576	SD00288.00.00	Indikator SDGs	12.2.1	Jejak material (material footprint).	Jejak Material (Material Footprint)	Jumlah bahan utama yang dibutuhkan untuk melayani permintaan akhir suatu negara dan dapat diartikan sebagai indikator untuk standar materi hidup/tingkat kapitalisasi ekonomi.	Klasifikasi Jejak Material (Material Footprint)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	MF per kapita; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
577	SD00288.00.00	Indikator SDGs	8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan	Jejak Material (Material Footprint)	Jumlah bahan utama yang dibutuhkan untuk melayani permintaan akhir suatu negara dan dapat diartikan sebagai indikator untuk standar materi hidup/tingkat kapitalisasi ekonomi.	Klasifikasi Jejak Material (Material Footprint)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	MF per kapita; Persen
578	SD01063.00.00	Indikator SDGs	8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Material
579	SD00289.00.01	Indikator SDGs	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Jenis Ikan	segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	Klasifikasi Jenis Ikan	1. Ikan pelagis kecil; 2. Ikan pelagis besar; 3. Ikan demersal; 4. Ikan karang; 5. Udang; 6. lobster; 7. kepiting; 8. rajungan; 9. cumi-cumi 10. lainnya;	Volume; Persentase	Ton; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
580	SD00289.00.02	Indikator SDGs	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Jenis Ikan	segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	Klasifikasi Jenis Ikan	1. Ikan bersirip (pisces); 2. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea); 3. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca); 4. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata); 5. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata); 5. kodok dan sebangsanya (amphibia); 7. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia); 8. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);	Volume; Persentase	Ton; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								9. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan 10. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis- jenis tersebut di atas;		
581	SD00290.00.00	Indikator SDGs	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.				
582	SD00290.00.00	Indikator SDGs	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
583	SD00290.00.00	Indikator SDGs	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
584	SD00290.00.00	Indikator SDGs	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				berdasarkan umur dan jenis kelamin.						
585	SD00290.00.00	Indikator SDGs	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; persen
586	SD00290.00.00	Indikator SDGs	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; persen
587	SD00290.00.00	Indikator SDGs	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.						
588	SD00290.00.00	Indikator SDGs	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
589	SD00290.00.00	Indikator SDGs	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).						
590	SD00290.00.00	Indikator SP2020			Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah; persentase	Orang; persen
591	SD00291.00.00	Indikator SDGs	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Jenis Satwa Terancam Puna Prioritas	25 jenis satwa yaitu 1) Harimau Sumatra (<i>Panthera tigris sumatrae</i>); 2) Gajah Sumatra (<i>Elephas maximus sumatranus</i>); 3) Badak Jawa (<i>Rhinoceros sondaicus</i>); 4) Owa Jawa (<i>Hylobates moloch</i>); 5) Banteng (<i>Bos javanicus</i>); 6) Elang Jawa (<i>Spizaetus bartelsi</i>); 7) Jalak Bali (<i>Leucopsar rothchildi</i>); 8) Kakatua Kecil Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>); 9) Orangutan Kalimantan (<i>Pongo pygmaeus</i>), 10) Komodo (<i>Varanus komodoensis</i>); 11) Bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>); 12) Anoa (<i>Bubalus depressicornis</i> and <i>Bubalus quarlesi</i>); 13) Babirusa (<i>Babyrousa babyrussa</i>); 14) Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>); 15) Macan Tutul Jawa (<i>Panthera pardus melas</i>); 16) Rusa Bawean (<i>Axis kuhlii</i>); 17) Cenderawasih (<i>Macgregoria pulchra</i> , <i>Paradisaea raggiana</i> , <i>Paradisaea apoda</i> , <i>Cicinnurus regius</i> , <i>Seleucidis melanoleuca</i> , <i>Paradisaea rubra</i>); 18) Surili (<i>Presbytis fredericae</i> , <i>Presbytis</i>	Klasifikasi Jenis Satwa Terancam Puna Prioritas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ekor

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						comata); 19) Tarsius (<i>Tarsius fuscus</i>); 20) Monyet hitam Sulawesi (<i>Macaca nigra</i> , <i>Macaca maura</i>); 21) Julang sumba (<i>Rhyticeros everetii</i>); 22) Nuri kepala hitam (<i>Lorius domicella</i> , <i>Lorius lory</i>); 23) Penyu (<i>Chelonia mydas</i> , <i>Eretmochelys imbricata</i>); 24) Kanguru pohon (<i>Dendrolagus mbaiso</i>); 25) Celebuk Rinjani (<i>Otus jolanodea</i>).				
592	SD00292.00.00	Indikator SDGs	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Jenjang Pendidikan	Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.	Klasifikasi Jenjang Pendidikan	1. Jenjang pendidikan formal 2. Jenjang pendidikan nonformal	Persentase	Persen
593	SP00026.00.00	Indikator SP2020			Jorong/Korong/Kampung	Bagian dari wilayah Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.	Klasifikasi Jorong/Korong/Kampung	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Jorong/Korong/Kampung

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								analisis atau sesuai kebutuhan		
594	SD01064.00.00	Indikator SDGs	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)		swasta non profit, sponsor)			
595	SD01053.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki	Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi ke-1 ditambah banyaknya DAS yang meningkat mata airnya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS maupun Banyaknya DAS di Lintas Negara yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas negara	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	DAS

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara		(MoU) lintas Negara			
596	SD01065.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Klasifikasi Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	DAS
597	SD00305.00.00	Indikator SDGs	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	Penerimaan negara dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara.	Klasifikasi Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	1. Migas 2. Non migas	Jumlah	Juta USD
598	SD01066.00.00	Indikator SDGs	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Klasifikasi Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
599	SD01067.00.00	Indikator SDGs	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
600	SD01068.00.00	Indikator SDGs	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) berdasarkan okupasi.	Klasifikasi Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Fasilitas
601	SD01069.00.00	Indikator SDGs	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka	Total pendanaan untuk kegiatan KSST yang tercantum dalam pagu indikatif.	Klasifikasi Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					KSST Indonesia					
602	SD01070.00.00	Indikator SDGs	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah Kab/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah kabupaten/kota yang sudah memiliki minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas di kabupaten/kota tersebut yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Klasifikasi Jumlah Kab/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kabupaten/Kota
603	SD01071.00.00	Indikator SDGs	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Akumulasi jumlah kabupaten/kota yang berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi paska POPM Filariasis.	Klasifikasi Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
604	SD01072.00.00	Indikator SDGs	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satu tahun.	Klasifikasi Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	kabupaten/kota
605	SD01094.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun	Jumlah kabupaten/kota yang	Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	Klasifikasi Kabupaten/Kota yang terbangun	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Kabupaten/Kota

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota	infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	analisis atau sesuai kebutuhan		
606	SD01073.00.00	Indikator SDGs	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					12 bulan terakhir					
607	SD01074.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	Jumlah kawasan suaka alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan jumlah kawasan pelestarian alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan Jumlah taman buru dengan nilai indeks METT minimal 70% yang dinyatakan dengan satuan kawasan konservasi.	Klasifikasi Hutan Konservasi	1. Kawasan suaka alam (KSA) 2. Kawasan pelestarian alam (KPA) 3. Taman buru (TB)	Jumlah	Kawasan Konservasi
608	SD01075.00.00	Indikator SDGs	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Jumlah seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kebijakan
609	SD01076.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat	Jumlah kepemilikan sertifikat	Jumlah PPID yang telah mengikuti pelatihan dan telah lulus sertifikasi PPID	Klasifikasi Jumlah kepemilikan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Pejabat

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	analisis atau sesuai kebutuhan		
610	SD01077.00.00	Indikator SDGs	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
611	SD01079.00.00	Indikator SDGs	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola sesuai peraturan perundangan	Jumlah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan	Klasifikasi Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola sesuai peraturan perundangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton
612	SD01080.00.00	Indikator SDGs	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu ditambah dengan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).	Klasifikasi Kawasan konservasi perairan	1. Dikelola Pusat 2. Dikelola Daerah	Luas	Hektar (Ha)
613	SD01081.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menghimpun metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus.	Klasifikasi Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Metadata
614	SD01082.00.00	Indikator SDGs	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita)	Jumlah Minuman	Perbandingan antara jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang dikonsumsi	Klasifikasi Jumlah	Klasifikasi berdasarkan	Volume/jumlah	Liter/kapita

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Keras/Beralkohol (Liter per Kapita 15 Tahun Keatas) yang dikonsumsi oleh Penduduk Umur ≥15 tahun	penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥15 tahun, dinyatakan dalam liter per kapita.	Minuman Keras/Beralkohol (Liter per Kapita 15 Tahun Keatas) yang dikonsumsi oleh Penduduk Umur ≥15 tahun	analisis atau sesuai kebutuhan		
615	SD01083.00.00	Indikator SDGs	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
616	SD01084.00.00	Indikator SDGs	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Untuk Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis didefinisikan sebagai jumlah orang di kabupaten/kota endemis yang telah melaksanakan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut dengan cakupan POPM Filariasis minimal 85% dari jumlah penduduk di kabupaten/kota atau 65% dari jumlah sasaran POPM kabupaten/kota, kemudian	Klasifikasi Penyakit tropis yang terabaikan	1. Filariasis 2. Kusta	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dilakukan survei darah jari dan hasilnya angka mikrofilarianya < 1%. Untuk proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati didefinisikan sebagai jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati.				
617	SD01085.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Jumlah pejabat fungsional statistisi Kementerian/ Lembaga ditambah dengan jumlah pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Klasifikasi Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
618	SD01086.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
619	SD00334.00.00	Indikator SDGs	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Jumlah penduduk yang dicakup asuransi	Yang termasuk dalam jaminan kesehatan melalui BPJS: 1. Pekerja	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				masyarakat per 1000 penduduk.	atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk		kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	penerima upah 2. Pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja 3. Penerima bantuan iuran.		
620	SD01087.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website adalah dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pengunjung; Persen
621	SD01088.00.00	Indikator SDGs	9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Jumlah	Penumpang; Metrik ton
622	SD01089.00.00	Indikator SDGs	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang	Jumlah absolut pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan NAPZA yang datang dan tercatat menjalani terapi dan rehabilitasi NAPZA di layanan rehabilitasi medis yang telah ditetapkan menjadi IPWL, baik milik sektor kesehatan, BNN, masyarakat maupun swasta.	Klasifikasi Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					mengakses layanan rehabilitasi medis		layanan rehabilitasi medis			
623	SD01090.00.00	Indikator SDGs	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahaan
624	SD01091.00.00	Indikator SDGs	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Klasifikasi Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahaan
625	SD01092.00.00	Indikator SDGs	12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pihak

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				diperlukan oleh masing-masing.	kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing		kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing			
626	SD01093.00.00	Indikator SDGs	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Jumlah kumulatif provinsi yang telah mencapai eliminasi Kusta (<1 kasus/10.000 penduduk) pada tahun tertentu.	Klasifikasi Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Provinsi; Persen
627	SD00345.00.00	Indikator SDGs	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan	Delapan puluh persen dari jumlah tangkapan lestari (Maximum Sustainable Yield-MSY).	Klasifikasi Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; nilai	Kg; rupiah
628	SD00350.00.00	Indikator SDGs	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkoba dan alkohol, yang mengikuti layanan pascarehabilitasi, setelah selesai menjalani program rehabilitasi.	Klasifikasi Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
629	SD00351.00.00	Indikator SDGs	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan	Jurnalis	Orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam surat kabar dan sebagainya; wartawan.	Klasifikasi Jurnalis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.						
630	SP00028.00.00	Indikator SP2020			Jurong	Bagian wilayah dalam Gampong (Desa) yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Gampong di wilayah Aceh.	Klasifikasi Jurong	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Jurong
631	SD00352.01.00	Indikator SDGs	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
632	SD00352.01.00	Indikator SDGs	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
633	SD00352.01.00	Indikator SDGs	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).						
634	SD00352.01.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
635	SD00352.01.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
636	SD00352.01.00	Indikator SDGs	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
637	SD00352.01.00	Indikator SDGs	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan	Kabupaten	Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).						
638	SD00352.02.00	Indikator SDGs	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
639	SD00352.02.00	Indikator SDGs	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
640	SD00352.02.00	Indikator SDGs	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
641	SD00352.02.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
642	SD00352.02.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
643	SD00352.02.00	Indikator SDGs	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
644	SD00352.02.00	Indikator SDGs	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan	Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Lumpur Tinja (IPLT).						
645	SD00352.02.00	Indikator SP2020			Kabupaten	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten.	Klasifikasi Kabupaten	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
646	SD00353.00.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Kabupaten 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)	Wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dimaksud meliputi 26 provinsi, 142 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut: 1. Wilayah terluar yang terdapat di 9 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 20. 2. Wilayah terdepan yang terdapat di 8 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 23. 3. Wilayah tertinggal yang terdapat di 22 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 99.	Klasifikasi Kabupaten 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen
647	SD00353.00.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kabupaten 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)	Wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dimaksud meliputi 26 provinsi, 142 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut: 1. Wilayah terluar yang terdapat di 9 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 20. 2. Wilayah terdepan yang terdapat di 8 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 23. 3. Wilayah tertinggal yang terdapat di 22	Klasifikasi Kabupaten 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kabupaten; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 99.				
648	SD00308.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT.	Klasifikasi Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	kabupaten/kota
649	SD00354.00.00	Indikator SDGs	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Kalori	Energi yang diperoleh dari makanan dan minuman serta penggunaan energi dalam aktivitas fisik.	Klasifikasi Kalori	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kkal; persen
650	SD00355.00.00	Indikator SDGs	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Kantor Bank	Seluruh jaringan/unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, Payment Point, Agency, dan Deposit Taking Company (DTC). Jaringan kantor adalah Jaringan	Klasifikasi Kantor Bank	1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang 3. Kantor Cabang Pembantu 4. Kantor Kas 5. Unit Pembantu	Jumlah; Persentase	Kantor; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah.				
651	SD01095.00.00	Indikator SDGs	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jaringan kantor dengan jumlah orang dewasa dikalikan 100.000. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jumlah ATM dikalikan dengan 100.000 dibagi dengan jumlah orang dewasa	Klasifikasi Kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kantor bank/atm
652	SD00356.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(g)	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Upaya menjamin ketahanan air melalui upaya harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab; peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	Klasifikasi Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
653	SD01096.00.00	Indikator SDGs	3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Peraturan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
654	SD00357.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kapasitas prasarana air baku	Kapasitas debit rata-rata prasarana air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, serta pulau-pulau.	Klasifikasi Kapasitas prasarana air baku	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
655	SD01097.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Jumlah kapasitas prasarana air baku rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau kecil dibagi dengan banyaknya sektor yang terlayani (4 sektor) dinyatakan dengan satuan meter kubik per detik (m ³ /dtk)	Klasifikasi Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	m ³ /dtk
656	SD00358.00.00	Indikator SDGs	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Kapasitas Statistik	Kemampuan suatu negara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melakukan diseminasi terhadap data berkualitas tinggi mengenai populasi dan ekonominya (a nation's ability to collect, analyze, and disseminate high-quality data about its population and economy).	Klasifikasi Kapasitas Statistik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
657	SD00359.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Karakteristik Daerah	<p>Terdiri dari indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Desa Gempa Bumi: Jumlah desa dengan keberadaan gempa bumi dan yang mengalami gempa bumi selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100% -Persentase Desa Tanah Longsor: Jumlah desa dengan keberadaan tanah longsor dan yang mengalami tanah longsor selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100% -Persentase Desa Banjir: Jumlah desa yang mengalami banjir selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%. - Persentase Desa Bencana Lainnya: Jumlah desa yang mengalami bencana lainnya selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100% - Persentase Desa di Kawasan Hutan Lindung: Jumlah desa yang memiliki kawasan hutan lindung di bagi dengan 100% - Persentase Desa Berlahan Kritis: Jumlah desa yang memiliki lahan kritis di bagi dengan 100%. - Persentase Desa Konflik satu tahun terakhir: Jumlah desa yang mengalami konflik selama 1 tahun terakhir di bagi dengan 100% 	Klasifikasi Karakteristik Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
658	SD00888.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Karakteristik Daerah Tertinggal	<p>Kriteria karakteristik daerah tertinggal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah desa tertinggal - daerah rawan pangan - daerah perbatasan 	Klasifikasi Karakteristik Daerah Tertinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						- daerah rawan bencana - daerah pasca konflik - daerah pulau kecil dan terluar.				
659	SD00360.00.00	Indikator SDGs	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Karantina	Tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi Karantina	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Karantina
660	SD00361.00.00	Indikator SDGs	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Karantina
661	SD00362.00.00	Indikator SDGs	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Karantina Tumbuhan	Tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.	Klasifikasi Karantina Tumbuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Karantina
662	SP00029.00.00	Indikator SP2020			Kartu Keluarga (KK)	Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga	Klasifikasi Kartu Keluarga (KK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	KK

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
663	SP00030.00.00	Indikator SP2020			Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana	Klasifikasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	KTP
664	SD00363.00.00	Indikator SDGs	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus Kejahatan Pembunuhan	Kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua – Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.	Klasifikasi Kasus Kejahatan Pembunuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
665	SD01098.00.00	Indikator SDGs	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi Kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
666	SD00364.00.00	Indikator SDGs	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus TB	Pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB.	Klasifikasi Kasus TB	Berdasarkan diagnosa: 1. TB aktif 2. TB laten Berdasarkan organ yang diserang: 1. TB Paru 2. TB Ekstra paru	Jumlah; persentase	Orang; persen
667	SD00365.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Kategori Kondisi Baik dan Sedang	Kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka International Roughness Index (IRI),	Klasifikasi Kategori Kondisi Baik dan Sedang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang.				
668	SD00366.00.00	Indikator SDGs	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Kawasan	Bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.	Klasifikasi Kawasan	1. Kawasan lindung 2. Kawasan budi daya 3. Kawasan perdesaan 4. Kawasan agropolitan 5. Kawasan perkotaan 6. Kawasan metropolitan 7. Kawasan megapolitan 8. Kawasan strategis nasional 9. Kawasan strategis provinsi 10. Kawasan strategis kabupaten/kota	Luas	Km ²
669	SD00367.00.00	Indikator SDGs	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Kawasan Hutan	Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.	Klasifikasi Kawasan Hutan	1. Hutan Negara 2. Hutan Adat 3. Hutan Hak 4. Hutan Produksi 5. Hutan Lindung 6. Hutan Konservasi	Luas	Km ²

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
670	SD00367.00.00	Indikator SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Kawasan Hutan	Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.	Klasifikasi Kawasan Hutan	1. Hutan Negara 2. Hutan Adat 3. Hutan Hak 4. Hutan Produksi 5. Hutan Lindung 6. Hutan Konservasi	Luas	Km ²
671	SD00368.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Kawasan Hutan Konservasi	Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.	Klasifikasi Kawasan Hutan Konservasi	1. Kawasan suaka alam (KSA) 2. Kawasan pelestarian alam (KPA) 3. Taman buru (TB)	Luas	Km ²
672	SD01099.00.00	Indikator SDGs	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
673	SD00369.00.00	Indikator SDGs	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Kawasan konservasi perairan	Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.	Klasifikasi Kawasan konservasi perairan	1. Dikelola Pusat 2. Dikelola Daerah	Luas	Km ²
674	SD00370.00.00	Indikator SDGs	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan	Kawasan Lindung	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.	Klasifikasi Kawasan Lindung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.						
675	SD00370.00.00	Indikator SDGs	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	Kawasan Lindung	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.	Klasifikasi Kawasan Lindung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
676	SD00371.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Kawasan Metropolitan	Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa.	Klasifikasi Kawasan Metropolitan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
677	SD00371.00.00	Indikator SDGs	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Kawasan Metropolitan	Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa.	Klasifikasi Kawasan Metropolitan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
678	SD00371.00.00	Indikator SDGs	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota	Kawasan Metropolitan	Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang	Klasifikasi Kawasan Metropolitan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				besar, kota sedang dan kota kecil.		dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa.				
679	SD00371.00.00	Indikator SDGs	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Kawasan Metropolitan	Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa.	Klasifikasi Kawasan Metropolitan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
680	SD00372.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Kawasan Pelestarian Alam	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	Klasifikasi Kawasan Pelestarian Alam	1. Taman Nasional (TN) 2. Taman Hutan Raya (THR) 3. Taman Wisata Alam (TWA)	Luas	Km ²
681	SD00372.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Kawasan Pelestarian Alam	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	Klasifikasi Kawasan Pelestarian Alam	1. Taman Nasional (TN) 2. Taman Hutan Raya (THR) 3. Taman Wisata Alam (TWA)	Luas	Km ²
682	SD00373.00.00	Indikator SDGs	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang	Kawasan Perdesaan	Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan	Klasifikasi Kawasan Perdesaan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.		sebagai tempat permukiman perdesaan, kelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.		analisis atau sesuai kebutuhan		
683	SD00374.00.00	Indikator SDGs	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Kawasan Perkotaan Besar	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang.	Klasifikasi Kawasan Perkotaan Besar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
684	SD00374.00.00	Indikator SDGs	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Kawasan Perkotaan Besar	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang.	Klasifikasi Kawasan Perkotaan Besar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
685	SD00375.00.00	Indikator SDGs	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Kawasan Perkotaan Kecil	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling banyak 100.000 (seratus ribu) orang	Klasifikasi Kawasan Perkotaan Kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
686	SD01100.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan	Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kawasan perkotaan.	Klasifikasi Kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kawasan ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					perkotaan (SPP)					
687	SD00376.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Kawasan Perkotaan Sedang	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.	Klasifikasi Kawasan Perkotaan Sedang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
688	SD00376.00.00	Indikator SDGs	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Kawasan Perkotaan Sedang	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.	Klasifikasi Kawasan Perkotaan Sedang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
689	SD00376.00.00	Indikator SDGs	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Kawasan Perkotaan Sedang	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.	Klasifikasi Kawasan Perkotaan Sedang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
690	SD00376.00.00	Indikator SDGs	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Kawasan Perkotaan Sedang	Kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.	Klasifikasi Kawasan Perkotaan Sedang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
691	SD00377.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang	Kawasan Suaka Alam	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan	Klasifikasi Kawasan Suaka Alam	1. Cagar Alam (CA)	Luas	Km ²

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dipulihkan kondisi ekosistemnya.		keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.		2. Suaka Margasatwa (SM)		
692	SD00377.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Kawasan Suaka Alam	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.	Klasifikasi Kawasan Suaka Alam	1. Cagar Alam (CA) 2. Suaka Margasatwa (SM)	Luas	Km ²
693	SD00378.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Kawasan Taman Buru	Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.	Klasifikasi Kawasan Taman Buru	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
694	SD00378.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Kawasan Taman Buru	Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.	Klasifikasi Kawasan Taman Buru	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Km ²
695	SD00379.01.00	Indikator SDGs	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Kawin	Status dari seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.	Klasifikasi Kawin	1. Kawin Adat 2. Kawin Agama 3. Kawin Negara 4. Hidup Bersama	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
696	SD00379.01.00	Indikator SDGs	3.7.1*	Proporsi perempuan usia	Kawin	Status dari seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri	Klasifikasi Kawin	1. Kawin Adat 2. Kawin Agama	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.		3. Kawin Negara 4. Hidup Bersama		
697	SD00379.01.00	Indikator SDGs	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Kawin	Status dari seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.	Klasifikasi Kawin	1. Kawin Adat 2. Kawin Agama 3. Kawin Negara 4. Hidup Bersama	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
698	SD00379.02.00	Indikator SP2020			Kawin	Status mempunyai istri bagi laki-laki atau mempunyai suami bagi perempuan, baik tinggal bersama maupun terpisah, termasuk mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), telah hidup bersama, atau oleh masyarakat dianggap sebagai suami-istri.	Klasifikasi Kawin	1. Kawin Adat 2. Kawin Agama 3. Kawin Negara 4. Hidup Bersama	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
699	SD00380.00.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Keanekaragaman Ekosistem	Keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya.	Klasifikasi Keanekaragaman Ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
700	SD00381.00.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Keanekaragaman Genetika	Keanekaragaman individu di dalam suatu jenis.	Klasifikasi Keanekaragaman Genetika	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
701	SD00382.01.00	Indikator SDGs	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
702	SD00382.02.00	Indikator SDGs	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
703	SD00382.02.00	Indikator SDGs	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
704	SD00382.02.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
705	SD00382.02.00	Indikator SDGs	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
706	SD00382.02.00	Indikator SDGs	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
707	SD00382.03.00	Indikator SDGs	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Keanekaragaman Hayati	Semua makhluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
708	SD00382.03.00	Indikator SDGs	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan	Keanekaragaman Hayati	Semua makhluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2.	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dalam kawasan lindung.				Keanekaragaman hayati perairan		
709	SD00382.03.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Keanekaragaman Hayati	Semua makhluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
710	SD00382.03.00	Indikator SDGs	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Keanekaragaman Hayati	Semua makhluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen
711	SD00382.03.00	Indikator SDGs	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Keanekaragaman Hayati	Semua makhluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba.	Klasifikasi Keanekaragaman Hayati	1. Keanekaragaman hayati daratan 2. Keanekaragaman hayati perairan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
712	SD00383.00.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Keaneragaman Jenis	Keaneragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan.	Klasifikasi Keaneragaman Jenis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
713	SD00384.00.00	Indikator SDGs	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Keasaman Laut	Ketika CO ₂ dilepaskan ke atmosfer larut dalam air laut sehingga beberapa perubahan kimia terjadi pada air laut.	Klasifikasi Keasaman Laut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
714	SD00385.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan Berkeyakinan	Kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan;	Klasifikasi Kebebasan Berkeyakinan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
715	SD00385.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan berkeyakinan	Kebebasan individu untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan;	Klasifikasi Kebebasan berkeyakinan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
716	SD00387.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan Berkumpul	hak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan mereka.	Klasifikasi Kebebasan Berkumpul	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
717	SD00388.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan Berpendapat	Kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya dan pembatasan.	Klasifikasi Kebebasan Berpendapat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
718	SD00388.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan Berpendapat	Kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis dan pembatasan.	Klasifikasi Kebebasan Berpendapat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
719	SD00390.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan Berserikat	Hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela.	Klasifikasi Kebebasan Berserikat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
720	SD00391.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan dari Diskriminasi	Kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warganegara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana pembedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.	Klasifikasi Kebebasan dari Diskriminasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
721	SD00391.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan dari Diskriminasi	Kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warganegara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana pembedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.	Klasifikasi Kebebasan dari Diskriminasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
722	SD00392.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan Menjalankan Aturan Agama	Kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang	Klasifikasi Kebebasan Menjalankan Aturan Agama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan.				
723	SD00393.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kebebasan Sipil	Diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut: 1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2. Kebebasan Berpendapat 3. Kebebasan Berkeyakinan 4. Kebebasan dari Diskriminasi	Klasifikasi Kebebasan Sipil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
724	SD00394.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Kebijakan	Serangkaian ide atau rencana apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu yang telah disetujui secara resmi oleh sekelompok orang, organisasi bisnis, pemerintah, atau partai politik.	Klasifikasi Kebijakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kebijakan; Persen
725	SD00394.00.00	Indikator SDGs	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Kebijakan	Serangkaian ide atau rencana apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu yang telah disetujui secara resmi oleh sekelompok orang, organisasi bisnis, pemerintah, atau partai politik.	Klasifikasi Kebijakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kebijakan; Persen
726	SD00395.00.00	Indikator SDGs	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Kebijakan Migran	Sejauh mana migran memiliki kesamaan dalam akses ke layanan, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, jaminan sosial dan manfaat kesejahteraan.	Klasifikasi Kebijakan Migran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
727	SD00396.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan yang Diskriminatif	Kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.	Klasifikasi Kebijakan yang Diskriminatif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kebijakan; Persen
728	SD00396.00.00	Indikator SDGs	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan yang Diskriminatif	Kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.	Klasifikasi Kebijakan yang Diskriminatif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kebijakan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
729	SD01101.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi Kebijakan yang Diskriminatif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kebijakan; Persen
730	SD01102.00.00	Indikator SDGs	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Jumlah peraturan/kebijakan responsif gender yang harmonis baik antarperaturan horizontal maupun antar peraturan vertikal	Klasifikasi Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peraturan; Persen
731	SP00031.00.00	Indikator SP2020			Kecamatan	Bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.	Klasifikasi Kecamatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kecamatan
732	SD00397.00.00	Indikator SDGs	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Kecelakaan Kerja	kejadian yang tidak terduga dan tidak direncanakan, termasuk tindakan kekerasan, yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan yang mengakibatkan satu atau lebih pekerja mengalami cedera, penyakit atau kematian. Kecelakaan kerja harus dipertimbangkan kecelakaan perjalanan, transportasi atau lalu lintas di mana pekerja terluka dan yang timbul dari atau dalam perjalanan	Klasifikasi Kecelakaan Kerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kerja; yaitu, saat terlibat dalam ekonomi aktivitas, atau di tempat kerja, atau menjalankan bisnis majikan.				
733	SD00398.00.00	Indikator SDGs	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Kecelakaan Kerja Fatal	Cedera akibat kerja yang fatal: cedera akibat pekerjaan yang menyebabkan kematian dalam waktu satu tahun sejak kecelakaan kerja.	Klasifikasi Kecelakaan Kerja Fatal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen
734	SD00399.00.00	Indikator SDGs	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Kecelakaan Kerja Non-Fatal	Cedera non fatal akan menyebabkan hilangnya hari kerja.	Klasifikasi Kecelakaan Kerja Non-Fatal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen
735	SD00400.00.00	Indikator SDGs	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Kecelakaan Lalu Lintas	Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.	Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen
736	SD00401.00.00	Indikator SDGs	3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan	Klasifikasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kejadian; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.				
737	SD01103.00.00	Indikator SDGs	17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.	Kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular tahun berjalan.	Klasifikasi Kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
738	SD00402.00.00	Indikator SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Kegiatan yang dianggap melakukan Illegal Fishing	<p>1. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut.</p> <p>3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.</p>	Klasifikasi Kegiatan yang dianggap melakukan Illegal Fishing	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
739	SD01104.00.00	Indikator SDGs	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang	Jumlah kasus malaria positif dibagi jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama dikali 1.000 penduduk.	Klasifikasi Kejadian Malaria per 1000 orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 1000 penduduk
740	SD01105.00.00	Indikator SDGs	3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang.	Kejadian TB per 1000 orang	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Kejadian TB per 1000 orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 1000 penduduk
741	SD00403.00.00	Indikator SDGs	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Kejahatan	Suatu tindakan atau aktivitas yang melanggar hukum, atau aktivitas ilegal pada umumnya.	Klasifikasi Kejahatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
742	SD00404.01.00	Indikator SDGs	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Kejahatan Kekerasan	Tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.	Klasifikasi Kejahatan Kekerasan	1. Pencurian 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Penganiayaan 4. Pelecehan seksual 5. Penculikan 6. Pemerasan 7. Lainnya	Jumlah; persentase	Kasus; persen
743	SD00404.01.00	Indikator SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Kejahatan Kekerasan	Tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan,	Klasifikasi Kejahatan Kekerasan	1. Pencurian 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Penganiayaan 4. Pelecehan seksual	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.		5. Penculikan 6. Pemerasan 7. Lainnya		
744	SD00404.02.00	Indikator SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kejahatan kekerasan	Semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).	Klasifikasi Kejahatan kekerasan	1. Pencurian 2. Pencurian dengan kekerasan 3. Penganiayaan 4. Pelecehan seksual 5. Penculikan 6. Pemerasan 7. Lainnya	Jumlah; persentase	Kasus; persen
745	SD00405.01.00	Indikator SDGs	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan	Penggunaan kekuatan fisik yang disengaja, untuk mengancam diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok atau komunitas, yang dapat mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, terhambatnya pertumbuhan atau kecacatan	Klasifikasi Kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
746	SD00405.02.00	Indikator SDGs	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,	Klasifikasi Kekerasan	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				atau seksual dalam 12 bulan terakhir.		atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum				
747	SD00405.02.00	Indikator SDGs	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	Klasifikasi Kekerasan	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
748	SD00405.02.00	Indikator SDGs	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	Klasifikasi Kekerasan	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
749	SD00405.02.00	Indikator SDGs	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	Klasifikasi Kekerasan	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dalam 12 bulan terakhir.						
750	SD00405.02.00	Indikator SDGs	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	Klasifikasi Kekerasan	1. Kekerasan Seksual 2. Kekerasan Fisik 3. Kekerasan Emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
751	SD00405.02.00	Indikator SDGs	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	Klasifikasi Kekerasan	1. Kekerasan Seksual 2. Kekerasan Fisik 3. Kekerasan Emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
752	SD00405.02.00	Indikator SDGs	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	Klasifikasi Kekerasan	1. Kekerasan Seksual 2. Kekerasan Fisik 3. Kekerasan Emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
753	SD00406.00.00	Indikator SDGs	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Emosional	Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan	Klasifikasi Kekerasan Emosional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
754	SD00406.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kekerasan Emosional	Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan.	Klasifikasi Kekerasan Emosional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
755	SD00406.00.00	Indikator SDGs	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Emosional	Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan	Klasifikasi Kekerasan Emosional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen
756	SD00406.00.00	Indikator SDGs	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Kekerasan Emosional	Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan	Klasifikasi Kekerasan Emosional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
757	SD00407.00.00	Indikator SDGs	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Fisik	Ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	Klasifikasi Kekerasan Fisik	1. Membunuh 2. Menonjok 3. Menendang 4. Mencambuk atau memukul dengan benda 5. Mencekik 6. Membekap 7. Mencoba menenggelamkan 8. Membakar dengan sengaja 9. Menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	Jumlah; persentase	Kasus; persen
758	SD00407.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kekerasan Fisik	Ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain.	Klasifikasi Kekerasan Fisik	1. Membunuh 2. Menonjok 3. Menendang 4. Mencambuk atau memukul dengan benda 5. Mencekik 6. Membekap 7. Mencoba menenggelamkan 8. Membakar dengan sengaja 9. Menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
759	SD00407.00.00	Indikator SDGs	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Fisik	Ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	Klasifikasi Kekerasan Fisik	1. Membunuh 2. Menonjok 3. Menendang 4. Mencambuk atau memukul dengan benda 5. Mencekik 6. Membekap 7. Mencoba menenggelamkan 8. Membakar dengan sengaja 9. Menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	Jumlah; persentase	Kasus; persen
760	SD00407.00.00	Indikator SDGs	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Kekerasan Fisik	Ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	Klasifikasi Kekerasan Fisik	1. Membunuh 2. Menonjok 3. Menendang 4. Mencambuk atau memukul dengan benda 5. Mencekik 6. Membekap 7. Mencoba menenggelamkan 8. Membakar dengan sengaja 9. Menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
761	SD00408.00.00	Indikator SDGs	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll. Kekerasan seksual diukur dengan: 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.	Klasifikasi Kekerasan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
762	SD00408.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kekerasan Seksual	<p>Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.</p> <p>Kekerasan seksual diukur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks. 	Klasifikasi Kekerasan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
763	SD00408.00.00	Indikator SDGs	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kekerasan Seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll. Kekerasan seksual diukur dengan: 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.	Klasifikasi Kekerasan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
764	SD00408.00.00	Indikator SDGs	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kekerasan Seksual	<p>Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.</p> <p>Kekerasan seksual diukur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks. 	Klasifikasi Kekerasan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
765	SD00408.00.00	Indikator SDGs	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Seksual	<p>Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.</p> <p>Kekerasan seksual diukur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks. 	Klasifikasi Kekerasan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
766	SD00408.00.00	Indikator SDGs	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Kekerasan Seksual	<p>Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.</p> <p>Kekerasan seksual diukur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks. 	Klasifikasi Kekerasan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
767	SD00408.00.00	Indikator SDGs	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Seksual	<p>Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.</p> <p>Kekerasan seksual diukur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks. 	Klasifikasi Kekerasan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kasus; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
768	SD00409.01.00	Indikator SDGs	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Terhadap Anak	Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.	Klasifikasi Kekerasan Terhadap Anak	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
769	SD00409.02.00	Indikator SDGs	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Kekerasan Terhadap Anak	Semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.	Klasifikasi Kekerasan Terhadap Anak	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
770	SD00409.03.00	Indikator SDGs	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Kekerasan Terhadap Anak	Tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabaian terhadap anak.	Klasifikasi Kekerasan Terhadap Anak	1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional	Jumlah; persentase	Kasus; persen
771	SD00410.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama	Kekerasan Terhadap Perempuan	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,	Klasifikasi Kekerasan Terhadap Perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Orang; Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kekerasan terhadap perempuan.		<p>baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.</p> <p>Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:</p> <p>a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;</p> <p>b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;</p> <p>c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.</p> <p>Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.</p>				

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
772	SD00410.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Kekerasan Terhadap Perempuan	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut: a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan	Klasifikasi Kekerasan Terhadap Perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Orang; Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						<p>psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.</p> <p>Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.</p>				

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
773	SD00410.00.00	Indikator SDGs	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Terhadap Perempuan	<p>Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.</p> <p>Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:</p> <p>a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;</p> <p>b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;</p> <p>c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan</p>	Klasifikasi Kekerasan Terhadap Perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Orang; Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						<p>psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.</p> <p>Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.</p>				

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
774	SD00410.00.00	Indikator SDGs	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan Terhadap Perempuan	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut: a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan	Klasifikasi Kekerasan Terhadap Perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Orang; Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						<p>psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.</p> <p>Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.</p>				

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
775	SD00410.00.00	Indikator SDGs	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Kekerasan Terhadap Perempuan	<p>Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.</p> <p>Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:</p> <p>a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;</p> <p>b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;</p> <p>c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan</p>	Klasifikasi Kekerasan Terhadap Perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Orang; Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.				
776	SD00411.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Kekuasaan Kehakiman	Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.	Klasifikasi Kekuasaan Kehakiman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
777	SD00412.00.00	Indikator SDGs	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Kekurangan gizi (underweight)	Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/ atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U).	Klasifikasi Kekurangan gizi (underweight)	1. Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO 2. Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO	Baku WHO	SD
778	SD00413.00.00	Indikator SDGs	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Kelahiran	Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.	Klasifikasi Kelahiran	1. Lahir Hidup 2. Lahir Mati	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/Kelahiran/Orang
779	SD00413.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kelahiran	Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.	Klasifikasi Kelahiran	1. Lahir Hidup 2. Lahir Mati	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/Kelahiran/Orang
780	SD00413.00.00	Indikator SDGs	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan	Kelahiran	Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang	Klasifikasi Kelahiran	1. Lahir Hidup 2. Lahir Mati	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/K

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.				elahiran/ Orang
781	SD00413.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Kelahiran	Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.	Klasifikasi Kelahiran	1. Lahir Hidup 2. Lahir Mati	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/ elahiran/ Orang
782	SD00414.00.00	Indikator SDGs	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Kelahiran Hidup	Anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis.	Klasifikasi Kelahiran Hidup	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kasus/ elahiran/ Orang
783	SD00415.00.00	Indikator SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Kelautan	Hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Klasifikasi Kelautan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
784	SD00415.00.00	Indikator SDGs	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Kelautan	Hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Klasifikasi Kelautan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
785	SD00416.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Pokdakan	Badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	Klasifikasi Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Pokdakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
786	SD00417.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Kelompok Usaha Bersama Kecil (KUB)	Badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	Klasifikasi Kelompok Usaha Bersama Kecil (KUB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok
787	SD00418.01.00	Indikator SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Keluarga	Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.	Klasifikasi Keluarga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Keluarga; Persen
788	SD00418.02.00	Indikator SP2020			Keluarga	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam KK.	Klasifikasi Keluarga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Keluarga; Persen
789	SD00419.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB)	Keluarga berencana (KB)	Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan,	Klasifikasi Keluarga berencana (KB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Keluarga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang tidak terpenuhi).		mengatur interval antar kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.				
790	SD00309.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Keluarga miskin dan rentan (40% berpendapatan terendah) yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial.	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah	Keluarga
791	SD00420.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN	Keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.	Klasifikasi Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; keluarga
792	SD00421.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Keluarga Pengguna Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN, dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.	Klasifikasi Keluarga Pengguna Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; keluarga
793	SD00422.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang	Kelurahan	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan	Klasifikasi Kelurahan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		analisis atau sesuai kebutuhan		
794	SD00422.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kelurahan	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi Kelurahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen
795	SD00422.00.00	Indikator SP2020			Kelurahan	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi Kelurahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Desa; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
796	SD01106.00.00	Indikator SDGs	14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing)	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
797	SD00423.00.00	Indikator SDGs	17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menyusun National Strategy for Development of Statistics (NSDS)	strategi nasional untuk memproduksi data yang digunakan untuk mengukur seluruh indikator SDGs dan indikator statistik lainnya.	Klasifikasi Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menyusun National Strategy for Development of Statistics (NSDS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
798	SD00424.00.00	Indikator SDGs	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara	Klasifikasi Kematian	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.		permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.		analisis atau sesuai kebutuhan		
799	SD00424.00.00	Indikator SDGs	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi Kematian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
800	SD00424.00.00	Indikator SDGs	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi Kematian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
801	SD00424.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi Kematian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
802	SD00424.00.00	Indikator SDGs	3.9.1	Angka kematian akibat rumah	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem	Klasifikasi Kematian	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tangga dan polusi udara ambien.		pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.		analisis atau sesuai kebutuhan		
803	SD00424.00.00	Indikator SDGs	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi Kematian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
804	SD00424.00.00	Indikator SDGs	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi Kematian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
805	SD00424.00.00	Indikator SDGs	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Kematian	Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.	Klasifikasi Kematian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
806	SD00425.00.00	Indikator SDGs	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Kematian akibat konflik	Kematian akibat tindakan agresif antara beberapa pihak yang langsung terkait dengan pertempuran, seperti pertikaian antar suku; Kematian akibat kejahatan perang seperti menargetkan pada penduduk sipil; Kematian akibat segala bentuk ranjau termasuk dari lokasi bekas ranjau yang masih aktif maupun dianggap tidak aktif.	Klasifikasi Kematian akibat konflik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
807	SD00426.00.00	Indikator SDGs	3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit	Kematian Akibat Penyakit Jantung, Kanker,	Persen orang berusia 30 tahun yang akan meninggal sebelum ulang tahun ke 70 karena penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis, dengan asumsi bahwa ia akan mengalami	Klasifikasi Kematian Akibat Penyakit Jantung, Kanker,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pernapasan kronis.	Diabetes, atau Penyakit Pernapasan Kronis	tingkat mortalitas saat ini pada setiap usia dan ia tidak akan mati dari penyebab kematian lainnya (misalnya, cedera atau HIV / AIDS).	Diabetes, atau Penyakit Pernapasan Kronis			
808	SD01107.00.00	Indikator SDGs	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.	Klasifikasi Kematian yang disebabkan konflik	1. Tempat kejadian perkara atau wilayah administrasi : nasional, provinsi dan kabupaten/kota 2. Jenis kelamin korban : laki-laki dan perempuan 3. Kelompok umur korban 4. Jenis konflik	Persentase	Persen
809	SD01108.00.00	Indikator SDGs	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
810	SD00427.00.00	Indikator SDGs	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Kematian Ibu	Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll	Klasifikasi Kematian Ibu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
811	SD00428.00.00	Indikator SDGs	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian yang disebabkan konflik	Kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial. Konflik merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.	Klasifikasi Kematian yang disebabkan konflik	1. Tempat kejadian perkara atau wilayah administrasi : nasional, provinsi dan kabupaten/kota 2. Jenis kelamin korban : laki-laki dan perempuan 3. Kelompok umur korban 4. Jenis konflik	Persentase	Persen
812	SD00429.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah	Kementerian	Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.	Klasifikasi Kementerian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kementerian; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
813	SD00429.00.00	Indikator SDGs	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Kementerian	Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.	Klasifikasi Kementerian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kemete rian; Persen
814	SD00429.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lem baga.	Kementerian	Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.	Klasifikasi Kementerian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kemete rian; Persen
815	SD00429.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lem baga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Kementerian	Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.	Klasifikasi Kementerian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kemete rian; Persen
816	SD00429.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer	Kementerian	Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.	Klasifikasi Kementerian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kemete rian; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Kementerian/Lem baga.						
817	SD00430.00.00	Indikator SDGs	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi Kemiskinan Menurut Metode Penghitungan	1. Head Count Index (HCI-P0) 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Persentase	Persen
818	SD00430.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi Kemiskinan	Head Count Index (HCI-P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) , Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Persentase	Persen
819	SD00430.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi Kemiskinan	Head Count Index (HCI-P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) , Indeks Keparahan Kemiskinan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								(Poverty Severity Index-P2)		
820	SD00431.00.00	Indikator SDGs	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Kemitraan Publik-Swasta (Public Private Partnership (PPP))	<p>Suatu perjanjian atau kontrak, antara entitas publik dan pihak swasta, di mana:</p> <p>(a) pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu, (b) pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi, secara langsung atau tidak langsung, (c) pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul, dan (d) fasilitas publik, tanah atau sumber daya lainnya dapat ditransfer atau disediakan untuk pihak swasta.</p> <p>An agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party.</p>	Klasifikasi Kemitraan Publik-Swasta (Public Private Partnership (PPP))	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
821	SD00432.00.00	Indikator SDGs	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan	Kendaraan Bermotor Umum	Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.	Klasifikasi Kendaraan Bermotor Umum	1. Rute Tertentu 2. Tidak Berute	Jumlah; persentase	Kendaraan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.						
822	SD00432.00.00	Indikator SDGs	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Kendaraan Bermotor Umum	Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.	Klasifikasi Kendaraan Bermotor Umum	1. Rute Tertentu 2. Tidak Berute	Jumlah; Persentase	Kendaraan; Persen
823	SD00433.00.00	Indikator SDGs	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan disuatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk.	Klasifikasi Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	1. tenaga medis 2. tenaga psikologi klinis 3. tenaga keperawatan 4. tenaga kebidanan 5. tenaga kefarmasian 6. tenaga kesehatan masyarakat 7. tenaga kesehatan lingkungan 8. tenaga gizi 9. tenaga keterampilan fisik	Proporsi	Proporsi per mil (1000)

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								10. tenaga keteknisian medis 11. tenaga teknis biomedika 12. tenaga kesehatan tradisional 13. tenaga kesehatan lain		
824	SP00032.00.00	Indikator SP2020			Kepala Keluarga	Seorang yang bertanggung jawab di keluarga tersebut dan tertera sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga	Klasifikasi Kepala Keluarga	Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin: 1. Laki-Laki 2. Perempuan Klasifikasi berdasarkan Usia	Jumlah	Kepala Keluarga
825	SD00434.00.00	Indikator SDGs	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah	Kepatuhan	Perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku.	Klasifikasi Kepatuhan	1. Kepatuhan Rendah 2. Kepatuhan Sedang 3. Kepatuhan Tinggi	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
826	SD00435.00.00	Indikator SDGs	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Kepatuhan Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Klasifikasi Kepatuhan Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Le mbaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
827	SD00436.00.00	Indikator SDGs	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Kepemilikan Akta	Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.	Klasifikasi Kepemilikan Akta	1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu (Susenas KOR 2018) 1. Ya 2. Tidak (SUPAS 2015)	Persentase	Persen
828	SD00436.00.00	Indikator SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40%	Kepemilikan Akta	Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.	Klasifikasi Kepemilikan Akta	1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				berpendapatan bawah.				5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu (Susenas KOR 2018) 1. Ya 2. Tidak (SUPAS 2015)		
829	SD00436.00.00	Indikator SDGs	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Kepemilikan Akta	Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.	Klasifikasi Kepemilikan Akta	1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu (Susenas KOR 2018) 1. Ya 2. Tidak (SUPAS 2015)	Persentase	Persen
830	SD00437.00.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki haklahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Kepemilikan lahan	hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan dan memindahkan hak atas lahan. Untuk itu hak yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan yang ditetapkan dengan Sertifikat.	Klasifikasi Kepemilikan lahan	Klasifikasi Wilayah	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
831	SD00438.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Kepuasan	Terdapat lima unsur penting yang menentukan kepuasan yaitu responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability.	Klasifikasi Kepuasan	1. Sangat Tidak Memuaskan 2. Tidak Memuaskan 3. Memuaskan 4. Sangat Memuaskan	Persentase	Persen
832	SD00391.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Kepunahan Berisiko	Suatu rumpun dinyatakan berisiko apabila dalam status kritis (critical), kritis dipertahankan (criticalmaintained), terancam punah (endangered) atau hampir punah yang dipelihara (endangeredmaintened). Suatu rumpun dinyatakan berisiko jika populasi suatu rumpun dengan jumlah betina produktif (breeding females) ≤ 100 ekor dan jantan produktif (breeding males) ≤ 5 ekor, atau jumlah total populasi ≤ 120 ekor. Jika diluar itu maka dikatakan tidak berisiko.	Klasifikasi Kepunahan Berisiko	1. Kritis (Critical) 2. Kritis Dipertahankan (Critical-maintained) 3. Terancam Punah (endangered) 4. Hampir punah yang dipelihara (endangeredmaintened)	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
833	SD00393.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Kepunahan dengan Risiko yang tidak diketahui	Status risiko yang tidak diketahui jika data terkait jumlah jantan produktif (breeding males) dan betina produktif (breeding females) dari suatu rumpun ternak tidak diketahui.	Klasifikasi Kepunahan dengan Risiko yang tidak diketahui	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
834	SD00394.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Kepunahan Kritis (Critical)	Suatu jenis hewan dikategorikan sebagai kritis jika jumlah total betina kurang dari atau sama dengan 100 atau jumlah total pejantan kurang dari atau sama dengan lima; atau ukuran populasi keseluruhan kurang dari atau sama dengan 120 dan menurun dan persentase betina yang dibiakkan untuk jantan dari jenis yang sama di bawah 80 persen, dan tidak diklasifikasikan sebagai punah.	Klasifikasi Kepunahan Kritis (Critical)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
835	SD00392.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Kepunahan Tidak Berisiko	Status aman atau tidak berisiko jika jantan dan betina produktif 20:40 (sapi dan kerbau), 20:50 (kambing, domba dan babi), 20:200 (ayam, itik, angsa).	Klasifikasi Kepunahan Tidak Berisiko	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
836	SD00439.01.00	Indikator SDGs	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Keracunan	Keracunan yang disebabkan oleh semua zat kimia termasuk obat-obatan dan makanan atau keracunan paparan dan zat berbahaya.	Klasifikasi Keracunan	1. Over dosis obat 2. Obat yang salah diberikan 3. Obat yang diminum secara tidak sengaja 4. Kecelakaan dalam penggunaan obat-obatan 5. Keracunan obat-obatan dan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								bahan biologi dalam prosedur medis dan bedah.		
837	SD00439.01.00	Indikator SDGs	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Keracunan	Keracunan yang disebabkan oleh semua zat kimia termasuk obat-obatan dan makanan atau keracunan paparan dan zat berbahaya.	Klasifikasi Keracunan	1. Over dosis obat 2. Obat yang salah diberikan 3. Obat yang diminum secara tidak sengaja 4. Kecelakaan dalam penggunaan obat-obatan 5. Keracunan obat-obatan dan bahan biologi dalam prosedur medis dan bedah.	Persentase	Persen
838	SD00439.02.00	Indikator SDGs	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Keracunan	Masuknya zat ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian.	Klasifikasi Keracunan	1. Over dosis obat 2. Obat yang salah diberikan 3. Obat yang diminum secara tidak sengaja 4. Kecelakaan dalam penggunaan obat-	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								obatan 5. Keracunan obat-obatan dan bahan biologi dalam prosedur medis dan bedah.		
839	SD00439.02.00	Indikator SDGs	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Keracunan	Masuknya zat ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian	Klasifikasi Keracunan	1. Over dosis obat 2. Obat yang salah diberikan 3. Obat yang diminum secara tidak sengaja 4. Kecelakaan dalam penggunaan obat- obatan 5. Keracunan obat-obatan dan bahan biologi dalam prosedur medis dan bedah.	Persentase	Persen
840	SD00440.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk	kebijakan dan peraturan perundangan- undangan yang memiliki muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.	Klasifikasi Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					perikanan skala kecil					
841	SD00441.00.00	Indikator SDGs	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Kerangka Kerja Monitoring Efektifitas Pembangunan Multi-Stakeholder	Indikator ini mengukur kualitas dan efektivitas hubungan antara mitra pembangunan. Semakin baik hubungan antara semua mitra terkait, semakin baik kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Klasifikasi Kerangka Kerja Monitoring Efektifitas Pembangunan Multi-Stakeholder	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
842	SD00442.00.00	Indikator SDGs	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Kerangka legislasi, administrasi dan kerangka kerja kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata	dapat berupa regulasi terkait ratifikasi pengesahan Protokol Nagoya baik untuk SDG pangan dan pertanian, hidupan liar dan mikrob, maupun rencana aksi pelaksanaannya.	Klasifikasi Kerangka legislasi, administrasi dan kerangka kerja kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
843	SD00443.00.00	Indikator SDGs	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,	Kerawanan Pangan	Suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat saja sedang	Klasifikasi Kerawanan Pangan	Rawan pangan kronis, rawan pangan sementara	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		terjadi atau berpotensi untuk terjadi (Kompas, 2004)				
844	SD00444.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Kereta Api	Kendaraan dengan tenaga gerak (listrik, diesel, atau tenaga uap) yang berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lain, yang akan atau sedang bergerak diatas rel, terdiri dari kereta penumpang dan kereta barang	Klasifikasi Kereta Api	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit
845	SD00445.00.00	Indikator SDGs	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.	Klasifikasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
846	SD00445.00.00	Indikator SDGs	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.	Klasifikasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
847	SD00446.01.00	Indikator SDGs	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.	Klasifikasi Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
848	SD00446.01.00	Indikator SDGs	17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.	Klasifikasi Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
849	SD00446.01.00	Indikator SDGs	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.	Klasifikasi Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
850	SD00446.01.00	Indikator SDGs	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.	Klasifikasi Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
851	SD00446.02.00	Indikator SDGs	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, mutual benefit dan non-interference. KSS perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta menguatkan solidaritas antarnegara berkembang.	Klasifikasi Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
852	SD00446.02.00	Indikator SDGs	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, mutual benefit dan non-interference. KSS perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta menguatkan solidaritas antarnegara berkembang.	Klasifikasi Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
853	SD00446.02.00	Indikator SDGs	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk	Kerjasama Selatan-	Manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-	Klasifikasi Kerjasama	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Kerjasama

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Selatan (KSS)	prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, mutual benefit dan non-interference. KSS perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta menguatkan solidaritas antarnegara berkembang.	Selatan-Selatan (KSS)	analisis atau sesuai kebutuhan		
854	SD00447.00.00	Indikator SDGs	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan (mutual opportunity) dan saling menguntungkan (mutual benefit). Dalam perjalanannya, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular (Triangular Cooperation). Terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerjasama Triangular (KST).	Klasifikasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
855	SD00447.00.00	Indikator SDGs	17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan (mutual opportunity) dan saling menguntungkan (mutual benefit). Dalam perjalanannya, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular (Triangular Cooperation). Terdiri	Klasifikasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerjasama Triangular (KST).				
856	SD00447.00.00	Indikator SDGs	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan (mutual opportunity) dan saling menguntungkan (mutual benefit). Dalam perjalanannya, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular (Triangular Cooperation). Terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerjasama Triangular (KST).	Klasifikasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
857	SD00448.00.00	Indikator SDGs	17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.	Kerjasama Triangular	Kerjasama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerjasama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.	Klasifikasi Kerjasama Triangular	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
858	SD00448.00.00	Indikator SDGs	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan	Kerjasama Triangular	Kerjasama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.	Klasifikasi Kerjasama Triangular	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				untuk negara-negara berkembang.						
859	SD00448.00.00	Indikator SDGs	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Kerjasama Triangular	Kerjasama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.	Klasifikasi Kerjasama Triangular	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kerjasama
860	SD00310.01.00	Indikator SDGs	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.	Klasifikasi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Nilai; persentase	Rupiah; persen
861	SD00310.01.00	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.	Klasifikasi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Nilai; persentase	Rupiah; persen
862	SD00310.01.00	Indikator SDGs	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.	Klasifikasi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Nilai; persentase	Rupiah; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
863	SD00310.02.00	Indikator SDGs	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi.	Klasifikasi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
864	SD00310.02.00	Indikator SDGs	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi.	Klasifikasi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Nilai; persentase	Rupiah; persen
865	SD00310.02.00	Indikator SDGs	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi.	Klasifikasi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
866	SD00310.02.00	Indikator SDGs	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	Klasifikasi Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
867	SD01109.00.00	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP,	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar		kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar			
868	SD00311.00.00	Indikator SDGs	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kesakitan Malaria / Insiden malaria (digambarkan dalam API)	API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk.	Klasifikasi Kesakitan Malaria / Insiden malaria (digambarkan dalam API)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 1000 penduduk
869	SD00312.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.	Klasifikasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	1. Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK) 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan ; Km2; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
870	SD00312.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.	Klasifikasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	1. Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK) 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan ; Km2; Persen
871	SD00313.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Kawasan (KPHK)	Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.	Klasifikasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Kawasan (KPHK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan ; Km2; Persen
872	SD00314.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)	KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.	Klasifikasi Kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan ; Km2; Persen
873	SD00315.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lahan (KPHL)	Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.	Klasifikasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lahan (KPHL)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan ; Km2; Persen
874	SD00316.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.	Klasifikasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan ; Km2; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
875	SD00317.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.	Klasifikasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan ; Km2; Persen
876	SD00317.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.	Klasifikasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Kesatuan ; Km2; Persen
877	SD00318.00.00	Indikator SDGs	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Kesehatan	Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.	Klasifikasi Kesehatan	1. Lahir 2. Batin/Mental/Spiritual	Jumlah; Persentase	Orang. Persen
878	SD00318.00.00	Indikator SDGs	3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.	Kesehatan	Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.	Klasifikasi Kesehatan	1. Lahir 2. Batin/Mental/Spiritual	Jumlah; Persentase	Orang. Persen
879	SD00319.00.00	Indikator SDGs	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan	Kesehatan Jiwa	Kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara	Klasifikasi Kesehatan Jiwa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang. Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				upaya kesehatan jiwa.		produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.				
880	SD00320.00.00	Indikator SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Kesehatan Reproduksi	Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.	Klasifikasi Kesehatan Reproduksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang. Persen
881	SD00320.00.00	Indikator SDGs	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Kesehatan Reproduksi	Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.	Klasifikasi Kesehatan Reproduksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang. Persen
882	SD00321.00.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Kesejahteraan Masyarakat	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.	Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
883	SD00322.00.00	Indikator SDGs	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	Klasifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
884	SD00323.00.00	Indikator SDGs	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Kesetaraan Gender	Hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.	Klasifikasi Kesetaraan Gender	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
885	SD00323.00.00	Indikator SDGs	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan	Kesetaraan Gender	Hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.	Klasifikasi Kesetaraan Gender	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pemberdayaan perempuan.						
886	SD00324.01.00	Indikator SDGs	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 (empat) komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: Kecukupan ketersediaan pangan, Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, Aksesibilitas/keterjangkaun terhadap pangan, serta Kualitas/keamanan pangan.	Klasifikasi Ketahanan Pangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
887	SD00324.02.00	Indikator SDGs	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Ketahanan pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangandengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapathidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.	Klasifikasi Ketahanan pangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
888	SD00325.00.00	Indikator SDGs	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Ketenagakerjaan	Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.	Klasifikasi Ketenagakerjaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
889	SD00326.00.00	Indikator SDGs	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Keterampilan Teknologi dan Komunikasi	Kegiatan yang berhubungan dengan komputer untuk mengukur keterampilan TIK meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Menyalin atau memindahkan file atau folder - Menggunakan alat salin dan tempel untuk menggandakan atau memindahkan informasi dalam dokumen - Mengirim email dengan file yang dilampirkan (misal dokumen, gambar, dan video) - Menggunakan rumus aritmatika dasar dalam spreadsheet - Menghubungkan dan memasang perangkat baru (misal modem, kamera, printer) - Menemukan, mengunduh, menginstal, dan mengkonfigurasi perangkat lunak. - Membuat presentasi elektronik dengan perangkat lunak presentasi (termasuk teks, gambar, suara, video atau grafik) - Mentransfer file antara komputer dan perangkat lain - Menulis program komputer menggunakan bahasa pemrograman khusus 	Klasifikasi Keterampilan Teknologi dan Komunikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
890	SD00327.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Keterbatasan Fisik	Terganggunanya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
891	SD00328.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Keterbatasan Intelektual	Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
892	SD00329.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Keterbatasan Mental	Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
893	SD00330.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Keterbatasan Sensorik	Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
894	SD01110.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi	Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional pada tahun berjalan.	Klasifikasi Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					hak akses untuk perikanan skala kecil		perikanan skala kecil			
895	SD00331.00.00	Indikator SDGs	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar.	Klasifikasi Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
896	SD01111.00.00	Indikator SDGs	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
897	SD00332.00.00	Indikator SDGs	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Ketidacukupan konsumsi pangan (undernourishment)	Suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Undernourishment berbeda dengan malnutrition dan undernutrition, dimana malnutrition dan undernutrition adalah outcome terkait status gizi.	Klasifikasi Ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
898	SD00332.00.00	Indikator SDGs	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of	Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup	Klasifikasi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Undernourishment).	(undernourishment)	normal, aktif, dan sehat. Undernourishment berbeda dengan malnutrition dan undernutrition, dimana malnutrition dan undernutrition adalah outcome terkait status gizi.	(undernourishment)			
899	SD00333.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah Selisih antara Penerimaan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH) dengan Belanja Pegawai (Gaji PNSD), KKD menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya	Klasifikasi Keuangan Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
900	SD00334.00.00	Indikator SDGs	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Keuntungan	Hasil yang bisa diraih dengan tindakan atau aktivitas tertentu.	Klasifikasi Keuntungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
901	SP00034.00.00	Indikator SP2020			Kewarganegaraan	Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.	Klasifikasi Kewarganegaraan	1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA)	Jumlah	Kewarganegaraan
902	SD00335.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana	Klimatologi	Gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.	Klasifikasi Klimatologi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Tata Ruang Wilayah (RTRW).						
903	SD00336.00.00	Indikator SDGs	10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini	Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.	Klasifikasi Koefisien Gini	Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apaapa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya	Rasio	Indeks

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.		
904	SD00337.00.00	Indikator SDGs	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.	Kolaborasi Tematik Quickwins Program	Dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis.	Klasifikasi Kolaborasi Tematik Quickwins Program	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	kolaborasi Tematik Quickwins Program
905	SD00338.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Komisi Informasi	Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Klasifikasi Komisi Informasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
906	SD00339.00.00	Indikator SDGs	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Komitmen	Perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak; tanggung jawab.	Klasifikasi Komitmen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
907	SD01112.00.00	Indikator SDGs	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars)	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
908	SD00340.00.00	Indikator SDGs	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Komnas HAM	Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM bertujuan untuk: a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan	Klasifikasi Komnas HAM	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
909	SD00341.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi mantap jalan nasional diperoleh dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional.	Klasifikasi Kondisi Mantap	Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks	Roughness Indeks IRI; persentase	m/km; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
910	SD01113.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi mantap jalan nasional diperoleh dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional.	Klasifikasi Kondisi mantap jalan nasional	Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1	Roughness Indeks IRI; persentase	m/km; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								kilometer jalan (m/km).		
911	SD00342.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kondisi stop buang air besar sembarangan (SBS)	Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan.	Klasifikasi Kondisi stop buang air besar sembarangan (SBS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
912	SD00343.00.00	Indikator SDGs	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur	Konflik Sosial/ Konflik	Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.	Klasifikasi Konflik Sosial/ Konflik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dan penyebab kematian.						
913	SD00343.00.00	Indikator SDGs	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Konflik Sosial/ Konflik	Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.	Klasifikasi Konflik Sosial/ Konflik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
914	SD00344.00.00	Indikator SDGs	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.	Klasifikasi Konservasi Keanekaragaman Hayati	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
915	SD00344.00.00	Indikator SDGs	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.	Klasifikasi Konservasi Keanekaragaman Hayati	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
916	SD00345.00.00	Indikator SDGs	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Konservasi Sumber Daya Air	Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.	Klasifikasi Konservasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
917	SD00345.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Konservasi Sumber Daya Air	Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.	Klasifikasi Konservasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
918	SD00345.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Konservasi Sumber Daya Air	Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.	Klasifikasi Konservasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
919	SD00346.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara	Klasifikasi Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.				
920	SD00347.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Konsultasi	Pertemuan untuk membahas sesuatu atau untuk mendapatkan saran atau proses mendiskusikan sesuatu dengan seseorang untuk mendapatkan saran atau pendapat mereka tentang hal itu.	Klasifikasi Konsultasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
921	SD00348.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	Klasifikasi Konsumen	Kelompok: 1. 16-25 tahun 2. 26-35 tahun 3. 36-45 tahun 3. 46-55 tahun 4. 56-65 tahun 5. >= 65 tahun Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Pendidikan terakhir yg ditamatkan: 1. SLTP/ sederajat 2. SLTA/ sederajat 3. D1/D2/D3 4. D4/S1	Jumlah; presentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								5. S2/S3 Pekerjaan Utama: 1. Wirasawasta 2. Pegawai Swasta 3. Pegawai BUMN/D 4. PNS/TNI/Polri 5. Peneliti/Dosen 6. Pegawai/Mahasiswa 7. Lainnya Instansi/Institusi: 1. Lembaga Pendidikan dan penelitian dalam negeri 2. Lembaga pendidikan dan penelitian luar negeri 3. Kementerian dan lembaga pemerintah 4. Lembaga internasional; Media massa 5. Pemerintah daerah; Perbankan		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								6. BUMN/BUMD 7. Swasta Lainnya 8. Lainnya Pemanfaatan hasil kunjungan: 1. Tugas sekolah/tugas kuliah 2. Skripsi/tesis/disertasi 3. Penelitian 4. Perencanaan 5. Evaluasi 6. Penyebaran Informasi Jenis Layanan: 1. Perpustakaan tercetak 2. Perpustakaan digital 3. Penjualan buku 4. Data mikro/peta digital/softcopy/publikasi 5. Konsultasi data statistik 6. Konsultasi kegiatan dan		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								rekomendasi statistik Fasilitas utama u/memperoleh data BPS: 1. Forum layanan statistik 2. PST/Perpustakaan BPS 3. Surat 4. E-mail 5. Telepon/Fax 6. Website BPS 7. Lainnya		
922	SD00348.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	Klasifikasi Konsumen	Kelompok: 1. 16-25 tahun 2. 26-35 tahun 3. 36-45 tahun 3. 46-55 tahun 4. 56-65 tahun 5. >= 65 tahun Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Pendidikan terakhir yg ditamatkan: 1. SLTP/ sederajat	Jumlah; presentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								2. SLTA/ sederajat 3. D1/D2/D3 4. D4/S1 5. S2/S3 Pekerjaan Utama: 1. Wirasawasta 2. Pegawai Swasta 3. Pegawai BUMN/D 4. PNS/TNI/Polri 5. Peneliti/Dosen 6. Pegawai/Mahasiswa 7. Lainnya Instansi/Institusi: 1. Lembaga Pendidikan dan penelitian dalam negeri 2. Lembaga pendidikan dan penelitian luar negeri 3. Kementerian dan lembaga pemerintah 4. Lembaga internasional; Media massa		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								5. Pemerintah daerah; Perbankan 6. BUMN/BUMD 7. Swasta Lainnya 8. Lainnya Pemanfaatan hasil kunjungan: 1. Tugas sekolah/tugas kuliah 2. Skripsi/tesis/disertasi 3. Penelitian 4. Perencanaan 5. Evaluasi 6. Penyebaran Informasi Jenis Layanan: 1. Perpustakaan tercetak 2. Perpustakaan digital 3. Penjualan buku 4. Data mikro/peta digital/softcopy/publikasi 5. Konsultasi data		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								statistik 6. Konsultasi kegiatan dan rekomendasi statistik Fasilitas utama u/memperoleh data BPS: 1. Forum layanan statistik 2. PST/Perpustakaan BPS 3. Surat 4. E-mail 5. Telepon/Fax 6. Website BPS 7. Lainnya		
923	SD00348.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	Klasifikasi Konsumen	Kelompok: 1. 16-25 tahun 2. 26-35 tahun 3. 36-45 tahun 3. 46-55 tahun 4. 56-65 tahun 5. >= 65 tahun Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Pendidikan	Jumlah; presentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								terakhir yg ditamatkan: 1. SLTP/ sederajat 2. SLTA/ sederajat 3. D1/ D2/ D3 4. D4/ S1 5. S2/ S3 Pekerjaan Utama: 1. Wirasawasta 2. Pegawai Swasta 3. Pegawai BUMN/ D 4. PNS/ TNI/ Polri 5. Peneliti/ Dosen 6. Pegawai/ Mahasis wa 7. Lainnya Instansi/ Institusi: 1. Lembaga Pendidikan dan penelitian dalam negeri 2. Lembaga pendidikan dan penelitian luar negeri 3. Kementerian dan lembaga pemerintah		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								4. Lembaga internasional; Media massa 5. Pemerintah daerah; Perbankan 6. BUMN/BUMD 7. Swasta Lainnya 8. Lainnya Pemanfaatan hasil kunjungan: 1. Tugas sekolah/tugas kuliah 2. Skripsi/tesis/disertasi 3. Penelitian 4. Perencanaan 5. Evaluasi 6. Penyebaran Informasi Jenis Layanan: 1. Perpustakaan tercetak 2. Perpustakaan digital 3. Penjualan buku 4. Data mikro/peta		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								digital/softcopy/publikasi 5. Konsultasi data statistik 6. Konsultasi kegiatan dan rekomendasi statistik Fasilitas utama u/memperoleh data BPS: 1. Forum layanan statistik 2. PST/Perpustakaan BPS 3. Surat 4. E-mail 5. Telepon/Fax 6. Website BPS 7. Lainnya		
924	SD00348.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Konsumen	Pengguna data dan/atau pengguna layanan yang menjadi responden.	Klasifikasi Konsumen	Kelompok: 1. 16-25 tahun 2. 26-35 tahun 3. 36-45 tahun 3. 46-55 tahun 4. 56-65 tahun 5. >= 65 tahun Jenis Kelamin: 1. Laki-laki	Jumlah; presentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								2. Perempuan Pendidikan terakhir yg ditamatkan: 1. SLTP/ sederajat 2. SLTA/ sederajat 3. D1/ D2/ D3 4. D4/ S1 5. S2/ S3 Pekerjaan Utama: 1. Wirasawasta 2. Pegawai Swasta 3. Pegawai BUMN/ D 4. PNS/ TNI/ Polri 5. Peneliti/ Dosen 6. Pegawai/ Mahasiswa 7. Lainnya Instansi/ Institusi: 1. Lembaga Pendidikan dan penelitian dalam negeri 2. Lembaga pendidikan dan penelitian luar negeri		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								3. Kementerian dan lembaga pemerintah 4. Lembaga internasional; Media massa 5. Pemerintah daerah; Perbankan 6. BUMN/BUMD 7. Swasta Lainnya 8. Lainnya Pemanfaatan hasil kunjungan: 1. Tugas sekolah/tugas kuliah 2. Skripsi/tesis/diseriasi 3. Penelitian 4. Perencanaan 5. Evaluasi 6. Penyebaran Informasi Jenis Layanan: 1. Perpustakaan tercetak 2. Perpustakaan digital		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								3. Penjualan buku 4. Data mikro/peta digital/softcopy/publikasi 5. Konsultasi data statistik 6. Konsultasi kegiatan dan rekomendasi statistik Fasilitas utama u/memperoleh data BPS: 1. Forum layanan statistik 2. PST/Perpustakaan BPS 3. Surat 4. E-mail 5. Telepon/Fax 6. Website BPS 7. Lainnya		
925	SD00349.00.00	Indikator SDGs	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam	Jumlah minuman mengandung alkohol (liter) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam setahun terakhir dibagi jumlah seluruh penduduk umur ≥15 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					satu tahun terakhir		dalam satu tahun terakhir			
926	SD00350.00.00	Indikator SDGs	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Konsumsi Lahan	Perluasan area yang dibangun yang dapat diukur secara langsung, Luasan absolut dari tanah yang dapat dieksplorasi di bidang pertanian, kehutanan atau kegiatan ekonomi lainnya, dan eksploitasi tanah yang terlalu intensif yang digunakan untuk pertanian dan kehutanan.	Klasifikasi Konsumsi Lahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; persentase	Hektar; persen
927	SD00351.00.00	Indikator SDGs	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Konsumsi Listrik Per Kapita	Perbandingan jumlah penjualan tenaga listrik dengan jumlah penduduk	Klasifikasi Konsumsi Listrik Per Kapita	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	Rata-rata	Kwh/Kapita
928	SD00352.00.00	Indikator SDGs	12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).	Konsumsi Material Domestik (Domestic Material Consumption)	Jumlah sebenarnya bahan dalam perekonomian. Jumlah bahan yang digunakan dalam perekonomian nasional, menyajikan jumlah material yang perlu ditangani dalam ekonomi, yang baik ditambahkan ke saham bahan bangunan dan infrastruktur transportasi atau digunakan untuk bahan bakar ekonomi sebagai throughput yang material	Klasifikasi Konsumsi Material Domestik (Domestic Material Consumption)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Material; Persen
929	SD00353.00.00	Indikator SDGs	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap	Kontak	Komunikasi dengan seseorang, terutama dengan berbicara atau menulis kepada mereka secara teratur.	Klasifikasi Kontak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.						
930	SD00353.00.00	Indikator SDGs	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Kontak	Komunikasi dengan seseorang, terutama dengan berbicara atau menulis kepada mereka secara teratur:	Klasifikasi Kontak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
931	SD00354.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Kontrasepsi	Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.	Klasifikasi Kontrasepsi	1. Sterilisasi wanita 2. Sterilisasi pria 3. IUD/ AKDR/SPIRAL 4. Suntikan 1 Bulan 5. Suntikan 3 Bulan 6. Susuk KB 7. Pil 8, Kondom 9. Intravag/ Diafragma	Jumlah; persentase	Pengguna; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								10. Mal 11. Pantang Berkala/ kalender 12. Sanggama terputus 13 Metode Modern lainnya 14. Metode Tradisional lainnya		
932	SD00354.00.00	Indikator SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Kontrasepsi	Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.	Klasifikasi Kontrasepsi	1. Sterilisasi wanita 2. Sterilisasi pria 3. IUD/ AKDR/SPIRAL 4. Suntikan 1 Bulan 5. Suntikan 3 Bulan 6. Susuk KB 7. Pil 8, Kondom 9. Intravag/ Diafragma 10. Mal 11. Pantang Berkala/ kalender 12. Sanggama terputus 13 Metode Modern	Jumlah; persentase	Pengguna; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								lainnya 14. Metode Tradisional lainnya		
933	SD00354.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Kontrasepsi	Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.	Klasifikasi Kontrasepsi	1. Sterilisasi wanita 2. Sterilisasi pria 3. IUD/ AKDR/SPIRAL 4. Suntikan 1 Bulan 5. Suntikan 3 Bulan 6. Susuk KB 7. Pil 8, Kondom 9. Intravag/ Diafragma 10. Mal 11. Pantang Berkala/ kalender 12. Senggama terputus	Jumlah; persentase	Pengguna; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								13 Metode Modern lainnya 14. Metode Tradisional lainnya		
934	SD00355.00.00	Indikator SDGs	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Kontribusi pariwisata terhadap PDB	Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai : a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku); b. Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku).	Klasifikasi Kontribusi pariwisata terhadap PDB	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
935	SD00356.00.00	Indikator SDGs	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Korban	Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.	Klasifikasi Korban	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
936	SD00356.00.00	Indikator SDGs	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Korban	Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.	Klasifikasi Korban	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
937	SD00357.01.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Bencana	Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.	Klasifikasi Korban Bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah. Persentase	Jiwa; Persen
938	SD00357.01.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Bencana	Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.	Klasifikasi Korban Bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah. Persentase	Jiwa; Persen
939	SD00357.02.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Korban Bencana	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.	Klasifikasi Korban Bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah. Persentase	Jiwa; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				per 100.000 orang.						
940	SD00358.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Hilang	Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.	Klasifikasi Korban Hilang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
941	SD00358.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Hilang	Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.	Klasifikasi Korban Hilang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
942	SD00358.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Hilang	Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.	Klasifikasi Korban Hilang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
943	SD00358.00.00	Indikator SDGs	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Hilang	Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.	Klasifikasi Korban Hilang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
944	SD00359.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban hilang per 100.000 orang	Korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi Korban hilang per 100.000 orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
945	SD00360.00.00	Indikator SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Korban kejahatan	Seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan.	Klasifikasi Korban kejahatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
946	SD00361.00.00	Indikator SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Korban kejahatan kekerasan	Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan.	Klasifikasi Korban kejahatan kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
947	SD00362.00.00	Indikator SDGs	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Korban Kekerasan	Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.	Klasifikasi Korban Kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
948	SD00362.00.00	Indikator SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Korban Kekerasan	Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.	Klasifikasi Korban Kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
949	SD00362.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Korban Kekerasan	Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau	Klasifikasi Korban Kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang melaporkan kepada polisi.		usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.				
950	SD00363.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban luka/sakit	Orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.	Klasifikasi Korban luka/sakit	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
951	SD00364.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban mengungsi akibat bencana per 100.000 orang	Korban mengungsi akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi Korban mengungsi akibat bencana per 100.000 orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
952	SD00365.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Meninggal	Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.	Klasifikasi Korban Meninggal	1. Meninggal di tempat 2. Meninggal setelah dirawat	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
953	SD00365.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Meninggal	Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.	Klasifikasi Korban Meninggal	1. Meninggal di tempat 2. Meninggal setelah dirawat	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
954	SD00365.00.00	Indikator SDGs	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Meninggal	Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.	Klasifikasi Korban Meninggal	1. Meninggal di tempat 2. Meninggal setelah dirawat	Jumlah; persentase	Jiwa; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
955	SD00366.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban meninggal per 100.000 orang	Korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi Korban meninggal per 100.000 orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
956	SD01078.00.00	Indikator SDGs	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, terluka, dan mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi Korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
957	SD01114.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, terluka, dan mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi Korban akibat bencana	1. Korban Meninggal 2. Korban Hilang 3. Korban Terdampak	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
958	SD00367.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
959	SD00368.00.00	Indikator SDGs	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.	Klasifikasi Korban Penyalahgunaan NAPZA	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
960	SD00369.00.00	Indikator SDGs	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkoba dan alkohol, yang telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial dalam panti (atau balai/loka/lembaga rehabilitasi sosial) milik pemerintah dan masyarakat.	Klasifikasi Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
961	SD00370.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Terdampak	Orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi.	Klasifikasi Korban Terdampak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Jiwa; persen
962	SD00370.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Korban Terdampak	Orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang	Klasifikasi Korban Terdampak	1. Korban Terluka/Sakit 2. Korban Mengungsi	Jumlah; persentase	Jiwa; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				per 100.000 orang.		dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi.				
963	SD00370.00.00	Indikator SDGs	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban Terdampak	Orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi.	Klasifikasi Korban Terdampak	Korban Terdampak Langsung: - Korban Terluka/Sakit: orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap - Pengungsi: orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti	Jumlah; persentase	Jiwa; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								sebagai akibat dampak buruk bencana		
964	SD00371.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban terkena dampak bencana per 100.000 orang	Korban terkena dampak bencana (korban terluka dan korban mengungsi) dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi Korban terkena dampak bencana per 100.000 orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
965	SD00372.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Korban terluka akibat bencana per 100.000 orang	Korban terluka akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.	Klasifikasi Korban terluka akibat bencana per 100.000 orang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi	Proporsi per 100.000 penduduk
966	SD00373.00.00	Indikator SDGs	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Korupsi	Perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperkayakan kepada mereka.	Klasifikasi Korupsi	1: Sangat wajar 2: Wajar 3: Kurang wajar 4: Tidak wajar	Persentase	Persen
967	SD00374.00.00	Indikator SDGs	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Kota	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kota.	Klasifikasi Kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
968	SD00374.00.00	Indikator SDGs	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan	Kota	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam	Klasifikasi Kota	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kota.		analisis atau sesuai kebutuhan		
969	SD00374.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Kota	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kota.	Klasifikasi Kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
970	SD00374.00.00	Indikator SP2020			Kota	Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kota.	Klasifikasi Kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
971	SD00375.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Kota Baru	Kota yang direncanakan dan dikembangkan dalam kaitan dengan kota yang telah tumbuh dan berkembang atau kota yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri	Klasifikasi Kota Baru	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
972	SD00376.00.00	Indikator SDGs	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Kota Hijau	Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.	Klasifikasi Kota Hijau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kota

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
973	SD00376.00.00	Indikator SDGs	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Kota Hijau	Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.	Klasifikasi Kota Hijau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kota
974	SD00377.00.00	Indikator SDGs	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Kota hijau yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah untuk menciptakan zero waste dengan menerapkan konsep 3R (reduce, reuse, recycle).	Klasifikasi Kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kota; Persen
975	SD00378.00.00	Indikator SDGs	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Kota Hijau yang Menyediakan RTH di Kawasan Perkotaan Metropolitan dan Kota Sedang	Kota hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang yang menyediakan area khusus sebagai RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.	Klasifikasi Kota Hijau yang Menyediakan RTH di Kawasan Perkotaan Metropolitan dan Kota Sedang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kota; Persen
976	SD00379.00.00	Indikator SDGs	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota	Kota Pusaka	Kota atau kabupaten dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh, sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota	Klasifikasi Kota Pusaka	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kota; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				besar, kota sedang dan kota kecil.		atau bagian dari wilayah/kota yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif				
977	SD00380.00.00	Indikator SDGs	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Kota Pusaka di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil	Kota dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidakberwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh di perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Klasifikasi Kota Pusaka di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kota; Persen
978	SD01115.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP	Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota sedang dan baru.	Klasifikasi Kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
979	SD00381.00.00	Indikator SDGs	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Kota Sedang di Luar Jawa yang Diarahkan Sebagai Pengendali (Buffer) Arus Urbanisasi dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Utama	Kota sedang di luar Jawa sebagai pengendali mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan.	Klasifikasi Kota Sedang di Luar Jawa yang Diarahkan Sebagai Pengendali (Buffer) Arus Urbanisasi dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Utama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kota; Persen
980	SD01116.00.00	Indikator SDGs	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Kota tangguh bencana yang terbentuk	Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.	Klasifikasi Kota Tangguh Bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kota; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
981	SD00382.00.00	Indikator SDGs	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Kota Tangguh Bencana	Kota yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampak bencana yang merugikan	Klasifikasi Kota Tangguh Bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kota; persen
982	SD00383.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah	Kota/kabupaten yang telah membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.	Klasifikasi Kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota/Kaupaten; Persen
983	SD00384.00.00	Indikator SDGs	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kredit	Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank. Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit.	Klasifikasi Kredit	1. Kredit Modal Kerja 2. Kredit Investasi 3. Kredit Konsumsi	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah
984	SD00388.00.00	Indikator SDGs	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Kredit dengan Penjaminan Tertentu	Kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin dengan kriteria tertentu., sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Klasifikasi Kredit dengan Penjaminan Tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
985	SD00386.00.00	Indikator SDGs	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kredit Investasi	Kredit yang diberikan untuk melakukan penanaman modal yang biasanya jangka panjang dengan maksud memperoleh keuntungan.	Klasifikasi Kredit Investasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah
986	SD00387.00.00	Indikator SDGs	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kredit Konsumsi	Kredit yang diberikan untuk membiayai pengadaan barang-barang serta jasa-jasa (penggunaan akhir).	Klasifikasi Kredit Konsumsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah
987	SD00385.00.00	Indikator SDGs	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kredit Modal Kerja	Kredit yang diberikan untuk membiayai kelancaran kegiatan usaha nasabah.	Klasifikasi Kredit Modal Kerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah
988	SD00389.00.00	Indikator SDGs	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Kredit UMKM	Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku. Kredit dengan penjaminan tertentu merupakan bagian dari kredit UMKM.	Klasifikasi Kredit UMKM	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Kredit; Rupiah
989	SD00638.00.00	Indikator SDGs	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Kredit yang diberikan	Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank.	Klasifikasi Kredit yang diberikan	1. Kredit Modal Kerja 2. Kredit Investasi 3. Kredit Konsumsi	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
990	SD00395.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan	Kritis Dipertahankan (Critical-maintained)	Populasi kritis yang menjadi sasaran program konservasi aktif atau populasi yang dikelola oleh perusahaan komersial atau lembaga penelitian.	Klasifikasi Kritis Dipertahankan (Critical-maintained)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.						
991	SD00396.00.00	Indikator SDGs	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Kualitas Air Ambien	Kualitas air ambien mengacu pada air alami, air yang tidak diolah di sungai, danau dan air tanah dan merupakan kombinasi dari pengaruh alami bersama dengan dampak dari semua kegiatan antropogenik.	Klasifikasi Kualitas Air Ambien	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
992	SD00397.00.00	Indikator SDGs	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Kualitas Air Danau	Meningkatnya 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.	Klasifikasi Kualitas Air Danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
993	SD00398.00.00	Indikator SDGs	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas Air Sebagai Air Baku	Meningkatnya indeks kualitas air (IKA) sungai sehingga memenuhi baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Klasifikasi Kualitas Air Sungai Sebagai Air Baku	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
994	SD00399.00.00	Indikator SDGs	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Menurut FAO -RAPA, PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.	Klasifikasi Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai, dan tingkat konsumsi ikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
995	SP00035.00.00	Indikator SP2020			Kuliah	Mengikuti kegiatan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, termasuk pendidikan diploma (D1/D2), sarjana muda (D3), sarjana (D4/S1), dan pascasarjana (S2 dan S3).	Klasifikasi Kuliah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
996	SD00400.00.00	Indikator SDGs	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Kunjungan wisatawan nusantara	Perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.	Klasifikasi Kunjungan wisatawan nusantara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
997	SD00401.00.00	Indikator SDGs	12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.	Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.	Klasifikasi Kurikulum	1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 2. Kurikulum pendidikan tinggi	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
998	SD00401.00.00	Indikator SDGs	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.	Klasifikasi Kurikulum	1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 2. Kurikulum pendidikan tinggi	Persentase	Persen
999	SD00401.00.00	Indikator SDGs	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru,	Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.	Klasifikasi Kurikulum	1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 2. Kurikulum pendidikan tinggi	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(d) penilaian siswa.						
1000	SD00402.00.00	Indikator SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Kursi di parlemen	Kursi di parlemen mengacu pada jumlah mandat parlemen, juga dikenal sebagai jumlah anggota parlemen. Kursi biasanya diperoleh oleh anggota dalam suatu pemilihan umum parlemen. Kursi juga dapat diisi dengan nominasi, penunjukan, pemilihan tidak langsung, rotasi anggota dan melalui pemilihan diluar pemilihan umum.	Klasifikasi Kursi di parlemen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1001	SD01022.00.00	Indikator SDGs	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Kurus (Wasting)	Kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita.	Klasifikasi Kurus (Wasting)	1. Sangat Kurus : Zscore < -3,0 2. Kurus : -3,0 < Zscore < -2,0 3. Normal -2,0 SD < Z-score < 2,0 SD	Nilai	Zscore
1002	SD00403.00.01	Indikator SDGs	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Kusta	Penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae, yang menyerang saraf tepi, kulit dan organ lainnya (kecuali Susunan Saraf Pusat).	Klasifikasi Kusta	1. Kusta basah 2. Kusta kering	Jumlah; persentase	Orang; persen
1003	SD00403.00.02	Indikator SDGs	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan	Kusta	Penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae, yang menyerang saraf tepi, kulit dan organ lainnya (kecuali Susunan Saraf Pusat).	Klasifikasi Kusta	1. Kusta Tuberkuloid 2. Kusta Lepromatosa 3. Kusta Borderline	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(Filariasis dan Kusta).						
1004	SD00404.00.00	Indikator SDGs	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Lahan Kritis	Lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS).	Klasifikasi Lahan Kritis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar (Ha); Persen
1005	SD00404.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Lahan Kritis	Lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS).	Klasifikasi Lahan Kritis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar (Ha); Persen
1006	SD00710.01.00	Indikator SDGs	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Lahan Perkebunan	Lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti: karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya.	Klasifikasi Lahan Perkebunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Km2; Persen
1007	SD00710.02.00	Indikator SDGs	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Lahan Perkebunan	Lahan yang memiliki status legal untuk dibuat perkebunan tanaman secara komersil pada lahan tersebut, berdasarkan pada undang-undang yang dijamin oleh pemerintah.	Klasifikasi Lahan Perkebunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Km2; Persen
1008	SD00405.00.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki haklahan pertanian,	Lahan pertanian	Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian	Klasifikasi Lahan pertanian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menurut jenis kepemilikan.						
1009	SD00406.00.00	Indikator SDGs	15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Lahan	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.	Klasifikasi Lahan	1. Sangat sesuai 2. Cukup sesuai 3. Sesuai marginal 4. Tidak sesuai	Luas	Hektar (Ha)
1010	SD00406.00.00	Indikator SDGs	15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Lahan	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.	Klasifikasi Lahan	1. Sangat sesuai 2. Cukup sesuai 3. Sesuai marginal 4. Tidak sesuai	Luas	Hektar (Ha)
1011	SD00406.00.00	Indikator SDGs	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Lahan	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.	Klasifikasi Lahan	1. Sangat sesuai 2. Cukup sesuai 3. Sesuai marginal 4. Tidak sesuai	Luas	Hektar (Ha)
1012	SD01117.00.00	Indikator SDGs	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1013	SD00407.00.00	Indikator SDGs	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDB Per kapita	Laju pertumbuhan PDB Per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita dari periode t-1 ke periode t.	Klasifikasi Laju pertumbuhan PDB Per kapita	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	Persentase	Persen
1014	SD00408.00.00	Indikator SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.	Klasifikasi Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	Persentase	Persen
1015	SD01118.00.00	Indikator SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-t terhadap nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dibagi dengan nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1016	SD00409.00.00	Indikator SDGs	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.	Klasifikasi Laju Pertumbuhan Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1017	SP00036.00.00	Indikator SP2020			Lama tinggal	Lama tinggal di alamat sekarang batasannya adalah SLS. Jika ada penduduk yang pindah rumah tetapi masih dalam satu SLS, maka lama tinggal dihitung selama dia tinggal di SLS tersebut meskipun tinggal di bangunan yang berbeda.	Klasifikasi Lama tinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Bulan; Tahun
1018	SD01119.00.00	Indikator SDGs	17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pelanggan
1019	SP00037.00.00	Indikator SP2020			Lantai	Bagian bawah atau dasar dari suatu ruangan di suatu rumah.	Klasifikasi Lantai	1. Keramik/marmer/granit 2. Ubin/tegel/teraso 3. Semen 4. Kayu/papan 5. Bambu 6. Tanah dan lainnya	Luas	m ²
1020	SP00023.00.00	Indikator SP2020			Lantai Granit	Suatu lantai yang terbuat dari batuan keras keputih-putihan yang dapat bertahan lebih lama dari keramik atau marmer.	Klasifikasi Lantai Granit	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m ²
1021	SP00033.00.00	Indikator SP2020			Lantai Keramik	Suatu lantai yang terbuat dari Tanah liat yang dibakar dan dicampur dengan mineral lain.	Klasifikasi Lantai Keramik	Klasifikasi berdasarkan	Luas	m ²

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								analisis atau sesuai kebutuhan		
1022	SP00038.00.00	Indikator SP2020			Lantai Marmer atau Batu Pualam	Suatu lantai yang terbuat dari batu gamping yang telah mengalami metamorfosis dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dsb.	Klasifikasi Lantai Marmer atau Batu Pualam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m ²
1023	SD00410.00.00	Indikator SDGs	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	Laporan Berkelanjutan Perusahaan	Laporan yang tidak terbatas pada keberlanjutan laporan perusahaan itu sendiri tetapi juga informasi berkelanjutan seperti, keberlanjutan penerbitan informasi sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan atau melaporkan informasi kepada pemerintah nasional.	Klasifikasi Laporan Berkelanjutan Perusahaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Laporan/Dokumen
1024	SD00411.00.00	Indikator SDGs	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK.	Laporan Penurunan Emisi GRK Tahunan	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAN GRK dan RAD GRK untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.	Klasifikasi Laporan Penurunan Emisi GRK Tahunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Laporan/Dokumen
1025	SD00412.00.00	Indikator SDGs	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).	Laut	Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	Klasifikasi Laut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
1026	SD00413.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan	Laut Teritorial	Jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.	Klasifikasi Laut Teritorial	Klasifikasi berdasarkan	Jarak	Mil

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				perikanan (WPP) secara berkelanjutan.				analisis atau sesuai kebutuhan		
1027	SD00414.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Layanan Hukum	Layanan yang melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau hukum seperti masalah pendapat hukum, pengarsipan, pembelaan dan pembelaan terhadap tuntutan hukum, dll. Oleh pengacara atau pengacara yang menjalankan layanan terkait hukum.	Klasifikasi Layanan Hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Layanan; Persen
1028	SD00415.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Layanan Keuangan	Bentuk layanan dari lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkannya pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal.	Klasifikasi Layanan Keuangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Layanan; Persen
1029	SD00416.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.	Klasifikasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara	1. Perkara perdata permohonan 2. Gugatan 3. Eksekusi	Jumlah; Persentase	Layanan; Persen
1030	SD00417.00.00	Indikator SDGs	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan	Layanan Rehabilitasi Medis	Fasilitas layanan kesehatan baik Puskesmas, Klinik Pratama, RSUD atau RS khusus, yang telah ditetapkan menjadi	Klasifikasi Layanan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Layanan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.		Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) oleh Menteri Kesehatan	Rehabilitasi Medis	analisis atau sesuai kebutuhan		
1031	SD00418.00.00	Indikator SDGs	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Legislasi	Pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintah yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.	Klasifikasi Legislasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
1032	SD00419.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Lembaga Demokrasi	Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah.	Klasifikasi Lembaga Demokrasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen
1033	SD00420.00.00	Indikator SDGs	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi	Lembaga Hak Asasi	Lembaga administratif independen yang dibentuk oleh negara untuk	Klasifikasi Lembaga Hak	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Lembaga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Manusia (HAM) Nasional	menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia, lembaga negara dan merupakan bagian dari aparaturnegara dan didanai oleh negara, namun lembaga ini beroperasi dan berfungsi secara independen dari pemerintah.	Asasi Manusia (HAM) Nasional	analisis atau sesuai kebutuhan		
1034	SD00421.00.00	Indikator SDGs	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) yang Independen	Institusi dengan status akreditasi "level A" sesuai United Nations Paris Principles, yang diadopsi oleh UN General Assembly tahun 1993. Proses akreditasi dilaksanakan melalui peer review oleh SubCommittee on Accreditation (SCA) dari ICC.	Klasifikasi Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) yang Independen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen
1035	SD00422.00.00	Indikator SDGs	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Lembaga HAM Nasional yang Compliance dengan Paris Principles	Apabila berkomitmen untuk menggalakkan dan melindungi HAM dengan mandat yang luas, kompetensi dan kekuatan untuk menginvestigasi, melaporkan situasi HAM nasional, dan mempublikasikan HAM melalui informasi dan edukasi. Lembaga ini juga independen dari pemerintah, memiliki kompetensi kuasi judicial, menangani keluhan, dan mendampingi korban untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Lembaga termasuk memiliki klasifikasi akreditasi yang baik bila kredibel, sah, relevan dan efektif dalam mempromosikan HAM di tingkat nasional.	Klasifikasi Lembaga HAM Nasional yang Compliance dengan Paris Principles	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen
1036	SD00423.00.00	Indikator SDGs	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Lembaga Keuangan	Semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat.	Klasifikasi Lembaga Keuangan	1. Perbankan konvensional 2. Perbankan Syariah 3. Pembiayaan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								dan Modal Ventura 4. Penunjang Pasar Modal 5. Perasuransian 6. Dana Pensiun 7. Pegadaian 8. Pedagang Valas 9. Koperasi Simpan Pinjam		
1037	SD00424.00.00	Indikator SDGs	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Lembaga Konservasi (LK)	Lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (exsitu) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya.	Klasifikasi Lembaga Konservasi (LK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen
1038	SD00425.01.00	Indikator SDGs	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Lembaga Pembiayaan	Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.	Klasifikasi Lembaga Pembiayaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen
1039	SD00425.02.00	Indikator SDGs	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Lembaga Pembiayaan	Suatu badan usaha di luar bank yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, ataupun surat sanggup bayar.	Klasifikasi Lembaga Pembiayaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen
1040	SD00426.00.00	Indikator SDGs	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Lembaga Pembiayaan Infrastruktur	Badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk	Klasifikasi Lembaga	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; persentase	Usaha; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						penyediaan dana pada proyek infrastruktur.	Pembiayaan Infrastruktur	analisis atau sesuai kebutuhan		
1041	SD00427.00.00	Indikator SDGs	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Lembaga pencatatan sipil	Instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.	Klasifikasi Lembaga pencatatan sipil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen
1042	SD00428.00.00	Indikator SDGs	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/di bantu.	Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA	Lembaga milik Pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.	Klasifikasi Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen
1043	SD00429.00.00	Indikator SDGs	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/di bantu.	Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Lembaga rehabilitasi sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat yang telah menerima bantuan dan/atau pengembangan kelembagaan, baik dari sisi manajerial, SDM dan teknis pelayanan.	Klasifikasi Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen
1044	SD00430.01.00	Indikator SDGs	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Limbah	Bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan atau hewan.	Klasifikasi Limbah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1045	SD00430.02.00	Indikator SDGs	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Limbah	Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.	Klasifikasi Limbah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
1046	SD00431.00.00	Indikator SDGs	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Limbah B3	Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3	Klasifikasi Limbah B3	1. Limbah B3 dari Sumber Spesifik 2. Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik 3. Limbah B3 dari B3 yang Sudah Kadaluwarsa, Tumpah dan Bekas Kemasan B3	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
1047	SD00432.00.00	Indikator SDGs	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan	Timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan	Klasifikasi Limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
1048	SD01120.00.00	Indikator SDGs	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan	Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola ditambah dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola ditambah dengan timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola ditambah dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola yang dinyatakan dengan satuan ton.	Klasifikasi limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(sektor industri)					
1049	SD00433.00.00	Indikator SDGs	12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.	Limbah Berbahaya (B3)	Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.	Klasifikasi Limbah Berbahaya (B3)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
1050	SD00434.00.00	Indikator SDGs	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Limbah Padat Perkotaan	Sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat termasuk sampah.	Klasifikasi Limbah Padat Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1051	SD00435.00.00	Indikator SDGs	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Lingkungan Hidup	Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.	Klasifikasi Lingkungan Hidup	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1052	SD00436.00.00	Indikator SDGs	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Listrik non-PLN	Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).	Klasifikasi Listrik non-PLN	1. Tenaga surya 2. BBM 3. Lainnya	Jumlah	Kwh
1053	SD00437.00.00	Indikator SDGs	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Listrik PLN	Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.	Klasifikasi Listrik PLN	1. 450 VA 2. 900 VA 3. 1.300 VA 4. 2.200 VA 5. 3.500-5.500 VA 6. 6.600-14.000 VA 7. Di atas 14.000 VA	Jumlah	Kwh
1054	SD00438.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Litigasi	Penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.	Klasifikasi Litigasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1055	SD00439.00.00	Indikator SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Klasifikasi Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Daerah/1 lokasi
1056	SD00439.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Klasifikasi Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Daerah/1 lokasi
1057	SD00439.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Klasifikasi Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Daerah/1 lokasi
1058	SD00442.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan hutan konservasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.	Klasifikasi Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
1059	SD00443.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Jumlah luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi untuk mendukung daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).	Klasifikasi Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1060	SD01121.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS.	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi ke-1 ditambah Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha)	Klasifikasi Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
1061	SD00444.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi dan keterwakilan ekosistem serta berupaya mengembalikan keseimbangan hayati dan ekosistemnya.	Klasifikasi Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
1062	SD00445.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Lumpur Tinja	Limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja). Campuran padatan dan fluida yang diambil dari tempat penampungan pertama limbah manusia (tinja).	Klasifikasi Lumpur Tinja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1063	SD00445.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Lumpur Tinja	Limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja). Campuran padatan dan fluida yang diambil dari tempat penampungan pertama limbah manusia (tinja).	Klasifikasi Lumpur Tinja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah tangga; Persen
1064	SD00446.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Madrasah Aliyah (MA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Madrasah Aliyah (MA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1065	SD00446.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MAberakreditasi minimal B.	Madrasah Aliyah (MA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Madrasah Aliyah (MA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1066	SD00446.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Madrasah Aliyah (MA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Madrasah Aliyah (MA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1067	SD00446.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se derajat.	Madrasah Aliyah (MA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Madrasah Aliyah (MA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1068	SD00446.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Madrasah Aliyah (MA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Madrasah Aliyah (MA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1069	SD00446.00.00	Indikator SDGs	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Madrasah Aliyah (MA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain	Klasifikasi Madrasah Aliyah (MA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.				
1070	SD00447.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se derajat.	Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs	Klasifikasi Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1071	SD00447.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3)SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1072	SD00448.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum	Klasifikasi Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.		analisis atau sesuai kebutuhan		
1073	SD00448.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar	Klasifikasi Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1074	SD00448.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1075	SD00448.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Dasar (SD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1076	SD00449.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.	Klasifikasi Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1077	SD00449.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Madrasah Tsanawiyah (Mts)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.	Klasifikasi Madrasah Tsanawiyah (Mts)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1078	SD00449.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.	Klasifikasi Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1079	SD00449.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.	Klasifikasi Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				at; (3)SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki- laki di (4) Perguruan Tinggi.						
1080	SD00450.00.00	Indikator SDGs	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Mahasiswa	Peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.	Klasifikasi Mahasiswa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; rata-rata; persentase	Orang; persen
1081	SD00451.00.00	Indikator SDGs	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Malaria	Penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles	Klasifikasi Malaria	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1082	SD00452.00.00	Indikator SDGs	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	Manajemen Perkotaan	Para pejabat, termasuk pejabat terpilih dan pegawai negeri, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kota, lintas semua sektor, seperti jalan, air, sanitasi, energi, ruang publik, sertifikat tanah, dll.	Klasifikasi Manajemen Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1083	SD00453.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Masalah psikososial	Masalah sosial yang mempunyai dampak negatif dan berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa atau masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari gangguan jiwa.	Klasifikasi Masalah psikososial	Klasifikasi berdasarkan penyebab	Jumlah	Kejadian
1084	SD00454.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Masyarakat	Seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.	Klasifikasi Masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; rata-rata	Orang
1085	SD00455.00.00	Indikator SDGs	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	Masyarakat Sipil	Kombinasi organisasi pemerintah, non pemerintah, kelompok masyarakat, berbasis organisasi masyarakat, organisasi perwakilan regional, serikat pekerja, lembaga penelitian, badan profesional, dan kelompok lain yang mewakili minat dan keinginan anggota dan komunitas yang lebih luas.	Klasifikasi Masyarakat Sipil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Organisasi/Kelompok; Persen
1086	SD00455.00.00	Indikator SDGs	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Masyarakat Sipil	Kombinasi organisasi pemerintah, non pemerintah, kelompok masyarakat, berbasis organisasi masyarakat, organisasi perwakilan regional, serikat pekerja, lembaga penelitian, badan profesional, dan kelompok lain yang mewakili minat dan keinginan anggota dan komunitas yang lebih luas.	Klasifikasi Masyarakat Sipil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Organisasi/Kelompok; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1087	SP00075.00.00	Indikator SP2020			Mata air	Sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya tanpa ditarik menggunakan alat atau pompa, termasuk mata air terlindung maupun tidak terlindung.	Klasifikasi Mata air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1088	SD00456.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Mata Air/ Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi Mata Air/ Sumber Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1089	SD00457.00.00	Indikator SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Median pengeluaran per kapita	Nilai tengah yang membagi sebaran data pengeluaran per kapita seluruh penduduk menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya.	Klasifikasi Median pengeluaran per kapita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
1090	SD00458.00.00	Indikator SDGs	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan.	Klasifikasi Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Umur	Tahun

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1091	SD00459.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Mediasi	Penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.	Klasifikasi Mediasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1092	SD00460.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum	Rumah tangga yang menggunakan air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.	Klasifikasi Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum	1. Membeli, 2. Tidak membeli	Jumlah; persentase	Rumah tangga; persen
1093	SD00461.00.00	Indikator SDGs	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Memiliki telepon genggam	Apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir.	Klasifikasi Memiliki telepon genggam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1094	SP00039.00.00	Indikator SP2020			Menantu	Suami atau istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.	Klasifikasi Menantu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1095	SD00462.00.00	Indikator SDGs	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Mencari Pekerjaan	Kegiatan dari seseorang yang berusaha mencari/mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu seminggu yang lalu.	Klasifikasi Mencari Pekerjaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1096	SD00463.00.00	Indikator SDGs	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Mencuci tangan dengan sabun dan air	Salah satu tindakan dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun dan air merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit.	Klasifikasi Mencuci tangan dengan sabun dan air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1097	SD00463.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Mencuci tangan dengan sabun dan air	Salah satu tindakan dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun dan air merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit.	Klasifikasi Mencuci tangan dengan sabun dan air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1098	SD00464.00.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Mengakses Internet	Meluangkan waktu untuk memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, sosial media, games online, dan lainnya. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out) internet dan hanya melanjutkan permainan saja termasuk dalam mengakses internet. Contoh: seorang anak yang bermain games online tetapi log in (membuka internet) dibukakan oleh orang tuanya/orang lain.	Klasifikasi Mengakses Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1099	SD00465.00.00	Indikator SDGs	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Mengakses Layanan Rehabilitasi	Penyalah guna zat, termasuk narkoba dan alkohol yang telah mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah.	Klasifikasi Mengakses Layanan Rehabilitasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1100	SD00466.00.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Menggunakan Internet	Apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, media sosial, online games, dan lainnya.	Klasifikasi Menggunakan Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1101	SP00040.00.00	Indikator SP2020			Mengurus Rumah Tangga	Kegiatan mengelola kebutuhan keluarga dan urusan rumah tangga tanpa mendapat upah atau gaji, termasuk anggota keluarga yang membantu mengurus rumah tangga	Klasifikasi Mengurus Rumah Tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1102	SD00467.00.00	Indikator SDGs	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Merokok	Aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa.	Klasifikasi Merokok	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1103	SD00467.00.00	Indikator SDGs	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Merokok	Aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa.	Klasifikasi Merokok	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1104	SP00041.00.00	Indikator SP2020			Mertua	Orang tua dari suami atau istri kepala keluarga.	Klasifikasi Mertua	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1105	SD00468.00.00	Indikator SDGs	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Metode Kontrasepsi (CPR)	Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase.	Klasifikasi Metode Kontrasepsi (CPR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1106	SD00468.00.00	Indikator SDGs	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Metode Kontrasepsi (CPR)	Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase.	Klasifikasi Metode Kontrasepsi (CPR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1107	SD00469.00.00	Indikator SDGs	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Metropolitan Baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kawasan perkotaan terpadu dengan sistem jaringan wilayah yang terintegrasi yang berada di luar Jawa yang juga memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.	Klasifikasi Metropolitan Baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen
1108	SD00854.00.00	Indikator SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Migran	Seseorang yang datang ke suatu ekonomi dan tinggal ataupun bermaksud untuk tinggal selama satu tahun atau lebih.	Klasifikasi Migran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1109	SD00471.00.00	Indikator SDGs	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Migran Lokal Kota	Penduduk migran risen yang tempat tinggalnya saat lima tahun sebelum survei masih di wilayah kota.	Klasifikasi Migran Lokal Kota	1. Dari pedesaan 2. Dari perkotaan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1110	SD00472.00.00	Indikator SDGs	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Migran Luar Kota	Penduduk migran risen yang tempat tinggalnya saat lima (5) tahun sebelum survei berada di luar wilayah kota.	Klasifikasi Migran Luar Kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1111	SD00473.00.00	Indikator SDGs	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	Mitigasi	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan ruang b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern	Klasifikasi Mitigasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1112	SD00473.00.00	Indikator SDGs	13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan	Mitigasi	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana	Klasifikasi Mitigasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.		Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan ruang b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern				
1113	SD00474.00.00	Indikator SDGs	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	Mitigasi Bencana Alam	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana, meliputi sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi	Klasifikasi Mitigasi Bencana Alam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1114	SP00027.00.00	Indikator SP2020			Nagari	Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat	Klasifikasi Nagari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Nagari

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.				
1115	SD00475.00.00	Indikator SDGs	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Narapidana	Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.	Klasifikasi Narapidana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; orang
1116	SD00477.00.00	Indikator SDGs	17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	National Strategy for Development of Statistics (NSDS)	Sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat sistem statistik. Strategi Nasional Pengembangan Statistik menetapkan prioritas statistik dalam jangka menengah dan panjang untuk memenuhi peningkatan permintaan akan informasi dari pemerintah dan pengguna data lainnya.	Klasifikasi National Strategy for Development of Statistics (NSDS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
1117	SD00478.01.00	Indikator SDGs	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Negara	Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.	Klasifikasi Negara	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara
1118	SD00478.01.00	Indikator SDGs	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau	Negara	Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.	Klasifikasi Negara	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pengendalian jenis asing invasif (JAI).						
1119	SD00478.01.00	Indikator SDGs	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Negara	Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.	Klasifikasi Negara	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara
1120	SD00478.02.00	Indikator SDGs	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Negara	Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.	Klasifikasi Negara	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara
1121	SD00478.02.00	Indikator SDGs	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).	Negara	Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.	Klasifikasi Negara	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1122	SD00478.02.00	Indikator SDGs	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Negara	Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.	Klasifikasi Negara	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara
1123	SD00478.03.00	Indikator SDGs	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Negara	Persekutuan bangsa dalam suatu daerah yang tentu batas-batasnya dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur.	Klasifikasi Negara	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara
1124	SD00478.03.00	Indikator SDGs	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).	Negara	Persekutuan bangsa dalam suatu daerah yang tentu batas-batasnya dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur.	Klasifikasi Negara	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara
1125	SD00478.03.00	Indikator SDGs	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan	Negara	Persekutuan bangsa dalam suatu daerah yang tentu batas-batasnya dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur.	Klasifikasi Negara	1. Negara Berkembang 2. Negera Maju	Jumlah	Negara

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.						
1126	SD00479.00.00	Indikator SDGs	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Negara Berkembang	Sebuah negara dengan sedikit kegiatan industri dan ekonomi dan di mana orang umumnya berpenghasilan rendah.	Klasifikasi Negara Berkembang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
1127	SD00470.00.00	Indikator SDGs	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US\$/ tahun perkapita	Klasifikasi Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	1. Lower middle 2. Upper middle	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1128	SD00470.00.00	Indikator SDGs	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di	Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US\$/ tahun perkapita.	Klasifikasi Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	1. Lower middle 2. Upper middle	Jumlah; persentase	Negara; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Organisasi Internasional.						
1129	SD00470.00.00	Indikator SDGs	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US\$/ tahun perkapita.	Klasifikasi Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	1. Lower middle 2. Upper middle	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1130	SD00470.00.00	Indikator SDGs	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US\$/ tahun perkapita.	Klasifikasi Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	1. Lower middle 2. Upper middle	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1131	SD00470.00.00	Indikator SDGs	17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	Negara dengan pendapatan 996 hingga 12055 US\$/ tahun perkapita.	Klasifikasi Negara Berpenghasilan Menengah (<i>Middle Income Countries</i>)	1. Lower middle 2. Upper middle	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1132	SD00440.00.00	Indikator SDGs	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara	Negara Berpenghasilan	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US\$/ tahun perkapita	Klasifikasi Negara	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; persentase	Negara; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				negara-negara berkembang di organisasi internasional.	an Rendah (<i>Low Income Countries</i>)		Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	analisis atau sesuai kebutuhan		
1133	SD00440.00.00	Indikator SDGs	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Negara Berpenghasilan Rendah (<i>Low Income Countries</i>)	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US\$/ tahun perkapita.	Klasifikasi Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1134	SD00440.00.00	Indikator SDGs	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Negara Berpenghasilan Rendah (<i>Low Income Countries</i>)	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US\$/ tahun perkapita.	Klasifikasi Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1135	SD00440.00.00	Indikator SDGs	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Negara Berpenghasilan Rendah (<i>Low Income Countries</i>)	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US\$/ tahun perkapita.	Klasifikasi Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1136	SD00440.00.00	Indikator SDGs	17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan	Negara Berpenghasilan Rendah (<i>Low Income Countries</i>)	Negara dengan pendapatan kurang dari 996 US\$/ tahun perkapita.	Klasifikasi Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.						
1137	SD01122.00.00	Indikator SDGs	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
1138	SD00480.00.00	Indikator SDGs	11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan	Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Negara berpenghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan serta memiliki tingkat aset manusia yang rendah.	Klasifikasi Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.						
1139	SD00480.00.00	Indikator SDGs	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Negara berpenghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan serta memiliki tingkat aset manusia yang rendah.	Klasifikasi Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1140	SD00480.00.00	Indikator SDGs	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Negara berpenghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan serta memiliki tingkat aset manusia yang rendah.	Klasifikasi Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1141	SD00480.00.00	Indikator SDGs	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi	Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Negara berpenghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan serta memiliki tingkat aset manusia yang rendah.	Klasifikasi Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.						
1142	SD00480.00.00	Indikator SDGs	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Negara berpenghasilan rendah yang menghadapi hambatan struktural yang parah terhadap pembangunan berkelanjutan. Sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan serta memiliki tingkat aset manusia yang rendah.	Klasifikasi Negara Kurang Berkembang (LDCs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1143	SD01123.00.00	Indikator SDGs	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					berkelanjutan					
1144	SD01124.00.00	Indikator SDGs	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	***Belum ada metadata globalnya. Indikator yang diukur di tingkat global.***	Klasifikasi Negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
1145	SD01125.00.00	Indikator SDGs	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Indikator ini diukur di tingkat global dengan memastikan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Klasifikasi Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
1146	SD01126.00.00	Indikator SDGs	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk	Negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				negara-negara kurang berkembang.	investasi untuk negara-negara kurang berkembang		negara-negara kurang berkembang			
1147	SD01127.00.00	Indikator SDGs	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Negara yang mengimplemen- tasikan kebijakan migran yang baik	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
1148	SD01128.00.00	Indikator SDGs	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	Negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1149	SD01129.00.00	Indikator SDGs	13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	Negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Negara
1150	SD00481.00.00	Indikator SDGs	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	Klasifikasi Negara-Negara Berkembang	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1151	SD00481.00.00	Indikator SDGs	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	Klasifikasi Negara-Negara Berkembang	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara	Jumlah; persentase	Negara; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				berkembang di Organisasi Internasional.				Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)		
1152	SD00481.00.00	Indikator SDGs	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	Klasifikasi Negara-Negara Berkembang	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1153	SD00481.00.00	Indikator SDGs	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	Klasifikasi Negara-Negara Berkembang	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Jumlah; persentase	Negara; Persen
1154	SD00481.00.00	Indikator SDGs	17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang	Negara-Negara Berkembang	Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah dan rendah (low and middle income countries).	Klasifikasi Negara-Negara Berkembang	1. Negara Berpenghasilan Rendah (Low Income Countries) 2. Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Countries)	Jumlah; persentase	Negara; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				ramah lingkungan.						
1155	SD00482.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Nelayan	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan	Klasifikasi Nelayan	1. Nelayan Kecil 2. Nelayan Tradisional 3. Nelayan Buruh 4. Nelayan Pemilik	Jumlah; persentase	Orang; persen
1156	SD00482.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan	Klasifikasi Nelayan	1. Nelayan Kecil 2. Nelayan Tradisional 3. Nelayan Buruh 4. Nelayan Pemilik	Jumlah; persentase	Orang; persen
1157	SD00483.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Nelayan Kecil	Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).	Klasifikasi Nelayan Kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1158	SD00484.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk	Nelayan Tradisional	nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.	Klasifikasi Nelayan Tradisional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				perikanan skala kecil.						
1159	SD00485.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan yang Terlindungi	Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.	Klasifikasi Nelayan yang Terlindungi	1. Nelayan Kecil 2. Nelayan Tradisional 3. Nelayan Buruh 4. Nelayan Pemilik	Jumlah; persentase	Orang; persen
1160	SD00486.00.00	Indikator SDGs	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Nepotisme	Pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.	Klasifikasi Nepotisme	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1161	SD01130.00.00	Indikator SDGs	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD
1162	SD01131.00.00	Indikator SDGs	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber	Nilai dolar atas semua	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Nilai dolar atas	Klasifikasi berdasarkan	Nilai	USD

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang		semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang	analisis atau sesuai kebutuhan		
1163	SD00487.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Nilai Indeks METT (Management Effectiveness Tracking Tool)	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penilaian elemen-elemen utama yang mencakup pemahaman konteks, perencanaan, alokasi sumberdaya (input), kegiatan pengelolaan (proses), produk dan jasa (output) dan dampaknya (outcome).	Klasifikasi Nilai Indeks METT (Management Effectiveness Tracking Tool)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks
1164	SD00488.00.00	Indikator SDGs	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Nilai Tambah	Besarnya nilai output dikurangi besarnya biaya intermediate input (biaya antara).	Klasifikasi Nilai Tambah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
1165	SD00488.00.00	Indikator SDGs	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah	Besarnya nilai output dikurangi besarnya biaya intermediate input (biaya antara).	Klasifikasi Nilai Tambah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
1166	SD00489.00.00	Indikator SDGs	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Nilai tambah industri kecil	Nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil.	Klasifikasi Nilai tambah industri kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1167	SD00490.00.00	Indikator SDGs	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Nilai tambah industri manufaktur	Jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah manufaktur diproyeksikan sebagai presentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah manufaktur dihitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan.	Klasifikasi Nilai tambah industri manufaktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
1168	SD00491.00.00	Indikator SDGs	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang.	Klasifikasi Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
1169	SD00492.00.00	Indikator SDGs	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Nilai Tambah Teknologi Menengah dan Tinggi	Tambahan bernilai tinggi industri manufaktur dengan intensitas teknologi yang lebih tinggi dan produktivitas tenaga kerja.	Klasifikasi Nilai Tambah Teknologi Menengah dan Tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Rupiah; persen
1170	SP00042.00.00	Indikator SP2020			Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia	Klasifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	NIK
1171	SP00043.00.00	Indikator SP2020			Nomor Kartu Keluarga (KK)	Nomor identitas unik yang terdapat pada KK.	Klasifikasi Nomor Kartu Keluarga (KK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Nomor KK

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1172	SD00493.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Non litigasi	Penyelesaian masalah hukum melalui jalur non pengadilan.	Klasifikasi Non litigasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1173	SD00494.00.00	Indikator SDGs	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Non migas	Diluar gas dan bumi (tentang barang produksi, dan sebagainya) yang tidak tergolong gas dan bumi.	Klasifikasi Non migas	1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Pertambangan dan lainnya	Berat bersih/volume; nilai	Ton; kg; Rupiah; USD
1174	SD00495.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)	Kesepakatan diantara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan.	Klasifikasi Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	MoU
1175	SD00496.00.00	Indikator SDGs	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Obat	Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.	Klasifikasi Obat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Obat; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1176	SD00496.00.00	Indikator SDGs	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Obat	Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.	Klasifikasi Obat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Obat; Persen
1177	SD00497.00.00	Indikator SDGs	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Obat Esensial	Obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya	Klasifikasi Obat Esensial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Obat; Persen
1178	SD00498.00.00	Indikator SDGs	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Obesitas (gemuk/sangat gemuk)	Penyakit kronis dengan ciri-ciri timbunan lemak tubuh yang berlebih (eksesif), biasanya menggunakan ukuran berat badan menurut tinggi badan dibandingkan tinggi badan >2 standar WHO 2005.	Klasifikasi Obesitas (gemuk/sangat gemuk)	1. Gemuk : Zscore >2, 0 s/d Zscore ≤3,0 2. Obesitas : Zscore >3,0	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1179	SD00499.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Obligasi Negara (ON)	SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon.	Klasifikasi Obligasi Negara (ON)	1. Obligasi Negara dengan kupon 2. Obligasi Negara tanpa kupon	Jumlah	Obligasi
1180	SD00500.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap	Obligasi Negara dengan Kupon	Memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau enam bulan sekali).	Klasifikasi Obligasi Negara dengan Kupon	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Obligasi

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				ekspor barang dan jasa.						
1181	SD00501.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Obligasi Negara Tanpa Kupon	Tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.	Klasifikasi Obligasi Negara Tanpa Kupon	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Obligasi
1182	SD01132.00.00	Indikator SDGs	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
1183	SD00502.01.00	Indikator SDGs	2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	Official Development Assistance (ODA)	Aliran dana ke negara-negara dan wilayah dalam daftar DAC (Development Assistance Committee) untuk Penerima ODA dan ke lembaga multilateral yang: i) disediakan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah negara dan daerah, atau oleh lembaga eksekutif mereka; dan ii) setiap transaksi dikelola dengan promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utamanya; dan bersifat lunak dan menyampaikan elemen hibah setidaknya 25 persen (dihitung dengan tingkat diskon 10 persen)	Klasifikasi Official Development Assistance (ODA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Bantuan /Lembaga; Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1184	SD00502.01.00	Indikator SDGs	3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.	Official Development Assistance (ODA)	Aliran dana ke negara-negara dan wilayah dalam daftar DAC (Development Assistance Committee) untuk Penerima ODA dan ke lembaga multilateral yang: i) disediakan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah negara dan daerah, atau oleh lembaga eksekutif mereka; dan ii) setiap transaksi dikelola dengan promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utamanya; dan bersifat lunak dan menyampaikan elemen hibah setidaknya 25 persen (dihitung dengan tingkat diskon 10 persen)	Klasifikasi Official Development Assistance (ODA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Bantuan /Lembaga; Rupiah
1185	SD00502.02.00	Indikator SDGs	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Official Development Assistance (ODA)	Bantuan pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang.	Klasifikasi Official Development Assistance (ODA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Bantuan /Lembaga; Rupiah
1186	SD00502.03.00	Indikator SDGs	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Official Development Assistance (ODA)	Ukuran diterimanya pengembangan kerjasama internasional. Dalam rangka menyediakan tempat belajar bagi negara berkembang di institusi pendidikan negara donor.	Klasifikasi Official Development Assistance (ODA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Bantuan /Lembaga; Rupiah
1187	SD00503.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.	Klasifikasi Opini	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian 2. Opini Wajar	Jumlah; Persentase	Opini; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).				dengan Pengecualian 3. Opini Tidak Wajar 4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini		
1188	SD00504.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).	Klasifikasi Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Opini; Persen
1189	SD00505.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.	Klasifikasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Opini; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).						
1190	SP00044.00.00	Indikator SP2020			Orang Asing	Orang bukan WNI yang telah bertempat tinggal/menetap dan tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tetapi saat pendataan berada di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun	Klasifikasi Orang Asing	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-Rata; Persentase	Orang; Persen
1191	SD01133.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah seluruh orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi Penyelesaian Sengketa	1. Litigasi 2. Non Litigasi	Persentase; jumlah	Persen; orang
1192	SD00506.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Orang Miskin	Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.	Klasifikasi Orang Miskin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; orang
1193	SD00506.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar	Orang Miskin	Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.	Klasifikasi Orang Miskin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.						
1194	SD00507.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Orang tua	Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.	Klasifikasi Orang tua	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; orang
1195	SD00507.00.00	Indikator SP2020			Orang tua	Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.	Klasifikasi Orang tua	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; jumlah	Persen; orang
1196	SD00508.00.00	Indikator SDGs	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Organisasi Internasional	Organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.	Klasifikasi Organisasi Internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
1197	SD00508.00.00	Indikator SDGs	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di	Organisasi Internasional	Organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.	Klasifikasi Organisasi Internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Organisasi Internasional.						
1198	SD00509.00.00	Indikator SDGs	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Klasifikasi Organisasi Kemasyarakatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
1199	SD00510.00.00	Indikator SDGs	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD))	Organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi yang beranggotakan 36 negara Eropa dan Amerika Utara ditambah Jepang dan Korea Selatan. Indonesia, bersama dengan Brazil, India, dan China, atau BRIC menjadi key partners dari OECD yang didirikan pada tahun 1961 dan berpusat di Paris.	Klasifikasi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD))	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi
1200	SD00511.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Pagu Anggaran	Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2014.	Klasifikasi Pagu Anggaran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1201	SD00512.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-	Pagu Indikatif	Ancar – ancar pagu alokasi anggaran yang diberikan kepada K/L berdasarkan SB	Klasifikasi Pagu Indikatif	Klasifikasi berdasarkan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				procurement terhadap belanja pengadaan.		Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja KL.		analisis atau sesuai kebutuhan		
1202	SD01134.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api	Panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda): jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.	Klasifikasi Panjang jalur kereta api	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	Km
1203	SD01135.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Panjang pembangunan jalan tol	Panjang jalan tol diukur dalam satuan km.	Klasifikasi Panjang pembangunan jalan tol	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	Km
1204	SD00513.00.00	Indikator SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Parlemen	Parlemen di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).	Klasifikasi Parlemen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Parlemen
1205	SD00514.00.00	Indikator SDGs	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	Partikulat	Partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron (mikrometer).	Klasifikasi Partikulat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	ugram/m ³

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1206	SD00515.00.00	Indikator SDGs	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Partisipasi Masyarakat	Peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Klasifikasi Partisipasi Masyarakat	1. Konsultasi publik 2. Penyampaian Aspirasi 3. Rapat dengar pendapat umum 4. Kunjungan kerja 5. Sosialisasi 6. Seminar 7. Lokakarya 8. Diskusi	Persentase	Persen
1207	SD00516.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan	Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Bentuk lain dari partisipasi adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah (frekuensi) keterlibatan baik secara individual maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti hearing, demonstrasi, mogok, dan sebagainya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk	Klasifikasi Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui press statement, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.				
1208	SD00517.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Pasangan Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah; persentase	Pasangan; persen
1209	SD00517.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Pasangan Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah; persentase	Pasangan; persen
1210	SD00517.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pasangan Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah; persentase	Pasangan; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1211	SD00518.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Pasar Rakyat	Suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.	Klasifikasi Pasar Rakyat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pasar; Persen
1212	SD00519.00.00	Indikator SDGs	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Pasca Rehabilitasi	Kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.	Klasifikasi Pasca Rehabilitasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
1213	SP00044.00.00	Indikator SP2020			Pedukuhan	Satuan tugas kewilayahan pembantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di DI Yogyakarta	Klasifikasi Pedukuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pedukuhan
1214	SD00526.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.	Klasifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pejabat

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.						
1215	SD00527.00.00	Indikator SDGs	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Pekerja	Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (buruh).	Klasifikasi Pekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1216	SD00528.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Pekerja Bebas	Seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.	Klasifikasi Pekerja Bebas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1217	SD00528.00.00	Indikator SP2020			Pekerja Bebas	Seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.	Klasifikasi Pekerja Bebas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1218	SP00045.00.00	Indikator SP2020			Pekerja dibayar	Semua orang yang bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapatkan upah dan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang.	Klasifikasi Pekerja dibayar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1219	SD00529.00.01	Indikator SDGs	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Pekerja informal di sektor non-pertanian	Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.	Klasifikasi Pekerja informal di sektor non-pertanian	KBLI	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1220	SD00529.00.02	Indikator SDGs	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Pekerja informal di sektor non-pertanian	Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.	Klasifikasi Pekerja informal di sektor non-pertanian	KBJI	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1221	SD00530.00.01	Indikator SDGs	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Pekerja informal di sektor pertanian	Penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.	Klasifikasi Pekerja informal di sektor pertanian	KBLI	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1222	SD00530.00.02	Indikator SDGs	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Pekerja informal di sektor pertanian	Penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri,	Klasifikasi Pekerja informal	KBJI	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sektor pertanian	berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.	di sektor pertanian			
1223	SD00531.00.00	Indikator SDGs	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Pekerja Migran	Orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja.	Klasifikasi Pekerja Migran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1224	SD01136.00.00	Indikator SDGs	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja, indikator ini dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah pekerja pada industri pariwisata, dengan jumlah pekerja semua sektor dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1225	SD00532.00.01	Indikator SDGs	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Pekerja setengah pengangguran	Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).	Klasifikasi Pekerja setengah pengangguran	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1226	SD00532.00.02	Indikator SDGs	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Pekerja setengah pengangguran	Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).	Klasifikasi Pekerja setengah pengangguran	1. Tidak Pernah Sekolah 2. Tidak tamat SD sederajat 3. SD/MI 4. SMP/MTs 5. SMA/MA 6. SMK 7. Diploma	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								(DI/DII/DIII) 8. S1/S2/S3		
1227	SP00046.00.00	Indikator SP2020			Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	Seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha (baik anggota keluarga atau bukan) dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.	Klasifikasi Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1228	SD00533.00.00	Indikator SDGs	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Pekerjaan	Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei diselenggarakan, tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja.	Klasifikasi Pekerjaan	KBJI	Jumlah	Pekerjaan
1229	SD00533.00.00	Indikator SP2020			Pekerjaan	Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei diselenggarakan, tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja.	Klasifikasi Pekerjaan	KBJI	Jumlah	Pekerjaan
1230	SD00534.00.00	Indikator SDGs	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Pelabuhan	Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat	Klasifikasi Pelabuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pelabuhan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						perpindahan intra dan antar moda transportasi.				
1231	SD00535.00.00	Indikator SDGs	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Pelabuhan Strategis	Pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, diantaranya fasilitas untuk pelayaran angkutan peti kemas, barang curah, barang umum dan penumpang serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal.	Klasifikasi Pelabuhan Strategis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pelabuhan
1232	SD00536.00.00	Indikator SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Pelaku Usaha	Orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.	Klasifikasi Pelaku Usaha	KBLI	Jumlah; persentase	Orang; persen
1233	SD00536.00.00	Indikator SDGs	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Pelaku Usaha	Orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.	Klasifikasi Pelaku Usaha	KBLI	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1234	SD00537.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.	Klasifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1235	SD00538.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.	Klasifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1236	SD00539.00.00	Indikator SDGs	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Pelayanan Dasar	Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.	Klasifikasi Pelayanan Dasar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1237	SD00539.00.00	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Pelayanan Dasar	Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.	Klasifikasi Pelayanan Dasar	Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1238	SD00540.00.00	Indikator SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Pelayanan Kesehatan	Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.	Klasifikasi Pelayanan Kesehatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1239	SD00540.00.00	Indikator SDGs	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan	Pelayanan Kesehatan	Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.	Klasifikasi Pelayanan Kesehatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.						
1240	SD00541.00.00	Indikator SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi	Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak.	Klasifikasi Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan n; Persen
1241	SD00542.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Pelayanan Peradilan	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.	Klasifikasi Pelayanan Peradilan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan n; Persen
1242	SD01137.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya	Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan n; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				perkara; dan Pos Layanan Hukum.	pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum		pembebasan biaya perkara, dan Pos Layanan Hukum			
1243	SD00543.00.00	Indikator SDGs	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Pelayanan Publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Klasifikasi Pelayanan Publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1244	SD00543.00.00	Indikator SDGs	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Pelayanan Publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Klasifikasi Pelayanan Publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1245	SD00544.00.00	Indikator SDGs	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran	Pelecehan	Setiap perilaku yang tidak pantas dan tidak diinginkan yang mungkin secara wajar diharapkan atau dianggap menyebabkan pelanggaran atau penghinaan bagi orang lain. Pelecehan dapat berupa kata-kata, isyarat, atau tindakan yang cenderung mengganggu, mengkhawatirkan, melecehkan, merendahkan, mengintimidasi, meremehkan, menghina	Klasifikasi Pelecehan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		atau memperlakukan orang lain atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, permusuhan, atau menyinggung.				
1246	SD00545.00.00	Indikator SDGs	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Pelecehan Seksual	Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, coleskan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.	Klasifikasi Pelecehan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1247	SD00545.00.00	Indikator SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Pelecehan Seksual	Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, coleskan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.	Klasifikasi Pelecehan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1248	SD00545.00.00	Indikator SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Pelecehan Seksual	Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, coleskan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.	Klasifikasi Pelecehan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1249	SD00545.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Pelecehan Seksual	Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, coleskan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.	Klasifikasi Pelecehan Seksual	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1250	SD00546.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.	Klasifikasi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1251	SD00546.00.00	Indikator SDGs	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Pembangunan	Proses, cara, perbuatan membangun.	Klasifikasi Pembangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program
1252	SD00547.00.00	Indikator SDGs	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Pembangunan Berkelanjutan	Pengembangan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.	Klasifikasi Pembangunan Berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program
1253	SD00548.00.00	Indikator SDGs	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Pembangunan Nasional	Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Klasifikasi Pembangunan Nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program
1254	SP00047.00.00	Indikator SP2020			Pembantu	Orang yang bekerja sebagai pembantu/sopir yang menginap di keluarga tersebut dengan menerima upah/gaji baik berupa uang atau pun barang.	Klasifikasi Pembantu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1255	SD00549.00.00	Indikator SDGs	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Pembela HAM	Orang dan/atau sekelompok orang dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun mendapatkan upah, yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai.	Klasifikasi Pembela HAM	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pembela; Persen
1256	SD00550.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.	Klasifikasi Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program
1257	SD00551.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Pemberi bantuan hukum	Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.	Klasifikasi Pemberi bantuan hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lembaga ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1258	SD00552.00.00	Indikator SDGs	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian Insentif	Dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.	Klasifikasi Pemberian Insentif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah
1259	SD00553.00.00	Indikator SDGs	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Pembiayaan Swasta	Donasi non tunai, swasta non profit, sponsor.	Klasifikasi Pembiayaan Swasta	1. Donasi Non Tunai 2. Swasta Non Profit 3. Sponsor	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1260	SD00554.01.00	Indikator SDGs	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Pembudi Daya Ikan	Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.	Klasifikasi Pembudi Daya Ikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1261	SD00554.02.00	Indikator SDGs	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Pembudi Daya Ikan	orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.	Klasifikasi Pembudi Daya Ikan	1. Pembesaran 2. Pembenihan 3. Ikan Hias	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1262	SD00555.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	Klasifikasi Pembudi Daya Ikan Kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1263	SD00556.00.00	Indikator SDGs	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Pembunuhan	Kejahatan dengan sengaja membunuh seseorang.	Klasifikasi Pembunuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
1264	SD00557.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kebutuhan dasar yang dimaksud mencakup: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan dan tempat hunian	Klasifikasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1. Terpenuhi 2. Tidak Terpenuhi	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1265	SD00558.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Jumlah absolut pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.	Klasifikasi Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
1266	SD00559.00.00	Indikator SDGs	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Pemerasan (<i>extortion</i>)	Permintaan pemberian pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.	Klasifikasi Pemerasan (<i>extortion</i>)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
1267	SD00560.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Klasifikasi Pemeriksaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
1268	SD00561.01.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Pemerintah Daerah	Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.	Klasifikasi Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1269	SD00561.01.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Pemerintah Daerah	Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.	Klasifikasi Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen
1270	SD00561.01.00	Indikator SDGs	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Pemerintah Daerah	Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.	Klasifikasi Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1271	SD00561.02.00	Indikator SDGs	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Pemerintah Daerah	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Klasifikasi Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen
1272	SD00561.02.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi	Pemerintah Daerah	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Klasifikasi Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Birokrasi Baik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
1273	SD00561.02.00	Indikator SDGs	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Pemerintah Daerah	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Klasifikasi Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen
1274	SD00561.02.00	Indikator SDGs	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Pemerintah Daerah	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Klasifikasi Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemda; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1275	SD00562.00.00	Indikator SDGs	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Pemerintah Pusat	Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.	Klasifikasi Pemerintah Pusat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemerintah; Persen
1276	SD00562.00.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap	Pemerintah Pusat	Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.	Klasifikasi Pemerintah Pusat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemerintah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				anggaran yang disetujui.						
1277	SD00563.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Pemilu yang Bebas dan Adil	Pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh, antara lain: adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara.	Klasifikasi Pemilu yang Bebas dan Adil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemilu; Persen
1278	SD00564.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Pemohon bantuan hukum	Orang atau kelompok yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.	Klasifikasi Pemohon bantuan hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemohon ; Persen
1279	SD00565.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Pemukiman Kumuh	Suatu wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai oleh: a. Banyak rumah tidak layak huni. b. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet. c. Penduduk/bangunan sangat padat. d. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban. e. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).	Klasifikasi Pemukiman Kumuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Luas; Persentase	Wilayah; Km2 ;Persen
1280	SD00566.00.00	Indikator SDGs	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Penahanan	Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	Klasifikasi Penahanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tersangka; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1281	SD00567.00.00	Indikator SDGs	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan akan pada lembaga konservasi	Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam melalui pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya dari baseline data tahun 2013.	Klasifikasi Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Satwa
1282	SD00568.00.00	Indikator SDGs	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Penanaman Modal Asing (PMA)	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.	Klasifikasi Penanaman Modal Asing (PMA)	1. Warga Negara Asing (WNA) 2. Badan Usaha Asing 3. Pemerintah Asing	Nilai	Rupiah/ USD
1283	SD00569.00.00	Indikator SDGs	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Penanganan Limbah Padat Perkotaan	Upaya penanganan limbah padat domestik di rumah sakit yang memenuhi standar untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, kenyamanan dan keindahan yang ditimbulkan.	Klasifikasi Penanganan Limbah Padat Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1284	SD01138.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.	Klasifikasi penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1285	SD01139.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.	Klasifikasi penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1286	SD01140.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.	Klasifikasi Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1287	SD00570.00.00	Indikator SDGs	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan	Penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan	Semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.	Klasifikasi Penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				terhadap perempuan.						
1288	SD00570.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM Perempuan	Semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.	Klasifikasi Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM Perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1289	SD00571.00.00	Indikator SDGs	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Penanganan Sampah	Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.	Klasifikasi Penanganan Sampah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tindakan ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1290	SD00572.00.00	Indikator SDGs	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Penanggulangan Filariasis	Semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi (microfilaria rate) serendah mungkin sehingga dapat menurunkan risiko penularan Filariasis di suatu wilayah.	Klasifikasi Penanggulangan Filariasis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tindakan; Persen
1291	SD00573.00.00	Indikator SDGs	14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).	Penangkapan Ikan	Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.	Klasifikasi Penangkapan Ikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tindakan; Persen
1292	SD00574.00.00	Indikator SDGs	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM	Penculikan	Membawa seseorang pergi secara ilegal dengan paksa, biasanya untuk meminta uang dengan imbalan membebaskan mereka.	Klasifikasi Penculikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dalam 12 bulan terakhir.						
1293	SD00575.00.00	Indikator SDGs	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Pencurian dengan Kekerasan	Mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.	Klasifikasi Pencurian dengan Kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1294	SD00575.00.00	Indikator SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Pencurian dengan Kekerasan	Mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan,	Klasifikasi Pencurian dengan Kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.				
1295	SD00575.00.00	Indikator SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Pencurian dengan Kekerasan	Mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.	Klasifikasi Pencurian dengan Kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1296	SD00575.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Pencurian dengan Kekerasan	Mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan	Klasifikasi Pencurian dengan Kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.				
1297	SD00576.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Pendampingan Psikososial	Bantuan langsung dalam bentuk pelayanan terapi psikososial di tempat perlindungan terdiri atas sarana dan prasarana pelayanan psikososial korban bencana.	Klasifikasi Pendampingan Psikososial	1. Ada 2. Tidak Ada	Jumlah	Bantuan; Asistensi
1298	SD00577.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Jumlah absolut pemberian asistensi sosial dalam bentuk pendampingan psikososial korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.	Klasifikasi Pendampingan psikososial korban bencana sosial	1. Ada 2. Tidak Ada	Jumlah	Bantuan; Asistensi
1299	SD00578.00.01	Indikator SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Pendapatan	Imbalan yang diterima baik berbentuk uang maupun barang, yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat.	Klasifikasi Pendapatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1300	SD00579.00.00	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Pendapatan Asli Daerah	Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).	Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1301	SD00580.00.00	Indikator SDGs	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	Pendapatan Nasional Bruto (<i>Gross National Product</i> (GNP))	PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri.	Klasifikasi Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Product (GNP))	1. PNB Pengeluaran Usaha 2. PNB Lapangan Usaha 1. PNB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2. PNB Atas Dasar Harga Berlaku"	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1302	SD00580.00.00	Indikator SDGs	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Pendapatan Nasional Bruto (<i>Gross National Product</i> (GNP))	PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri.	Klasifikasi Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Product (GNP))	1. PNB Pengeluaran Usaha 2. PNB Lapangan Usaha 1. PNB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2. PNB Atas Dasar Harga Berlaku"	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1303	SD00581.00.00	Indikator SDGs	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang,	Pendapatan Neto	Pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.	Klasifikasi Pendapatan Neto	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.						
1304	SD00581.00.00	Indikator SDGs	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Pendapatan Neto	Pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.	Klasifikasi Pendapatan Neto	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1305	SD00582.00.00	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.	Klasifikasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1306	SD00582.00.00	Indikator SDGs	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.	Klasifikasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1307	SD00583.00.00	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi	Pendapatan pajak	Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.	Klasifikasi Pendapatan pajak	Klasifikasi berdasarkan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				terhadap PDB menurut sumbernya.	perdagangan internasional		perdagangan internasional	analisis atau sesuai kebutuhan		
1308	SD00583.00.00	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Pendapatan pajak perdagangan internasional	Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.	Klasifikasi Pendapatan pajak perdagangan internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1309	SD00584.00.00	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Pendapatan Pemerintah (Negara)	Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah.	Klasifikasi Pendapatan Pemerintah (Negara)	1. Penerimaan Pajak 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 3. Hibah	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1310	SD00585.00.00	Indikator SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Pendapatan Rumah Tangga	Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).	Klasifikasi Pendapatan Rumah Tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1311	SD00578.00.02	Indikator SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,	Pendapatan/ Penghasilan	Meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan; dan nilai pembayaran	Klasifikasi Pendapatan/Penghasilan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.		sejenisnya. Terdapat dua komponen, yaitu: 1. untuk jam kerja biasa atau untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, dan 2. untuk lembur Semua komponen pendapatan lainnya dikumpulkan secara agregat.				
1312	SD00578.00.02	Indikator SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Pendapatan/ Penghasilan	Meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan; dan nilai pembayaran sejenisnya. Terdapat dua komponen, yaitu: 1. untuk jam kerja biasa atau untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, dan 2. untuk lembur Semua komponen pendapatan lainnya dikumpulkan secara agregat.	Klasifikasi Pendapatan/ Penghasilan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1313	SD00578.00.03	Indikator SDGs	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Pendapatan/ Penghasilan	Pendapatan aktual yang diterima untuk bulan terakhir di pekerjaan pertama di negara tujuan, termasuk bonus dan penghasilan lainnya (misalnya untuk kerja lembur). Penyesuaian harus dilakukan untuk setiap pengurangan pajak negara tujuan dan sosial kontribusi keamanan, serta untuk setiap pengurangan upah yang dilakukan untuk memulihkan biaya rekrutmen awalnya dibayar oleh majikan.	Klasifikasi Pendapatan/ Penghasilan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1314	SD00579.00.00	Indikator SDGs	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	Pendayagunaan Sumber Daya Air	Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.	Klasifikasi Pendayagunaan Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Proyek; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				secara terpadu (0-100).						
1315	SD00579.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Pendayagunaan Sumber Daya Air	Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.	Klasifikasi Pendayagunaan Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Proyek; Persen
1316	SD00580.00.00	Indikator SDGs	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.	Klasifikasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	PAUD meliputi: 1. Taman Kanak-kanak 2. Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal 3. PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu 4. PAUD-TAAM 5. PAUD-PAK 6. PAUD-BIA 7. TKQ 8. PAUD Inklusi 9. Kelompok Bermain 10. Tempat Penitipan Anak (Day Care).	Jumlah; persentase	Unit; persen
1317	SD00581.00.00	Indikator SDGs	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	Pendidikan Formal	Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	Klasifikasi Pendidikan Formal	1. Pendidikan dasar 2. Pendidikan menengah 3. Pendidikan tinggi	Jumlah; persentase	Unit; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.						
1318	SD00582.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Pendidikan layanan khusus	Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.	Klasifikasi Pendidikan layanan khusus	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Unit; persen
1319	SD00583.00.00	Indikator SDGs	12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.	Pendidikan Nasional	Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.	Klasifikasi Pendidikan Nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Unit; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1320	SD00583.00.00	Indikator SDGs	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Pendidikan Nasional	Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.	Klasifikasi Pendidikan Nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Unit; persen
1321	SD00584.00.00	Indikator SDGs	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Pendidikan Nonformal	Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.	Klasifikasi Pendidikan Nonformal	1. Paket A setara SD/MI 2. Paket B setara SMP/MTs 3. Paket C setara SMA/MA	Jumlah; persentase	Unit; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1322	SD00585.00.00	Indikator SDGs	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development)	Upaya mendorong masyarakat untuk secara konstruktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan.	Klasifikasi Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Unit; persen
1323	SD00586.01.00	Indikator SDGs	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1324	SD00586.01.00	Indikator SDGs	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				akses terhadap pelayanan dasar.						
1325	SD00586.01.00	Indikator SDGs	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1326	SD00586.01.00	Indikator SDGs	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1327	SD00586.01.00	Indikator SDGs	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1328	SD00586.01.00	Indikator SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1329	SD00586.01.00	Indikator SDGs	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1330	SD00586.01.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1331	SD00586.01.00	Indikator SDGs	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1332	SD00586.01.00	Indikator SDGs	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1333	SD00586.01.00	Indikator SDGs	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
1334	SD00586.01.00	Indikator SDGs	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1335	SD00586.01.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1336	SD00586.01.00	Indikator SDGs	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1337	SD00586.01.00	Indikator SDGs	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.		analisis atau sesuai kebutuhan		
1338	SD00586.01.00	Indikator SDGs	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Penduduk	Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1339	SD00586.02.00	Indikator SDGs	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Penduduk	Orang, Badan hukum atau lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1340	SD00586.02.00	Indikator SDGs	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Penduduk	Orang, Badan hukum atau lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1341	SD00586.02.00	Indikator SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Penduduk	Orang, Badan hukum atau lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1342	SD00586.02.00	Indikator SDGs	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Penduduk	Orang, Badan hukum atau lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1343	SD00586.02.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Penduduk	Orang, Badan hukum atau lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1344	SD00586.02.00	Indikator SDGs	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Penduduk	Orang, Badan hukum atau lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1345	SD00586.02.00	Indikator SDGs	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Penduduk	Orang, Badan hukum atau lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1346	SD00586.02.00	Indikator SDGs	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Penduduk	Orang, Badan hukum atau lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1347	SD00586.03.00	Indikator SDGs	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1348	SD00586.03.00	Indikator SDGs	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1349	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1350	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kelamin, umur dan penyebab kematian.						
1351	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1352	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1353	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1354	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.						
1355	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1356	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1357	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1358	SD00586.03.00	Indikator SDGs	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		“tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).				
1359	SD00586.03.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1360	SD00586.03.00	Indikator SDGs	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1361	SD00586.03.00	Indikator SDGs	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1362	SD00586.03.00	Indikator SDGs	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
1363	SD00586.03.00	Indikator SDGs	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1364	SD00586.03.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1365	SD00586.03.00	Indikator SDGs	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1366	SD00586.03.00	Indikator SDGs	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						“tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).				
1367	SD00586.03.00	Indikator SDGs	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1368	SD00586.03.00	Indikator SDGs	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1369	SD00586.03.00	Indikator SDGs	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1370	SD00586.03.00	Indikator SDGs	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1371	SD00586.03.00	Indikator SDGs	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1372	SD00586.03.00	Indikator SDGs	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1373	SD00586.03.00	Indikator SDGs	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Penduduk	Orang-orang yang biasanya tinggal di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal” (usual residence).	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1374	SD00586.04.00	Indikator SDGs	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1375	SD00586.05.00	Indikator SP2020			Penduduk	Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.	Klasifikasi Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Orang; Persen
1376	SD00587.00.00	Indikator SDGs	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Penduduk Dewasa	Semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten/kota yang berusia 15 tahun atau lebih.	Klasifikasi Penduduk Dewasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1377	SD00588.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut	Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan,	Klasifikasi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				jenis kelamin dan kelompok umur.		kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/ pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain				
1378	SD00691.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Penduduk miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Klasifikasi Penduduk miskin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
1379	SP00048.00.00	Indikator SP2020			Penduduk Tunawisma	Penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal (rumah). Penduduk tunawisma antara lain penduduk yang tinggal di kolong jembatan, pasar, terminal, stasiun, emperan toko, taman umum atau berbagai fasilitas umum lainnya, gelandangan di trotoar jalan, dan manus.	Klasifikasi Penduduk Tunawisma	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-Rata; Persentase	Orang; Persen
1380	SD00589.00.00	Indikator SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan	Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.	Klasifikasi Penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1381	SD00590.00.00	Indikator SDGs	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.	Penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal pada siang dan malam hari	Berjalan kaki sendiri di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendiri di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap).	Klasifikasi Penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal pada siang dan malam hari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1382	SD00590.00.00	Indikator SDGs	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	Peneliti	Para profesional yang terlibat dalam konsepsi atau penciptaan pengetahuan baru. Mereka melakukan penelitian dan meningkatkan atau mengembangkan konsep, teori, model, teknik instrumentasi, perangkat lunak atau metode operasional.	Klasifikasi Peneliti	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peneliti; Persen
1383	SD01141.00.00	Indikator SDGs	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	Peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Peneliti; Rasio
1384	SD00591.00.00	Indikator SDGs	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Penelitian	Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Klasifikasi Penelitian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penelitian; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1385	SD00591.00.00	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Penelitian	Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Klasifikasi Penelitian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penelitian ; Persen
1386	SD00592.00.00	Indikator SDGs	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Penempatan TKI	Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan	Klasifikasi Penempatan TKI	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lokasi; Persen
1387	SD00593.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Penerangan/ Listrik	Produksinya adalah produksi kotor, yaitu termasuk konsumsi yang dipakai stasiun pembantu dan hilang dalam perjalanan/tranformer dianggap sebagian dari stasiun. Listrik umum adalah listrik yang dihasilkan untuk tujuan dijual dengan memproduksi, mentransmisikan dan mendistribusikan energi listrik. Ini dilaksanakan oleh perusahaan swasta, koperasi, pemerintah daerah/desa, dan pemerintah pusat. Listrik yang diproduksi dan digunakan sendiri adalah listrik yang	Klasifikasi Penerangan/Listrik	1. Listrik PLN dengan meteran, 2. Listrik PLN tanpa meteran, 3. Listrik non PLN, 4. Bukan listrik.	Jumlah	Kwh

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Misalnya, rumah tangga atau perusahaan industri yang memproduksi listrik yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau perusahaan tersebut. Penggunaan pada stasiun pembangkit dan yang hilang termasuk konsumsi oleh stasiun pembantu dan hilang dalam perjalanan dianggap sebagai bagian dari pembangkit energi listrik				
1388	SD00594.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Penerima bantuan hukum	Orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.	Klasifikasi Penerima bantuan hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1389	SD00595.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem jaminan sosial nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.	Klasifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1390	SD00596.00.00	Indikator SDGs	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori	Penerima Program Perlindungan Sosial	Program-program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah untuk masyarakat miskin seperti bantuan tunai terkait, Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), kredit usaha, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan.	Klasifikasi Penerima Program Perlindungan Sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.		Rumah tangga penerima program perlindungan sosial				
1391	SD00597.01.00	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme pendapatan dan belanja negara.	Klasifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. SDA Migas 2. SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi) 3. Bagian laba BUMN 4. PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L) 5. Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum)	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1392	SD00597.02.00	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Klasifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. SDA Migas 2. SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi) 3. Bagian laba BUMN 4. PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L) 5. Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum)	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1393	SD00598.01.00	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Penerimaan Pajak/Perpajakan	Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah diintegrasikan kedalam penerimaan dari pajak.	Klasifikasi Penerimaan Pajak/Perpajakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1394	SD00598.01.00	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Penerimaan Pajak/Perpajakan	Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah diintegrasikan kedalam penerimaan dari pajak.	Klasifikasi Penerimaan Pajak/Perpajakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1395	SD00598.02.00	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi	Penerimaan Pajak/Perpajakan	Semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan	Klasifikasi Penerimaan	Klasifikasi berdasarkan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				terhadap PDB menurut sumbernya.		Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.	Pajak/Perpajakan	analisis atau sesuai kebutuhan		
1396	SD00598.02.00	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Penerimaan Pajak/Perpajakan	Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.	Klasifikasi Penerimaan Pajak/Perpajakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1397	SD00599.00.00	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Penerimaan perpajakan pemerintah daerah	Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Klasifikasi Penerimaan perpajakan pemerintah daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1398	SD01142.00.00	Indikator SDGs	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kawasan
1399	SD00600.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.	Klasifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lelang; Persen
1400	SD00601.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Pengadaan barang/jasa pemerintah	Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e procurement) dengan cara e-tendering atau e-purchasing.	Klasifikasi Pengadaan barang/jasa pemerintah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lelang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1401	SD00602.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Pengadaan Secara Elektronik/E-Procurement	Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Klasifikasi Pengadaan Secara Elektronik/E-Procurement	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Lelang; Persen
1402	SD00603.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Pengadilan Negeri	Pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum.	Klasifikasi Pengadilan Negeri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pengadilan; Persen
1403	SD00604.00.00	Indikator SDGs	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia.	Klasifikasi Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Laporan; Persen
1404	SD00605.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Pengamanan limbah cair rumah tangga	Melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.	Klasifikasi Pengamanan limbah cair rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1405	SD00606.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang	Pengamanan sampah	Melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan	Klasifikasi Pengamanan	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	rumah tangga	prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.	sampah rumah tangga	analisis atau sesuai kebutuhan		
1406	SD00607.00.00	Indikator SDGs	6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.	Pengambilan (withdrawal) Air Tawar	Volume air tawar yang diambil dari sumbernya (sungai, danau, akuifer) untuk pertanian, industri, dan kota. Pengambilan air tawar termasuk air tawar primer (tidak diambil sebelumnya), air tawar sekunder (sebelumnya diambil dan dikembalikan ke sungai dan air tanah, seperti air limbah yang dibuang dan air drainase pertanian) dan air tanah. Itu tidak termasuk air non-konvensional, yaitu penggunaan langsung air limbah yang diolah, penggunaan langsung air drainase pertanian dan air desalinasi.	Klasifikasi Pengambilan (withdrawal) Air Tawar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1407	SD00608.00.00	Indikator SDGs	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Pengangguran	Konsep pengangguran yaitu (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Klasifikasi Pengangguran	1. Pengangguran Terbuka 2. Pengangguran Terselubung	Jumlah; persentase	Orang; persen
1408	SD00609.00.00	Indikator SDGs	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan	Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan	Klasifikasi Penganiayaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).		pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan				
1409	SD00610.00.00	Indikator SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.	Klasifikasi Penganiayaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1410	SD00610.00.00	Indikator SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.	Klasifikasi Penganiayaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1411	SD00610.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.	Klasifikasi Penganiayaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1412	SD01143.00.00	Indikator SDGs	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1413	SD00611.00.00	Indikator SDGs	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami	Pengasuh	Orang dewasa yang tinggal di rumah tangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun	Klasifikasi Pengasuh	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Ruta; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir		orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga.		analisis atau sesuai kebutuhan		
1414	SD00611.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Pengasuh	Orang dewasa yang tinggal di rumah tangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga.	Klasifikasi Pengasuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ruta; Persen
1415	SD00612.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga	Melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.	Klasifikasi Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1416	SD00613.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS serta segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.	Klasifikasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1417	SD00614.00.00	Indikator SDGs	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Pengelolaan Kualitas Air	Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.	Klasifikasi Pengelolaan Kualitas Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1418	SD00614.00.00	Indikator SDGs	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Pengelolaan Kualitas Air	Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.	Klasifikasi Pengelolaan Kualitas Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1419	SD00615.00.00	Indikator SDGs	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Pengelolaan sampah	Perlakuan terhadap sampah yang biasa dilakukan, perilaku pemilahan sampah, perlakuan terhadap barang bekas layak pakai, serta kebiasaan membeli produk isi ulang.	Klasifikasi Pengelolaan sampah	1. Pengurangan Sampah 2. Penanganan Sampah	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1420	SD00616.00.00	Indikator SDGs	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Pengelolaan Sumber Daya Air	Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.	Klasifikasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1421	SD00616.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.	Klasifikasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1422	SD00616.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.	Klasifikasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1423	SD00617.00.00	Indikator SDGs	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Pengeluaran	Perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.	Klasifikasi Pengeluaran	1. Produksi Sendiri 2. Pemberian dari Pihak Lain	Nilai	Rupiah
1424	SD00692.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Pengeluaran konsumsi per kapita	Jumlah konsumsi yang dikeluarkan mencerminkan jumlah pendapatan dari rumah tangga dan menjadi salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.	Klasifikasi Pengeluaran konsumsi per kapita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
1425	SD00618.00.00	Indikator SDGs	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran oleh sektor pemerintah termasuk pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang berada di bawah judul pembelian pemerintah dan termasuk pengeluaran yang tidak untuk barang dan jasa, yang disebut pembayaran transfer.	Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	Classification of the Functions of Government (COFOG)	Nilai	Rupiah
1426	SD00618.00.00	Indikator SDGs	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran oleh sektor pemerintah termasuk pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang berada di bawah judul pembelian pemerintah dan termasuk pengeluaran yang tidak untuk barang dan jasa, yang disebut pembayaran transfer.	Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	Classification of the Functions of Government (COFOG)	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				secara berkelanjutan.						
1427	SD00619.00.00	Indikator SDGs	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan	Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1428	SD00620.00.00	Indikator SDGs	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan	Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945)	Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1429	SD00621.00.00	Indikator SDGs	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari	Pengeluaran Pemerintah Untuk Perlindungan Sosial	Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN. Serta jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN.	Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah Untuk Perlindungan Sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				total belanja pemerintah.						
1430	SD00622.00.00	Indikator SDGs	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Pengeluaran per Kapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.	Klasifikasi Pengeluaran per Kapita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1431	SD00623.00.00	Indikator SDGs	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang	Pengeluaran untuk	Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan	Klasifikasi Pengeluaran	Klasifikasi berdasarkan	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	perlindungan sosial pada periode tertentu dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang sama.	untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	analisis atau sesuai kebutuhan		
1432	SD00624.00.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Pengeluaran Utama Pemerintah	Realisasi belanja negara berdasarkan pada Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016, yang dimaksud dengan Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.	Klasifikasi Pengeluaran Utama Pemerintah	Kode anggaran dan sejenisnya	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
1433	SD00625.00.00	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Pengembangan	Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.	Klasifikasi Pengembangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1434	SD00626.00.00	Indikator SDGs	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan	Pengembangbiakan Tumbuhan	Kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual) dalam lingkungan buatan dan/atau semi	Klasifikasi Pengembangbiakan Tumbuhan dan Satwa Liar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	dan Satwa Liar	alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis.				
1435	SD01144.00.00	Indikator SDGs	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan	Penghematan penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan; b. mengurangi penggunaan Air Tanah; c. menggunakan kembali Air Tanah; d. mendaur ulang Air Tanah; e. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan; f. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir; g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah; dan/atau i. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah	Klasifikasi Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Cara
1436	SD00627.00.00	Indikator SDGs	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan	Pengendalian Daya Rusak Air	Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas	Klasifikasi Pengendalian Daya Rusak Air	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Upaya; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sumber daya air secara terpadu (0-100).		lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.		analisis atau sesuai kebutuhan		
1437	SD00627.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Pengendalian Daya Rusak Air	Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.	Klasifikasi Pengendalian Daya Rusak Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Upaya; Persen
1438	SD01145.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB modern pada periode tertentu dibagi jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1439	SD00628.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan responden mengenai metode kontrasepsi	Diperoleh dengan cara menanyakan semua jenis alat atau cara kontrasepsi yang pernah didengar untuk menunda atau menghindari terjadinya kehamilan dan kelahiran. Bila responden tidak dapat menjawab secara spontan pewawancara membacakan penjelasan dari tiap alat/cara KB dan menanyakan apakah responden mengetahui alat/cara KB tersebut. Metode atau cara kontrasepsi dibagi dalam dua kategori, yaitu metode kontrasepsi modern dan cara tradisional. Metode kontrasepsi modern meliputi sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil KB, IUD, suntik KB, susuk, kondom pria, intravag, diafragma,	Klasifikasi Pengetahuan responden mengenai metode kontrasepsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kontrasepsi darurat, dan metode amenorrhea laktasi (MAL).				
1440	SD00629.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Pengguna Informasi Publik	Orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.	Klasifikasi Pengguna Informasi Publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1441	SD00630.00.00	Indikator SDGs	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Pengguna Jasa	Setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.	Klasifikasi Pengguna Jasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Pengguna; Persen
1442	SD00630.00.00	Indikator SDGs	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi	Pengguna Jasa	Setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.	Klasifikasi Pengguna Jasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Pengguna; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				umum di perkotaan						
1443	SD00631.00.00	Indikator SDGs	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan.	Penghematan penggunaan air tanah	Bagian dari upaya konservasi Air Tanah yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah. Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan agar Air Tanah tersedia secara terus menerus dan berkesinambungan. Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan efisien dan rasional.	Klasifikasi Penghematan penggunaan air tanah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1444	SD00632.00.00	Indikator SDGs	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Penghilangan Secara Paksa	Penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.	Klasifikasi Penghilangan Secara Paksa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1445	SD00633.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Pengolahan Hasil Hutan	Pengolahan hulu hasil hutan.	Klasifikasi Pengolahan Hasil Hutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1446	SD00634.00.00	Indikator SDGs	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Pengungsi	Orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.	Klasifikasi Pengungsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang/pengungsi; persen
1447	SD00635.00.00	Indikator SDGs	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Pengurangan Sampah	Pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah.	Klasifikasi Pengurangan Sampah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Metrik Ton; Persen
1448	SD01146.00.00	Indikator SDGs	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1449	SP00049.00.00	Indikator SP2020			Pensiunan	Seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usia atau atas permintaan sendiri dan berhak atas pesangon atau dana	Klasifikasi Pensiunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pensiun yang diberikan setiap bulan sampai ia meninggal dunia.				
1450	SD00636.00.00	Indikator SDGs	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Penutupan Hutan	Penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.	Klasifikasi Penutupan Hutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Ha; Persen
1451	SD00636.00.00	Indikator SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Penutupan Hutan	Penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.	Klasifikasi Penutupan Hutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Ha; Persen
1452	SD00184.01.00	Indikator SDGs	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Penyakit kaki gajah (filariasis)	Penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria (microfilaria) yang dapat menular dengan perantara nyamuk sebagai vektor.	Klasifikasi Penyakit kaki gajah (filariasis)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1453	SD00184.02.00	Indikator SDGs	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Penyakit kaki gajah (filariasis)	Penyakit menular disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae, dan scrotum, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Upaya untuk mengatasi penyakit ini sesuai dengan metode pengobatan WHO yaitu dengan Pemberian Obat Pencegahan Massal	Klasifikasi Penyakit kaki gajah (filariasis)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(POPM) Filariasis sekali setahun selama 5 Tahun.				
1454	SD00637.00.00	Indikator SDGs	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Penyalah Guna	Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.	Klasifikasi Penyalah Guna	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1455	SD00639.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi Penyandang Disabilitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang/ Penyanda ng; Persen
1456	SD00639.00.00	Indikator SDGs	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi Penyandang Disabilitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang/ Penyanda ng; Persen
1457	SD00639.00.00	Indikator SDGs	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan	Klasifikasi Penyandang Disabilitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang/ Penyanda ng; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				penyangang disabilitas.		efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.				
1458	SD00639.00.00	Indikator SDGs	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Penyangang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi Penyangang Disabilitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang/Person; Persen
1459	SD00670.00.00	Indikator SDGs	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Penyediaan Infrastruktur	Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.	Klasifikasi Penyediaan Infrastruktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1460	SD00670.00.00	Indikator SDGs	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Penyediaan Infrastruktur	Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.	Klasifikasi Penyediaan Infrastruktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1461	SD00671.00.00	Indikator SDGs	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.	Klasifikasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penyelenggaraan; Persen
1462	SD00672.00.00	Indikator SDGs	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Penyelenggaraan Penanganan Filariasis	Penyelenggaraan Penanggulangan Filariasis dilaksanakan melalui pokok kegiatan: a. Surveilans Kesehatan; b. Penanganan Penderita; c. Pengendalian faktor risiko; dan d. Komunikasi, informasi, dan edukasi.	Klasifikasi Penyelenggaraan Penanggulangan Filariasis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penyelenggaraan; Persen
1463	SD00673.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.	Klasifikasi Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Penyelenggaraan; Persen
1464	SD00674.00.00	Indikator SDGs	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis,	Penyiksaan	Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau	Klasifikasi Penyiksaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.		memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.				
1465	SD00675.00.00	Indikator SDGs	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Penyuapan (<i>bribery</i>)	Apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.	Klasifikasi Penyuapan (<i>bribery</i>)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1466	SD00676.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Peradilan Umum	Salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.	Klasifikasi Peradilan Umum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peradilan ; Persen
1467	SD00677.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Peradilan yang Independen	Pelaksanaan rule of law yang bebas intervensi, penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) yang konsisten dan kesetaraan di hadapan hukum (<i>equality before the law</i>). Hal ini penting untuk dilihat, karena supremasi hukum merupakan landasan demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan politik (dan cabang kekuasaan yang	Klasifikasi Peradilan yang Independen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peradilan ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						lainnya), serta penegakan hukum yang konsisten mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi.				
1468	SD00678.00.00	Indikator SDGs	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	Perairan Darat	Segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.	Klasifikasi Perairan Darat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
1469	SD00679.00.00	Indikator SDGs	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Perairan Indonesia	Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.	Klasifikasi Perairan Indonesia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
1470	SD00679.00.00	Indikator SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Perairan Indonesia	Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.	Klasifikasi Perairan Indonesia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
1471	SD00680.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Perairan Kepulauan	Semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.	Klasifikasi Perairan Kepulauan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil
1472	SD00681.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Perairan Pedalaman	Semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semuabagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.	Klasifikasi Perairan Pedalaman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1473	SD00682.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah	Peran birokrasi dalam konsolidasi demokrasi, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat banyak.	Klasifikasi Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1474	SD00683.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/ DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat, karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Parlemen yang efektif, yakni yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, diindikasikan oleh antara lain: adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi; berjalannya mekanisme check and balance; akuntabilitas politik yang tinggi; dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen.	Klasifikasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1475	SD00684.00.00	Indikator SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Peran Partai Politik	Fungsi penyerapan aspirasi masyarakat; fungsi komunikasi politik (antara konstituen dengan para penyelenggara negara); fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik; serta fungsi sosialisasi politik (La Palombara and Weiner, 1966).	Klasifikasi Peran Partai Politik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1476	SD00685.00.00	Indikator SDGs	3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan	Peraturan Kesehatan Internasional (International Health	Suatu instrumen internasional yang secara resmi mengikat untuk diberlakukan oleh seluruh negara anggota WHO, maupun bukan negara anggota WHO tetapi setuju untuk dipersamakan dengan negara anggota WHO. IHR mengatur tata cara dan	Klasifikasi Peraturan Kesehatan Internasional (International	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peraturan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				darurat kesehatan.	Regulation/IHR)	pengendalian penyakit, baik yang menular maupun tidak menular, seperti efek dari Nuklir, Biologi dan Kimia (Nubika). Instrumen tersebut untuk membantu suatu negara mengidentifikasi apakah suatu keadaan merupakan PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), mengarahkan negara untuk mengkaji suatu kejadian di wilayahnya dan menginformasikan kepada WHO setiap kejadian yang merupakan PHEIC sesuai dengan kriteria sebagai berikut (1) Berdampak/berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat, (2) KLB atau sifat kejadian tidak diketahui, (3) Berpotensi menyebar secara internasional, (4) Berisiko terhadap perjalanan ataupun perdagangan.	Health Regulation/IHR)			
1477	SD00686.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Peraturan Perundangan-undangan	Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.	Klasifikasi Peraturan Perundangan-undangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Peraturan
1478	SD00687.00.00	Indikator SDGs	15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Perburuan	Segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.	Klasifikasi Perburuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1479	SD00687.00.00	Indikator SDGs	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Perburuan	Segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.	Klasifikasi Perburuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1480	SD00688.00.00	Indikator SDGs	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Percobaan bunuh diri	Tindakan dengan sengaja merusak diri sendiri dengan menggunakan alat, cara tertentu, atau zat (obat atau racun) dengan tujuan mengakhiri kehidupan yang tidak mengakibatkan kematian, namun membutuhkan intervensi medik psikiatrik.	Klasifikasi Percobaan bunuh diri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1481	SD00689.00.00	Indikator SDGs	15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Perdagangan	Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.	Klasifikasi Perdagangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transaksi; Persen
1482	SD00689.00.00	Indikator SDGs	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Perdagangan	Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.	Klasifikasi Perdagangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transaksi; Persen
1483	SD00690.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Perekonomian Masyarakat	Terdiri dari indikator Persentase penduduk miskin dan Pengeluaran konsumsi per kapita.	Klasifikasi Perekonomian Masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1484	SD00884.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Perekonomian Masyarakat Daerah Tertinggal	Terdiri dari indikator: - Persentase Penduduk Miskin - Pengeluaran konsumsi per kapita.	Klasifikasi Perekonomian Masyarakat Daerah Tertinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1485	SD00693.00.00	Indikator SDGs	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Perempuan Pernah Kawin	Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.	Klasifikasi Perempuan Pernah Kawin	1. Kawin 2. Cerai Hidup 3. Cerai Mati	Jumlah; persentase; proporsi	Orang; persen
1486	SD00694.00.00	Indikator SDGs	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Perencanaan	Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.	Klasifikasi Perencanaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1487	SD00695.00.00	Indikator SDGs	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	Perencanaan Kota	Proses teknis dan politik yang menyangkut pengembangan dan penggunaan tanah, bagaimana lingkungan alami digunakan, dll.	Klasifikasi Perencanaan Kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1488	SD00696.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Perguruan Tinggi	Pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.	Klasifikasi Perguruan Tinggi	1. Diploma satu (D1) 2. Diploma dua (D2) 3. Diploma tiga (D3) 4. Diploma empat (D4) 5. Strata satu (S1) 6. Strata dua (S2) 7. Starata (S3)	Jumlah; Persentase	Perguruan Tinggi; Persen
1489	SD00697.00.00	Indikator SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Perikanan	Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	Klasifikasi Perikanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1490	SD01147.00.00	Indikator SDGs	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang	***Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.***	Klasifikasi Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan semua negara					
1491	SD00698.00.00	Indikator SDGs	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Perilaku anti korupsi	Tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik.	Klasifikasi Perilaku anti korupsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tindakan ; Persen
1492	SD00699.00.00	Indikator SDGs	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Perilaku korupsi	Tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat).	Klasifikasi Perilaku korupsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1493	SD00700.00.00	Indikator SDGs	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Peringatan Dini	Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.	Klasifikasi Peringatan Dini	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Peringatan; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1494	SD00701.00.00	Indikator SDGs	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	Peringatan Dini	Serangkaian kegiatan pemberian sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.	Klasifikasi Peringatan Dini	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Peringatan; persen
1495	SD00701.00.00	Indikator SDGs	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Peringatan Dini Cuaca	Serangkaian kegiatan pemberian informasi sesegera mungkin kepada masyarakat yang berisikan tentang prediksi peluang terjadinya cuaca ekstrim.	Klasifikasi Peringatan Dini Cuaca	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Peringatan; persen
1496	SD00702.00.00	Indikator SDGs	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Peringkat Biru Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.	Klasifikasi Peringkat Biru Proper	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
1497	SD00703.00.00	Indikator SDGs	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Peringkat Emas Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.	Klasifikasi Peringkat Emas Proper	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1498	SD00705.00.00	Indikator SDGs	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Peringkat Hijau Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.	Klasifikasi Peringkat Hijau Proper	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
1499	SD00706.00.00	Indikator SDGs	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Peringkat Hitam Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.	Klasifikasi Peringkat Hitam Proper	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
1500	SD00707.00.00	Indikator SDGs	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Peringkat Merah Proper	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.	Klasifikasi Peringkat Merah Proper	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
1501	SD00708.00.00	Indikator SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Peristiwa yang dilaporkan	Setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.	Klasifikasi Peristiwa yang dilaporkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
1502	SD00708.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Peristiwa yang dilaporkan	Setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan	Klasifikasi Peristiwa yang dilaporkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang melaporkan kepada polisi.		dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.				
1503	SD00709.00.00	Indikator SDGs	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Perkawinan	Awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan.	Klasifikasi Perkawinan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1504	SD00711.00.00	Indikator SDGs	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Perkebunan	Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.	Klasifikasi Perkebunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1505	SD00712.00.00	Indikator SDGs	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Perkeretaapian	Kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.	Klasifikasi Perkeretaapian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Sistem; Persen
1506	SD01147.00.00	Indikator SDGs	2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.	Perkiraan dukungan kepada produsen	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kebijakan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1507	SD00713.00.00	Indikator SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Perkosaan	Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya.	Klasifikasi Perkosaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kasus; Persen
1508	SD00714.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Perkotaan	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.	Klasifikasi Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kota; Persen
1509	SD00715.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	Segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergarman.	Klasifikasi Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1510	SD00716.00.00	Indikator SDGs	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Perlindungan Sosial	Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial.	Klasifikasi Perlindungan Sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1511	SD00717.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Permukiman Kumuh	Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marginal (tidak boleh dijadikan tempat tinggal), misalnya: bantaran sungai, pinggir rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai oleh: a. Banyak rumah tidak layak huni. b. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet. c. Penduduk/bangunan sangat padat. d. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban. e. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).	Klasifikasi Permukiman Kumuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemukim an; Persen
1512	SD00717.00.00	Indikator SDGs	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Permukiman Kumuh	Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marginal (tidak boleh dijadikan tempat tinggal), misalnya: bantaran sungai, pinggir rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai oleh: a. Banyak rumah tidak layak huni. b. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet. c. Penduduk/bangunan sangat padat. d. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban. e. Biasanya berada di areal marginal	Klasifikasi Permukiman Kumuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemukim an; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).				
1513	SD00718.00.00	Indikator SDGs	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Permukiman Liar	Pemukiman yang dibangun secara tidak resmi (liar) pada lahan kosong di kota yang merupakan milik pemerintah maupun swasta, yang didiami oleh orang yang miskin karena tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap.	Klasifikasi Permukiman Liar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pemukiman; Persen
1514	SD00719.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Pernah Kawin	Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.	Klasifikasi Pernah Kawin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1515	SD00719.00.00	Indikator SDGs	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin	Pernah Kawin	Penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.	Klasifikasi Pernah Kawin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.						
1516	SD01148.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Persentase akses layanan keuangan formal UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diperoleh dengan jumlah rekening kredit UMKM dibagi dengan jumlah total UMKM dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1517	SD01149.00.00	Indikator SDGs	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1518	SD00720.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima	Perbandingan antara banyaknya anak umur 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali) terhadap	Klasifikasi Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					imunisasi dasar lengkap	jumlah anak umur 12-23 bulan seluruhnya pada periode yang sama. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuartil 1 dan kuartil 2).	imunisasi dasar lengkap			
1519	SD01150.00.00	Indikator SDGs	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur 0-17 tahun dikalikan 100%.	Klasifikasi Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1520	SD00721.00.00	Indikator SDGs	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara/huruf f (AMH) penduduk umur ≥15 tahun	Perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun.	Klasifikasi Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1521	SD00722.00.00	Indikator SDGs	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Jumlah bayi usia 0-5 bulan 29 hari yang mendapat ASI eksklusif di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi jumlah seluruh bayi usia 0-5 bulan 29 hari di suatu wilayah pada periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1522	SD01151.00.00	Indikator SDGs	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) diperoleh dengan cara membagi jumlah akumulasi usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan dengan jumlah penduduk usia	Klasifikasi Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)	muda (15-24 tahun) dikali dengan 100 persen.	dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)			
1523	SD00723.00.00	Indikator SDGs	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	1. Persentase guru (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik (S1/D4). 2. Persentase guru (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.	Klasifikasi Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1524	SD01153.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	Jumlah indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target dibagi dengan jumlah indikator global SDGs dikalikan 100%.	Klasifikasi Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1525	SD01154.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lem baga dan	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen Pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien,	Klasifikasi Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Baik Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	akuntabel dan bebas KKN. Komponen Hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan.	Kementerian/Le mbaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)			
1526	SD01155.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK)	Jumlah IKK terkoneksi dibagi dengan jumlah total IKK dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1527	SD01156.00.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Jumlah kabupaten 3T yang terkoneksi dibagi dengan total kabupaten 3T dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1528	SD01157.00.00	Indikator SDGs	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan	Persentase kabupaten/kota yang	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko dibagi	Klasifikasi Persentase kabupaten/kota	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia dikali 100%.	yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	analisis atau sesuai kebutuhan		
1529	SD01158.00.00	Indikator SDGs	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80% dari sasaran bayinya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama dan dikali 100%.	Klasifikasi Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1530	SD01159.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer	Jumlah K/L yang sudah memiliki statistisi dan/atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%.	Klasifikasi Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1531	SD00724.00.00	Indikator SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan.	Klasifikasi Persentase kepatuhan pelaku usaha	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1532	SD01160.00.00	Indikator SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah dikalikan 100%.	Klasifikasi Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1533	SD00725.00.00	Indikator SDGs	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1534	SD00726.00.00	Indikator SDGs	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.	Klasifikasi Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1535	SD01161.00.00	Indikator SDGs	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif	Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.	Klasifikasi Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(Eselon I dan II)		eksekutif (Eselon I dan II)			
1536	SD01162.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%.	Klasifikasi Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1537	SD01163.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Jumlah konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS yang menjadi rujukan utama dibagi dengan jumlah konsumen data dan informasi statistik BPS dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1538	SD01164.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat	Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%.	Klasifikasi Persentase konsumen yang puas terhadap akses data	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Statistik (BPS)		Badan Pusat Statistik (BPS)			
1539	SD00727.00.00	Indikator SDGs	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai SPM) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1540	SD00728.00.00	Indikator SDGs	1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Banyaknya penduduk laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dalam berbagai dimensi dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%)	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
1541	SD00729.00.00	Indikator SDGs	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persentase Merokok pada Penduduk	Perbandingan jumlah penduduk umur 10 sampai 18 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-18 tahun.	Klasifikasi Persentase Merokok pada	1. Merokok tiap hari 2. Merokok kadang-kadang	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Umur ≤18 tahun		Penduduk Umur ≤18 tahun			
1542	SD01165.00.00	Indikator SDGs	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari dalam sebulan terakhir dibagi jumlah penduduk umur ≥15 tahun dan dikalikan 100%.	Klasifikasi Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1543	SD01166.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.	Klasifikasi Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Persentase	Persen
1544	SD00730.00.00	Indikator SDGs	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir	Perbandingan antara banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1545	SD00731.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan	Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok umur 0-17 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					akta kelahiran					
1546	SD00732.00.00	Indikator SDGs	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%) menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki; 2. Perempuan	Persentase	Persen
1547	SD00732.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%) menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki; 2. Perempuan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1548	SD00733.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional	Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase. Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.	Klasifikasi Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1549	SD00734.00.00	Indikator SDGs	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	Banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum di perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk di perkotaan.	Klasifikasi Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1550	SD00734.00.00	Indikator SDGs	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum di perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk di perkotaan.	Klasifikasi Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1551	SD01167.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara persentase hasil pemeriksaan dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap	Klasifikasi Persentase peningkatan Opini Wajar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	seluruh hasil pemeriksaan pada tahun tertentu dengan jumlah hasil pemeriksaan yang menghasilkan Opini WTP terhadap seluruh hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya di setiap tingkat pemerintahan.	Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)			
1552	SD00735.00.00	Indikator SDGs	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Persentase peningkatan populasi jenis satwa terancam punah prioritas	perbandingan jumlah populasi jenis satwa terancam punah prioritas terhadap jumlah populasinya pada baseline data tahun 2013.	Klasifikasi Persentase peningkatan populasi jenis satwa terancam punah prioritas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1553	SD01168.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun tertentu dengan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun sebelumnya di setiap tingkat pemerintahan.	Klasifikasi Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Kabupaten/ Kota)		Kabupaten/Kota)			
1554	SD00736.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitas sosial di bagi dengan jumlah populasi penyandang disabilitas.	Klasifikasi Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1555	SD01169.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Jumlah penyelesaian permohonan sengketa informasi teregister per tahun berjalan dibagi dengan seluruh jumlah register sengketa per tahun berjalan dikalikan 100%.	Klasifikasi Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1556	SD00737.00.00	Indikator SDGs	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah	perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.	Klasifikasi Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kasus yang terjadi					
1557	SD00737.00.00	Indikator SDGs	15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	perbandingan jumlah penyelesain kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.	Klasifikasi Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1558	SD00738.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15- 49 tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase.	Klasifikasi Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15- 49 tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	Fasilitas kesehatan seperti 1. Rumah sakit 2. Rumah sakit bersalin 3. Klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter 4. Puskesmas/pustu / polindes.	Persentase	Persen
1559	SD00738.00.00	Indikator SDGs	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15- 49 tahun yang Proses Melahirkan	Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang	Klasifikasi Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15- 49 tahun yang Proses	Fasilitas kesehatan seperti 1. Rumah sakit 2. Rumah sakit bersalin 3. Klinik/bidan praktek	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				fasilitas kesehatan.	Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase.	Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	swasta/praktek dokter 4. Puskesmas/pustu / polindes.		
1560	SD01170.00.00	Indikator SDGs	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Presentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca diperoleh dengan cara mengurangi tingkat emisi pada tahun ke t terhadap tingkat emisi pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan tingkat emisi pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1561	SD01171.00.00	Indikator SDGs	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Jumlah populasi jenis satwa ke-i tahun berjalan dibagi dengan jumlah populasi jenis satwa ke-I baseline data tahun 2013 dikali dengan seratus persen, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1562	SD01172.00.00	Indikator SDGs	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin		menurut jenis kelamin			
1563	SD01173.00.00	Indikator SDGs	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Pembagian jumlah belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dengan jumlah total belanja pemerintah pusat dan dikalikan 100 persen.	Klasifikasi Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1564	SD00739.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh	Perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase rumah tangga kumuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1565	SD00740.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1566	SD00741.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber	Persentase rumah tangga miskin dan	Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga yang miskin	Klasifikasi Persentase rumah tangga miskin dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%).	rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN			
1567	SD00742.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	Perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1568	SD00744.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1569	SD00743.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					berkelanjuta n					
1570	SD00745.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjuta n	Perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).	Klasifikasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1571	SD00746.00.00	Indikator SDGs	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Banyaknya sampah perkotaan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan.	Klasifikasi Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1572	SD00747.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Perbandingan antara jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SD/MI	Klasifikasi Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Klasifikasi status desa (saat penyajian data): 1. Perkotaan 2. Perdesaan	Persentase	Persen
1573	SD00748.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MAberakredi tasi minimal B.	Persentase SMA/MA Berakreditasi Minimal B	Perbandingan antara jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMA/MA.	Klasifikasi Persentase SMA/MA Berakreditasi Minimal B	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1574	SD00749.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs	Persentase SMP/MTs	Perbandingan antara jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMP/MTs	Klasifikasi Persentase SMP/MTs	Klasifikasi status desa (saat penyajian data):	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				berakreditasi minimal B.	Berakreditasi Minimal B		Berakreditasi Minimal B	1. Perkotaan 2. Perdesaan		
1575	SD01174.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal dengan penduduk yang bekerja dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Persentase tenaga kerja formal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1576	SD01175.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dapat diperoleh dengan membagi jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian dengan penduduk yang bekerja dikali 100 persen.	Klasifikasi Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1577	SD01176.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian /Lembaga	Jumlah K/L yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan/atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%.	Klasifikasi Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Le mbaga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1578	SD01177.00.00	Indikator SDGs	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) diperoleh dengan cara membagi jumlah akumulasi usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) dikali dengan 100 persen.	Klasifikasi Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pelatihan (NEET)					
1579	SD00751.01.00	Indikator SDGs	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pertanian	Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.	Klasifikasi Pertanian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1580	SD00751.02.00	Indikator SDGs	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Pertanian	Penerapan karya manusia kepada alam dalam budi daya tumbuhan dan binatang dan penangkapan/perburuan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia.	Klasifikasi Pertanian	Klasifikasi berdasarkan sektor pertanian: 1. Tanaman pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan tangkap 6. Perikanan budidaya 7. Kehutanan 8. jasa pertanian	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1581	SD00752.00.00	Indikator SDGs	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Pertanian Berkelanjutan	Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk memastikan pencapaian dan kepuasan berkelanjutan kebutuhan manusia untuk generasi sekarang dan mendatang. Pengembangan semacam itu (di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dll.) Melestarikan sumber daya tanah, air,	Klasifikasi Pertanian Berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						tanaman dan gen hewan, tidak merusak lingkungan, layak secara teknis, layak secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial.				
1582	SD00753.01.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Pertumbuhan ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	Klasifikasi Pertumbuhan ekonomi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1583	SD00753.01.00	Indikator SDGs	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Pertumbuhan Ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1584	SD00753.02.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Pertumbuhan Ekonomi	Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.	Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1585	SD01178.00.00	Indikator SDGs	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor non migas pada tahun ke - t dikurangi dengan ekspor non migas pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan ekspor non migas pada tahun ke t-1 dikalikan dengan 100%.	HS/BTKI	Klasifikasi berdasarkan HS/BTKI	Persentase	Persen
1586	SD01179.00.00	Indikator SDGs	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	Klasifikasi Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1587	SD01180.00.00	Indikator SDGs	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	***Indikator nasional global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1588	SD00754.00.00	Indikator SDGs	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan	Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. Badan usaha perusahaan konstruksi dapat berbentuk PT, CV, Firma, PT (Persero), Perusahaan Umum atau Perusahaan Jawatan.	Klasifikasi Perusahaan	1. PT 2. CV 3. Firma 4. PT (Persero) 5. Perusahaan Umum 6. Perusahaan Jawatan	Jumlah; Persentase	Perusahaan; Persen
1589	SD00755.00.00	Indikator SDGs	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.	Klasifikasi Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Perusahaan; Persen
1590	SD00756.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Peserta KB aktif	Peserta KB Aktif :Akteptor yang pada saat ini sedang memakai alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh kontrasepsi.	Klasifikasi Peserta KB aktif	1. Baru; 2. Aktif	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
1591	SD00756.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan	Peserta KB baru	Peserta KB Baru: peserta yang baru pertama kali menggunakan metode	Klasifikasi Peserta KB baru	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		kontrasepsi termasuk mereka yang pasca keguguran dan sesudah melahirkan,Pe		analisis atau sesuai kebutuhan		
1592	SD00757.00.00	Indikator SDGs	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru	Peserta Proper ranking Biru ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan	Klasifikasi Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Peserta; Persen
1593	SD00758.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Petambak Garam	Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.	Klasifikasi Petambak Garam	1. Tambak 2. Non Tambak	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1594	SD00759.00.00	Indikator SDGs	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Petugas	Seseorang yang memiliki posisi otoritas dalam suatu organisasi.	Klasifikasi Petugas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1595	SD00759.00.00	Indikator SDGs	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar	Petugas	Seseorang yang memiliki posisi otoritas dalam suatu organisasi.	Klasifikasi Petugas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.						
1596	SD00760.00.00	Indikator SDGs	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Pihak Berwajib	Seseorang dengan tanggung jawab resmi untuk bidang kegiatan tertentu.	Klasifikasi Pihak Berwajib	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1597	SD00761.00.00	Indikator SDGs	7.a.1	Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar.	Pinjaman Luar Negeri	Setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.	Klasifikasi Pinjaman Luar Negeri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1598	SD00762.00.00	Indikator SDGs	17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	Pita lebar (Broadband)	Akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.	Klasifikasi Pita lebar (Broadband)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1599	SD00762.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Pita lebar (Broadband)	Akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.	Klasifikasi Pita lebar (Broadband)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1600	SD00762.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Pita lebar (Broadband)	Akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.	Klasifikasi Pita lebar (Broadband)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Mbps
1601	SD00763.01.00	Indikator SDGs	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Pola Pangan Harapan (PPH)	Komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.	Klasifikasi Pola Pangan Harapan (PPH)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Skor PPH
1602	SD00763.02.00	Indikator SDGs	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Pola Pangan Harapan (PPH)	Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.	Klasifikasi Pola Pangan Harapan (PPH)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Skor PPH
1603	SD00764.00.00	Indikator SDGs	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis	Populasi	Seluruh himpunan tertentu yang didapat dari survei.	Klasifikasi Populasi	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				satwa terancam punah prioritas.				analisis atau sesuai kebutuhan		
1604	SD00764.00.00	Indikator SDGs	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Populasi	Seluruh himpunan tertentu yang didapat dari survei.	Klasifikasi Populasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1605	SD00764.00.00	Indikator SDGs	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Populasi	Seluruh himpunan tertentu yang didapat dari survei.	Klasifikasi Populasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1606	SD00764.00.00	Indikator SDGs	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Populasi	Seluruh himpunan tertentu yang didapat dari survei.	Klasifikasi Populasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang
1607	SD01181.00.00	Indikator SDGs	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Penduduk

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					jalan yang layak					
1608	SD00765.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Pos Layanan Hukum	Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum.	Klasifikasi Pos Layanan Hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1609	SD00766.00.00	Indikator SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Posisi manajerial	Jenis jabatan yang tugas utamanya terdiri dari menentukan dan merumuskan kebijaksanaan pemerintah, dan juga undang-undang dan peraturan pemerintah, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, undang-undang dan peraturan pemerintah, mewakili pemerintah dan bertindak atas nama pemerintah, atau merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan dan organisasi, atau departemen	Klasifikasi Posisi manajerial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1610	SD00767.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada	Pranata Komputer	Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang	Klasifikasi Pranata Komputer	1. Pranata komputer tingkat terampil 2. Pranata komputer tingkat ahli	Jumlah; presentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Kementerian/Lem baga.		berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan system informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.				
1611	SD00767.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lem baga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Pranata Komputer	Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan system informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.	Klasifikasi Pranata Komputer	1. Pranata komputer tingkat terampil 2. Pranata komputer tingkat ahli	Jumlah; presentase	Orang; persen
1612	SD00767.00.00	Indikator SDGs	17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lem baga.	Pranata Komputer	Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan system informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.	Klasifikasi Pranata Komputer	1. Pranata komputer tingkat terampil 2. Pranata komputer tingkat ahli	Jumlah; presentase	Orang; persen
1613	SD00768.00.00	Indikator SDGs	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishmen t).	Prevalensi	Proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu.	Klasifikasi Prevalensi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1614	SD00769.00.00	Indikator SDGs	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat	Prevalensi anak balita	Jumlah anak balita yang menderita gemuk pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah	Klasifikasi Prevalensi anak	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	yang menderita gemuk (obesitas)	anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	balita yang menderita gemuk (obesitas)	analisis atau sesuai kebutuhan		
1615	SD00770.00.00	Indikator SDGs	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Prevalensi anak balita yang menderita kurus (wasting)	Jumlah anak balita yang menderita kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi anak balita yang menderita kurus (wasting)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1616	SD00771.00.00	Indikator SDGs	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Prevalensi anak balita yang menderita sangat gemuk (obesitas)	Jumlah anak balita yang menderita sangat gemuk pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi anak balita yang menderita sangat gemuk (obesitas)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1617	SD00772.00.00	Indikator SDGs	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Prevalensi anak balita yang menderita sangat kurus (wasting)	Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi anak balita yang menderita sangat kurus (wasting)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1618	SD00773.00.00	Indikator SDGs	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil anemia di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi anemia pada ibu hamil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1619	SD00774.00.00	Indikator SDGs	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun).	Klasifikasi Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1620	SD00775.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut. Tumpang tindih dengan jenis kekerasan yang lainnya terjadi : a. Pertama, mereka dapat terjadi secara bersamaan, dimana anak dapat dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik. b. Kedua, mereka bisa mengalami tiga jenis kekerasan pada waktu yang bersamaan.	Klasifikasi Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1621	SD00775.00.00	Indikator SDGs	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut. Tumpang tindih dengan jenis kekerasan yang lainnya terjadi: a. Pertama, mereka dapat terjadi secara bersamaan, dimana anak dapat dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik. b. Kedua, mereka bisa mengalami tiga jenis kekerasan pada waktu yang bersamaan.	Klasifikasi Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1622	SD01182.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Prevalensi kekerasan	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				laki-laki dan anak perempuan.	anak laki-laki dan perempuan		terhadap anak laki-laki dan perempuan	analisis atau sesuai kebutuhan		
1623	SD01183.00.00	Indikator SDGs	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%	Klasifikasi Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1624	SD00776.00.00	Indikator SDGs	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana jumlah anak balita mengalami kekurangan gizi (underweight) dibandingkan dengan jumlah seluruh anak balita, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1625	SD00777.00.00	Indikator SDGs	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU)	Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.	Klasifikasi Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1626	SD00778.00.00	Indikator SDGs	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, dihitung berdasarkan prevalensi kurus, sangat kurus (wasting), gemuk, dan sangat gemuk (obesitas).	Klasifikasi Prevalensi malnutrisi anak pada usia	1. Kurus 2. Sangat Kurus (Wasting) 3. Gemuk	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tahun, berdasarkan tipe.	pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		kurang dari 5 tahun	4. Sangat Gemuk (Obesitas)		
1627	SD00779.00.00	Indikator SDGs	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Perbandingan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥25.	Klasifikasi Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1628	SD00780.00.00	Indikator SDGs	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Persentase individu di populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/FIES) berdasarkan skala referensi global.	Klasifikasi Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1629	SD00781.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					15-49 tahun yang berstatus kawin		usia 15-49 tahun yang berstatus kawin			
1630	SD00782.00.00	Indikator SDGs	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Jumlah sampel orang berusia 10-59 tahun yang pernah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah populasi nasional berusia 10-59 tahun yang dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1631	SD00783.00.00	Indikator SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Jumlah anak baduta stunting (pendek dan sangat pendek) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1632	SD01184.00.00	Indikator SDGs	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Stunting	1. Sangat pendek: Z-score < -3,0 SD 2. Pendek: -3,0 SD < Z-score < -2,0 SD 3. Normal: Z-score >= -2,0 SD (Sumber: Kepmenkes No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								antropometri penilaian status gizi anak)		
1633	SD00784.00.00	Indikator SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Jumlah anak balita stunting (pendek dan sangat pendek) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1634	SD00785.00.00	Indikator SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Jumlah anak baduta pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1635	SD00786.00.00	Indikator SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1636	SD00787.00.00	Indikator SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah dua	Jumlah anak baduta sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tahun/baduta		dua tahun/baduta			
1637	SD00788.00.00	Indikator SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1638	SD00789.00.00	Indikator SDGs	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi	Perbandingan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg.	Klasifikasi Prevalensi tekanan darah tinggi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1639	SD00790.00.00	Indikator SDGs	17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.	Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi	Prinsip 1. Statistik resmi memberikan elemen yang sangat diperlukan dalam sistem informasi masyarakat yang demokratis, melayani pemerintah, ekonomi dan publik dengan data tentang situasi ekonomi, demografis, sosial dan lingkungan. Untuk tujuan ini, statistik resmi yang memenuhi uji utilitas praktis harus disusun dan tersedia secara tidak memihak oleh lembaga statistik resmi untuk menghormati hak warga negara atas informasi publik. Prinsip 2. Untuk mempertahankan kepercayaan pada statistik resmi, lembaga statistik perlu memutuskan secara profesional pertimbangan, termasuk	Klasifikasi Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						<p>prinsip-prinsip ilmiah dan etika profesional, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyajian data statistik.</p> <p>Prinsip 3. Untuk memfasilitasi interpretasi data yang benar, lembaga statistik harus menyajikan informasi sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode, dan prosedur statistik.</p> <p>Prinsip 4. Badan statistik berhak mengomentari interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik.</p> <p>Prinsip 5. Data untuk keperluan statistik dapat diambil dari semua jenis sumber, baik itu survei statistik atau catatan administratif. Badan statistik harus memilih sumber sehubungan dengan kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban responden.</p> <p>Prinsip 6. Data individu dikumpulkan oleh lembaga statistik untuk kompilasi statistik, apakah itu merujuk pada yang orang atau hukum, harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik.</p> <p>Prinsip 7. Undang-undang, peraturan, dan tindakan yang digunakan sistem statistik untuk diumumkan kepada publik.</p> <p>Prinsip 8. Koordinasi di antara lembaga statistik di dalam negara adalah penting untuk mencapai konsistensi dan efisiensi dalam sistem statistik.</p>				

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Prinsip 9. Penggunaan oleh lembaga statistik di setiap negara konsep internasional, klasifikasi dan metode mempromosikan konsistensi dan efisiensi sistem statistik di semua tingkatan resmi. Prinsip 10. Kerja sama bilateral dan multilateral dalam statistik berkontribusi pada peningkatan sistem statistik resmi di semua negara.				
1640	SD00790.00.00	Indikator SDGs	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Prinsip-Prinsip Fundamental Statistik	Prinsip 1. Statistik resmi memberikan elemen yang sangat diperlukan dalam sistem informasi masyarakat yang demokratis, melayani pemerintah, ekonomi dan publik dengan data tentang situasi ekonomi, demografis, sosial dan lingkungan. Untuk tujuan ini, statistik resmi yang memenuhi uji utilitas praktis harus disusun dan tersedia secara tidak memihak oleh lembaga statistik resmi untuk menghormati hak warga negara atas informasi publik. Prinsip 2. Untuk mempertahankan kepercayaan pada statistik resmi, lembaga statistik perlu memutuskan secara profesional pertimbangan, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika profesional, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyajian data statistik. Prinsip 3. Untuk memfasilitasi interpretasi data yang benar, lembaga statistik harus menyajikan informasi sesuai dengan	Klasifikasi Prinsip-Prinsip Fundamental Statistik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						<p>standar ilmiah tentang sumber, metode, dan prosedur statistik.</p> <p>Prinsip 4. Badan statistik berhak mengomentari interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik.</p> <p>Prinsip 5. Data untuk keperluan statistik dapat diambil dari semua jenis sumber, baik itu survei statistik atau catatan administratif. Badan statistik harus memilih sumber sehubungan dengan kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban responden.</p> <p>Prinsip 6. Data individu dikumpulkan oleh lembaga statistik untuk kompilasi statistik, apakah itu merujuk pada yang orang atau hukum, harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik.</p> <p>Prinsip 7. Undang-undang, peraturan, dan tindakan yang digunakan sistem statistik untuk diumumkan kepada publik.</p> <p>Prinsip 8. Koordinasi di antara lembaga statistik di dalam negara adalah penting untuk mencapai konsistensi dan efisiensi dalam sistem statistik.</p> <p>Prinsip 9. Penggunaan oleh lembaga statistik di setiap negara konsep internasional, klasifikasi dan metode mempromosikan konsistensi dan efisiensi sistem statistik di semua tingkatan resmi.</p> <p>Prinsip 10. Kerja sama bilateral dan multilateral dalam statistik berkontribusi</p>				

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pada peningkatan sistem statistik resmi di semua negara.				
1641	SD00520.01.01	Indikator SDGs	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1642	SD00520.01.01	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1643	SD00520.01.01	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1644	SD00520.01.01	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								(PDB) Lapangan Usaha		
1645	SD00520.01.01	Indikator SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1646	SD00520.01.01	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1647	SD00520.01.02	Indikator SDGs	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1648	SD00520.01.02	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.				Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
1649	SD00520.01.02	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1650	SD00520.01.02	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1651	SD00520.01.02	Indikator SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								(PDB)Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
1652	SD00520.01.02	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB)Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1653	SD00520.02.01	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1654	SD00520.02.01	Indikator SDGs	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara	Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kurang berkembang dan semua negara.						
1655	SD00520.02.01	Indikator SDGs	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1656	SD00520.02.01	Indikator SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1657	SD00520.02.02	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1658	SD00520.02.02	Indikator SDGs	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1659	SD00520.02.02	Indikator SDGs	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1660	SD00520.02.02	Indikator SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1661	SD00520.03.01	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1662	SD00520.03.01	Indikator SDGs	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1663	SD00520.03.01	Indikator SDGs	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1664	SD00520.03.01	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1665	SD00520.03.02	Indikator SDGs	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1666	SD00520.03.02	Indikator SDGs	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1667	SD00520.03.02	Indikator SDGs	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1668	SD00520.03.02	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB)	Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1669	SD00521.01.00	Indikator SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1670	SD00521.01.00	Indikator SDGs	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1671	SD00521.01.00	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1672	SD00521.02.00	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlaku pada waktu tersebut. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1673	SD00522.00.00	Indikator SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	PDB atas dasar harga konstan menunjukkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah
1674	SD00523.00.01	Indikator SDGs	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Rasio	Rupiah/kapita
1675	SD00523.00.02	Indikator SDGs	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Rasio	Rupiah/kapita

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1676	SD00523.00.03	Indikator SDGs	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	1. rendah/low-income (PDB/kapita <= \$1,025) 2. Menengah rendah/lower middle-income (PDB/kapita \$1,026 - \$3,995) 3. Menengah tinggi/upper middle-income (\$3,996 - \$12,375) 4. Tinggi/high-income (PDB/kapita > = \$12,376)	Rasio	Rupiah/kapita
1677	SD00524.00.00	Indikator SDGs	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	PDB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk.	Klasifikasi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Rasio	Rupiah/kapita
1678	SD00525.00.01	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pengeluaran 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1679	SD00525.00.02	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.	Klasifikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Nilai	Rupiah
1680	SD00791.00.00	Indikator SDGs	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk Ramah Lingkungan yang Teregister	Produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (green public procurement, GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.	Klasifikasi Produk Ramah Lingkungan yang Teregister	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Produk; Persen
1681	SD00792.00.00	Indikator SDGs	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Program Bantuan Sosial	Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada iuran dari penerima manfaat, dan dapat berupa uang (in-cash transfer) atau pelayanan (in-kind transfer).	Klasifikasi Program Bantuan Sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
1682	SD00793.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program doktor (S3)	Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta	Klasifikasi Program doktor (S3)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.				
1683	SD00794.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program doktor terapan	Kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.	Klasifikasi Program doktor terapan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1684	SD00795.01.00	Indikator SDGs	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin.	Klasifikasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Rumah Tangga/ Keluarga
1685	SD00795.02.00	Indikator SDGs	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.	Klasifikasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase; Jumlah	Persen; Rumah Tangga/ Keluarga
1686	SD00796.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program magister (S2)	Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.	Klasifikasi Program magister (S2)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1687	SD00797.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program magister terapan	Kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.	Klasifikasi Program magister terapan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1688	SD00798.00.00	Indikator SDGs	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Penanggulangan Kemiskinan	Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.	Klasifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1689	SD00799.00.00	Indikator SDGs	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.	Klasifikasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Peringat hitam 2. Peringkat Merah 3. Peringkat Biru 4. Peringkat Hijau 5. Peringat Emas	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1690	SD00780.00.00	Indikator SDGs	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin,	Program Perlindungan Sosial	Program-program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah untuk masyarakat miskin seperti bantuan tunai terkait, Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), kredit usaha, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan	Klasifikasi Program Perlindungan Sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.		Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan.				
1691	SD00781.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program profesi	Pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.	Klasifikasi Program profesi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1692	SD00782.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program sarjana (S1)	Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.	Klasifikasi Program sarjana (S1)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1693	SD00782.00.00	Indikator SDGs	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Program Sarjana (S1)	Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.	Klasifikasi Program Sarjana (S1)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1694	SD00783.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program spesialis	Pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.	Klasifikasi Program spesialis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Program Studi
1695	SD01185.00.00	Indikator SDGs	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1696	SD01186.00.00	Indikator SDGs	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%.	Klasifikasi Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1697	SD00784.00.00	Indikator SDGs	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Jumlah anak-anak dan orang muda diakhir pendidikan SD atau menengah, mencapai atau melebihi tingkat kemahiran minimum, dinyatakan sebagai persentase dari semua anak-anak dan orang muda di akhir tingkat pendidikan primer atau tingkat pendidikan menengah.	Klasifikasi Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1698	SD01187.00.00	Indikator SDGs	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang	Proporsi anggaran domestik	Total pajak dalam negeri dibagi dengan total belanja negara dikalikan 100%.	Klasifikasi Proporsi anggaran	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				didanai oleh pajak domestik.	yang didanai oleh pajak domestik		domestik yang didanai oleh pajak domestik	analisis atau sesuai kebutuhan		
1699	SD00785.00.00	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB	Diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran pemerintah untuk riset dengan PDB dikalikan dengan 100 persen. Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku.	Klasifikasi Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1700	SD01188.00.00	Indikator SDGs	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1701	SD01189.00.00	Indikator SDGs	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1702	SD01190.00.00	Indikator SDGs	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Proporsi biaya remitansi dari jumlah	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi biaya remitansi dari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang dikirimkan		jumlah yang dikirimkan			
1703	SD00786.00.00	Indikator SDGs	1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Klasifikasi Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1704	SD01191.00.00	Indikator SDGs	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1705	SD01192.00.00	Indikator SDGs	11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal	***Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.***	Klasifikasi Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1706	SD00787.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko,	Suatu rumpun dinyatakan berisiko apabila dalam status kritis (critical), kritis dipertahankan (critical-maintained), terancam punah (endangered) atau hampir punah yang dipelihara (endangered-maintained).	Klasifikasi Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak	1. Berisiko 2. Tidak berisiko 3. Risiko yang tidak diketahui.	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				risiko yang tidak diketahui.	tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui		berisiko, dan risiko yang tidak diketahui			
1707	SD01193.00.00	Indikator SDGs	15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1708	SD01193.00.00	Indikator SDGs	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1709	SD01194.00.00	Indikator SDGs	17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Fundamental dari Statistik Resmi.	yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi		targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi			
1710	SD01192.00.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Proporsi individu yang menggunakan internet	Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi Proporsi individu yang menggunakan internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1711	SD01192.00.00	Indikator SDGs	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Proporsi individu yang menggunakan Internet	Proporsi individu yang menggunakan internet dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Proporsi individu yang menggunakan Internet	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Proporsi
1712	SD00788.00.00	Indikator SDGs	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam.	Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam	perbandingan antara individu yang menguasai/miliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.	Klasifikasi Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1713	SD01195.00.00	Indikator SDGs	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Proporsi industri kecil dengan	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit diperoleh dengan membagi jumlah industri kecil yang mendapatkan akses pinjaman atau kredit dengan jumlah	Klasifikasi Proporsi industri kecil dengan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pinjaman atau kredit	industri kecil dan dikalikan dengan 100 persen.	pinjaman atau kredit			
1714	SD01196.00.00	Indikator SDGs	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1715	SD00789.00.00	Indikator SDGs	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati.	Klasifikasi Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1716	SD01197.00.00	Indikator SDGs	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1717	SD00790.00.00	Indikator SDGs	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan oleh selain pasangan	Berupa informasi yang terbatas pada paksaan melakukan hubungan seksual ketika perempuan tersebut tidak ingin melakukan, serta mencoba untuk memaksa seseorang untuk bertindak seksual melawan kehendaknya atau mencoba untuk memaksa dia ke hubungan seksual.	Klasifikasi Proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan oleh selain pasangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1718	SD00791.00.00	Indikator SDGs	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Jumlah kematian akibat keracunan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1719	SD01198.00.00	Indikator SDGs	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dari pembagian penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terdiri dari dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata dan ekspor netto jasa perjalanan	Klasifikasi Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						(ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) dengan PDB pada harga berlaku dikalikan dengan 100 persen.				
1720	SD01199.00.00	Indikator SDGs	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1721	SD01200.00.00	Indikator SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1722	SD01200.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi korban kekerasan dalam 12	Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun	Klasifikasi Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang melaporkan kepada polisi.	bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	tersebut dikali seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).	terakhir yang melaporkan kepada polisi			
1723	SD01201.00.00	Indikator SDGs	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1724	SD01202.00.00	Indikator SDGs	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen.	Klasifikasi Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1725	SD00792.00.00	Indikator SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI.	Klasifikasi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1726	SD00794.00.00	Indikator SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat (anggota DPR RI, DPD RI), keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan perempuan di pemerintah daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II.	Klasifikasi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1727	SD00793.00.00	Indikator SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah/parlemen daerah	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan perempuan pada jabatan pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota).	Klasifikasi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah/parlemen daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1728	SD01203.00.00	Indikator SDGs	15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1729	SD01204.00.00	Indikator SDGs	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian,	Proporsi pekerja informal di sektor non-pertanian dapat di peroleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor non-pertanian, dengan jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non-pertanian dikali 100 persen.	Klasifikasi Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					berdasarkan jenis kelamin		berdasarkan jenis kelamin			
1730	SD01205.00.00	Indikator SDGs	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1731	SD01206.00.00	Indikator SDGs	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1732	SD00795.00.00	Indikator SDGs	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Perbandingan antara luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Klasifikasi Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1733	SD01207.00.00	Indikator SDGs	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1734	SD01208.00.00	Indikator SDGs	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian		pencatatan kematian			
1735	SD01209.00.00	Indikator SDGs	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI)	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1736	SD01210.00.00	Indikator SDGs	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri diperoleh dengan membagi nilai tambah industri kecil dibagi dengan total nilai tambah industri dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1737	SD01211.00.00	Indikator SDGs	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur	Proporsi nilai tambah sektor industri	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan PDB dan dikalikan 100 persen.	Klasifikasi Proporsi nilai tambah sektor industri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				terhadap PDB dan per kapita.	manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan jumlah populasi dan dikalikan 100 persen.	manufaktur terhadap PDB dan per kapita			
1738	SD01212.00.00	Indikator SDGs	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Proporsi
1739	SD01213.00.00	Indikator SDGs	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1740	SD00796.00.00	Indikator SDGs	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi pasangan usia reproduksi/s ubur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Perbandingan perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan PUS yang memerlukan alat kontrasepsi.	Klasifikasi Proporsi pasangan usia reproduksi/subur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1741	SD01214.00.00	Indikator SDGs	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir		12 bulan terakhir			
1742	SD01215.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa	Jumlah (nilai) pembayaran utang dan bunga dibagi dengan jumlah (nilai) ekspor barang dan jasa dikalikan 100%.	Klasifikasi Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1743	SD01216.00.00	Indikator SDGs	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Banyaknya pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB dibagi dengan jumlah pemerintah kota secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).	Klasifikasi Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1744	SD00797.00.00	Indikator SDGs	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di	Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					bawah 1400 kkal/kapita/hari		di bawah 1400 kkal/kapita/hari			
1745	SD01217.00.00	Indikator SDGs	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	Klasifikasi Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1746	SD01218.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Jumlah rumah terlayani mobile broadband dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1747	SD00798.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air	Perbandingan antara penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya.	Klasifikasi Proporsi penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1748	SD01219.00.00	Indikator SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran per kapita dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.	Klasifikasi Disabilitas	1. Kesulitan Membaca 2. Kesulitan Mendengar 3. Berbicara Tidak Lancar 4. Kesulitan Memahami/Hilangan Jiwa 5. Lambat Dalam Belajar/Memahami Pelajaran 6. Keterbatasan Berjalan 7. Keterbatasan Bergerak 8. Kesulitan Mengambil Barang Kecil Menggunakan Jari	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1749	SD01220.00.00	Indikator SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan	Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran per kapita dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.	Klasifikasi Jenis Kelamin	1. Laki-laki; 2. Perempuan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					penyandang difabilitas					
1750	SD01221.00.00	Indikator SDGs	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.	Klasifikasi Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1751	SD01222.00.00	Indikator SDGs	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia		atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia			
1752	SD01223.00.00	Indikator SDGs	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki haklahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki haklahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian, (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki haklahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1753	SD01224.00.00	Indikator SDGs	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1754	SD00799.00.00	Indikator SDGs	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus,	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk	Banyaknya penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan		khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan			
1755	SD01225.00.00	Indikator SDGs	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1756	SD01226.00.00	Indikator SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan	Proporsi penduduk yang menjadi korban	Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100%.	Klasifikasi Proporsi penduduk yang menjadi korban	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir		kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir			
1757	SD01227.00.00	Indikator SDGs	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%.	Klasifikasi Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1758	SD01228.00.00	Indikator SDGs	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1759	SD01229.00.00	Indikator SDGs	16.6.2	Proporsi penduduk yang	Proporsi penduduk	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik		penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	analisis atau sesuai kebutuhan		
1760	SD01230.00.00	Indikator SDGs	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk terlayani mobile broadband dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1761	SD01231.00.00	Indikator SDGs	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1762	SD00800.00.00	Indikator SDGs	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses	Jumlah penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk/rumah tangga pada	Klasifikasi Proporsi penduduk/rumah tangga dengan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					terhadap pelayanan dasar	periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	akses terhadap pelayanan dasar			
1763	SD00801.00.00	Indikator SDGs	1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.	Klasifikasi Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1764	SD01232.00.00	Indikator SDGs	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Perbandingan antara anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD dibanding dengan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah.	Klasifikasi Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1765	SD01233.00.00	Indikator SDGs	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sebelum umur 18 tahun.	mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun		mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun			
1766	SD00802.00.00	Indikator SDGs	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1767	SD00803.00.00	Indikator SDGs	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga	Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan.	Klasifikasi Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kesehatan terlatih		tenaga kesehatan terlatih			
1768	SD00804.00.00	Indikator SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Perbandingan perempuan umur reproduktif (15-49 tahun) yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun.	Klasifikasi Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1769	SD00805.00.00	Indikator SDGs	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan	Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%) atau Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sebelum umur 18 tahun					
1770	SD00806.00.00	Indikator SDGs	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta.	Klasifikasi Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1771	SD00807.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah).	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Persentase	Persen
1772	SD00808.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.	Klasifikasi Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1773	SD00808.00.00	Indikator SDGs	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.	Klasifikasi Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1774	SD01234.00.00	Indikator SDGs	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1775	SD01235.00.00	Indikator SDGs	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					rumah yang tidak layak		atau rumah yang tidak layak			
1776	SD01236.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Perbandingan antara penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk secara keseluruhan, dinyatakan dalam persen (%)	Klasifikasi Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1777	SD00809.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.	Klasifikasi Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1778	SD01237.00.00	Indikator SDGs	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas		menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas			
1779	SD01238.00.00	Indikator SDGs	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	Klasifikasi Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1780	SD01239.00.00	Indikator SDGs	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1781	SD00810.00.00	Indikator SDGs	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone.	Klasifikasi Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1782	SD01240.00.00	Indikator SDGs	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1783	SD00811.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang	Persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat	Klasifikasi Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					layak dan terjangkau	dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.				
1784	SD01241.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dibagi dengan jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun dikalikan 100%.	Klasifikasi Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1785	SD01242.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga (RT) yang tersambung kepada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal (atau jumlah SR pada sistem terpusat pengolahan air limbah domestik skala kota, kawasan dan komunal) dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani (total)	Klasifikasi Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1786	SD00812.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem	Proporsi Rumah Tangga yang	Banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik dalam sistem terjadwal (regular desludging)	Klasifikasi Proporsi Rumah Tangga yang	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pengelolaan lumpur tinja.	Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	maupun peningkatan kualitas sistem panggilan (on call basis).	Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	analisis atau sesuai kebutuhan		
1787	SD00813.00.00	Indikator SDGs	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk internet tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	Klasifikasi Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)					
1788	SD01243.00.00	Indikator SDGs	16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum	***Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.***	Klasifikasi Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1789	SD01244.00.00	Indikator SDGs	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya		dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya			
1790	SD00814.00.00	Indikator SDGs	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Jumlah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan dari seluruh sektor dibagi dengan total APBN dinyatakan dalam satuan persen (%).	Klasifikasi Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1791	SD01245.00.00	Indikator SDGs	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1792	SD01246.00.00	Indikator SDGs	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Proporsi tahanan yang melebihi masa	Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t dibagi dengan jumlah tahanan pada akhir tahun t dikalikan 100%.	Klasifikasi Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan		terhadap seluruh jumlah tahanan			
1793	SD00815.00.00	Indikator SDGs	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis aman	Perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama yang dinyatakan dalam persentase.	Klasifikasi Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis aman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1794	SD01247.00.00	Indikator SDGs	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur diperoleh dengan cara membagi jumlah tenaga kerja sektor industri dengan jumlah tenaga kerja total kemudian dikalikan dengan 100 persen.	Klasifikasi Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1795	SD00816.00.00	Indikator SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	perbandingan antara luas kawasan hutan dan lahan yang tertutup vegetasi terhadap total luas daratan yang dinyatakan dalam persentase, tidak termasuk perairan umum seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah	Klasifikasi Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1796	SD01248.00.00	Indikator SDGs	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					terhadap PDB					
1797	SD01249.00.00	Indikator SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB	Total remitansi dibagi dengan PDB dikalikan dengan 100%.	Klasifikasi Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1798	SD00817.00.00	Indikator SDGs	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi	Perbandingan waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Klasifikasi Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1799	SD01250.00.00	Indikator SDGs	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					air yang operasional					
1800	SD01251.00.00	Indikator SDGs	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1801	SP00050.00.00	Indikator SP2020			Proses bisnis	Tahapan-tahapan yang disusun dalam sebuah kegiatan.	Klasifikasi Proses bisnis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Proses
1802	SD00818.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Proses Melahirkan/ Kelahiran	Proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluaranya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluaranya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluaranya plasenta.	Klasifikasi Proses Melahirkan/ Kelahiran	1. Lahir hidup 2. Lahir mati	Jumlah; persentase	Kelahiran; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1803	SD00818.00.00	Indikator SDGs	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Proses Melahirkan/ Kelahiran	Proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta.	Klasifikasi Proses Melahirkan/ Kelahiran	1. Lahir hidup 2. Lahir mati	Jumlah; persentase	Kelahiran; persen
1804	SP00051.00.00	Indikator SP2020			Provinsi	Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.	Klasifikasi Provinsi	11. Nanggroe Aceh Darussalam 12. Sumatera Utara 13. Sumatera Barat 14. Riau 15. Jambi 16. Sumatera Selatan 17. Bengkulu 18. Lampung 19. Kepulauan Bangka Belitung 21. Kepulauan Riau 31. Dki Jakarta 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 34. Di Yogyakarta	Jumlah	Provinsi

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								35. Jawa Timur 36. Banten 51. Bali 52. Nusa Tenggara Barat 53. Nusa Tenggara Timur 61. Kalimantan Barat 62. Kalimantan Tengah 63. Kalimantan Selatan 64. Kalimantan Timur 65. Kalimantan Utara 71. Sulawesi Utara 72. Sulawesi Tengah 73. Sulawesi Selatan 74. Sulawesi Tenggara 75. Gorontalo 76. Sulawesi Barat 81. Maluku 82. Maluku Utara 91. Papua Barat 94. Papua		

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1805	SD00819.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Provinsi dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan	Provinsi yang telah melakukan upaya pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil terkait peningkatan akses pendanaan usaha.	Klasifikasi Provinsi dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Provinsi
1806	SD01252.00.00	Indikator SDGs	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Jumlah proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama ditambah dengan jumlah proyek yang sudah ditetapkan pemenang ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses pelelangan.	Klasifikasi proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Proyek
1807	SD00820.00.00	Indikator SDGs	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Proyeksi Populasi	Perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk	Klasifikasi Proyeksi Populasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang.				
1808	SD00821.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Psikososial	Masalah sosial yang mempunyai dampak negatif dan berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa atau masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari gangguan jiwa	Klasifikasi Psikososial	Klasifikasi berdasarkan penyebab	Jumlah	Kasus
1809	SD00822.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Pulau Kecil	Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km ² (duaribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.	Klasifikasi Pulau Kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
1810	SD00822.00.00	Indikator SDGs	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Pulau Kecil	Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km ² (duaribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.	Klasifikasi Pulau Kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1811	SD00823.00.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Pulau Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB)	Pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk yang memerlukan pelayanan dasar.	Klasifikasi Pulau Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
1812	SD00823.00.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Pulau Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB)	Pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk yang memerlukan pelayanan dasar.	Klasifikasi Pulau Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
1813	SD00824.00.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km ² yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai hukum internasional dan nasional.	Klasifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
1814	SD00824.00.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km ² yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai hukum internasional dan nasional.	Klasifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pulau
1815	SD00825.00.00	Indikator SDGs	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.	Klasifikasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Kawasan ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1816	SD00826.01.00	Indikator SDGs	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Puskesmas	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.	Klasifikasi Puskesmas	Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan: a. Puskesmas non rawat inap b. Puskesmas rawat inap Berdasarkan karakteristik wilayah kerja a. Puskesmas kawasan perkotaan b. Puskesmas kawasan pedesaan c. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terkecil (PerMenKes No. 75 Th 2014)	Jumlah; Persentase	Puskesmas; Persen
1817	SD00826.02.00	Indikator SDGs	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Puskesmas	Unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. Biasanya Puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari 2 sampai 3 puskesmas di dalam 1 kecamatan.	Klasifikasi Puskesmas	Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan: a. Puskesmas non rawat inap b. Puskesmas rawat inap Berdasarkan	Jumlah; Persentase	Puskesmas; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Puskesmas dibedakan antara puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap dan tidak.		karakteristik wilayah kerja a. Puskesmas kawasan perkotaan b. Puskesmas kawasan pedesaan c. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terkecil (PerMenKes No. 75 Th 2014)		
1818	SD00827.00.00	Indikator SDGs	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki tenaga kesehatan yang sudah terlatih kesehatan jiwa 2) Melakukan kegiatan promotif kesehatan jiwa 3) Melakukan deteksi dini 4) Layanan pengobatan dasar dan rujukan kesehatan jiwa	Klasifikasi Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Puskesmas; Persen
1819	SD00828.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Ragam Data	Pengelompokan jenis data menurut kedepuitan yang ada di BPS pusat meliputi bidang statistik sosial, produksi, distribusi dan jasa, neraca dan analisis statistik, dan metodologi dan informasi statistik.	Klasifikasi Ragam Data	1. Statistik sosial 2. Statistik produksi 3. Statistik distribusi & jasa 4. Neraca & analisis statistik 5. Metodologi & informasi statistik	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1820	SD00828.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Ragam Data	Pengelompokan jenis data menurut kedeputan yang ada di BPS pusat meliputi bidang statistik sosial, produksi, distribusi dan jasa, neraca dan analisis statistik, dan metodologi dan informasi statistik.	Klasifikasi Ragam Data	1. Statistik sosial 2. Statistik produksi 3. Statistik distribusi & jasa 4. Neraca & analisis statistik 5. Metodologi & informasi statistik	Persentase	Persen
1821	SD00828.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Ragam Data	Pengelompokan jenis data menurut kedeputan yang ada di BPS pusat meliputi bidang statistik sosial, produksi, distribusi dan jasa, neraca dan analisis statistik, dan metodologi dan informasi statistik.	Klasifikasi Ragam Data	1. Statistik sosial 2. Statistik produksi 3. Statistik distribusi & jasa 4. Neraca & analisis statistik 5. Metodologi & informasi statistik	Persentase	Persen
1822	SD00828.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Ragam Data	Pengelompokan jenis data menurut kedeputan yang ada di BPS pusat meliputi bidang statistik sosial, produksi, distribusi dan jasa, neraca dan analisis statistik, dan metodologi dan informasi statistik.	Klasifikasi Ragam Data	1. Statistik sosial 2. Statistik produksi 3. Statistik distribusi & jasa 4. Neraca & analisis statistik 5. Metodologi & informasi statistik	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1823	SD00829.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Perbandingan antara Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Perguruan Tinggi (PT) perempuan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Perguruan Tinggi (PT) laki-laki.	Klasifikasi Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Perbandingan
1824	SD01253.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan tingkat (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) laki-laki tingkat (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat; dan Perbandingan antara Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Perguruan Tinggi (PT) perempuan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Perguruan Tinggi (PT) laki-laki.	Klasifikasi Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat, (2) SMP/MTs/ sederajat, (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat, dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Perbandingan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				laki di (4) Perguruan Tinggi.	perempuan/1 laki-laki di (4) Perguruan Tinggi		perempuan/laki- laki di (4) Perguruan Tinggi			
1825	SD00831.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederaj at; (3)SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki- laki di (4) Perguruan Tinggi.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)	Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat Sekolah Dasar (SD, MI, Salafiah Ula, dan paket A setara SD) perempuan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat Sekolah Dasar laki- laki.	Klasifikasi Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Perbandi ngan
1826	SD00830.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederaj at;	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)	Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat menengah (SMA, SMK, MA, Salafiah Ulya dan paket C setara SM) perempuan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat menengah laki-laki.	Klasifikasi Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Perbandi ngan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(3)SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.						
1827	SD00832.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3)SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Rasio APM-SMP	Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP, MTs, Salafiah wustha, dan paket B setara SMP) perempuan terhadap APM tingkat SMP laki-laki.	Klasifikasi Rasio APM-SMP	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Perbandingan
1828	SD00833.00.00	Indikator SDGs	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio Elektrifikasi	Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga	Klasifikasi Rasio Elektrifikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Perbandingan
1829	SD01254.00.00	Indikator SDGs	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas	Rasio Emisi CO2/Emisi	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri	Klasifikasi Rasio Emisi	Klasifikasi berdasarkan	Nilai	Rasio

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	diperoleh dengan cara membagi tingkat Emisi CO2 dengan nilai tambah sektor industri.	CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	analisis atau sesuai kebutuhan		
1830	SD01255.00.00	Indikator SDGs	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1831	SD01256.00.00	Indikator SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Total penerimaan pajak pemerintah pusat dibagi dengan PDB dikali dengan 100%	Klasifikasi Pemungut Pajak	1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat 2. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah	Persentase	Persen
1832	SD00834.00.00	Indikator SDGs	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas melalui jaringan gas rumah tangga terhadap total rumah tangga.	Klasifikasi Rasio penggunaan gas rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	Perbandingan
1833	SD00835.00.00	Indikator SDGs	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-Rata Institusi	Banyaknya institusi swasta, ormas, dan/atau organisasi profesi yang berperan secara aktif dalam FDPPKB guna memberikan masukan dalam penyusunan RKPD pada setiap kota yang dilakukan pengukuran.	Klasifikasi Rata-Rata Institusi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Institusi

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1834	SD01257.00.00	Indikator SDGs	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-2 hingga Kota ke-n dibagi dengan jumlah kota secara keseluruhan, dinyatakan dengan satuan institusi per kota.	Klasifikasi Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Institusi
1835	SD00836.00.00	Indikator SDGs	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum) dari kantor desa.	Klasifikasi Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (Bank Umum)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Km
1836	SD01258.00.00	Indikator SDGs	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1837	SD00837.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	Klasifikasi Rata-Rata Lama Sekolah	Klasifikasi berdasarkan	Waktu	Tahun

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								analisis atau sesuai kebutuhan		
1838	SD00838.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Jumlah tahun belajar penduduk umur ≥15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).	Klasifikasi Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Waktu	Tahun
1839	SD00839.00.00	Indikator SDGs	2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	Klasifikasi Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
1840	SD01259.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal	Diperoleh dari pembagian antara penjumlahan pertumbuhan ekonomi dari n daerah tertinggal dengan banyaknya daerah tertinggal.	Klasifikasi Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)	1. Berpotensi maju 2. Agak tertinggal 3. Tertinggal 4. Sangat tertinggal 5. Parah	Persentase	Persen
1841	SD01260.00.00	Indikator SDGs	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	ugram/m ³

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					jumlah penduduk)					
1842	SD00840.00.00	Indikator SDGs	17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara)	Indikator yang menyediakan nilai custom duties levied oleh 6 negara mitra FTA. Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan pembagian ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.	Klasifikasi Rata-Rata Tarif Terbobot di Negara Mitra FTA (Free Trade Agreement)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1843	SD01261.00.00	Indikator SDGs	17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
1844	SD00841.00.00	Indikator SDGs	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman	Rawan pangan akut atau transitory	Mencakup rawan pangan musiman. Rawan pangan ini terjadi karena adanya kejutan yang sangat membatasi kepemilikan pangan oleh rumah tangga, terutama mereka yang berada di pedesaan. Bagi rumah tangga diperkotaan rawan pangan tersebut disebabkan oleh	Klasifikasi Rawan pangan akut atau transitory	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Skala	Poin

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Kerawanan Pangan.		pemutusan hubungan kerja dan pengangguran.				
1845	SD00842.00.00	Indikator SDGs	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Rawan pangan kronis	Kondisi kurang pangan (untuk tingkat rumah tangga berarti kepemilikan pangan lebih sedikit dari pada kebutuhan dan untuk tingkat individu konsumsi pangan lebih rendah dari pada kebutuhan biologis) yang terjadi sepanjang waktu.	Klasifikasi Rawan pangan kronis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Skala	Poin
1846	SD00843.01.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Reformasi Birokrasi	Transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia.	Klasifikasi Reformasi Birokrasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1847	SD00843.02.00	Indikator SDGs	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah	Reformasi Birokrasi	Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.	Klasifikasi Reformasi Birokrasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
1848	SD00844.00.00	Indikator SDGs	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Registrasi	Rangkaian proses pendaftaran dan penilaian pemenuhan persyaratan.	Klasifikasi Registrasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Proses; Persen
1849	SD00844.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Registrasi	Rangkaian proses pendaftaran dan penilaian pemenuhan persyaratan.	Klasifikasi Registrasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Proses; Persen
1850	SD00847.00.00	Indikator SDGs	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.	Klasifikasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas; Persentase	Hektar (Ha); Persen
1851	SD00848.00.00	Indikator SDGs	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Rehabilitasi Medis	Proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.	Klasifikasi Rehabilitasi Medis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1852	SD00845.00.00	Indikator SDGs	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan,	Rehabilitasi Pengguna NAPZA	Suatu proses pemulihan klien gangguan penyalahgunaan NAPZA, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap, serta dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yang bertujuan untuk mengubah	Klasifikasi Rehabilitasi Pengguna NAPZA	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				yang mengakses layanan rehabilitasi medis.		perilaku dan mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.				
1853	SD00849.00.00	Indikator SDGs	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Rehabilitasi Sosial	Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.	Klasifikasi Rehabilitasi Sosial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
1854	SD00846.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Rehabilitasi Tanaman	Usaha kultur teknis untuk memulihkan keadaan pertumbuhan tanaman kearah kondisi yang lebih baik produktivitasnya.	Klasifikasi Rehabilitasi Tanaman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tanaman ;Persen
1855	SD00850.00.00	Indikator SDGs	8.10.2	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.	Rekening	Pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu; apabila seseorang disebutkan mempunyai akun pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank; akun (account).	Klasifikasi Rekening	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rekening ; Persen
1856	SD00851.01.00	Indikator SDGs	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal	Remaja	Kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun	Klasifikasi Remaja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.						
1857	SD00851.01.00	Indikator SDGs	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Remaja	Kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun	Klasifikasi Remaja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1858	SD00851.02.00	Indikator SDGs	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Remaja	Responden remaja pria berstatus belum kawin yang berusia 15-24 tahun.	Klasifikasi Remaja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; persentase	Orang; persen
1859	SD00852.01.00	Indikator SDGs	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Remitansi	Bagian dari gaji/penghasilan yang dikirimkan kepada keluarganya di luar negeri (home country).	Klasifikasi Remitansi	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/ USD; Persen
1860	SD00852.02.00	Indikator SDGs	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars)	Remitansi	Bagian dari transfer dana yang umumnya dilakukan tanpa dasar /underlying pemenuhan suatu kewajiban ekonomi,	Klasifikasi Remitansi	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/ USD; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sebagai proporsi terhadap total GDP.		bernilai kecil/low value dan dilakukan antar perorangan.				
1861	SD00852.02.00	Indikator SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Remitansi	Bagian dari transfer dana yang umumnya dilakukan tanpa dasar /underlying pemenuhan suatu kewajiban ekonomi, bernilai kecil/low value dan dilakukan antar perorangan.	Klasifikasi Remitansi	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/ USD; Persen
1862	SD00852.03.00	Indikator SDGs	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Remitansi	Layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia ke penerima di luar negeri maupun sebaliknya.	Klasifikasi Remitansi	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/ USD; Persen
1863	SD00852.03.00	Indikator SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Remitansi	Layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia ke penerima di luar negeri maupun sebaliknya.	Klasifikasi Remitansi	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/ USD; Persen
1864	SD00852.04.00	Indikator SDGs	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Remitansi	Transfer uang yang dilakukan oleh pekerja asing (migran) ke penerima negara asalnya.	Klasifikasi Remitansi	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/ USD; Persen
1865	SD00852.04.00	Indikator SDGs	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Remitansi	Transfer uang yang dilakukan oleh pekerja asing (migran) ke penerima negara asalnya.	Klasifikasi Remitansi	1. Remitansi uang 2. Remitansi barang berharga	Nilai; Persentase	Rupiah/ USD; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1866	SD00750.00.00	Indikator SDGs	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Remitansi Pribadi	Arus masuk pengiriman uang pribadi dinyatakan sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). The inflow of personal remittances expressed as a percentage of Gross Domestic Product (GDP).	Klasifikasi Remitansi Pribadi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah/ USD; Persen
1867	SD00853.00.00	Indikator SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Remitansi Tenaga Kerja	Transfer dari tenaga kerja migran kepada keluarga di negara asal.	Klasifikasi Remitansi Tenaga Kerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Rupiah/ USD; Persen
1868	SD00855.00.00	Indikator SDGs	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK.	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK)	Dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.	Klasifikasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
1869	SD00856.00.00	Indikator SDGs	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK.	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK)	Dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.	Klasifikasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
1870	SD00857.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisa	Rencana pengelolaan DAS yang masuk dalam kebijakan dan srategi pemanfaatan ruang wilayah baik berdasarkan wilayah administratif, fungsi, kegiatan dan nilai strategis kawasan	Klasifikasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					si ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		Ruang Wilayah (RTRW)			
1871	SD00858.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.	Klasifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1872	SD00859.00.00	Indikator SDGs	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Resolusi Konflik	Cara bagi dua atau lebih pihak untuk menemukan solusi damai untuk perselisihan di antara mereka. Ketidaksepakatan itu bisa bersifat pribadi, finansial, politis, atau emosional.	Klasifikasi Resolusi Konflik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Resolusi; Persen
1873	SD00860.00.00	Indikator SDGs	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Restorasi Ekosistem	Upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.	Klasifikasi Restorasi Ekosistem	1. Dilakukan oleh Pemerintah 2. Dilakukan oleh swasta	Jumlah; Persentase	Restorasi; Persen
1874	SD00861.00.00	Indikator SDGs	17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16	Review Undang-undang	Kemampuan lembaga statistik dalam memonitor perkembangan kebutuhan statistik nasional dengan review Undang-	Klasifikasi Review Undang-undang Nomor	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Tahun 1997 tentang Statistik.	Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik	Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	16 Tahun 1997 Tentang Statistik	analisis atau sesuai kebutuhan		
1875	SD00862.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Revitalisasi	Upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.	Klasifikasi Revitalisasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Program; Persen
1876	SD00863.00.00	Indikator SDGs	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Riset	penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.	Klasifikasi Riset	1. penelitian 2. pengembangan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1877	SD00864.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Risiko Bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.	Klasifikasi Risiko Bencana	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Jumlah; Persentase	Kerugian; Persen
1878	SD00864.00.00	Indikator SDGs	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Risiko Bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.	Klasifikasi Risiko Bencana	1. Kerugian Material 2. Kerugian Non Material	Jumlah; Persentase	Kerugian; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1879	SD00865.00.00	Indikator SDGs	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Ruang Terbuka Hijau	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Area; Persen
1880	SD00865.00.00	Indikator SDGs	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Ruang Terbuka Hijau	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Area; Persen
1881	SD00866.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Rujukan Utama	Menggunakan data BPS sebagai data utama untuk kegiatan yang dilakukan.	Klasifikasi Rujukan Utama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1882	SP00052.00.00	Indikator SP2020			Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.	Klasifikasi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RW; RT

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1883	SD00867.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Rumah layak huni	Rumah tangga yang menempati rumah layak huni adalah rumah tangga dengan memperhatikan kondisi rumah berdasar 7 (tujuh) indikator pembentuk berikut: 1. Luas lantai per kapita 2. Air minum layak 3. Santasi Layak 4. Jenis atap terluas 5. Jenis lantai terluas 6. Jenis dinding terluas 7. Sumber penerangan listrik	Klasifikasi Rumah layak huni	1. Layak huni (maksimum dua indikator pembentuk yang kurang baik) 2. Rawan layak huni (ada tiga indikator pembentuk yang kurang baik)	Jumlah; Persentase	Rumah; Persen
1884	SD00868.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Rumah layak huni dan terjangkau	Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.	Klasifikasi Rumah layak huni dan terjangkau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah; Persen
1885	SD00869.00.00	Indikator SDGs	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Rumah tahanan negara (Rutan)	Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.	Klasifikasi Rumah tahanan negara (Rutan)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rutan; Persen
1886	SD00870.00.00	Indikator SDGs	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1887	SD00870.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.		bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.		2. Rumah Tangga Khusus		
1888	SD00870.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1889	SD00870.00.00	Indikator SDGs	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1890	SD00870.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1891	SD00870.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				baku untuk pulau-pulau.						
1892	SD00870.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1893	SD00870.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1894	SD00870.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1895	SD00870.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Rumah Tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi Rumah Tangga	1. Rumah Tangga Biasa 2. Rumah Tangga Khusus	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1896	SD00871.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Banyaknya rumah tangga yang tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.	Klasifikasi Rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1897	SD00872.00.00	Indikator SDGs	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1898	SD00872.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1899	SD00872.00.00	Indikator SDGs	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1900	SD00872.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1901	SD00872.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk	Rumah Tangga Biasa	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan	Klasifikasi Rumah Tangga	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	(Ordinary Household)	fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Biasa (Ordinary Household)	analisis atau sesuai kebutuhan		
1902	SD00872.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1903	SD00872.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1904	SD00872.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1905	SD00872.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.	Klasifikasi Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1906	SD00873.00.00	Indikator SDGs	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang	Klasifikasi Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.				
1907	SD00873.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1908	SD00873.00.00	Indikator SDGs	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1909	SD00873.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1910	SD00873.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1911	SD00873.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1912	SD00873.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1913	SD00873.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1914	SD00873.00.00	Indikator SDGs	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.	Klasifikasi Rumah Tangga Khusus (Special Household)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1915	SD00874.01.00	Indikator SDGs	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Rumah Tangga Kumuh	Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak), sufficient living area, dan durability of housing.	Klasifikasi Rumah Tangga Kumuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1916	SD00874.02.00	Indikator SDGs	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Rumah Tangga Kumuh	Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%.	Klasifikasi Rumah Tangga Kumuh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1917	SD00875.00.00	Indikator SDGs	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Keluarga miskin dan rentan yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan.	Klasifikasi Rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Keluarga /Rumah Tangga; Persen
1918	SD00876.00.00	Indikator SDGs	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Rumah tidak layak huni	Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Terdapat 7 (tujuh) indikator	Klasifikasi Rumah tidak layak huni	Tidak layak huni: 3 indikator atau lebih	Jumlah; Persentase	Rumah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						<p>penyusun rumah tidak layak yaitu: 1. Sufficient living area Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m2 karena tidak memenuhi sufficient living area atau kecukupan luas lantai hunian. 2. Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya. 3. Jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas adalah bambu atau lainnya. 4. Jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas adalah tanah atau lainnya. 5. Kepemilikan akses terhadap layanan sanitasi layak Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6. Kepemilikan akses terhadap sumber air minum layak</p>				

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak. 7. Sumber utama penerangan Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila sumber utama penerangan rumah tangga adalah non listrik. Dari 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak huni, rumah tangga dikategorikan menempati rumah tidak layak huni apabila memenuhi 3 (tiga) atau lebih indikator penyusun.				
1919	SP00053.00.00	Indikator SP2020			Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik non PLN	Rumah yang ditempati menggunakan listrik non PLN, misalnya perusahaan listrik daerah, genset berbahan bakar solar, atau pembangkit listrik tenaga matahari.	Klasifikasi Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik non PLN	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1920	SP00054.00.00	Indikator SP2020			Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik PLN dengan daya 450 watt atau 900 watt	Rumah yang ditempati menggunakan listrik PLN dengan daya terpasang 450 watt atau 900 watt.	Klasifikasi Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik PLN dengan daya 450 watt atau 900 watt	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1921	SP00055.00.00	Indikator SP2020			Rumah yang ditempati menggunakan	Rumah yang ditempati menggunakan listrik PLN dengan daya terpasang lebih dari 900 watt.	Klasifikasi Rumah yang ditempati	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					n sumber listrik PLN dengan daya lebih dari 900 watt		menggunakan sumber listrik PLN dengan daya lebih dari 900 watt	analisis atau sesuai kebutuhan		
1922	SP00056.00.00	Indikator SP2020			Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik PLN tanpa meteran	Rumah yang ditempati menggunakan listrik PLN tanpa meteran, misalnya dengan menyalurkan listrik dari tetangga atau mengambil dari saluran listrik utama.	Klasifikasi Rumah yang ditempati menggunakan sumber listrik PLN tanpa meteran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1923	SP00057.00.00	Indikator SP2020			Rumah yang ditempati tidak menggunakan listrik	Rumah yang ditempati tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan.	Klasifikasi Rumah yang ditempati tidak menggunakan listrik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
1924	SD01262.00.00	Indikator SDGs	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	Indikator telah tercapai melalui ketersediaan rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati menjadi indikasi adanya langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan mengurangi dampak, serta upaya mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif.	Klasifikasi Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kebijakan
1925	SD00877.00.00	Indikator SDGs	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas	Sambungan Jaringan Gas untuk	Jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk	Klasifikasi Sambungan Jaringan Gas	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Sambungan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				untuk rumah tangga.	Rumah Tangga (Sambungan Rumah (SR))	rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.	untuk Rumah Tangga (Sambungan Rumah (SR))	analisis atau sesuai kebutuhan		Rumah (SR)
1926	SD00878.00.00	Indikator SDGs	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Sampah	Sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat	Klasifikasi Sampah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
1927	SD00879.00.00	Indikator SDGs	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Sampah Rumah Tangga	Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik	Klasifikasi Sampah Rumah Tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen
1928	SD00880.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Sanitasi	Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.	Klasifikasi Sanitasi	1. Layak 2. Tidak Layak	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
1929	SD00881.00.00	Indikator SDGs	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air	Sanitasi Dasar	Sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana Buang Air Besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga	Klasifikasi Sanitasi Dasar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).						
1930	SD00882.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Sanitasi yang meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.	Klasifikasi Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
1931	SD00883.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.	Klasifikasi Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen
1932	SD00883.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar	Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air	Klasifikasi Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Fasilitas; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Sembarangan (SBS).		minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.				
1933	SD00886.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	<p>Terdiri dari indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya - Persentase rumah tangga pengguna telepon - Persentase rumah tangga pengguna listrik -Persentase rumah tangga pengguna air bersih -Persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen -Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk - Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk -Jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk 	Klasifikasi Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
1934	SD00889.00.00	Indikator SDGs	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Sasaran Dari Pendidikan Layanan Khusus	Daerah yang memiliki Indeks Risiko Bencana tinggi dan sedang dan daerah yang terpapar bencana yang mengakibatkan terganggunya layanan pendidikan terhadap anak (siswa/siswi).	Klasifikasi Sasaran Dari Pendidikan Layanan Khusus	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
1935	SD00890.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang	Satu Dapur	Jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.	Klasifikasi Satu Dapur	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	Rumah Tangga

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.				analisis atau sesuai kebutuhan		
1936	SP00058.00.00	Indikator SP2020			Satuan Lingkungan Setempat	Satuan wilayah di bawah desa/kelurahan. Satuan wilayah ini biasanya ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan desa, dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan tingkatan dan banyaknya satuan wilayah di bawah desa beserta batas-batasnya.	Klasifikasi Satuan Lingkungan Setempat	1. Rukun Tetangga (RT) 2. Rukun Warga (RW) 3. Jorong 4. Dusun 5. Lingkungan	Jumlah	SLS
1937	SD00891.00.00	Indikator SDGs	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Satwa Liar	Satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.	Klasifikasi Satwa Liar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Satwa
1938	SD00893.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Sedimentasi	Sedimentasi jumlah material tanah berupa kadar lumpur dalam air oleh aliran air sungai yang berasal dari proses erosi di daerah hulu, yang diendapkan pada suatu daerah di hilir dimana kecepatan pengendapan butir-butir material suspensi telah lebih kecil dari kecepatan angkutnya.	Klasifikasi Sedimentasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton/m3
1939	SP00059.00.00	Indikator SP2020			Segmen	Wilayah yang dibatasi batas alam atau buatan seperti jalan, sungai, dan kebun.	Klasifikasi Segmen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Segmen
1940	SD00894.01.00	Indikator SDGs	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke:	Sekolah	Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan	Klasifikasi Sekolah	1. Sekolah Negeri 2. Sekolah Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.				
1941	SD00894.02.00	Indikator SP2020			Sekolah	Mengikuti kegiatan pendidikan formal dan non formal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan menengah (SLTA).	Klasifikasi Sekolah	1. Sekolah Negeri 2. Sekolah Swasta	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1942	SD00895.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi Sekolah Dasar (SD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1943	SD00895.00.00	Indikator SDGs	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c)	Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi Sekolah Dasar (SD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.						
1944	SD00895.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi Sekolah Dasar (SD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1945	SD00895.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi Sekolah Dasar (SD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1946	SD00895.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Sekolah Dasar (SD)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Klasifikasi Sekolah Dasar (SD)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1947	SD00896.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada tingkat Sekolah Dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).	Klasifikasi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1948	SD00897.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1949	SD00897.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1950	SD00897.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se derajat.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1951	SD00897.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3)SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1952	SD00897.00.00	Indikator SDGs	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1953	SD00897.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Sekolah Menengah Awal (SMA)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Sekolah Menengah Awal (SMA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1954	SD00898.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1955	SD00898.00.00	Indikator SDGs	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Sekolah Menengah Lanjutan (SMK)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.	Klasifikasi Sekolah Menengah Lanjutan (SMK)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1956	SD00899.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).	Klasifikasi Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1957	SD00900.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKKP.	Klasifikasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1958	SD00900.00.00	Indikator SDGs	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk	Klasifikasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKPP.				
1959	SD00900.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKPP.	Klasifikasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1960	SD00900.00.00	Indikator SDGs	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKPP.	Klasifikasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1961	SD00900.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederaj at; (3)SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki- laki di (4) Perguruan Tinggi.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kependidikan Putri/SKPP.	Klasifikasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen
1962	SD00901.00.00	Indikator SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederaj at; (3)SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).	Klasifikasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sekolah; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				laki di (4) Perguruan Tinggi.						
1963	SD00902.00.00	Indikator SDGs	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Sektor Pariwisata	Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.	Klasifikasi Sektor Pariwisata	KBLI	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1964	SD00903.00.00	Indikator SDGs	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Sektor Pertanian	Jenis komoditi/sub sektor jika salah satu sumber penghasilan adalah sektor pertanian, meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, kehutanan, dan jasa pertanian.	Klasifikasi Sektor Pertanian	KBLI	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
1965	SD00904.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Sengketa Informasi Publik	Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.	Klasifikasi Sengketa Informasi Publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sengketa ; Persen
1966	SD00905.00.00	Indikator SDGs	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Sengketa Lingkungan Hidup (LH)	Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	Klasifikasi Sengketa Lingkungan Hidup (LH)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sengketa ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1967	SD00905.00.00	Indikator SDGs	15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Sengketa Lingkungan Hidup (LH)	Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	Klasifikasi Sengketa Lingkungan Hidup (LH)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sengketa ; Persen
1968	SD00906.00.00	Indikator SDGs	16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.	Senjata Api	Perakitan barel dan aksi dari mana proyektil dilepaskan dengan menggunakan propelan yang terbakar dengan cepat. Juga disebut senjata, pistol, pistol, pistol panjang, pistol, revolver, dll.	Klasifikasi Senjata Api	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Senjata
1969	SD00907.00.00	Indikator SDGs	16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.	Senjata Ringan	Senjata yang dirancang untuk penggunaan individu. Termasuk, antara lain, revolver dan pistol yang bisa diisi sendiri, senapan dan karabin, senjata sub-mesin, senapan serbu dan senapan mesin ringan.	Klasifikasi Senjata Ringan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Senjata
1970	SD00908.00.00	Indikator SDGs	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan	Sensus Penduduk	Pendataan penduduk dan karakteristiknya secara menyeluruh di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.	Klasifikasi Sensus Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sensus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.						
1971	SD00908.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Sensus Penduduk	Pendataan penduduk dan karakteristiknya secara menyeluruh di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.	Klasifikasi Sensus Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sensus; Persen
1972	SD00908.00.00	Indikator SP2020			Sensus Penduduk	Pendataan penduduk dan karakteristiknya secara menyeluruh di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.	Klasifikasi Sensus Penduduk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sensus; Persen
1973	SP00060.00.00	Indikator SP2020			Septic Tank atau Tangki Septik	Tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu/beton di semua sisinya.	Klasifikasi Septic Tank atau Tangki Septik	1. Tangki dengan dasar semen 2. Tangki tanpa dasar semen	Jumlah	Septic Tank
1974	SD00909.00.00	Indikator SDGs	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja,	Serikat Pekerja	Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.	Klasifikasi Serikat Pekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Organisasi; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.						
1975	SD00910.00.00	Indikator SDGs	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Sertifikasi SNI ISO 14001	Standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML).	Klasifikasi Sertifikasi SNI ISO 14001	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sertifikat ; Persen
1976	SD00911.00.00	Indikator SDGs	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Sertifikat Pendidik	Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional	Klasifikasi Sertifikat Pendidik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sertifikat ; Persen
1977	SD00912.00.00	Indikator SDGs	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Sidang di luar gedung pengadilan	Sidang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri dalam bentuk sidang keliling atau sidang di zitting plaats.	Klasifikasi Sidang di luar gedung pengadilan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sidang; Persen
1978	SD00913.00.00	Indikator SDGs	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lem	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur, yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Klasifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
1979	SD00914.00.00	Indikator SDGs	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Sistem Angkutan Rel yang Dikembangk an di Kota Besar	Sistem perkeretaapian yang dikembangkan untuk melayani perpindahan orang di kota besar	Klasifikasi Sistem Angkutan Rel yang Dikembangkan di Kota Besar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1980	SD00915.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Sistem Ekologis	Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas .	Klasifikasi Sistem Ekologis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1981	SD00916.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Sistem Informasi Sumber Daya Air	Jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.	Klasifikasi Sistem Informasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1982	SD00917.01.00	Indikator SDGs	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal- hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.	Klasifikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiunan 5. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan /Progra m; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1983	SD00917.02.00	Indikator SDGs	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.	Klasifikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiunan 5. Jaminan Kematian	Jumlah; Persentase	Kegiatan /Program; Persen
1984	SD00918.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan	Sistem pengelolaan air limbah yang melayani komplek perumahan dan komplek perkantoran, memiliki jaringan pipa sekunder dan tersier, dan unit pengolahan air limbah.	Klasifikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1985	SD00918.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan	Sistem pengelolaan air limbah yang melayani komplek perumahan dan komplek perkantoran, memiliki jaringan pipa sekunder dan tersier, dan unit pengolahan air limbah.	Klasifikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1986	SD00919.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota,	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Komunal	Sistem pengelolaan air limbah dengan jangkauan pelayanan minimal 10 rumah tangga.	Klasifikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Komunal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kawasan dan komunal.						
1987	SD00919.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Komunal	Sistem pengelolaan air limbah dengan jangkauan pelayanan minimal 10 rumah tangga.	Klasifikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Komunal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1988	SD00920.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani wilayah luas dalam kota, memiliki jaringan pipa lengkap (pipa primer, sekunder dan tersier) dan unit pengolahan air limbah.	Klasifikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1989	SD00920.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani wilayah luas dalam kota, memiliki jaringan pipa lengkap (pipa primer, sekunder dan tersier) dan unit pengolahan air limbah.	Klasifikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1990	SD00921.00.00	Indikator SDGs	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim serta Kebencanaan	Sistem pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu kota oleh lembaga yang berwenang.	Klasifikasi Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim serta Kebencanaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen
1991	SD00922.00.00	Indikator SDGs	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan	Sistem Statistik Nasional	Suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan,	Klasifikasi Sistem Statistik Nasional	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Sistem; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.		sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.		analisis atau sesuai kebutuhan		
1992	SD01263.00.00	Indikator SDGs	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Situs
1993	SD00923.00.00	Indikator SDGs	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai yang diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.	Klasifikasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	Skor PPH; Persen
1994	SD00924.00.00	Indikator SDGs	16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.	Standar Internasional	Standar yang diadopsi oleh organisasi standar internasional dan tersedia untuk umum. Definisi yang diberikan dalam semua standar IEC berbunyi: "Dokumen normatif, dikembangkan sesuai dengan prosedur konsensus, yang telah disetujui oleh anggota Komite Nasional IEC dari komite yang bertanggung jawab sesuai dengan Bagian 1 dari Arahan ISO / IEC.	Klasifikasi Standar Internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Standar; Persen
1995	SD00925.00.00	Indikator SDGs	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang	Standar Pelayanan	Standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai	Klasifikasi Standar	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Masyarakat (SPM)	kesesuaiannya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan.	Pelayanan Masyarakat (SPM)	analisis atau sesuai kebutuhan		
1996	SD00926.00.00	Indikator SDGs	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Klasifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1997	SD00927.00.00	Indikator SDGs	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Meliputi layanan: a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Klasifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
1998	SD00928.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)	Pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan. Prinsip SPP meliputi: 1. keadilan dan perlindungan pada kepentingan umum; 2. keterpaduan pelayanan perkotaan; 3. keberlanjutan. SPP dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas: a. tempat permukiman perkotaan; b.	Klasifikasi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan; c. pelayanan sosial; dan d. kegiatan ekonomi.				
1999	SD00928.00.00	Indikator SDGs	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)	Pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan. Prinsip SPP meliputi: 1. keadilan dan perlindungan pada kepentingan umum; 2. keterpaduan pelayanan perkotaan; 3. keberlanjutan. SPP dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas: a. tempat permukiman perkotaan; b. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan; c. pelayanan sosial; dan d. kegiatan ekonomi.	Klasifikasi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2000	SD00929.00.00	Indikator SDGs	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Standar Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Publik sekurang-kurangnya mencakup: a) dasar hukum b) persyaratan c) sistem, mekanisme, dan prosedur d) jangka waktu penyelesaian e) biaya/tarif f) produk pelayanan g) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas h) kompetensi pelaksana i) pengawasan internal j) penanganan pengaduan, saran dan masukan k) jumlah pelaksana l) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan m) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan n) evaluasi kinerja pelaksana.	Klasifikasi Standar Pelayanan Publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Pelayanan; Persen
2001	SD00930.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Stasiun Hidrologi	Suatu tempat/lokasi peralatan hidrologi yang dibangun melalui tahapan survei dan perencanaan jaringan hidrologi yang berfungsi sebagai pemantau karakteristik hidrologi.	Klasifikasi Stasiun Hidrologi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Stasiun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2002	SD00930.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Stasiun Hidrologi	Suatu tempat/lokasi peralatan hidrologi yang dibangun melalui tahapan survei dan perencanaan jaringan hidrologi yang berfungsi sebagai pemantau karakteristik hidrologi.	Klasifikasi Stasiun Hidrologi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Stasiun; Persen
2003	SD00931.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Stasiun Hidrologi dan Klimatologi yang Dilakukan Updating dan Revitalisasi	Stasiun hidrologi dan klimatologi yang mengalami pembaharuan dan pengembangan baik pada alat pengukuran yang digunakan maupun sarana dan prasarananya.	Klasifikasi Stasiun Hidrologi dan Klimatologi yang Dilakukan Updating dan Revitalisasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Stasiun; Persen
2004	SD00931.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Stasiun Hidrologi dan Klimatologi yang Dilakukan Updating dan Revitalisasi	Stasiun hidrologi dan klimatologi yang mengalami pembaharuan dan pengembangan baik pada alat pengukuran yang digunakan maupun sarana dan prasarananya.	Klasifikasi Stasiun Hidrologi dan Klimatologi yang Dilakukan Updating dan Revitalisasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Stasiun; Persen
2005	SD00932.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Stasiun Klimatologi	Suatu/lokasi yang dibangun untuk melakukan pengukuran secara kontinyu dan meliputi periode waktu yang lama (minimal 10 tahunan). Pengamatan utama yang dilakukan stasiun klimatologi meliputi unsur curah hujan, suhu udara, arah dan laju angin, kelembaban, tinggi dasar awan, banglash, durasi penyinaran matahari dan suhu tanah.	Klasifikasi Stasiun Klimatologi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Stasiun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2006	SD00932.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Stasiun Klimatologi	Suatu/lokasi yang dibangun untuk melakukan pengukuran secara kontinyu dan meliputi periode waktu yang lama (minimal 10 tahunan). Pengamatan utama yang dilakukan stasiun klimatologi meliputi unsur curah hujan, suhu udara, arah dan laju angin, kelembaban, tinggi dasar awan, banglash, durasi penyinaran matahari dan suhu tanah.	Klasifikasi Stasiun Klimatologi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Stasiun; Persen
2007	SD00933.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Statistik Dasar	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.	Klasifikasi Statistik Dasar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
2008	SD00934.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Statistik Khusus	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian. Meskipun pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi/perusahaan terkait, dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS.	Klasifikasi Statistik Khusus	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
2009	SD00935.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi	Statistik Sektoral	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang	Klasifikasi Statistik Sektoral	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Rujukan Statistik (SIRuSa).		bersangkutan. Meskipun program pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah terkait, dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS.				
2010	SD00936.00.00	Indikator SDGs	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Status Hidup Bersama	Kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat.	Klasifikasi Status Hidup Bersama	1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	Persentase	Persen
2011	SD00937.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Status Kawin	Status keterikatan seseorang dalam perkawinan. Status kawin tidak hanya bagi mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.	Klasifikasi Status Kawin	1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	Persentase	Persen
2012	SP00061.00.00	Indikator SP2020			Status kepemilikan rumah yang ditempati (Kontrak/Sewa)	Rumah disewa oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya bulanan atau tahunan.	Klasifikasi Status kepemilikan rumah yang ditempati (Kontrak/Sewa)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
2013	SP00062.00.00	Indikator SP2020			Status kepemilikan rumah yang ditempati	Rumah yang ditempati merupakan milik kepala keluarga atau milik salah satu anggota keluarga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau	Klasifikasi Status kepemilikan rumah yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(Milik Sendiri)	rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.	ditempati (Milik Sendiri)			
2014	SP00063.00.00	Indikator SP2020			Status kepemilikan rumah yang ditempati: Bebas Sewa (menumpang)	Rumah yang ditempati tersebut diperoleh dari pihak lain bukan anggota keluarga (baik famili maupun bukan famili yang tinggal di tempat lain) dan ditempati tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.	Klasifikasi Status kepemilikan rumah yang ditempati: Bebas Sewa (menumpang)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
2015	SP00064.00.00	Indikator SP2020			Status kepemilikan rumah yang ditempati: Dinas	Rumah yang ditempati tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi/perusahaan tempat bekerja kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga, baik dengan membayar sewa maupun tidak.	Klasifikasi Status kepemilikan rumah yang ditempati: Dinas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
2016	SP00065.00.00	Indikator SP2020			Status kepemilikan rumah yang ditempati: Lainnya	Rumah yang ditempati tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama dan rumah adat.	Klasifikasi Status kepemilikan rumah yang ditempati: Lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rumah Tangga; Persen
2017	SD00938.00.00	Indikator SDGs	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Status Migran	Penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah kelurahan/desa dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei.	Klasifikasi Status Migran	1. Migran luar kota 2. Migran lokal kota	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2018	SD00939.00.00	Indikator SDGs	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Status Pekerjaan	Jenis kedudukan Seseorang dalam pekerjaan utama.	Klasifikasi Status Pekerjaan	1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4. Buruh/Karyawan/Pegawai 5. Pekerja Keluarga atau tidak dibayar 6. Pekerja Bebas	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2019	SD00939.00.00	Indikator SP2020			Status Pekerjaan	Jenis kedudukan Seseorang dalam pekerjaan utama.	Klasifikasi Status Pekerjaan	1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4. Buruh/Karyawan/Pegawai 5. Pekerja Keluarga atau	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								tidak dibayar 6. Pekerja Bebas		
2020	SD00940.00.00	Indikator SDGs	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.	Klasifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2021	SD00941.01.00	Indikator SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Stunting	Kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.	Klasifikasi Stunting	1. Sangat pendek: Z-score < -3,0 SD 2. Pendek: -3,0 SD < Z-score < -2,0 SD 3. Normal: Z-score >= -2,0 SD (Sumber: Kepmenkes No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak)	Nilai Baku Antropometri Anak Balita WHO 2005	Nilai terstandar (Z-score)
2022	SD00941.01.00	Indikator SDGs	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah	Stunting	Kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari	Klasifikasi Stunting	1. Sangat pendek: Z-score < -3,0 SD 2. Pendek: -3,0 SD < Z-score < -2,0 SD 3. Normal: Z-score	Nilai Baku Antropometri Anak Balita WHO 2005	Nilai terstandar (Z-score)

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dua tahun/baduta.		WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.		>= -2,0 SD (Sumber: Kepmenkes No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak)		
2023	SD00941.02.00	Indikator SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Stunting	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.	Klasifikasi Stunting	1. Sangat pendek: Z-score < -3,0 SD 2. Pendek: -3,0 SD < Z-score < -2,0 SD 3. Normal: Z-score >= -2,0 SD (Sumber: Kepmenkes No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak)	Nilai Baku Antropometri Anak Balita WHO 2005	Nilai terstandar (Z-score)
2024	SP00069.00.00	Indikator SP2020			Suami	Suami dari kepala keluarga.	Klasifikasi Suami	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2025	SD00942.00.00	Indikator SDGs	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Suap	Untuk mencoba membuat seseorang melakukan sesuatu untuk Anda dengan memberi mereka uang, hadiah, atau sesuatu yang mereka inginkan.	Klasifikasi Suap	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Temuan; Persen
2026	SD00942.00.00	Indikator SDGs	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Suap	Untuk mencoba membuat seseorang melakukan sesuatu untuk Anda dengan memberi mereka uang, hadiah, atau sesuatu yang mereka inginkan.	Klasifikasi Suap	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Temuan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2027	SD00943.00.00	Indikator SDGs	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	Subsidi	Semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang dimaksud dengan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Tujuan pemberian subsidi, antara lain, adalah menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain. Data yang tercakup dalam perincian subsidi ini adalah subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk.	Klasifikasi Subsidi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2028	SP00070.00.00	Indikator SP2020			Suku	Kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun.	Klasifikasi Suku	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Suku; Orang; Persen
2029	SD00944.00.00	Indikator SDGs	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi Sumber Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2030	SD00944.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi Sumber Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2031	SD00944.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi Sumber Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2032	SD00944.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi Sumber Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2033	SD00944.00.00	Indikator SDGs	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi Sumber Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2034	SD00944.00.00	Indikator SDGs	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi Sumber Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2035	SD00944.00.00	Indikator SDGs	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Sumber Air	Tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	Klasifikasi Sumber Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2036	SD00945.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Sumber Air Minum	Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.	Klasifikasi Sumber Air Minum	1. Air Kemasan Bermerk 2. Air Isi Ulang 3. Leding Meteran 4. Leding Eceran 5. Sumur Bor/Pompa 6. Sumur Terlindung 7. Sumur Tak Terlindung 8. Mata Air Terlindung 9. Mata Air Tak Terlindung 10. Air Permukaan 11. Air Hujan 12. Sumber Lainnya	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2037	SD00945.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Sumber Air Minum	Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.	Klasifikasi Sumber Air Minum	1. Air Kemasan Bermerk 2. Air Isi Ulang 3. Leding Meteran 4. Leding Eceran 5. Sumur Bor/Pompa 6. Sumur Terlindung 7. Sumur Tak Terlindung 8. Mata Air Terlindung	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								9. Mata Air Tak Terlindung 10. Air Permukaan 11. Air Hujan 12. Sumber Lainnya		
2038	SD00945.00.00	Indikator SDGs	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Sumber Air Minum	Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.	Klasifikasi Sumber Air Minum	1. Air Kemasan Bermerk 2. Air Isi Ulang 3. Leding Meteran 4. Leding Eceran 5. Sumur Bor/Pompa 6. Sumur Terlindung 7. Sumur Tak Terlindung 8. Mata Air Terlindung 9. Mata Air Tak Terlindung 10. Air Permukaan 11. Air Hujan 12. Sumber Lainnya	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2039	SD00946.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Sumber Air Minum Layak	Air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja \geq 10 m.	Klasifikasi Sumber Air Minum Layak	1. Air Ledeng (keran) Meteran 2. Air Ledeng Eceran	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				sumber air minum layak dan berkelanjutan.				3. Keran Umum 4. Hydrant Umum 5. Terminal Air 6. Penampungan Air Hujan (PAH) atau Mata Air 7. Sumur Terlindung 8. Sumur Bor atau Sumur Pompa		
2040	SP00070.00.00	Indikator SP2020			Sumber Air Minum Utama Air Hujan	Jika keluarga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum.	Klasifikasi Sumber Air Minum Utama Air Hujan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2041	SP00074.00.00	Indikator SP2020			Sumber Air Minum Utama Lainnya	Jika keluarga menggunakan sumber air minum yang tidak disebutkan di atas, misalnya air laut yang disuling.	Klasifikasi Sumber Air Minum Utama Lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2042	SD00947.00.00	Indikator SDGs	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2043	SD00947.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2044	SD00947.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2045	SD00947.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2046	SD00947.00.00	Indikator SDGs	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2047	SD00947.00.00	Indikator SDGs	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Sumber Daya Air	Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.	Klasifikasi Sumber Daya Air	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2048	SD00948.00.00	Indikator SDGs	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Sumber Daya Ikan	Potensi semua jenis ikan.	Klasifikasi Sumber Daya Ikan	1. Ikan Perairan Laut 2. Ikan Perairan Darat 3. Ikan Perairan Payau	Persentase	Persen
2049	SD00948.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Sumber Daya Ikan	Potensi semua jenis ikan.	Klasifikasi Sumber Daya Ikan	1. Ikan Perairan Laut 2. Ikan Perairan Darat	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								3. Ikan Perairan Payau		
2050	SD00949.00.00	Indikator SDGs	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Sumber Daya Kelautan	Sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.	Klasifikasi Sumber Daya Kelautan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2051	SD00949.00.00	Indikator SDGs	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).	Sumber Daya Kelautan	Sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.	Klasifikasi Sumber Daya Kelautan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2052	SD00885.00.00	Indikator SDGs	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal	Terdiri dari indikator: - Angka Harapan Hidup - Rata-Rata Lama Sekolah - Angka Melek Huruf.	Klasifikasi Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Daerah; Persen
2053	SD00950.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air	Klasifikasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.				
2054	SD00951.00.00	Indikator SDGs	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Sumber Energi	Sebagian sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara, air, panas bumi, gambut, biomasa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi.	Klasifikasi Sumber Energi	Sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen
2055	SD00952.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Sumber Listrik Bukan PLN	Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi atau oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari AKI, generator, PLT surya (solar cell).	Klasifikasi Sumber Listrik Bukan PLN	1. Tenaga surya 2. BBM	Jumlah; Persentase	Sumber; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2056	SD00953.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Sumur Resapan	Sumur yang dirancang untuk menyerap air hujan, biasanya berkedalaman 1½ - 2 m dan secara kasat mata tidak dapat dilihat karena permukaannya tertutup. Manfaat sumur resapan diantaranya adalah untuk meresapkan air hujan ke tanah, sebagai cadangan air tanah, dan untuk mencegah banjir. Bagian dalam sumur biasanya diisi oleh batu pecah, bata merah, ijuk serta arang dimana batu disusun berongga. Untuk rumah yang memiliki talang air, air hujan dari talang air akan dialirkan ke sumur melalui pipa. Sementara untuk rumah yang tidak memiliki talang air, maka sumur berada di bawah taman/parit. Jadi, sumur resapan yang dimaksud bukan untuk menyerap air limbah dari septic tank. Sumur resapan biasanya berjarak minimal 5 meter dari septic tank.	Klasifikasi Sumur Resapan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sumur; Persen
2057	SD00954.00.00	Indikator SDGs	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Sungai	Tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.	Klasifikasi Sungai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Panjang; Lebar	Sungai; Km
2058	SD00954.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana	Sungai	Tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.	Klasifikasi Sungai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Panjang; Lebar	Sungai; Km

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				Tata Ruang Wilayah (RTRW).						
2059	SD00954.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Sungai	Tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.	Klasifikasi Sungai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Panjang; Lebar	Sungai; Km
2060	SD00954.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Sungai	Tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.	Klasifikasi Sungai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Panjang; Lebar	Sungai; Km
2061	SD00954.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.	Klasifikasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Surat; Persen
2062	SP00077.00.00	Indikator SP2020			Surat kematian	Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/dokter/bidan maupun perawat di fasilitas kesehatan atau yang dikeluarkan oleh kepolisian/ pengadilan	Klasifikasi Surat kematian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Surat

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						yang selanjutnya digunakan untuk pelaporan kematian dan sebagai syarat penerbitan akta kematian oleh pejabat pencacatan sipil.				
2063	SD00955.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.	Klasifikasi Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Surat; Persen
2064	SD00956.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Surat Utang Negara (SUN)	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.	Klasifikasi Surat Utang Negara (SUN)	1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 2. Obligasi Negara (ON)	Jumlah; Persentase	Surat; Persen
2065	SP00078.00.00	Indikator SP2020			Surat/Akta Perceraian	Suatu bukti otentik tentang putusannya suatu ikatan perkawinan.	Klasifikasi Surat/Akta Perceraian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Surat
2066	SP00079.00.00	Indikator SP2020			Surat/Akta Pernikahan	Suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.	Klasifikasi Surat/Akta Pernikahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Surat

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2067	SD00892.00.00	Indikator SDGs	17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.	Sustainable Development Goals (SDGs)	Kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.	Klasifikasi Sustainable Development Goals (SDGs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Goals; Persen
2068	SD00892.00.00	Indikator SDGs	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Sustainable Development Goals (SDGs)	Kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.	Klasifikasi Sustainable Development Goals (SDGs)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Goals; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2069	SD00957.01.00	Indikator SDGs	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Tahanan	Seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan).	Klasifikasi Tahanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2070	SD00957.01.00	Indikator SDGs	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Tahanan	Seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan).	Klasifikasi Tahanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2071	SD00957.02.00	Indikator SDGs	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Tahanan	Seseorang tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan).	Klasifikasi Tahanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2072	SD00957.03.00	Indikator SDGs	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Tahanan	Tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut.	Klasifikasi Tahanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2073	SD00958.00.00	Indikator SDGs	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Tarif	Bea masuk untuk impor barang dagangan, dipungut berdasarkan ad valorem (persentase nilai) atau berdasarkan ketentuan tertentu (mis. \$ 7 per 100 kg). Tarif dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan harga untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal yang serupa dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Langkah-langkah pemulihan perdagangan dan pajak tidak dianggap sebagai tarif	Klasifikasi Tarif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2074	SD00958.00.00	Indikator SDGs	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).	Tarif	Bea masuk untuk impor barang dagangan, dipungut berdasarkan ad valorem (persentase nilai) atau berdasarkan ketentuan tertentu (mis. \$ 7 per 100 kg). Tarif dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan harga untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal yang serupa dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Langkah-langkah pemulihan perdagangan dan pajak tidak dianggap sebagai tarif.	Klasifikasi Tarif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
2075	SD00958.00.00	Indikator SDGs	17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).	Tarif	Bea masuk untuk impor barang dagangan, dipungut berdasarkan ad valorem (persentase nilai) atau berdasarkan ketentuan tertentu (mis. \$ 7 per 100 kg). Tarif dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan harga untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal yang serupa dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Langkah-langkah pemulihan perdagangan dan pajak tidak dianggap sebagai tarif.	Klasifikasi Tarif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
2076	SD00958.00.00	Indikator SDGs	17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Tarif	Bea masuk untuk impor barang dagangan, dipungut berdasarkan ad valorem (persentase nilai) atau berdasarkan ketentuan tertentu (mis. \$ 7 per 100 kg). Tarif dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan harga untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal yang serupa dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Langkah-langkah pemulihan	Klasifikasi Tarif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						perdagangan dan pajak tidak dianggap sebagai tarif.				
2077	SD00959.00.00	Indikator SDGs	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).	Tarif Terbobot	Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan pembagian ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.	Klasifikasi Tarif Terbobot	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
2078	SD00959.00.00	Indikator SDGs	17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).	Tarif Terbobot	Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan pembagian ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.	Klasifikasi Tarif Terbobot	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai; Persentase	USD/kg; Persen
2079	SP00080.00.00	Indikator SP2020			Tegel	Ubin yang terbuat dari semen.	Klasifikasi Tegel	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m ²
2080	SD00959.00.00	Indikator SDGs	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Tekanan Darah Tinggi	Peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang.	Klasifikasi Tekanan Darah Tinggi	Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin penderita: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2081	SD00960.00.00	Indikator SDGs	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Teknologi	Metode untuk menggunakan penemuan ilmiah untuk tujuan praktis.	Klasifikasi Teknologi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi ; Persen
2082	SD00960.00.00	Indikator SDGs	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Teknologi	Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.	Klasifikasi Teknologi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi ; Persen
2083	SD00961.00.00	Indikator SDGs	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Teknologi dan Komunikasi	Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.	Klasifikasi Teknologi dan Komunikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi ; Persen
2084	SD00962.00.00	Indikator SDGs	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan	Teknologi Ramah Lingkungan	Teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi Ramah Lingkungan memenuhi persyaratan: - Pemenuhan terhadap regulasi	Klasifikasi Teknologi Ramah Lingkungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi ; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				teknologi ramah lingkungan.		- Efisien dalam penggunaan sumber daya (air, energi, penggunaan bahan baku, penggunaan bahan kimia)				
2085	SD00962.00.00	Indikator SDGs	17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Teknologi Ramah Lingkungan	Teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi Ramah Lingkungan memenuhi persyaratan: - Pemenuhan terhadap regulasi - Efisien dalam penggunaan sumber daya (air, energi, penggunaan bahan baku, penggunaan bahan kimia)	Klasifikasi Teknologi Ramah Lingkungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teknologi ; Persen
2086	SD00963.01.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Telekomunikasi	Hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman, atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektronik.	Klasifikasi Telekomunikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Telekomunikasi; Persen
2087	SD00963.01.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Telekomunikasi	Hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman, atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektronik.	Klasifikasi Telekomunikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Telekomunikasi; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2088	SD00963.02.00	Indikator SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Telekomunikasi	Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.	Klasifikasi Telekomunikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teekomunikasi; Persen
2089	SD00963.02.00	Indikator SDGs	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Telekomunikasi	Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.	Klasifikasi Telekomunikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Teekomunikasi; Persen
2090	SD00964.01.00	Indikator SDGs	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam.	Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa kemana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Termasuk telepon seluler adalah handphone dan smartphone, tetapi tidak termasuk tablet meskipun bisa digunakan untuk menelepon.	Klasifikasi Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ponsel; Persen
2091	SD00964.01.00	Indikator SDGs	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam.	Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa kemana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Termasuk telepon seluler adalah handphone dan smartphone, tetapi tidak termasuk tablet	Klasifikasi Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ponsel; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						meskipun bisa digunakan untuk menelepon.				
2092	SD00964.02.00	Indikator SDGs	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk smartphone.	Klasifikasi Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ponsel; Persen
2093	SD00964.02.00	Indikator SDGs	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk smartphone.	Klasifikasi Telepon Genggam/Seluler (Ponsel)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ponsel; Persen
2094	SD00965.01.00	Indikator SDGs	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Tenaga Kerja	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja.	Klasifikasi Tenaga Kerja	1. Bekerja 2. Pengangguran	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2095	SD00965.02.00	Indikator SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Tenaga kerja	Semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan atau proses produksi baik yang dibayar maupun tidak dibayar seperti pemilik atau pekerja keluarga. Pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal/hari tidak dianggap pekerja.	Klasifikasi Tenaga kerja	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai) 2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2096	SD00965.02.00	Indikator SDGs	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Tenaga Kerja	Semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan atau proses produksi baik yang dibayar maupun tidak dibayar seperti pemilik atau pekerja keluarga. Pekerja	Klasifikasi Tenaga Kerja	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal/hari tidak dianggap pekerja.		2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga		
2097	SD00965.02.00	Indikator SDGs	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Tenaga Kerja	Semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan atau proses produksi baik yang dibayar maupun tidak dibayar seperti pemilik atau pekerja keluarga. Pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal/hari tidak dianggap pekerja.	Klasifikasi Tenaga Kerja	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan /Pegawai) 2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2098	SD00965.02.00	Indikator SDGs	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Tenaga Kerja	Semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan atau proses produksi baik yang dibayar maupun tidak dibayar seperti pemilik atau pekerja keluarga. Pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal/hari tidak dianggap pekerja.	Klasifikasi Tenaga Kerja	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan /Pegawai) 2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2099	SD00965.03.00	Indikator SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Tenaga kerja	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	Klasifikasi Tenaga kerja	1. Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan /Pegawai) 2. Berusaha 3. Pekerja Keluarga	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2100	SD00966.00.00	Indikator SDGs	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Tenaga kerja asing	Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.	Klasifikasi Tenaga kerja asing	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2101	SD00967.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Tenaga kerja formal	Penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.	Klasifikasi Tenaga kerja formal	1. Pemilik Usaha 2. Buruh/karyawan/pegawai	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2102	SD00968.00.00	Indikator SDGs	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.	Klasifikasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2103	SD00968.00.00	Indikator SDGs	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.	Klasifikasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2104	SD00968.00.00	Indikator SDGs	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.	Klasifikasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2105	SD00968.00.00	Indikator SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.	Klasifikasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2106	SD00969.01.00	Indikator SDGs	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Tenaga Kesehatan	Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Klasifikasi Tenaga Kesehatan	1. Tenaga medis 2. Tenaga psikologi klinis 3. Tenaga keperawatan 4. Tenaga kebidanan 5. Tenaga kefarmasian 6. Tenaga kesehatan masyarakat 7. Tenaga kesehatan lingkungan 8. Tenaga gizi 9. Tenaga keterampilan fisik 10. Tenaga keteknisian medis 11. Tenaga teknik biomedika 12. Tenaga kesehatan tradisional 13. Tenaga kesehatan lain	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2107	SD00969.01.00	Indikator SDGs	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Tenaga Kesehatan	Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Klasifikasi Tenaga Kesehatan	1. Tenaga medis 2. Tenaga psikologi klinis 3. Tenaga keperawatan 4. Tenaga kebidanan 5. Tenaga kefarmasian 6. Tenaga kesehatan masyarakat 7. Tenaga kesehatan lingkungan 8. Tenaga gizi 9. Tenaga keterampilan fisik 10. Tenaga keteknisian medis 11. Tenaga teknik biomedika 12. Tenaga kesehatan tradisional 13. Tenaga kesehatan lain	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2108	SD00969.02.00	Indikator SDGs	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Tenaga Kesehatan	Setiap orang yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan bidang kesehatan dan melakukan upaya kesehatan untuk masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung, mencakup: tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis.	Klasifikasi Tenaga Kesehatan	1. Dokter umum/spesialis 2. Dokter gigi (tidak termasuk tukang gigi) 3. Bidan 4. Tenaga kesehatan lainnya (misalnya: apoteker/asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, perawat, dll.)	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2109	SD00970.00.00	Indikator SDGs	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Tenaga Kesehatan Terlatih	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.	Klasifikasi Tenaga Kesehatan Terlatih	1. Dokter kandungan 2. Dokter umum 3. Bidan 4. Perawat 5. Tenaga medis lainnya	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2110	SD00971.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Terancam Punah (Endangered)	Suatu jenis dikategorikan sebagai terancam punah jika jumlah total betina pemijahan lebih besar dari 100 dan kurang dari atau sama dengan 1.000 atau jumlah total pejantan jantan kurang dari atau sama dengan 20 dan lebih besar dari lima; atau ukuran populasi keseluruhan lebih besar dari 80 dan kurang dari 100 dan meningkat dan persentase betina yang dibiakkan untuk jantan dari breed yang sama di atas 80 persen; atau ukuran populasi keseluruhan lebih besar dari 1.000 dan kurang dari atau sama dengan 1.200 dan menurun dan persentase betina yang dibiakkan untuk jantan dari breed yang sama di bawah 80 persen.	Klasifikasi Terancam Punah (Endangered)	Klasifikasi berdasarkan jenis varietas	Jumlah; Persentase	Spesies; Persen
2111	SP00081.00.00	Indikator SP2020			Teraso	Jenis lantai yang terbuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dengan kapur pasir, dan dituang di atas dasar batu.	Klasifikasi Teraso	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	m ²
2112	SD01264.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Banyaknya wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-1 ditambah dengan wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-2 hingga wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-n yang dinyatakan dengan satuan wilayah pengelolaan perikanan.	Klasifikasi Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	WPPNRI
2113	SD01265.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Klasifikasi Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Sensus; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pada tahun 2020		pada tahun 2020			
2114	SD01266.00.00	Indikator SDGs	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diukur dengan indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik, kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik, serta kewajiban layanan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria: 1) Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik; 2) Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik; 3) Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; dan 4) Peningkatan kewajiban layanan informasi publik.	Klasifikasi Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Badan Publik
2115	SD01267.00.00	Indikator SDGs	17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Tersedianya Dashboard Makroekonomi	Dashboard makroekonomi berisikan namun tidak terbatas pada kriteria atau fungsi sebagai berikut: 1. Alert: Memonitor pergerakan beberapa indikator/variabel yang dianggap penting terhadap stabilitas ekonomi; 2. Global: Memvisualisasikan perbandingan indikator/variabel ekonomi dunia; 3. Forecast: Memproyeksi perkembangan ekonomi dengan berbagai indikator kunci dalam beberapa waktu ke depan; 4. Perkembangan Pasar: Menjelaskan pergerakan aktual harga beberapa komoditas domestik/lokal, komoditas	Klasifikasi Tersedianya Dashboard Makroekonomi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks; Proporsi; Persentase	Indeks; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						dunia, indeks harga saham dan nilai tukar mata uang dunia terhadap USD.				
2116	SD00972.00.00	Indikator SDGs	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya Data Registrasi Terkait Kelahiran dan Kematian (Vital Statistics Register)	Kemampuan lembaga pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dalam menyajikan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Klasifikasi Tersedianya Data Registrasi Terkait Kelahiran dan Kematian (Vital Statistics Register)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2117	SD01268.00.00	Indikator SDGs	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS	Indikator telah tercapai melalui tersedianya perundang-undangan terkait pelaksanaan UNCLOS yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya.	Klasifikasi Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Dokumen; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2118	SD01269.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang laut nasional yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Klasifikasi Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
2119	SD01270.00.00	Indikator SDGs	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika	Indikator telah tercapai melalui ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan tersebut menjadi indikasi adanya regulasi untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika pada tahun berjalan.	Klasifikasi Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
2120	SD01271.00.00	Indikator SDGs	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang	Tersedianya lembaga HAM Nasional yang berakreditasi A. Komnas HAM telah dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993 yang dinyatakan sebagai Komnas HAM berdasar UU No. 39 tahun 1999. Komnas HAM telah terakreditasi pada level "A".	Klasifikasi Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lembaga

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					independen yang sejalan dengan Paris Principles		dengan Paris Principles			
2121	SD01272.00.00	Indikator SDGs	17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS)	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menyusun National Strategy for Development of Statistics (NSDS), yaitu strategi nasional untuk memproduksi data yang digunakan untuk mengukur seluruh indikator SDGs dan indikator statistik lainnya.	Klasifikasi Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
2122	SD00973.00.00	Indikator SDGs	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Timbulan sampah yang didaur ulang	Timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.	Klasifikasi Timbulan sampah yang didaur ulang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton/m ³ ; Persen
2123	SD00974.00.00	Indikator SDGs	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Timbunan Sampah	Banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari atau perluasan bangunan atau perpanjangan jalan.	Klasifikasi Timbunan Sampah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton/m ³ ; Persen
2124	SD00975.00.00	Indikator SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Tindak kejahatan	Perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.	Klasifikasi Tindak kejahatan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2125	SD00976.00.00	Indikator SDGs	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Tindak Pidana Lingkungan	Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dana/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	Klasifikasi Tindak Pidana Lingkungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
2126	SD00976.00.00	Indikator SDGs	15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Tindak Pidana Lingkungan	Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dana/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	Klasifikasi Tindak Pidana Lingkungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus
2127	SD00977.00.00	Indikator SDGs	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Tindakan Karantina Hewan	Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.	Klasifikasi Tindakan Karantina Hewan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan
2128	SD00978.00.00	Indikator SDGs	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Tingkat Emisi	Perkalian antara data aktifitas dengan faktor emisi.	Klasifikasi Tingkat Emisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ton

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2129	SD01273.00.00	Indikator SDGs	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Frekuensi
2130	SD00979.00.00	Indikator SDGs	1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional dan untuk menentukan garis kemiskinan internasional tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan daya beli (purchasing power parity) masing-masing negara yang berbeda-beda. World Bank telah menggunakan 1,90 dolar Amerika (dengan harga tahun dasar 2011) sebagai batas garis kemiskinan internasional hingga tahun 2016.	Klasifikasi Tingkat Kemiskinan Ekstrim	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Proporsi; persentase	Orang; persen
2131	SD00980.00.00	Indikator SDGs	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Tingkat Konsumsi Minimum	Tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal)	Klasifikasi Tingkat Konsumsi Minimum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2132	SD01274.00.00	Indikator SDGs	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan	Tingkat partisipasi	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi Tingkat	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin		partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	analisis atau sesuai kebutuhan		
2133	SD01275.00.00	Indikator SDGs	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan***	Klasifikasi Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2134	SD01276.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Jumlah rumah terkoneksi fixed broadband dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali dengan 100%.	Klasifikasi Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2135	SD00981.00.00	Indikator SDGs	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	Klasifikasi Tingkat	1. <= 5% 2. 5,1% - 10% 3. > 10%	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.			Pengangguran Terbuka			
2136	SD01277.00.00	Indikator SDGs	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran berdasarkan jenis kelamin/kelompok umur dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.	Klasifikasi Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2137	SD00982.00.00	Indikator SDGs	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Tingkat Risiko Kepunahan Hewan Ternak dan Sejenisnya	Tingkat Risiko Kepunahan Hewan Ternak dan Sejenisnya dan Sejenisnya diklasifikasikan menjadi berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Klasifikasi Tingkat Risiko Kepunahan Hewan Ternak dan Sejenisnya	1. Kepunahan Berisiko 2. Kepunahan Tidak berisiko 3. Kepunahan dengan Risiko yang tidak diketahui	Jumlah; Persentase	Ekor; Persen
2138	SD01278.00.00	Indikator SDGs	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran diperoleh dari pembagian penduduk yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dan penduduk yang bekerja dikali 100 persen.	Klasifikasi Tingkat setengah pengangguran	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2139	SD01279.00.00	Indikator SDGs	6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					ketersediannya					
2140	SD01280.00.00	Indikator SDGs	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2141	SD01281.00.00	Indikator SDGs	2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah; USD

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2142	SD01282.00.00	Indikator SDGs	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dukungan
2143	SD00983.01.00	Indikator SDGs	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.	Klasifikasi Total Fertility Rate (TFR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Anak
2144	SD00983.02.00	Indikator SDGs	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur.	Klasifikasi Total Fertility Rate (TFR)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Anak
2145	SD00984.00.00	Indikator SDGs	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Total Hasil Tangkapan Ikan dari Laut	Penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh provinsi.	Klasifikasi Total Hasil Tangkapan Ikan dari Laut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Volume; Nilai	Kg; Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2146	SD01283.00.00	Indikator SDGs	17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD
2147	SD01284.00.00	Indikator SDGs	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$)	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD
2148	SD01282.00.00	Indikator SDGs	3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Nilai	Bantuan /Lembaga; Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kesehatan dasar					
2149	SD01285.00.00	Indikator SDGs	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah) dengan PDB dikali dengan 100 persen. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.	Klasifikasi Pendapatan Pemerintah (Negara)	1. Penerimaan Pajak 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 3. Hibah	Nilai; Persentase	Rupiah; Persen
2150	SD01286.00.00	Indikator SDGs	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Rupiah; Persen
2151	SD00985.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap	Transaksi barang ekspor	Mencakup barang dagangan umum emas non moneter dan net ekspor barang merchanting	Klasifikasi Transaksi barang ekspor	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transaksi; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				ekspor barang dan jasa.						
2152	SD00986.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Transaksi Berjalan	Mencakup ekspor dan impor barang, jasa, pendapatan, serta transfer berjalan. Transaksi finansial meliputi investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya di luar cadangan devisa dan kredit/pinjaman IMF yang disajikan sebagai komponen tersendiri.	Klasifikasi Transaksi Berjalan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transaksi; Persen
2153	SD00987.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Transaksi jasa ekspor	Mencakup jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kebudayaan, dan rekreasi, dan jasa pemerintah.	Klasifikasi Transaksi jasa ekspor	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transaksi; Persen
2154	SD00988.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Transfer Berjalan	Mencakup penerimaan dan pembayaran transfer berjalan oleh sektor pemerintah (government) dan sektor lainnya (other sectors). Transfer berjalan sektor lainnya mencakup pula transfer dari tenaga kerja (workers' remittances)	Klasifikasi Transfer Berjalan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transfer; Persen
2155	SD00989.00.00	Indikator SDGs	13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu	Transfer/Alih Teknologi	Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.	Klasifikasi Transfer/Alih Teknologi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Transfer; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.						
2156	SD00990.00.00	Indikator SDGs	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Transportasi	Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.	Klasifikasi Transportasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jenis Transportasi; Persen
2157	SD00990.00.00	Indikator SDGs	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Transportasi	Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.	Klasifikasi Transportasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jenis Transportasi; Persen
2158	SD00990.00.00	Indikator SDGs	9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Transportasi	Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.	Klasifikasi Transportasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jenis Transportasi; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2159	SD00991.00.00	Indikator SDGs	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Transportasi Publik/Umm	Jasa transportasi (memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain), penumpang diharuskan membayar ongkos. Transportasi umum tidak harus memiliki trayek dan izin beroperasi.	Klasifikasi Transportasi Publik/Umum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Jenis Transportasi; Persen
2160	SD00992.00.00	Indikator SDGs	3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang.	Tuberkulosis (TB)	Penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.	Klasifikasi Tuberkulosis (TB)	1. TB aktif 2. TB laten Berdasarkan organ yang diserang: 1. TB Paru 2. TB Ekstra paru	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2161	SD00992.00.00	Indikator SDGs	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Tuberkulosis (TB)	Penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.	Klasifikasi Tuberkulosis (TB)	1. TB aktif 2. TB laten Berdasarkan organ yang diserang: 1. TB Paru 2. TB Ekstra paru	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2162	SD00992.01.00	Indikator SDGs	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan	Tumbuhan	Semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.	Klasifikasi Tumbuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tumbuhan

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.						
2163	SD00992.02.00	Indikator SDGs	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Tumbuhan	Semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.	Klasifikasi Tumbuhan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Tumbuhan
2164	SD00993.00.00	Indikator SDGs	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Udara Ambien	Udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.	Klasifikasi Udara Ambien	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton/m3; Persen
2165	SD00994.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	UMKM	Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.	Klasifikasi UMKM	KBLI	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
2166	SD00995.01.00	Indikator SDGs	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi Umur/Usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				(DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.						
2167	SD00995.01.00	Indikator SDGs	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi Umur/Usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
2168	SD00995.01.00	Indikator SDGs	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi Umur/Usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
2169	SD00995.01.00	Indikator SDGs	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia	Klasifikasi Umur/Usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.				
2170	SD00995.01.00	Indikator SDGs	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi Umur/Usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
2171	SD00995.01.00	Indikator SDGs	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi Umur/Usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
2172	SD00995.01.00	Indikator SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual,	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia	Klasifikasi Umur/Usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.				
2173	SD00995.01.00	Indikator SDGs	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Umur/Usia	Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden.	Klasifikasi Umur/Usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Tahun; Persen
2174	SD00995.02.00	Indikator SDGs	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
2175	SD00995.02.00	Indikator SDGs	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)		
2176	SD00995.02.00	Indikator SDGs	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
2177	SD00995.02.00	Indikator SDGs	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2178	SD00995.02.00	Indikator SDGs	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
2179	SD00995.02.00	Indikator SDGs	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
2180	SD00995.02.00	Indikator SDGs	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.				3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)		
2181	SD00995.02.00	Indikator SDGs	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
2182	SD00995.02.00	Indikator SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								Pendapatan Februari 2018)		
2183	SD00995.02.00	Indikator SDGs	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik Pendapatan Februari 2018)	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen
2184	SD00995.03.00	Indikator SP2020			Umur/Usia	Selisih antara tanggal lahir dengan tanggal wawancara. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi Umur/Usia	1. Kelompok umur remaja (15-24 tahun) 2. Kelompok umur prima/produktif (25-54 tahun) 3. Kelompok umur dewasa (55+ tahun) (Statistik	Jumlah; Rata-rata; Persentase	Tahun; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
								Pendapatan (Februari 2018)		
2185	SD01287.00.00	Indikator SDGs	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Tersedianya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Klasifikasi Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Peraturan
2186	SD00476.01.00	Indikator SDGs	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip	Undang-Undang Statistik Nasional	Undang-undang statistik yang mendefinisikan aturan, peraturan, langkah-langkah yang berkaitan dengan organisasi, manajemen, pemantauan dan inspeksi kegiatan statistik dengan cara yang sistematis, kekuatan, efektivitas dan efisiensi untuk memastikan cakupan	Klasifikasi Undang-Undang Statistik Nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				fundamental Statistik Resmi.		penuh, akurasi dan konsistensi dengan fakta untuk memberikan referensi untuk arah kebijakan, perencanaan sosial ekonomi, dan berkontribusi pada pembangunan negara untuk mencapai kekayaan, budaya, kesejahteraan dan kesetaraan.				
2187	SD00476.02.00	Indikator SDGs	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Undang-Undang Statistik Nasional	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997.	Klasifikasi Undang-Undang Statistik Nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen
2188	SD00996.00.00	Indikator SDGs	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	Suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC),	Klasifikasi Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	Klasifikasi wilayah menurut provinsi	Jumlah	Unit

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.				
2189	SD00997.00.00	Indikator SDGs	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	Upah	Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau undang-undang dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.	Klasifikasi Upah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah
2190	SD00998.00.00	Indikator SDGs	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah rata-rata per jam kerja	Imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang.	Klasifikasi Upah rata-rata per jam kerja	1. < 5juta 2. 5 - 10 juta 3. > 10 juta	Nilai	Ribu Rupiah/jam
2191	SD01288.00.00	Indikator SDGs	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam kerja diperoleh dengan cara membagi upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerja aktual seminggu dikalikan dengan 4 (empat).	Klasifikasi Upah rata-rata per jam pekerja	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Rata-rata
2192	SD00999.00.00	Indikator SDGs	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah/Gaji Bersih	Imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau	Klasifikasi Upah/Gaji Bersih	1. < 5juta 2. 5 - 10 juta 3. > 10 juta	Nilai	Rupiah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan.				
2193	SD01000.00.00	Indikator SDGs	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Upaya Kesehatan Jiwa	Setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat	Klasifikasi Upaya Kesehatan Jiwa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
2194	SD01001.00.00	Indikator SDGs	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Upaya Kuratif	Kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat.	Klasifikasi Upaya Kuratif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
2195	SD01001.00.00	Indikator SDGs	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Upaya Preventif	Suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa.	Klasifikasi Upaya Preventif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
2196	SD01002.00.00	Indikator SDGs	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Upaya Promotif	Kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa	Klasifikasi Upaya Promotif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2197	SD01003.00.00	Indikator SDGs	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Upaya Rehabilitatif	Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk: a. mencegah atau mengendalikan disabilitas; b. memulihkan fungsi sosial; c. memulihkan fungsi okupasional; dan d. mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.	Klasifikasi Upaya Rehabilitatif	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Kegiatan; Persen
2198	SD01004.00.00	Indikator SDGs	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Urbanisasi	Pengarahan mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan	Klasifikasi Urbanisasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
2199	SD01005.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Usaha Kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Klasifikasi Usaha Kecil	KBLI	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).				
2200	SD01006.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Usaha Menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).	Klasifikasi Usaha Menengah	KBLI	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2201	SD01007.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Usaha Mikro	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).	Klasifikasi Usaha Mikro	KBLI	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
2202	SD01007.00.00	Indikator SDGs	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Usaha Mikro	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).	Klasifikasi Usaha Mikro	KBLI	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
2203	SD01008.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Usaha Pergaraman	Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	Klasifikasi Usaha Pergaraman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
2204	SD01009.00.00	Indikator SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Usaha Perikanan	Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	Klasifikasi Usaha Perikanan	1. Perikanan Tangkap 2. Perikanan Budidaya	Jumlah; Persentase	Usaha; Persen
2205	SD01009.00.00	Indikator SDGs	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Usaha Perikanan	Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	Klasifikasi Usaha Perikanan	1. Perikanan Tangkap 2. Perikanan Budidaya	Usaha; persentase	Orang; persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2206	SD01010.00.00	Indikator SDGs	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Usia Kawin Pertama	Bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka umur pada saat perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan pertama dihitung dari umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan.	Klasifikasi Usia Kawin Pertama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Umur	Tahun
2207	SD01010.00.00	Indikator SDGs	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Usia Kawin Pertama	Bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka umur pada saat perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan pertama dihitung dari umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan.	Klasifikasi Usia Kawin Pertama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Umur	Tahun
2208	SD01011.00.00	Indikator SDGs	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Usia Muda	Laki-laki dan perempuan yang berusia 15 – 24 tahun.	Klasifikasi Usia Muda	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2209	SD01012.00.00	Indikator SDGs	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia	Usia Subur	Usia dimana seorang wanita dalam risiko tinggi untuk hamil (15-49 tahun).	Klasifikasi Status Desa	1. Perkotaan; 2. Perdesaan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				15-49 tahun yang berstatus kawin.						
2210	SD01012.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Usia Subur	Usia dimana seorang wanita dalam risiko tinggi untuk hamil (15-49 tahun).	Klasifikasi Usia Subur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2211	SD01013.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Utang Luar Negeri	Posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/ atau pokok pada waktu yang akan datang.	Klasifikasi Utang Luar Negeri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	USD
2212	SD01014.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Utang Luar Negeri Pemerintah	Utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier, dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk.	Klasifikasi Utang Luar Negeri Pemerintah	1. Utang Bilateral 2. Utang Multilateral 3. Utang Komersial 4. Utang Supplier 5. Surat Berharga Negara (SBN)	Nilai	USD

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2213	SD01015.00.00	Indikator SDGs	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat	Utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral/multilateral, fasilitas kredit ekspor (FKE), utang komersial, dan leasing, termasuk pula Surat Berharga Negara (SBN) (yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri) yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan dua belas bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah Fixed Rate/IFR) dan Global Sukuk.	Klasifikasi Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat	1. Surat Utang Negara 2. Surat Berharga Syariah Negara	Nilai	USD
2214	SD01016.00.00	Indikator SDGs	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Vaksin	Antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.	Klasifikasi Vaksin	1. Vaksin yang Hidup 2. Vaksin yang Sudah Dimatikan 3. Vaksin yang Berisi Sub Unit dari Antigen 4. Vaksin Yang berisi Toksoid	Persentase	Persen
2215	SD01016.00.00	Indikator SDGs	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Vaksin	Antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan	Klasifikasi Vaksin	1. Vaksin yang Hidup 2. Vaksin yang Sudah Dimatikan 3. Vaksin yang Berisi Sub Unit dari Antigen	Persentase	Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.		4. Vaksin Yang berisi Toksoid		
2216	SD01017.00.00	Indikator SDGs	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Varietas Unggul	Varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetapan SK Menteri Pertanian. Varietas unggul baru yang dilepas harus memiliki kelebihan dari varietas unggul sebelumnya, paling tidak dalam hal hasil per hektar, ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman, dan cekaman iklim.	Klasifikasi Varietas Unggul	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Jenis
2217	SD01018.00.00	Indikator SDGs	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetapan SK Menteri Pertanian.	Klasifikasi Varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Jenis
2218	SD01289.00.00	Indikator SDGs	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP	***Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.***	Klasifikasi Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah; USD
2219	SD01019.00.00	Indikator SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami	Wali	Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.	Klasifikasi Wali	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.						
2220	SD01020.00.00	Indikator SDGs	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Wanita Pasangan Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.	Klasifikasi Wanita Pasangan Usia Subur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2221	SD01020.00.00	Indikator SDGs	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Wanita Pasangan Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.	Klasifikasi Wanita Pasangan Usia Subur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2222	SD01020.00.00	Indikator SDGs	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode	Wanita Pasangan Usia Subur	Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid	Klasifikasi Wanita Pasangan Usia Subur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				kontrasepsi modern.						
2223	SD01021.00.00	Indikator SDGs	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Warga Negara Asing (WNA)	Orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. Misalnya, jika aslinya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis adalah INDIA.	Klasifikasi Warga Negara Asing (WNA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2224	SD01021.00.00	Indikator SP2020			Warga Negara Asing (WNA)	Orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. Misalnya, jika aslinya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis adalah INDIA.	Klasifikasi Warga Negara Asing (WNA)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2225	SP00082.00.00	Indikator SP2020			Warga Negara Indonesia (WNI)	Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI	Klasifikasi Warga Negara Indonesia (WNI)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; rata-rata; persentase	Orang; persen
2226	SD01024.00.00	Indikator SDGs	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Wilayah Endemis Filariasis	Satuan kabupaten/kota yang ditentukan berdasarkan hasil survei data dasar prevalensi mikrofilaria menunjukkan angka mikrofilaria (microfilaria rate) lebih dari dan/atau sama dengan 1% (satu persen).	Klasifikasi Wilayah Endemis Filariasis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Wilayah

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2227	SD01025.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.	Klasifikasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	1. WPPNRI 571 2. WPPNRI 572 3. WPPNRI 573 4. WPPNRI 711 5. WPPNRI 712 6. WPPNRI 713 7. WPPNRI 714 8. WPPNRI 715 9. WPPNRI 716 10. WPPNRI 717 11. WPPNRI 718	Jumlah	WPPNRI
2228	SD01026.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Wilayah Pesisir	Daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.	Klasifikasi Wilayah Pesisir	1. Kawasan Pemanfaatan Umum 2. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas	Hektar (Ha)
2229	SD01027.00.00	Indikator SDGs	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Wilayah Sungai	Kesatuan wilayah pengelolaansumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km ² .	Klasifikasi Wilayah Sungai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
2230	SD01027.00.00	Indikator SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Wilayah Sungai	Kesatuan wilayah pengelolaansumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km ² .	Klasifikasi Wilayah Sungai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)
2231	SD01027.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki	Wilayah Sungai	Kesatuan wilayah pengelolaansumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang	Klasifikasi Wilayah Sungai	Klasifikasi berdasarkan	Luas	Hektar (Ha)

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
				partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.		luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.		analisis atau sesuai kebutuhan		
2232	SD01028.00.00	Indikator SDGs	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Wilayah Sungai yang pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya.	Klasifikasi Wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Wilayah
2233	SD01029.00.00	Indikator SDGs	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Wireless Broadband	Layanan telekomunikasi nirkabel yang kecepatan transmisi datanya sekurang-kurangnya 256 kbps.	Klasifikasi Wireless Broadband	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Kecepatan	Kbps
2234	SD01030.00.00	Indikator SDGs	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Wisatawan	Orang yang melakukan wisata.	Klasifikasi Wisatawan	1. visitor (pengunjung) 2. Tourist (wisatawan) 3. Excursionist (pelancong)	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2235	SD01031.01.00	Indikator SDGs	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Wisatawan Mancanegara	Orang yang melakukan perjalanan di luar negara tempat tinggalnya, lama perjalanan kurang dari 12 bulan di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanan tidak untuk bekerja atau memperoleh penghasilan.	Klasifikasi Wisatawan Mancanegara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2236	SD01031.01.00	Indikator SDGs	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Wisatawan Mancanegara	Orang yang melakukan perjalanan di luar negara tempat tinggalnya, lama perjalanan kurang dari 12 bulan di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanan tidak untuk bekerja atau memperoleh penghasilan.	Klasifikasi Wisatawan Mancanegara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2237	SD01031.02.00	Indikator SDGs	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Wisatawan Mancanegara	Seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.	Klasifikasi Wisatawan Mancanegara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen
2238	SD01032.00.00	Indikator SDGs	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Wisatawan Nusantara	Seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.	Klasifikasi Wisatawan Nusantara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Orang; Persen

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2239	SD01033.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Zona	Ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.	Klasifikasi Zona	1. Zona Tambahan 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Jarak	Mil
2240	SD01034.00.00	Indikator SDGs	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.	Klasifikasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil
2241	SD01034.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.	Klasifikasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil
2242	SD01035.00.00	Indikator SDGs	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Zona Tambahan	Zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.	Klasifikasi Zona Tambahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jarak	Mil
2243	SD01036.00.00	Indikator SDGs	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Zonasi Ekosistem Pesisir	Suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses	Klasifikasi Zonasi Ekosistem Pesisir	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Hektar (Ha)

No	ID Konsep	Indikator	No. Indikator	Judul Indikator	Konsep	Definisi	Nama Klasifikasi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.				

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO